

ECONOMIC DEVELOPMENT
MANPOWER
LOCAL GOVERNMENT

DISERTASI

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESENJANGAN ANTAR
DAERAH SERTA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Dis E.17/09
Sas
P



HADI SASANA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAJARAN ANTAR
DAERAH SERTA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Senin
Tanggal : 7 Juli 2008
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

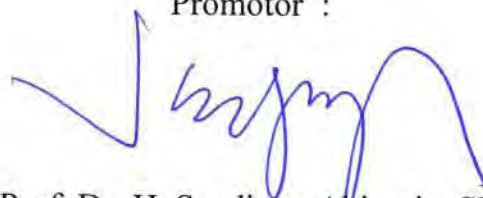
**HADI SASANA
NIM : 09051571.D**

LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi ini telah disetujui
Pada tanggal 21 Juli 2008

Oleh :

Promotor :



Prof. Dr. H. Soedjono Abipraja, SE
NIP 130445343

Ko Promotor :



Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs. Ec. MEc.
NIP 130 935 811

Telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)
Tanggal : 7 Mei 2008

PANITIA PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Ketua : Prof. Dr. H. Iman Syakir, SE.

Anggota : 1. Prof. Dr.H.Soedjono Abipraja, SE
2. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec.MEc.
3. Prof. Dr. H. Effendie, SE.
4. Prof. Dr. H. Sarmanu, drh, MS.
5. Prof. Dr. H. Murdijanto Purbangkoro, SE, SU.
6. Dr. Agus Suman , Drs, DEA.

Ditetapkan dengan
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 4328/J03/PP/2008
Tanggal : 16 Mei 20008

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobil 'alamin penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga disertasi berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Daerah serta Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

Penyelesaian penyusunan naskah disertasi ini merupakan hasil dari suatu proses yang sangat panjang, dimana saya tidak dapat bekerja sendirian, namun berkat dukungan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan selesainya disertasi ini, maka dengan hati yang tulus dan ikhlas perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Prof. Dr. H. Soedjono Abipraja, SE. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, selaku Promotor yang telah mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini, dan dengan penuh kesabaran, kearifan serta kesabaran memberikan saran dan petunjuk sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Pengalaman dan wawasan berpikir yang diberikan kepada penulis merupakan hal yang sangat berharga untuk penulisan disertasi dan pembelajaran dalam kehidupan penulis.

Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec., MEc., selaku Ko-Promotor yang penuh dengan kesabaran, kearifan, dan perhatian telah mengarahkan, memotivasi dan memberikan saran-saran sekaligus koreksi yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi.

Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. H. Fasich, Apt., dan Prof. Dr. Med. Puruhito, dr., mantan rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa program doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH, MS., Wakil Direktur I, Prof. Dr. H. Eddy Raharjo, dr. Sp. Ank.Ic., dan Prof.H.Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs. Ak.,MEc.,PhD., selaku Wakil Direktur II, serta mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., mantan Asisten Direktur I Program Pascasarjana Prof. Dr. Laba Mahaputra, drh., MSc., dan Dr. Soenarjo, dr. MS., MSc., mantan asisten Direktur II, beserta seluruh staf dan karyawan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan fasilitas dan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Prof. Dr. H. Effendie, SE., yang dengan penuh kesabaran, kearifan, keikhlasan, dan kedisiplinan telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan kepada penulis selama

mengikuti pendidikan doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. H. Effendie, SE., dan Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs. Ec. MEc., selaku dosen penanggung jawab Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) Program Doktor Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, yang telah meletakkan dasar-dasar teoritik yang dapat dijadikan bekal oleh penulis dalam menyelesaikan disertasi.

Prof. Dr. Budiman Christiananta, MA, PhD., Prof. Dr. IBM Santike, SE., Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE., Prof. Dr. H. Effendie, SE., Prof. Dr. H. Soedjono Abipraja, SE., Prof. Dr. Lasiyo, MA, MM, Prof. Dr. Hj. Jumila Zain, Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE, Prof. Dr. Haryono Suyono, Prof. Dr. Munawar Ismail, DEA, Prof. Dr. Harry Susanto, staff pengajar pada Program Doktor Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah meletakkan dasar-dasar teoritik yang dapat dijadikan bekal oleh penulis dalam menyelesaikan studi.

Para guru kami di SD Negeri Mungging II, SMP Negeri I Karangdowo, SMA Negeri I Cawas Klaten, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta para dosen kami di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Semoga Allah mencatat dan meridhoi amal ilmiah Bapak dan Ibu.

Kepada Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo SpBd, dan Prof. H. Eko Budihardjo, MSc. selaku mantan Rektor Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan, dorongan dan bantuan untuk melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Airlangga Surabaya. Dr. HM. Chabachib, MSi, Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Prof. Dr. H. Arifin S, MCom, Akt., selaku Pembantu Dekan I, Dr. Hj. Indi Jastuti, MSi selaku Pembantu Dekan II, Dr. H. Purbayu BS, SU, selaku Pembantu Dekan III dan Dra. Hj. Herniwati RH, MS. selaku Pembantu Dekan IV yang telah memotivasi dan memberikan bantuan moril dalam menempuh pendidikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahNya.

Ibunda tercinta dan ayahnda tercinta (alm) yang telah dengan ikhlas dan tanpa pamrih telah mendidik dan membesarkan, serta senantiasa memberikan doa yang tiada hentinya bagi penulis, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlimpah atas segala jerih payah dan amal ibadahnya. Begitu pula kepada kedua mertuaku yang telah melahirkan dan membesarkan istriku serta doa restu yang tiada hentinya dalam proses belajar penulis.

Kepada saudara-saudaraku tercinta: Dr. Herry Sawiji, MPd, Dra. Sri Rahayu, H. Sarjono, SE., dr. Yayuk Sri Rahayu, Mkes, Joko Triyono, STP., MM., Ichda Nurhayati, STP, MM., Hastarini, SE, MSi., Aswandi Amus, ST., dan Teguh

Wiyono, yang telah memberikan doa restu dan motivasi untuk melanjutkan studi sampai jenjang doktoral. Terimakasih kami ucapkan semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.

Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Dr.H. Edy Yusuf AG, MSc., Sekretaris Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Dra.Tri Wahyu, MSi., rekan-rekan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro., dan rekan-rekan program doktor angkatan 2005 Dr. Thomas J Kaihatsu, Dr.Hj. Nurlaily, MSi, Dr. Agus Arman, MSi.,Dr. M.Natsir, MSi., Vektor Lengkong, MSi., dan lainnya yang tidak dapat kami sebut satu per satu, terimakasih atas doa, motivasi dan bantuannya semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya.

Terkhusus kepada istriku Yuliani Setyaningsih, SKM., MKes., dan buah hati tercinta : Annisa Aulia Rahma dan Alvito Naufal Adyatma Nugraha yang dengan segala ketulusan hati dan keikhlasan kusita waktunya untuk tidak menerima kasih sayang dari suami dan ayahnya, serta doa yang tiada henti-hentinya buat suami dan ayahnya untuk menempuh pendidikan doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Oleh karena itu tidak berlebihan gelar doktor ini kededikasikan kepada kalian.

Kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah membantu dan mendoakan bagi keberhasilan penulis yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, kami haturkan penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, amiin amiin ya rabbal 'alamin.

RINGKASAN

RINGKASAN

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan antar Daerah serta Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing. Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom.

Pembangunan di daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Untuk itu pembangunan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara bertahap sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi menghendaki penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tingkat *output* yang lebih tinggi sehingga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal alokasi anggaran dan kewenangan daerah untuk mengelola cukup besar, namun hal tersebut belum optimal serta belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah yakni relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi, masih besarnya jumlah pengangguran, belum tercapainya pemerataan, serta nilai indeks pembangunan manusia yang belum optimal, sehingga proses pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai.

Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah serta penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, menggunakan data sekunder selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2005 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota. Analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*), dengan paket program SPSS.

Hasil dari pembahasan dan analisis terhadap data yang ada, diperoleh temuan sebagai berikut :

Pertama, Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien jalur sebesar 0,268 dengan nilai probabilitas signifikansi (*p*) sebesar 0,000. Hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis satu, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal di kabupaten/kota akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar daerah memiliki koefisien jalur sebesar -0,494 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Hasil estimasi ini memberikan dukungan hipotesis dua, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal akan semakin mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah kabupaten/kota.

Ketiga, Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan antar daerah mempunyai koefisien jalur sebesar $-0,164$ dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,013$. Hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis tiga, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah kabupaten/kota.

Keempat, Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki koefisien jalur sebesar $0,154$ dengan nilai probabilitas signifikansi (p) sebesar $0,042$. Hasil estimasi ini memberikan dukungan hipotesis empat pada penelitian ini, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar kemampuan daerah kabupaten/kota menyerap tenaga kerja.

Kelima, Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan mempunyai koefisien jalur sebesar $0,133$ dengan nilai probabilitas signifikansi (p) sebesar $0,003$. Hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis lima, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten/kota.

Keenam, Pengaruh kesenjangan antar daerah terhadap kesejahteraan mempunyai koefisien jalur sebesar $-0,262$ dengan nilai probabilitas signifikansi (p) sebesar $0,000$. Hasil estimasi ini sesuai hipotesis enam, bahwa kesenjangan antar daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat kesenjangan antar daerah, akan semakin mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten/kota.

Ketujuh, Pengaruh tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan mempunyai koefisien jalur yang bertanda positif sebesar $0,600$ dengan nilai probabilitas signifikansi (p) sebesar $0,000$. Hasil estimasi ini sesuai dengan hipotesis tujuh, bahwa meningkatnya tenaga kerja yang terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar tenaga kerja terserap dalam berbagai lapangan usaha akan semakin mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten/kota.

SUMMARY

The Implication of Fiscal Decentralization on Economic Growth, Regional Inequality, Employment, and Welfare at Regencies/Municipalities Level In Central Java Province

Fiscal decentralization and implementation of local autonomy enhance authority of local governments to increase their income and to conduct allocative function in setting priority of local development. Fiscal decentralization and implementation of local autonomy are expected to improve equality of local developments, in accordance with the motivation of local governments to develop their region based on their specific potentiality. Fiscal decentralization could provide optimal benefit if followed by adequate financial ability of autonomous local regions.

Local development, as a part of national development, is conducted within the framework of comprehensive development of the people of Indonesia entirely. Development at regencies/municipalities level in Central Java Province is conducted gradually in accordance with the accomplishment of national development goals. Economic development requires efficient utilization of resource to reach higher output level, so that it could drive local economic growth. Economic growth is increasing during the implementation of fiscal decentralization, however, it is not optimal so far. Furthermore, it is not able to completely solve basic problems of development at regencies/municipalities level in Central Java Province, such as low level of economic growth, higher rate of unemployment, income inequality, and low level of Human Development Index. Those problems lead to inability of local development in improving people welfare.

This study is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth, inter-regional inequality, employment, and welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Research population consist of 29 regencies and 6 municipalities, employing secondary data from Central Bureau of Statistic of Central Java Province and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2001 up to 2005. Data analysis is conducted using path analysis with SPSS program software. The findings of this studi suggest that :

First, The path coefficient of fiscal decentralization is 0.268 with p value 0.000. This estimation result is relevant with the first hypothesis that fiscal decentralization has significant effect on economic growth. This result indicates that higher fiscal decentralization lead to higher economic growth at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Second, The path coefficient of fiscal decentralization is -0.494 with p value 0.000. This result supports the second hypothesis that fiscal decentralization has a significant effect on inter-regional inequality at regencies/municipalities level in Central Java Province. This result indicates that higher fiscal decentralization drives economic growth at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Third, The path coefficient of economic growth is -0.164 with p value 0.013 . This estimation result is relevant with the third hypothesis that economic growth has significant effect on inter-regional inequality. This result indicates that higher economic growth lead to decreasing inter-regional inequality at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Forth, The path coefficient of economic growth is 0.154 with p value 0.042 . This estimation result support the forth hypothesis that economic growth has significant effect on employment at regencies/municipalities level in Central Java Province. This result indicates that higher economic growth lead to higher employment level at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Fifth, The path coefficient of economic growth is 0.133 with p value 0.003 . This estimation result is relevant with the fifth hypothesis that economic growth has significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. This result indicates that higher economic growth lead to higher welfare level at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Sixth, The path coefficient of inter-regional inequality is -0.262 with p value 0.000 . This estimation result support the sixth hypothesis that inter-regional inequality has significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. This result indicates that lower inter-regional inequality improves welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Seventh, The path coefficient of employment is 0.600 with p value 0.000 . This estimation result is relevant with the seventh hypothesis that employment rate has significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. This result indicates that higher employment rate increases welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province.

ABSTRACT

ABSTRACT

The Implication of Fiscal Decentralization on Economic Growth, Regional Inequality, Employment, and Welfare at Regencies/Municipalities Level In Central Java Province

During the era of local autonomy and fiscal decentralization, local governments is provided with authority to increase their income and to conduct allocative function in setting priority of local development. This research is intended to examine the influence of fiscal decentralization on economic growth, inter-regional inequality, employment, and welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Research population consist of 29 regencies and 6 municipalities, employing secondary data from Central Bureau of Statistic of Central Java Province and regencies/municipalities level in Central Java Province within the period of 2001 up to 2005. Data analysis is conducted by using path analysis with SPSS program software.

The results of this study indicate that, first fiscal decentralization has a positive and significant effect on economic growth at regencies/municipalities level in Central Java Province. Second, fiscal decentralization has a negative and significant effect on inter-regional inequality at regencies/municipalities level in Central Java Province. Third, economic growth has a negative and significant effect on inter-regional inequality at regencies/municipalities level in Central Java Province. Forth, economic growth has a positive and significant effect on employment rate at regencies/municipalities level in Central Java Province. Fifth, economic growth has a positive and significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Sixth, inter-regional inequality has a negative and significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province. Seventh, employment rate has a negative and significant effect on welfare at regencies/municipalities level in Central Java Province.

Keywords: fiscal decentralization, economic growth, inter-regional inequality, employment rate, welfare

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

		Halaman
Sampul Depan		i
Prasyarat Gelar.....		ii
Lembar Pengesahan.....		iii
Lembar Penetapan Panitia Ujian.....		iv
Ucapan Terimakasih.....		v
Ringkasan		viii
<i>Summary</i>		x
<i>Abstract</i>		xii
DAFTAR ISI.....		xiii
DAFTAR TABEL.....		xvii
DAFTAR GAMBAR.....		xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....		xxii
BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	12
1.3	Tujuan Studi.....	13
1.4	Manfaat Studi	14
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1	Landasan Teoritik.....	15
2.1.1	Otonomi Daerah.....	15
2.1.2	Desentralisasi Fiskal	19
2.1.2.1	Indikator Desentralisasi Fiskal.....	27
2.1.2.2	Permasalahan Desentralisasi Fiskal di Negara Berkembang.....	28
2.1.3	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.	32
2.1.4	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	38
2.1.5	Desentralisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesejahteraan.....	42
2.1.6	Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	45
2.1.6.1	Pembangunan Ekonomi.....	45
2.1.6.2	Indeks Pembangunan Manusia (<i>Human Development Index</i>)	48

2.1.6.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	51
2.1.6.3.1	Teori Pertumbuhan Klasik.....	53
2.1.6.3.2	Teori Pertumbuhan Harrod – Domar.....	54
2.1.6.3.3	Teori Pertumbuhan Neo Klasik.....	57
2.1.6.3.4	Teori Pertumbuhan Baru (<i>New Growth Theory</i>).....	58
2.1.7	Pengeluaran Pemerintah.....	59
2.1.8	Penerimaan Pemerintah.....	64
2.1.9	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi.	65
2.1.10	Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja	66
2.1.11	Pertumbuhan dan Kesejahteraan	74
2.1.12	Kesenjangan Ekonomi	76
2.1.13	Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan.....	82
2.1.14	Teori Ekonomi Kesejahteraan	83
2.1.14.1	Kesejahteraan Umum dan Kesejahteraan Ekonomi....	84
2.1.14.2	Kesejahteraan Individu dan Kesejahteraan Sosial.....	85
2.1.14.3	Pareto Optimum dan Kondisi Kesejahteraan Optimu	87
2.1.14.4	Kesejahteraan dengan Memperhatikan Pembangunan Manusia.....	92
2.1.15	Teori Pertumbuhan Wilayah.....	94
2.1.16	Teori Pembangunan Wilayah.....	97
2.1.16.1	Teori Basis Ekonomi(<i>Economic Base Theory</i>).....	97
2.1.16.2	Teori Tempat Sentral (<i>Central Place Theory</i>).....	98
2.1.16.3	Teori Kausal Kumulatif (<i>Cumulative Causation Theory</i>).....	99
2.1.16.4	Teori Lokasi (<i>Place Theory</i>).....	99
2.1.16.5	Teori Daya Tarik (<i>Attraction Theory</i>).....	100
2.2	Penelitian Sebelumnya.....	100
BAB 3	KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	108
3.1	Kerangka Konseptual.....	108
3.2	Hipotesis	114
BAB 4	METODE PENELITIAN.....	116
4.1	Rancangan Penelitian.....	116
4.2	Populasi dan Pengumpulan Data.....	117
4.2.1	Populasi Penelitian.....	117
4.2.2	Pengumpulan Data.....	118
4.3	Klasifikasi dan Definisi Operasional Variabel.....	118
4.3.1	Klasifikasi Variabel.....	118
4.3.2	Definisi Operasional Variabel.....	120
4.4	Instrumen Penelitian.....	124
4.5	Data dan Prosedur Pengambilan Data	124
4.6	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	125
4.7	Cara Pengolahan dan analisis Data.....	126
4.7.1	Cara Pengolahan Data.....	126

4.7.2	Analisis Data.....	126
4.7.3	Langkah-Langkah Pada Analisis Jalur.....	127
BAB 5	HASIL DAN ANALISIS	130
5.1	Deskripsi Hasil Studi.....	130
5.1.1	Kependudukan.....	131
5.1.2	Kondisi Perekonomian Daerah	133
5.2	Deskripsi Variabel.....	138
5.2.1	Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	138
5.2.2	Pendapatan Asli Daerah.....	140
5.2.3	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	144
5.2.4	Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Realisasi Total Pengeluaran.....	148
5.2.5	Pertumbuhan Ekonomi.....	150
5.2.6	Kesenjangan Antar Daerah.....	153
5.2.7	Tenaga Kerja Terserap.....	155
5.2.8	Indeks Pembangunan Manusia.....	159
5.3	Analisis Jalur.....	161
5.3.1	Uji Normalitas.....	162
5.3.2	Uji Heteroskedastisitas.....	163
5.3.3	Uji Autokorelasi.....	164
5.3.4	Uji Multikolinearitas.....	164
5.4	Pengaruh Antar Variabel.....	164
5.4.1	Pengaruh Langsung Antar Variabel.....	169
5.4.2	Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel.....	171
5.4.3	Pengaruh Total Antar Variabel.....	172
BAB 6	PEMBAHASAN	174
6.1	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	174
6.2	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesenjangan Antar Daerah.....	204
6.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Antar Daerah.....	209
6.4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tenaga Kerja Terserap.....	216
6.5	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan.....	230
6.6	Pengaruh Kesenjangan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan.....	237
6.7	Pengaruh Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan.....	242
6.8	Temuan-Temuan Studi.....	248
6.9	Keterbatasan Studi.....	260

BAB 7	PENUTUP.....	261
7.1	Keimpulan.....	261
7.2	Saran-Saran.....	265
	DAFTAR PUSTAKA.....	269
	LAMPIRAN	279

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	REALISASI PAD,TOTAL TRANSFER MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2002 DAN 2004 (RIBU RUPIAH).....	4
Tabel 1.2	PENERIMAAN TOTAL MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN 2004 (RIBU RUPIAH).....	6
Tabel 1.3	PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000 DAN INDEKS WILIAMSON DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2005.....	9
Tabel 1.4	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DI JAWA TENGAH TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2005.....	11
Tabel 5.1	JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN SERTA LUAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005.....	132
Tabel 5.2	PDRB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000	134
Tabel 5.3	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005	135
Tabel 5.4	PDRB ATAS DASAR BERLAKU DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005	137
Tabel 5.5	REALISASI PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005.....	139
Tabel 5.6	PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005.....	142
Tabel 5.7	PERSENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005	144

Tabel 5.8	DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005.....	146
Tabel 5.9	PERSENTASE DANA BAGI HASIL TERHADAP TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005	148
Tabel 5.10	RASIO PAD DITAMBAH BAGI HASIL TERHADAP REALISASI TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005	149
Tabel 5.11	PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005	151
Tabel 5.12	PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen).....	152
Tabel 5.13	KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005	154
Tabel 5.14	TENAGA KERJA TERSERAP DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005.....	156
Tabel 5.15	RATA-RATA PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005.....	158
Tabel 5.16	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005.....	160
Tabel 5.17	HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN JALUR.....	165
Tabel 5.18	PENGARUH LANGSUNG VARIABEL PENELITIAN..	170
Tabel 5.19	PENGARUH TIDAK LANGSUNG VARIABEL PENELITIAN	171

Tabel 5.20	PENGARUH TOTAL VARIABEL EKSOGEN TERHADAP VARIABEL ENDOGEN	173
Tabel 6.1	RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT KABUPATEN/KOTA BAKORLIN I PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN).....	190
Tabel 6.2	RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN).....	191
Tabel 6.3	RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN III PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN).....	194
Tabel 6.4	RATA-RATA TENAGA KERJA TERSERAP SECARA SEKTORAL MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN I PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN).....	221
Tabel 6.5	RATA-RATA TENAGA KERJA TERSERAP SECARA SEKTORAL MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN).....	222
Tabel 6.6	RATA-RATA TENAGA KERJA TERSERAP SECARA SEKTORAL MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN III PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN).....	223
Tabel 6.7	TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN I PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen).....	226
Tabel 6.8	TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen).....	227
Tabel 6.9	TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN III PROVINSI	

	JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen).....	228
Tabel 6.10	RATA-RATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005.....	246

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	KURVA LORENZ.....	77
Gambar 2.2	KURVA U TERBALIK.....	79
Gambar 2.3	EDGEWORTH BOX DIAGRAM	89
Gambar 2.4	PARETO OPTIMAL.....	91
Gambar 3.1	KERANGKA PROSES BERPIKIR.....	110
Gambar 3.2	KERANGKA KONSEPTUAL.....	114
Gambar 5.1	PEMERIKSAAN ASUMSI NORMALITAS PADA MODEL	162
Gambar 5.2	PEMERIKSAAN ASUMSI HOMOSKEDASTISITAS PADA MODEL	163
Gambar 5.3	HUBUNGAN VARIABEL EKSOGEN TERHADAP VARIABEL ENDOGEN	165

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 PETA TEORI.....	279
Lampiran 2 OUTPUT ANALISIS JALUR	283
Lampiran 3 DATA DISERTASI.....	299

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal, pembangunan ekonomi harus diarahkan secara serentak pada setiap sektor ekonomi. Arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi lokal, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual.

Pembangunan di daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Untuk itu pembangunan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara bertahap sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang ekonomi yaitu

terciptanya struktur perekonomian yang seimbang, mandiri dan handal bercirikan industri yang kuat dan maju serta didukung pertanian yang tangguh. Pembangunan di bidang ekonomi menghendaki penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tingkat *output* yang lebih tinggi. Menambah investasi yang tepat ke daerah-daerah, seperti sarana dan prasarana umum sehingga dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Masalah keuangan daerah seringkali timbul karena keterbatasan dana yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka membangun daerahnya. Distribusi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak merata, kegiatan ekonomi yang terpusat di daerah perkotaan mempengaruhi bagi hasil pajak (terdiri atas pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan perseorangan) dan bukan pajak (terdiri atas hasil dari sektor pertambangan umum, pertambangan migas, kehutanan, dan perikanan) antar daerah. Kondisi seperti ini bisa membawa implikasi meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah, dan kesenjangan ekonomi antar daerah. Melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi *vertical (center region)* dan *horizontal (region-region) imbalances*

antar daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Fisher dalam Kuncoro (2004), transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya, dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama dari implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antar daerah.

Alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih didasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Di Indonesia transfer dari pemerintah pusat ke daerah meliputi : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Menurut Oates dalam Gorodnichenko (2001: 85), dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Di Indonesia selama ini nilai total transfer dari pemerintah pusat jauh lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat sangat besar dalam membiayai pengeluarannya. Besarnya transfer pemerintah pusat ke kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.1. Berdasarkan data Tabel 1.1 halaman 4, menunjukkan bahwa selama tahun 2002 dan tahun 2004 total transfer di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seluruhnya mengalami

kenaikan. Kenaikan tersebut juga terjadi pada pengeluaran total daerah di kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan transfer yang diikuti oleh peningkatan pengeluaran total, menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 1.1
REALISASI TOTAL TRANSFER DAN TOTAL PENGELUARAN
MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2002 DAN 2004 (RIBU RUPIAH)

NO	Kabupaten/Kota	2002		2004	
		Total Pengeluaran Daerah	Total Transfer	Total Pengeluaran Daerah	Total Transfer
1	Kab. Cilacap	389.405.484	376.431.687	502.955.108	448.561.990
2	Kab. Banyumas	374.584.447	359.150.681	488.851.690	438.174.080
3	Kab. Purbalingga	280.918.928	260.280.175	317.284.174	311.155.543
4	Kab. Banjarnegara	253.205.377	239.994.710	344.791.092	298.087.055
5	Kab. Kebumen	352.513.698	320.582.552	427.806.043	373.238.054
6	Kab. Purworejo	278.262.234	254.924.984	350.842.402	317.654.186
7	Kab. Wonosobo	235.247.000	238.040.575	351.619.864	288.386.056
8	Kab. Magelang	327.994.144	301.564.283	417.376.796	381.914.132
9	Kab. Boyolali	287.112.031	286.049.693	395.692.550	343.880.291
10	Kab. Klaten	401.310.426	344.393.130	495.124.460	417.521.163
11	Kab. Sukoharjo	205.601.519	240.122.356	347.962.300	321.111.586
12	Kab. Wonogiri	300.401.010	278.551.248	444.084.458	370.668.045
13	Kab. Karanganyar	266.943.817	251.500.842	363.553.294	325.540.976
14	Kab. Sragen	276.284.950	274.429.296	380.335.917	331.267.843
15	Kab. Grobogan	322.564.969	305.138.415	467.797.969	398.263.890
16	Kab. Blora	327.882.526	317.002.133	378.582.855	324.261.304
17	Kab. Rembang	202.741.509	200.117.701	286.605.170	236.050.345
18	Kab. Pati	324.087.779	307.375.652	444.319.716	362.939.117
19	Kab. Kudus	239.398.312	216.794.818	347.334.972	289.389.044
20	Kab. Jepara	290.306.771	266.533.693	385.401.281	308.586.176
21	Kab. Demak	217.459.951	220.055.718	332.211.468	302.370.317
22	Kab. Semarang	285.329.673	256.891.895	363.569.879	316.698.783
23	Kab. Temanggung	252.361.513	226.847.920	308.187.439	264.195.671
24	Kab. Kendal	358.644.113	322.842.249	396.744.547	351.966.740
25	Kab. Batang	227.830.924	237.796.038	325.180.836	254.565.493
26	Kab. Pekalongan	256.791.670	224.283.065	311.462.405	265.354.493
27	Kab. Pemalang	282.586.873	281.729.033	405.560.095	357.693.805
28	Kab. Tegal	310.179.618	291.403.457	444.552.825	381.013.199
29	Kab. Brebes	373.030.559	341.125.995	447.994.376	427.235.129
30	Kota Magelang	143.970.187	123.594.483	175.418.967	148.807.052
31	Kota Surakarta	262.624.681	215.549.641	327.393.370	279.163.851
32	Kota Salatiga	110.040.073	116.529.750	168.950.588	134.146.274
33	Kota Semarang	505.763.455	387.779.922	661.416.254	516.900.043
34	Kota Pekalongan	133.676.209	123.322.214	180.288.472	151.800.498
35	Kota Tegal	158.163.672	181.670.409	252.064.887	201.900.894

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2005

Pada tahun 2002 besarnya total pengeluaran dan transfer paling besar adalah Kota Semarang (total pengeluaran sebesar Rp 505.763.455 ribu, dan transfer Rp 387.779.922 ribu), sedangkan paling kecil adalah Kota Salatiga (total pengeluaran sebesar Rp 110.040.073 ribu, dan tranfer sebesar Rp 116.529.750 ribu). Pada tahun 2004 total pengeluaran dan transfer paling besar adalah Kota Semarang (total pengeluaran sebesar Rp 661.416.254 ribu, dan tranfer sebesar Rp 516.900.043 ribu), sedangkan paling kecil adalah Kota Salatiga (total pengeluaran sebesar Rp 168.950.588 ribu dan tranfer Rp 134.146.274 ribu).

Provinsi Jawa Tengah secara administratif terdiri dari 29 Kabupten dan 6 Kota, masing-masing daerah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Komponen penerimaan total pemerintah daerah kabupaten dan kota secara garis besar meliputi : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan total di masing-masing daerah kabupaten dan kota seperti terlihat pada Tabel 1.2 halaman 6. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua daerah tiap tahun penerimaan totalnya selalu meningkat, meskipun penerimaan yang cenderung meningkat tersebut sebagian besar berasal dari dana perimbangan. Daerah yang penerimaan totalnya paling besar adalah Kota Semarang (690.550.689 ribu), sedangkan yang paling kecil adalah Kota Salatiga (213.457.345 ribu) pada tahun tahun 2004.

Berdasarkan data Tabel 1.1 halaman 4 dan Tabel 1.2 halaman 6, apabila dibandingkan antara realisasi pengeluaran total dengan penerimaan total ternyata nilai pengeluaran total lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan total. Keadaan ini ternyata terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap tahun anggaran terdapat sisa lebih anggaran tahun

sebelumnya. Keadaan tersebut dapat disimpulkan, bahwa anggaran belum dapat digunakan secara optimal atau bahkan dapat pula perencanaannya belum dilakukan secara baik (Mursinto, 2004: 46).

Tabel 1.2
PENERIMAAN TOTAL MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN 2004 (RIBU RUPIAH)

NO	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004
1	Kab. Cilacap	461.719.532	577.747.576	650.586.234
2	Kab. Banyumas	410.033.619	509.440.854	549.750.224
3	Kab. Purbalingga	326.746.344	356.666.557	401.256.980
4	Kab. Banjarnegara	318.234.657	428.523.056	485.345.760
5	Kab. Kebumen	399.556.837	441.925.809	576.881.223
6	Kab. Purworejo	303.371.484	376.971.530	492.560.865
7	Kab. Wonosobo	331.238.551	386.060.163	453.964.234
8	Kab. Magelang	372.645.439	439.826.679	511.231.556
9	Kab. Boyolali	325.257.089	339.402.202	395.795.211
10	Kab. Klaten	372.226.284	485.048.772	529.575.242
11	Kab. Sukoharjo	265.092.756	364.428.743	405.258.095
12	Kab. Wonogiri	325.063.864	458.855.123	564.732.786
13	Kab. Karanganyar	289.482.691	297.807.520	345.226.678
14	Kab. Sragen	304.171.996	405.554.277	545.775.932
15	Kab. Grobogan	342.757.610	110.136.810	360.458.389
16	Kab. Blora	408.550.147	367.624.082	457.397.245
17	Kab. Rembang	227.289.389	249.807.583	349.226.798
18	Kab. Pati	364.382.102	457.705.187	495.468.221
19	Kab. Kudus	262.200.351	301.960.185	360.258.586
20	Kab. Jepara	328.357.330	398.412.817	485.586.475
21	Kab. Demak	232.863.926	302.821.923	358.543.367
22	Kab. Semarang	310.174.650	270.689.305	360.334.227
23	Kab. Temanggung	230.689.305	291.376.470	375.467.321
24	Kab. Kendal	416.940.416	415.968.578	486.978.455
25	Kab. Batang	318.747.811	382.555.594	415.365.998
26	Kab. Pekalongan	291.837.428	311.217.424	394.257.965
27	Kab. Pemasang	324.926.995	430.104.889	480.456.435
28	Kab. Tegal	402.222.637	467.256.443	556.780.345
29	Kab. Brebes	370.735.239	458.243.987	495.235.210
30	Kota Magelang	168.015.412	204.005.178	255.432.678
31	Kota Surakarta	266.940.389	358.446.249	415.445.945
32	Kota Salatiga	167.724.920	149.450.250	213.457.345
33	Kota Semarang	544.252.920	636.977.545	690.550.689
34	Kota Pekalongan	147.587.365	186.717.219	235.432.567
35	Kota Tegal	318.424.428	245.408.376	345.654.786

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 2005

Dalam era desentralisasi fiskal sistem anggaran yang diterapkan adalah sistem *hard budget control*, artinya apabila daerah mengalami defisit sumber dana dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan daerahnya, maka pemerintah daerah sendirilah yang menanggungnya (Nurkholis,2003). Dalam mekanisme penyusunan anggaran, alokasi belanja selama ini diklasifikasikan menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai prioritas rencana selama satu tahun anggaran. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga kebijakan dalam pengalokasian dana harus terarah, cermat, efisien dan lebih bermanfaat. Pertimbangan dalam kebijaksanaan perencanaan alokasi anggaran pembangunan perlu ditinjau dari dampak ekonominya terhadap *output*, *income* dan kesempatan kerja, serta kemampuannya terhadap efek pengganda (*multiplier effect*) dari aktivitas ekonomi maupun sosial. Dampak pengeluaran pemerintah terhadap kondisi makro ekonomi dan sosial di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal. Untuk melihat kinerja pembangunan daerah dari aspek makro ekonomi dan sosial terdapat beberapa indikator.

Pertama, dilihat dari hasil *output* pembangunan daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data Tabel 1.3 di halaman 9 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB riil di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan selalu meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai 2005 mengalami pertumbuhan positif kecuali Kabupaten Semarang. Pada tahun 2003 daerah yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Kabupaten Cilacap (tumbuh sebesar 6,56 persen), sedangkan daerah yang paling rendah tingkat pertumbuhannya adalah Kabupaten Semarang (-2,96 persen). Pada

tingkat Provinsi Jawa Tengah perekonomian tahun 2003 tumbuh sebesar 4,98 persen. Pada tahun 2005 semua daerah mengalami pertumbuhan positif, daerah yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 7,99 persen, sedangkan daerah paling rendah pertumbuhannya adalah Kabupaten Kendal dengan pertumbuhan sebesar 2,69 persen. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 perekonomiannya tumbuh sebesar 5,35 persen (BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2006). Hampir semua daerah di Jawa Tengah perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi untuk mendorong kinerja ekonomi makro daerah.

Kedua, dilihat dari aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah masih terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Isu kesenjangan dan pertumbuhan hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Kesenjangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan. Data Tabel 1.3 di halaman 9 menunjukkan, pada tahun 2003 nilai indeks Williamson berkisar antara nilai 0,02 sampai 0,42. Pada tahun 2005 nilai indeks Williamson mengalami perubahan menjadi berkisar antara 0,02 sampai 0,45. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, dilihat dari indikator sosial (tenaga kerja), tenaga kerja (*manpower*) dipilah dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin banyak lapangan kerja harus

disediakan. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan besarnya lapangan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran. Pengangguran yang semakin besar akan menjadi beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.3
PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN HARGA KONSTAN
TAHUN 2000 DAN INDEKS WILIAMSON DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2005

N0	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi			Indeks Williamson		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	6,56	6,88	7,99	0.42	0.43	0.45
2	Kab. Banyumas	4,78	4,02	3,21	0.10	0.09	0.10
3	Kab. Purbalingga	4,46	3,99	4,18	0.08	0.08	0.08
4	Kab. Banjarnegara	2,94	3,82	4,32	0.07	0.06	0.06
5	Kab. Kebumen	3,70	1,97	3,21	0.10	0.10	0.10
6	Kab. Purworejo	5,08	4,17	4,85	0.04	0.03	0.03
7	Kab. Wonosobo	2,27	2,29	3,19	0.08	0.08	0.08
8	Kab. Magelang	4,73	4,27	4,62	0.06	0.06	0.06
9	Kab. Boyolali	4,86	2,04	4,08	0.02	0.02	0.02
10	Kab. Klaten	4,91	4,95	4,66	0.05	0.04	0.04
11	Kab. Sukoharjo	4,14	4,31	4,11	0.02	0.02	0.02
12	Kab. Wonogiri	1,69	3,31	4,14	0.09	0.09	0.09
13	Kab. Karanganyar	5,67	6,79	5,49	0.03	0.03	0.03
14	Kab. Sragen	3,62	4,60	5,16	0.06	0.06	0.06
15	Kab. Grobogan	4,50	3,56	4,74	0.12	0.11	0.11
16	Kab. Blora	4,84	4,45	4,32	0.08	0.08	0.08
17	Kab. Rembang	3,12	3,88	3,15	0.05	0.04	0.05
18	Kab. Pati	2,13	4,13	4,01	0.05	0.05	0.05
19	Kab. Kudus	1,68	3,24	4,23	0.36	0.37	0.37
20	Kab. Jepara	3,85	3,78	4,23	0.04	0.04	0.04
21	Kab. Demak	2,85	3,40	3,86	0.08	0.08	0.08
22	Kab. Semarang	-2,96	1,13	3,18	0.05	0.03	0.03
23	Kab. Temanggung	4,52	3,69	3,99	0.05	0.05	0.05
24	Kab. Kendal	2,91	2,80	2,69	0.03	0.02	0.02
25	Kab. Batang	2,14	2,00	2,80	0.05	0.05	0.05
26	Kab. Pekalongan	3,69	4,10	3,72	0.04	0.04	0.05
27	Kab. Pemasang	3,81	3,94	4,15	0.10	0.10	0.10
28	Kab. Tegal	5,56	5,31	4,90	0.12	0.11	0.12
29	Kab. Brebes	4,77	4,81	4,83	0.10	0.10	0.10
30	Kota Magelang	3,74	3,00	5,71	0.05	0.05	0.05
31	Kota Surakarta	6,11	5,80	5,15	0.10	0.09	0.09
32	Kota Salatiga	5,19	3,13	4,23	0.02	0.02	0.02
33	Kota Semarang	4,91	4,37	5,50	0.36	0.35	0.36
34	Kota Pekalongan	3,78	4,80	3,82	0.04	0.04	0.04
35	Kota Tegal	5,20	6,25	4,87	0.07	0.03	0.03

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2006 (diolah)

Pada tahun 2003 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 912.513 orang, mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.044.573 orang tahun 2004, dan menjadi lebih besar lagi pada tahun 2005 yaitu sebanyak 9.698.112 orang (BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2006). Masih tingginya angka pengangguran ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini, sehingga setiap rencana pembangunan ekonomi jumlah pengangguran selalu diupayakan untuk diminimalkan.

Keempat, dilihat dari tingkat kesejahteraan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pendekatan kesejahteraan dengan melihat manusia sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia mengukur kesejahteraan melalui tingkat pemenuhan tiga unsur (pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli) dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Berdasarkan hasil penghitungan indeks pembangunan manusia, di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan perbaikan kinerja (lihat Tabel 1.4 halaman 11).

Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 adalah berkisar antara 61,6 (Kabupaten Brebes) sampai 72,9 (Kota Salatiga). Pada tahun 2005 IPM daerah mengalami peningkatan menjadi berkisar antara 64,3 (Kabupaten Brebes) sampai 76,0 (Kota Surakarta). Berdasarkan data IPM ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Tengah, namun belum optimal. Langkah yang perlu

dilakukan pemerintah yaitu merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari pengeluaran total, dan anggaran lain yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, misalnya untuk kesehatan (Nugroho,2004:16).

Tabel 1.4
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DI JAWA TENGAH
TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2005

N0	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
		2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	64,8	68,8	69,5
2	Kab. Banyumas	68,2	70,3	70,7
3	Kab. Purbalingga	65,9	68,7	69,3
4	Kab. Banjarnegara	65,2	66,9	67,3
5	Kab. Kebumen	65,7	68,0	68,9
6	Kab. Purworejo	65,9	68,7	69,1
7	Kab. Wonosobo	65,7	66,9	67,6
8	Kab. Magelang	66,7	69,1	69,9
9	Kab. Boyolali	65,9	68,5	69,0
10	Kab. Klaten	67,9	71,0	71,4
11	Kab. Sukoharjo	66,1	70,7	71,2
12	Kab. Wonogiri	65,5	68,4	69,0
13	Kab. Karanganyar	68,9	70,5	70,7
14	Kab. Sragen	64,6	66,1	66,6
15	Kab. Grobogan	65,4	67,3	68,2
16	Kab. Blora	64,4	66,5	67,9
17	Kab. Rembang	64,6	67,5	69,0
18	Kab. Pati	68,4	70,6	70,9
19	Kab. Kudus	67,4	69,4	70,0
20	Kab. Jepara	67,7	69,1	69,6
21	Kab. Demak	66,0	69,0	69,4
22	Kab. Semarang	68,8	71,4	71,9
23	Kab. Temanggung	68,8	71,4	71,8
24	Kab. Kendal	63,3	67,3	67,5
25	Kab. Batang	65,4	67,0	67,6
26	Kab. Pekalongan	64,5	67,6	68,2
27	Kab. Pemasang	63,4	65,6	66,3
28	Kab. Tegal	63,5	66,8	67,5
29	Kab. Brebes	61,6	63,4	64,3
30	Kota Magelang	71,7	74,5	74,7
31	Kota Surakarta	72,5	75,8	76,0
32	Kota Salatiga	72,9	74,4	74,8
33	Kota Semarang	72,8	74,9	75,3
34	Kota Pekalongan	69,0	71,4	71,9
35	Kota Tegal	69,1	71,2	71,4

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2006.

Dilihat dari variabel-variabel makro ekonomi dan sosial, selama lebih dari lima tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang positif, namun hal tersebut belum optimal dan belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, besarnya jumlah pengangguran, rendahnya pendapatan per kapita masyarakat, kesenjangan ekonomi antar daerah, serta nilai indeks pembangunan manusia yang belum optimal. Sehingga tujuan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan belum tercapai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?

6. Apakah kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?
7. Apakah tenaga kerja yang terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?

Untuk menjawab permasalahan yang ada, perlu dianalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah, penyerapan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan Studi

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Untuk menganalisis pengaruh kesenjangan ekonomi antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Studi

Studi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kesenjangan ekonomi antar daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam penentuan perencanaan dan kebijakan pembangunan sehingga pembangunan dalam era desentralisasi fiskal dapat mencapai hasil yang optimal dan mewujudkan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritik

2.1.1 Otonomi Daerah

Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang naik dan surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa.

Benih otonomi di Indonesia, sebenarnya berasal dari “politik etis” yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan maksud ingin meningkatkan kecerdasan dan kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia. Setelah itu berkembanglah organisasi dan gerakan-gerakan politik kaum cendekiawan yang bertujuan menuntut hak bangsa Indonesia untuk turut berperan dalam menentukan ketatanegaraan (Kuncoro, 2003:4).

Perubahan ketatanegaraan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, antara lain dengan memberikan otonomi pada badan-badan politik setempat. Pemerintah Belanda mulai memperkenalkan otonomi daerah di Indonesia dengan menerapkan asas desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi 1903 (*Decentralisatie wet 1903*) yang memungkinkan dibuka daerah-daerah otonom yang bernama “*Locale Ressorten*”. Dalam undang-undang tersebut dibentuklah dewan-dewan daerah, di luar Jawa di beberapa kota penting dibentuk juga dewan-dewan kota di samping beberapa dewan setempat. Sistem tersebut kemudian diganti dengan dikeluarkannya *Bestuurshervormingswet* 1922

(Peraturan dasar Ketatanegaraan Hindia Belanda). Dalam Peraturan ini sudah dibentuk daerah menyerupai provinsi dan kabupaten (Kuncoro, 2003:5).

Pada jaman pendudukan Jepang, Hindia Belanda dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan militer. Wilayah Sumatra pusatnya di Bukit Tinggi, wilayah Jawa di Jakarta, dan kepulauan lain berkedudukan di Ujung Pandang Makasar berdasarkan peraturan pemerintah pendudukan Jepang, *Osamu Sirei No. 27 Tahun 2602 (1942)*. Pemerintahan dilakukan secara terpusat melalui residen, bupati dan walikota. Sedangkan pemerintah provinsi, dewan-dewan yang ada di provinsi, kabupaten dan kota dihapus (Kuncoro, 2003:5).

Di masa kemerdekaan otonomi daerah merupakan isu menarik di Indonesia, karena semenjak pendiri negara menyusun format negara isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya. Pemerintahan daerah dalam pengaturan Pasal 18 UUD 45 sebenarnya telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul daerah yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan di mana pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat namun dengan menyadari berbagai heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia, desentralisasi atau distribusi kekuasaan/kewenangan dari pusat ke daerah perlu dialirkan ke daerah otonom.

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu "autos" yang berarti "sendiri", dan "nomos" yang berarti "aturan". Sehingga otonomi diartikan "pengundangan sendiri", mengatur atau memerintah sendiri. Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1974, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya dikenal tiga sistem otonomi yang pokok, (Winarna, 2002:2) yaitu :

1. Sistem otonomi materiil, atau pengertian rumah tangga materiil.

Antara pemerintah pusat dan daerah ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab) yang eksplisit (diperinci dengan tegas) dalam undang-undang pembentukan daerah. Otonomi daerah itu hanya meliputi tugas-tugas yang telah ditentukan satu per satu, jadi bersifat definitif. Hal ini berarti pula apa yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak termasuk urusan pemerintah daerah otonom, tetapi urusan pemerintah pusat.

2. Sistem otonomi formil, atau pengertian rumah tangga formil.

Dalam pengertian sistem otonomi formil, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan oleh daerah otonom. Apa yang dapat dilakukan oleh negara (pusat), pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom. Bila ada pembagian tugas, hal itu semata-mata disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, seperti efisiensi penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Perbedaan tugas diadakan secara formal dengan membuat bentuk-bentuk peraturan tertentu.

3. Sistem otonomi riil, atau pengertian rumah tangga riil

Dalam sistem ini urusan atau tugas dan kewenangan daerah di dasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Sehingga membawa konsekuensi bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat diserahkan kepada daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengaturnya dan mengurusnya sendiri. Sebaliknya tugas yang telah menjadi wewenang daerah pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu, dapat ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Sistem ini merupakan jalan tengah atau percampuran dari sistem otonomi materiil dan formil

Di samping ketiga sistem di atas, dikenal juga apa yang disebut sebagai sistem residu (sisa). Dalam sistem ini secara umum telah ditentukan terlebih dahulu tugas-tugas yang telah menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari enam tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002 : 7), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya.

Remy Prud'homme (Sugiyanto, 2000) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain :

1. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
2. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
3. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.
4. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari asas penyelenggaraan pemerintahan (di daerah) yaitu :

1. Asas sentralisasi, di mana perumusan kebijakan (*policy making*), pelaksanaan kebijakan (*policy execution*) serta evaluasi terhadap kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat.
2. Asas desentralisasi, mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut :
 - a. Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri, dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu (Hoogerwerf, 2000: 96).
 - b. Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah otonom (Elmi dalam Khusaini,2006:73).

- c. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat yang lebih atas kepada daerah bawahan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dimana akan melahirkan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zadjuli, 2004).

Dari beberapa pengertian di atas desentralisasi dapat diartikan sebagai peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*local government*), untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya. Menurut Bird and Vaillancourt (2000: 4) ada tiga desentralisasi dalam kaitannya dengan derajat kemandirian mengambil keputusan yang dilakukan daerah, yaitu:

- a. Desentralisasi yang berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat kepada instansi vertikal di daerah, atau ke pemerintah daerah.
- b. Delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah.
- c. Devolusi atau pelimpahan berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.

Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung

jawab dan sumber keuangan untuk menyediakan fasilitas publik terutama menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pusat kepada daerah.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
3. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk merealisasikan ketentuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah. Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006: 29) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl,2000:19). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, melalui pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Namun, dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi, prinsip efisiensi juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik sedapat mungkin dikelola secara efisien, namun menghasilkan *output* yang maksimal.

Bahl (2000:25-26) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai

pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Menurut Kaho (1997:52), kelebihan yang diperoleh dari sistem desentralisasi adalah :

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
2. Dalam menghadapi masalah mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah
5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara.
6. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang langsung

Laporan Bank Dunia tahun 1999 juga menjelaskan alasan tentang masalah perlunya desentralisasi (Kaikisna, 2000), yaitu :

1. Wujud demokratisasi melalui keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
2. Efisiensi alokasi terhadap ketersediaan barang publik.
3. Pemerataan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Persaingan dalam memacu kinerja pemerintah daerah.
5. Dekat dengan rakyat dalam pelayanan, kebijakan dan program.
6. Tekanan kewilayahan akibat kesenjangan.

Menurut Boediarso (2004:39) kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan tujuan:

- a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
- c. Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
- d. Meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan format APBN.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay, 1991) :

- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas urgensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum (*welfare state*).
2. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari perspektif politik. Negara sebagai organisasi, kekuasaan yang didalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur, cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, perlu pemencaran kekuasaan (*dispersed of power*).
3. Dari perspektif manajemen pemerintahan negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Desentralisasi fiskal diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana. Desentralisasi fiskal tidak bisa diadopsi begitu saja, namun di sesuaikan dengan latar belakang sejarah dan kebudayaan, kondisi-kondisi lembaga, politik, dan ekonomi yang melekat pada negara itu.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pemerintah pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *law inforcement*.
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Menurut Bahl (2001) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah ini secara teori dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak positif pajak (*local tax rate*) dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa *tax revenue* akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik. Sebaliknya, dampak negatif pajak bagi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan karena pajak menimbulkan "*deadweight loss of tax*". Ketika pajak dikenakan pada barang, maka pajak akan mengurangi surplus konsumen dan produsen.

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka terhadap

kelompok bunga lokal. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

2.1.2.1 Indikator Desentralisasi Fiskal

Dalam membahas mengenai indikator desentralisasi fiskal, terdapat tiga variabel yang merupakan representasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut (Kusaini, 2006: 99):

a. Desentralisasi Pengeluaran

Variabel pengeluaran, didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total masing-masing kabupaten/kota (APBD) terhadap total pengeluaran pemerintah (APBN) (Phillips *and* Woller, 1997; Zhang *and* Zou, 1998). Hal ini menunjukkan ukuran relatif pengeluaran pemerintah, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hasil studi yang dilakukan Zhang dan Zou (1998), menunjukkan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengimplikasikan bahwa desentralisasi fiskal gagal mendorong pertumbuhan ekonomi di China. Hal ini mungkin merefleksikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur. Sementara, studi yang dilakukan oleh Phillips *and* Woller (1997) juga menunjukkan efek negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Phillips *and* Woller gagal

menjelaskan efek desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

b. Desentralisasi Pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten/kota (APBD), terhadap total pengeluaran pembangunan nasional (APBN) (Zhang *and* Zhou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relatif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Variabel ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Rasio ini juga dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sektor publik atau tidak. Hubungan positif, jika pemerintah lokal melakukan investasi di sektor publik.

c. Desentralisasi Penerimaan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD), tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah (Philips *and* Woller, 1997). Variabel ini mengekspresikan besaran relatif antara pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

2.1.2.2 Permasalahan Desentralisasi Fiskal di Negara Berkembang

Permasalahan utama dalam membuat evaluasi desentralisasi fiskal pada kondisi tertentu adalah dengan menentukan apakah desentralisasi fiskal yang "baik" itu dapat dengan lebih baik mendukung tercapainya tujuan pusat (meningkatkan kesejahteraan nasional secara keseluruhan), atau membebaskan daerah dari sebagian besar arahan pemerintah (yang paling berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah). Desentralisasi memiliki banyak manfaat antara lain : dapat memperbaiki aksesibilitas, tanggung jawab lokal, dan efektivitas pemerintah. Desentralisasi sulit menghasilkan misalnya pola pengeluaran yang sama seperti diambil pusat, kecuali dalam kasus langka yang mungkin tidak akan terjadi, yakni bila tujuan pemerintah daerah identik dengan tujuan pusat. Dalam suatu masyarakat dengan kondisi geografis yang heterogen, hal ini jelas tidak mungkin. Perselisihan antara pusat dan daerah atas apa yang seharusnya dikerjakan tidak dapat dihindari, walaupun masing-masing pihak sudah mencoba dengan sepenuh hati untuk melayani kepentingan para pemilih yang berbeda-beda (Bird *and* Vaillancourt, 2000: 6) .

Persyaratan ketat untuk keberhasilan desentralisasi dipertegas kembali di negara-negara berkembang. Desentralisasi tidak hanya bisa gagal memperbaiki pelayanan daerah, tetapi dapat juga mengganggu stabilitas nasional. Resiko terbesar terjadi ketika penerimaan didesentralisir tanpa disertai langkah-langkah yang memadai dalam menjamin stabilitas mobilisasi dana yang mencukupi dan berlanjut, dan memastikan kemampuan serta tanggung jawab daerah dalam mengelola pengeluaran. Argentina pada tahun 1980 merupakan contoh yang sering diangkat, dan di negara-negara dalam transisi di Eropa Timur dan Tengah.

Pengalaman internasional dengan jelas memperlihatkan, jika suatu negara mendesentralisasikan tanggung jawab pengeluaran yang lebih besar dibanding dengan sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan akan menurun, atau daerah akan menekan pusat, untuk mendapatkan tambahan kucuran dana yang lebih besar, atau pinjaman yang lebih besar, atau kedua-duanya. Salah satu contoh dan yang paling banyak dianalisis, adalah kasus-kasus di negara-negara Federasi Rusia. Sebaliknya, jika lebih banyak penerimaan daripada pengeluaran

yang didesentralisasikan, mobilisasi dana daerah dapat menurun dan keseimbangan makroekonomi kembali muncul. Negara-negara seperti Kolumbia, Argentina, dan Brazil sering sekali dijadikan contoh buruk dalam hal ini. Bahkan, walaupun kedua sisi didesentralisasikan dengan pola yang seimbang, sering dikhawatirkan daerah tidak memiliki kapasitas administratif dan teknis yang cukup memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi barunya secara memuaskan. Permasalahan-permasalahan demikian mungkin perlu diperhatikan di negara-negara berkembang yang memerlukan investasi sosial dan infrastruktur yang penting untuk mengadakan perubahan di pemerintah daerah (Bird, 1994).

Kekhawatiran atas kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan makro terletak pada rekomendasi umum yang menekankan perlunya disiplin yang sangat tinggi atas batas pinjaman daerah yang diperkenankan. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa tidak termonitornya pemerintah daerah, terutama yang sangat tergantung pada transfer dari pusat, dapat menyebabkan terjadinya defisit APBD yang besar, yang ditutupi dengan pinjaman daerah. Pendapat yang lain, mengingat stabilisasi makroekonomi merupakan sebagian tugas utama pemerintah pusat yang harus dilaksanakan dengan baik, maka penting bagi pusat untuk memiliki semua peralatan kebijakan yang dibutuhkan, termasuk pinjaman dan terutama pinjaman dari luar negeri.

Pendapat-pendapat demikian (atau yang mirip dengan itu) dipegang oleh banyak negara, dan hasilnya berbagai macam bentuk batasan dikenakan untuk pinjaman bagi pemerintah daerah, misalnya batasan pinjaman umur proyek investasi jangka panjang, batasan jumlah kewajiban jatuh tempo hingga persentase maksimum dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau perlunya persetujuan pusat dalam melakukan pinjaman (Bird *et al.*, 1995).

Sistem keuangan daerah yang dirancang bagus tidak akan memperlihatkan perlunya berbagai macam kontrol tersendiri selain kontrol dari pasar modal yang sudah beroperasi secara efisien, sesuatu yang mungkin tidak terdapat di banyak negara berkembang. Dalam hal pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah terdapat masalah khusus, banyak kreditur berasumsi bahwa seluruh pinjaman pemerintah daerah (secara implisit) ditanggung oleh pusat.

Jika pemerintah pusat ingin menghindari permasalahan makro yang bersumber dari utang pemerintah daerah, hal ini dapat dilaksanakan dengan tidak memberikan subsidi atas utang semacam itu, dan merelakan pemerintah daerah yang dililit utang terlalu banyak itu bangkrut. Hal ini dipraktekkan di Maroko, di mana pusat mengubah pola subsidi untuk pemerintah daerah, dari anggaran berimbang yang dijamin pusat baik pengeluaran bunga maupun cicilan hutang diartikan sebagai kenaikan transfer dari pusat, menjadi sistem perimbangan menurut formula yang tidak mempertimbangkan unsur pinjaman daerah (*Bird and Vaillancourt, 2000: 31*). Permasalahan yang mungkin terjadi akibat kesalahan pinjaman luar negeri mungkin memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Misalnya, kewajiban untuk mendapatkan persetujuan pusat secara eksplisit sebelum perjanjian pinjaman luar negeri ditandatangani.

Pada akhirnya, cara untuk mengurangi risiko moral yang melekat dalam kondisi seperti ini adalah dengan mengenakan batas yang lugas atas pinjaman daerah. Perlu ditekankan, akar permasalahan terletak pada sangat terbatasnya kewenangan perpajakan pemerintah daerah dibanding harapan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai fungsi yang dapat mereka biayai dengan kemampuan sendiri tanpa ketergantungan berlebihan kepada pusat (baik secara langsung melalui tranfer atau secara tidak langsung melalui jaminan). Jika

kepemilikan lokal atas basis (obyek) pajak tidak diperluas melewati batasan sempit yang diterapkan pada sebagian besar negara berkembang, tidak direkomendasikan untuk mengendurkan aturan-aturan pinjaman daerah. Pinjaman daerah harus dilaporkan dengan mekanisme transparan sehingga tidak seorangpun dapat menyembunyikan hutangnya pada pejabat yang berikut. Oleh karena itu masyarakat setempat maupun pemerintah pusat dapat memegang kendali yang lebih baik atas apa yang sudah berlangsung. Lebih penting lagi, pinjaman daerah hanya untuk pembiayaan investasi pembangunan (*capital*).

Kemampuan pemerintah daerah untuk meminjam atas dasar kenaikan aliran kas dari adanya transfer (atau royalti-royalti). Sepanjang pinjaman ini tidak disubsidi, tidak masalah. Porsi transfer ini tidak secara khusus merupakan elemen "pendapatan sendiri" dari daerah. Transfer memang merupakan jaminan yang baik, hanya jika hal tersebut dapat diprediksi dengan baik. Namun hal ini sangat sulit dilakukan di negara berkembang (Bird, 1990).

2.1.3 Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu mekanisme distribusi sejumlah dana anggaran pusat kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah. Konsep perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah konsekuensi dari adanya tanggung jawab terhadap kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Oleh karena itu setiap tingkat pemerintahan berkepentingan terhadap kebijakan desentralisasi fiskal.

Dalam ketentuan umum UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan

antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Sedangkan yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disebut bahwa dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hubungan keuangan merupakan sebuah sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.

Pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sangat perlu dilakukan karena tidak semua wewenang pemerintahan diberikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, kepentingan dan kebutuhan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pusat atau negara juga harus tersedia secara memadai.

Dana perimbangan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi. Dalam arti sederhana, dana perimbangan adalah pembagian penerimaan antar

tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas :

1. Dana bagi hasil dari : Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh perorangan, dan penerimaan dari sumber daya alam, yakni minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Penetapan besarnya dana bagi hasil pajak dan non pajak didasarkan atas persentase dengan tarif dan basis pajaknya.
2. Dana alokasi umum (DAU) atau sering disebut juga dengan *block grant* yang besarnya didasarkan atas formula tertentu.
3. Dana alokasi khusus (DAK). DAK identik dengan *special grant* yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah (*bottom-up*).

Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, maka pemerintahan suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan terhadap masyarakat.

- b. Fungsi distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi stabilisasi pertahanan dan keamanan, stabilisasi ekonomi dan moneter, dan lain-lain.

Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih tepat bila dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah lebih mengetahui akan kebutuhan dan standar pelayanan terhadap masyarakatnya. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan perbedaan kondisi dan situasi dari masing-masing wilayah (daerah). Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara jelas dan tegas.

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, yakni sebagai berikut:

1. Pembagian kekuasaan yang rasional di antara tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana.
2. Pembagian seluruh sumber dana yang adil dan memadai untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan, dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
3. Upaya fiskal oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan pembagian yang adil atas seluruh beban pengeluaran pemerintah daerah dalam masyarakat.

Dimensi ekonomi-politik hubungan keuangan pusat dan daerah tercermin dalam proses pengambilan kebijakan tentang dana perimbangan.

Dana perimbangan, yang merupakan instrumen penyeimbang fiskal pusat dan daerah, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Menurut Djaenuri dalam Saragih (2003:87) mengemukakan beberapa model hubungan keuangan pusat dan daerah yang dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan, antara lain adalah:

By percentage yakni distribusi penerimaan yang diterapkan pada PBB, royalti atau *license fee*, *land rent*, di bidang kehutanan dan pertambangan umum serta pertambangan migas yang diberikan sebagian hasilnya kepada daerah.

By origin yakni bahwa distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan.

By formula yakni distribusi penerimaan ke daerah yang didasarkan kepada suatu formula tertentu atau mempertimbangkan faktor-faktor tertentu : *by grant to reimburse cost* artinya transfer keuangan kepada daerah untuk membiayai satu jenis pengeluaran tertentu.

By adhoc grants yakni transfer keuangan yang didesain oleh pemerintah pusat yang didasarkan antara lain pada alokasi prioritas nasional atau alokasi tambahan yang ditujukan untuk tujuan tertentu dalam satu tahun anggaran tertentu.

Berdasarkan berbagai pendekatan di atas, maka pendekatan dalam merumuskan dana perimbangan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, yakni : *by percentage of share* - pendekatan dalam menghitung bagi hasil pajak dan non pajak (*shared taxes and non taxes*) ; *By formula* - pendekatan dalam menghitung dana alokasi umum (*block grant*),

dan *By adhoc grants* atau *special grants* pendekatan dalam menghitung dana alokasi khusus (*special grants*) yang sebagian besar didasarkan atas kebutuhan khusus atau yang sifatnya sangat mendesak.

Davey (1988: 258) mengemukakan bahwa secara teoretis terdapat beberapa pendekatan dalam merumuskan hubungan keuangan pusat dan daerah yaitu :

1. Pendekatan kapitalisasi, pemerintah daerah memperoleh modal permulaan yang diharapkan untuk diinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran rutin. Modal untuk pemerintah daerah sebagai pemberian dari pusat dapat berbentuk bantuan (*grant*), sehingga tidak diperlukan adanya pembayaran kembali atau pengembalian dalam jangka waktu tertentu.
2. Pendekatan pendapatan, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumber pendapatan bagi daerah yang dipandang potensial di masing-masing daerah untuk mengelola sejumlah urusan pemerintahan.
3. Pendekatan pengeluaran, pemerintah pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran tertentu. Pendekatan ini memungkinkan adanya suatu mekanisme agar sejumlah uang cukup tersedia bagi pemerintah daerah (baik dari pusat atau daerah) untuk memberikan pelayanan sesuai target nasional.
4. Pendekatan komprehensif. Dalam pendekatan komprehensif, sumber pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun bagian dari sumber pendapatan nasional seperti pajak, diberikan kepada pemerintah daerah sebanding dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pelaksanaan desentralisasi jelas harus didukung oleh kebijakan dana perimbangan yang sering disebut dengan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Namun, tidak dapat diartikan secara sempit bahwa desentralisasi fiskal adalah sama dengan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan instrumen penting dari proses pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebab komponen dalam dana perimbangan sudah mencerminkan unsur pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Menurut Zadjuli (2004) dalam sistem perimbangan keuangan antar pemerintah, belum terdapat ukuran-ukuran tertentu serta pembagian yang jelas. Sehingga dewasa ini daerah kabupaten/kota masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

2.1.4 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah terhadap penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya. Aktivitas rutin pemerintah dapat didanai dengan melakukan pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor-sektor potensial yang ada di daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Achmad (2000) dalam Kurnia (2006:29), pajak daerah adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari jasa negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Musgrave *and* Musgrave (1989:219), bahwa dalam pelaksanaan pengenaan suatu perpajakan harus mengandung unsur pencapaian tujuan untuk aspek keadilan. Untuk pencapaian tujuan tersebut, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pendekatan atas dasar prinsip manfaat (*benefit principle*), yaitu wajib pajak memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara apabila wajib pajak telah menerima manfaat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga dalam pendekatan ini melihat bahwa jika pelayanan pemerintah mengalami peningkatan, maka sebagai konsekuensinya adalah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat (wajib pajak) meningkat pula.
- b. Pendekatan atas dasar prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*), yaitu wajib pajak memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara berdasarkan atas kemampuan membayar wajib pajak. Dengan demikian semakin tinggi kemampuan membayar wajib pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarnya, dan sebaliknya

semakin rendah kemampuan membayar wajib pajak, maka semakin rendah pula pajak yang harus dibayar.

Menurut Musgrave *and* Musgrave (1989:219), bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara profesional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat keadilan
2. Syarat yuridis
3. Syarat ekonomis
4. Syarat finansial
5. Sistem dan pemungutan harus sederhana

Para ekonom dan ahli filsafat sosial sejak Adam Smith sampai sekarang telah mencanangkan tentang persyaratan yang optimal untuk suatu struktur pajak yang "baik" yaitu (Musgrave *and* Musgrave, 1989:230) :

1. Penerimaan/pendapatan harus di tentukan dengan tepat.
2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran sesuai dengan kemampuannya.
3. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
4. Biaya administrasi dan biaya lainnya harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi meliputi 4 (empat) jenis, yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Air Permukaan.

Sedangkan pajak daerah untuk pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 (tujuh) jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Parkir.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2001:121). Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jenis jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. **Jasa umum**, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
2. **Jasa usaha**, adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. **Perijinan tertentu**, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.5 Desentralisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Kesejahteraan

Banyak literatur teoritis yang menyatakan bahwa dampak dari desentralisasi bagi suatu negara/daerah adalah sangat tergantung pada corak institusi atau kelembagaan yang ada dalam tata pemerintahan negara/daerah tersebut. Sementara literatur empirik berusaha untuk menunjukkan bahwa dampak desentralisasi pada pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas pemerintahan, dan penyediaan barang publik serta kesejahteraan tergantung pada kekuatan partai/anggota parlemen, dan tingkat subordinasi yaitu kepala daerah apakah dipilih oleh rakyatnya (Enikolopov *and* Zurafkaya, 2003).

Berbagai penelitian mengenai kaitan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menemukan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten satu dengan yang lainnya. Walaupun berbagai literatur teoritik sepakat bahwa implementasi desentralisasi fiskal yang tepat akan mendorong peningkatan

efisiensi ekonomi, khususnya di sektor publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bagaimanakah sebenarnya hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan yang cukup luas dalam berbagai literatur. Secara intuitif desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Martinez *and* Macnab, 2001). Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah yang mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing.

Menurut Prud'homme (1995:43) dan Peterson (1996:23) desentralisasi fiskal dapat berdampak positif bagi pengembangan ekonomi daerah di masa datang. Oleh karena itu perlu dikembangkan berbagai penelitian untuk membangun teori ini lebih mendalam. Desentralisasi fiskal dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Desentralisasi fiskal akan mendorong efisiensi ekonomi terutama di sektor publik yang pada akhirnya akan menimbulkan dinamika efek pada pertumbuhan ekonomi daerah. Secara eksplisit dinyatakan pengeluaran publik terutama penyediaan infrastruktur bagi masyarakat akan lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah (*sub-national government*) daripada oleh pemerintah pusat, karena mereka lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut World Bank (1997), desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Ada tiga mekanisme pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi pertama, mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di

sektor pengeluaran pemerintah, efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makro ekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda antara negara maju negara berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi tidak begitu dirasakan. Pendapat ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup dan lemahnya *skill* sumberdaya manusia dalam mengelola anggaran.

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam memobilisasi dan menggunakan sumber daya lokal guna meningkatkan *public service* (Peterson, 1996: 26). Peningkatan efisiensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kesejahteraan konsumen (*tax payer*) dari sumber daya yang ada. Jika masyarakat mendapatkan output yang lebih besar atas pemanfaatan sumber daya yang ada, maka sebenarnya terdapat efisiensi ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Lindahman and Thurmaier (2002), meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic need*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk

yang lebih sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* untuk melihat *basic need*. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya kesenjangan antar daerah, ketidakstabilan makro ekonomi dan sebagainya.

2.1.6 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1.6.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21)

Menurut Meier dalam Todaro (2003:25), pembangunan adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat, dan distribusi pendapatan tidak semakin

timpang. Pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) struktur ekonomi, maupun kelembagaan.

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik (Kuncoro, 2003 :45).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya meliputi usaha masyarakat secara keseluruhan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian usaha-usaha pembangunan suatu negara meliputi pula usaha pembangunan di bidang sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Dengan demikian pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat (atau bangsa) meningkat dalam jangka panjang (Kamaluddin, 1998:10).

Dalam konteks regional, pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 1999:108) adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada, dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Dalam pembangunan daerah, investasi pemerintah dalam tahap awal pembangunan sangat diperlukan. Hal ini terjadi karena tuntutan penyediaan fasilitas publik untuk kepentingan masyarakat. Pembentukan modal bukan saja harus dilakukan oleh para pengusaha swasta tetapi juga pemerintah karena dalam

pembangunan, pembentukan modal sosial (yaitu pembangunan sarana dan prasarana) dan pembentukan modal dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang-barang untuk keperluan masyarakat perlu dilakukan secara bersama-sama. Pembentukan modal sosial biasanya dilakukan oleh pemerintah dan pembentukan modal di sektor produktif pada umumnya dilakukan oleh pihak swasta. (Sukimo,2000:365)

Dari berbagai pengertian pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa, pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

2.1.6.2 Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index*

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolok ukur terjadinya pembangunan. Dalam berbagai definisi pembangunan, cenderung mengidentikkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan riil per kapita hanyalah merupakan sebagian dari indeks kesejahteraan. Kesejahteraan ekonomi mengandung pertimbangan nilai mengenai tingkat distribusi pendapatan yang diinginkan.

Indikator-indikator pembangunan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi : 1. indikator ekonomi (GNP per kapita, laju pertumbuhan ekonomi), dan 2. indikator sosial (*Human Development Index, Physical Quality Life Index*). *United Nations Development Program (UNDP)* dalam *Human Development Report* yang terbit secara berkala sejak tahun 1990 tentang Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)*, menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi secara sistematis dan komprehensif.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)* memeringkat semua negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia paling rendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). HDI berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan : masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua per tiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga), serta standar kehidupan (*standard of living*) yang diukur dengan pendapatan riil per kapita. HDI memeringkat semua negara menjadi tiga kelompok tingkat pembangunan manusia : 1. tingkat pembangunan manusia yang rendah (0,0 hingga 0,499), 2. tingkat pembangunan manusia menengah (0,50 hingga 0,799), dan 3. tingkat pembangunan manusia yang tinggi (0,80 hingga 1,00).

Indeks tiga komponen HDI dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum (UNSFIRS, 2000) :

$$\text{Indeks } X(i) = \{X(i) - X(i)\min\} / \{X(i)\max - X(i)\min\}$$

Di mana : $X(i)$ adalah indikator ke- i ($i=1,2,3$)

$X(\max)$ adalah nilai maksimum $X(i)$

$X(i)\min$ adalah nilai minimum $X(i)$

Berdasarkan prosedur di atas, HDI dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{HDI} = 1/3 \{X(1) + X(2) + X(3)\}$$

Di mana : $X(1)$ adalah indeks harapan hidup kelahiran

$X(2)$ adalah indeks pendidikan

$X(3)$ adalah indeks standar hidup layak

Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia. HDI juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indikator kesenjangan pembangunan dan pemerinkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro,2003:70). Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut.

HDI sebagai standar indikator kinerja makro memiliki keterkaitan erat dengan kinerja unit-unit mikro. Dasar penetapan standar indikator kinerja makro unit kerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil pencapaian kontribusi unit kerja terhadap indikator kerja *outcome* pada tahun berjalan dengan serangkaian data historis kontribusi periode yang lalu dengan data trend runtun waktu. IPM sebagai suatu indeks yang mengukur pembangunan sosial ekonomi suatu daerah berdasarkan pada pengukuran ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu keunggulan IPM sebagai alat ukur pembangunan adalah fleksibel dalam pengaplikasiannya. Pada tingkat provinsi, IPM merupakan gabungan

indikator kinerja *outcome* dari beberapa unit kerja provinsi dan unit kerja kabupaten/kota.

Bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia, HDI dapat merupakan ukuran kinerja pembangunan antar negara maupun antar daerah yang penting, dan memberikan wawasan yang luas mengenai pembangunan.

2.1.6.3 Pertumbuhan Ekonomi

Para ekonom dan politisi di banyak negara, baik negara-negara kaya maupun miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan memomorsatukan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Selama bertahun-tahun kebijaksanaan konvensional hampir selalu menyamakan pembangunan dengan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkannya. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Kuznets dalam Pressman (2000:77) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Dari kedua faktor ini

pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

Todaro (2003: 92) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Djojohadikusumo (1994:6), menyatakan bahwa salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan produksi. Oleh karena itu proses pembangunan menghendaki perubahan pada komposisi produksi di antara sektor-sektor ekonomi, serta perubahan kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini berarti perubahan adalah suatu transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur ekonomi, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat.

2.1.6.3.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut teori Klasik, akumulasi modal serta jumlah tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk (Spechler, 1990:46). Smith menyebut ada tiga unsur pokok dalam produksi suatu negara, yaitu :

- a. Sumber daya yang tersedia, yaitu tanah.
- b. Sumber daya insani, yaitu jumlah penduduk.
- c. Stok barang modal yang ada.

Ada beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: peranan sistem pasaran bebas, perluasan pasar, spesialisasi dan kemajuan teknologi.

David Ricardo (Spechler, 1990: 84) menyatakan bahwa faktor produksi tanah adalah tetap dan merupakan faktor yang membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi akan cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang akhirnya akan memperlambat bekerjanya hukum hasil lebih yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*).

Menurut Karl Marx (Spechler, 1990: 116) dalam bukunya *Das Kapital* membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari feodalisme, kapitalisme dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, di mana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis.

Eksploitasi terhadap kaum buruh dan peningkatan pengangguran yang terjadi akibat substitusi tenaga manusia dengan input modal yang padat kapital, pada kapitalisme akhirnya akan menyebabkan revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh. Fase ini merupakan tonggak baru munculnya suatu tatanan sosial alternatif di samping tata masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat sosialis.

Menurut Schumpeter dalam Pressman (2000:155) pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan *inovasi* atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses multiplier yang ditimbulkannya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat

2.1.6.3.2 Teori Pertumbuhan Harrod – Domar

Teori pertumbuhan Harrod–Domar dikemukakan oleh dua orang ahli ekonomi sesudah Keynes, yaitu R.F. Harrod dan Evsey Domar. Teori Harrod–Domar pada hakikatnya berusaha untuk menunjukkan syarat yang diperlukan agar pertumbuhan mantap (*steady growth*), yang didefinisikan sebagai pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal, akan selalu berlaku dalam perekonomian (Sukirno, 2000: 450).

Teori Harrod–Domar merupakan perluasan dari teori Keynes yang melihat persoalan pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam model ekonomi makro Keynes mengandung konsep-konsep agregat yaitu konsumsi agregat, investasi agregat, pengeluaran pemerintah agregat, *output* agregat dan komponen-

komponen agregat lainnya. Berdasarkan model ini, pengeluaran pemerintah hanya akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi dalam negeri seandainya terjadi perubahan absolut dalam pengeluaran pemerintah. Jikalau perubahan pengeluaran absolut tidak terjadi tetapi terjadi perubahan komposisi dalam pengeluaran pemerintah, metodologi ini menganggap bahwa perubahan dampak ekonomi akibat pengeluaran pemerintah tidak terjadi. Anggapan ini mengandung pengertian bahwa model ekonomi makro tidak secara komprehensif memperhitungkan dampak tidak langsung (*indirect effects*) yang dapat ditimbulkan oleh berbagai komponen pengeluaran pemerintah. Secara agregat dampak tidak langsung diperhitungkan dalam angka pengganda pengeluaran pemerintah (*government expenditure multiplier*), tetapi dampak tidak langsung bermula dari perubahan absolut bukan dari perubahan komposisi pengeluaran pemerintah (Arief, 1998: 50).

Dalam teori Harrod–Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Apabila kapasitas produksi bertambah, maka pendapatan nasional baru akan bertambah dan apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan tercipta. Model pertumbuhan ekonomi Harrod–Domar adalah sebagai berikut :

$$\Delta Y / Y = s / k \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

Dari persamaan Harrod – Domar tersebut jelas dinyatakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB ($\Delta Y / Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional (s), serta rasio modal–*output* nasional (k). Secara lebih spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan

secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan dan secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio modal–*output* dari suatu perekonomian (Todaro, 2003: 130).

Sementara itu menurut Kaldor (Pressman,2000: 216) terdapat korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan *output* manufaktur. Angka pertumbuhan agregat tergantung pada tingkat pertumbuhan manufaktur (daripada sebaliknya) dan hal ini dapat dijelaskan dengan meningkatnya *return to scale* dalam aktivitas industri. Pertumbuhan manufaktur berkorelasi dengan pertumbuhan produktivitas sektor ekonomi yang lain. Ketika sektor manufaktur tumbuh, sektor ini menyerap surplus tenaga kerja di sektor pertanian. Akibatnya produktivitas dan standar kehidupan bagi sektor pertanian akan lebih baik. Selain itu industrialisasi cenderung mempercepat tingkat perubahan teknologi, tidak hanya pada satu sektor tetapi dalam ekonomi secara keseluruhan. Menurut Hirschman (Arsyad,1999:155), bahwa terdapat keterkaitan sektoral dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang pesat dari satu atau beberapa industri akan mendorong industri lainnya. Keterkaitan antar sektor tersebut bisa keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect*) atau bisa juga keterkaitan ke depan (*forward linkage effect*). Untuk itu pemerintah diharapkan terus mendorong sektor industri manufaktur dalam negeri.

Menurut Samuelson (1995:124) dalam teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*), setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan

volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing di pasar luar negeri.

2.1.6.3.3 Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik pertama sekali dikembangkan oleh Profesor Robert Solow, yang memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1987. Teori Neo-Klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat.

Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (*constan return to scale*) dengan koefisien baku. Model Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari *input* tenaga kerja dan modal. Kemajuan teknologi sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada penyediaan faktor produksi (tenaga kerja, akumulasi modal). Dalam bentuknya yang formal, model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni (Todaro, 2003: 150): $Y = K^\alpha (AL)^{1-\beta}$.

Di mana : Y adalah produk domestik bruto, L adalah jumlah tenaga kerja, K adalah stok modal fisik dan modal manusiawi, dan A adalah produktivitas tenaga kerja.

Dalam analisis Neo-Klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu lainnya. Pada hakikatnya ia tidak berbeda dengan pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik.

Walau bagaimanapun teori Neo-Klasik dipandang sebagai teori yang lebih tepat dan lebih sempurna dalam menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kalau dibandingkan dengan teori Klasik. Karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedang dalam teori Klasik yang diperhatikan hanyalah hubungan di antara pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi.

2.1.6.3.4 Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth*), memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Menurut teoritis pertumbuhan endogen Romer (1986) dalam Todaro (2003:171), menjelaskan faktor-faktor yang menentukan ukuran dan tingkat pertumbuhan GDP yang belum dijelaskan dan dianggap ditentukan secara eksogen oleh persamaan pertumbuhan neoklasik Solow (*Solow residual*)

Model pertumbuhan endogen menganggap investasi pemerintah dan swasta dalam *human capital* menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas, dan menolak kecenderungan *diminishing return*. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan adanya skala hasil yang meningkat (*increasing return to scale*) dan pola pertumbuhan jangka panjang antar negara.

Persamaan teori endogen dapat dituliskan dengan $Y=AK$. Dalam formulasi ini A adalah faktor yang mempengaruhi teknologi, dan K adalah modal fisik dan modal manusia (*physical and human capital*). Perlu diperhatikan bahwa tidak ada hasil yang menurun (*diminishing return*) atas kapital dalam formula tersebut. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah investasi dalam modal manusia dapat

menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang melebihi penghasilan yang cukup untuk menutup *diminishing returns*. Lebih lanjut hal tersebut menyebabkan kemungkinan bahwa investasi yang menghasilkan penghematan eksternal menyebabkan dihilangkannya A dari persamaan Solow.

Implikasi dari penekanan terhadap pentingnya tabungan dan investasi pada modal manusia oleh teori pertumbuhan endogen adalah tidak ada kekuatan yang menyamakan tingkat pertumbuhan antar negara, serta tingkat pertumbuhan nasional yang konstan dan berbeda antar negara tergantung pada besarnya tabungan nasional dan tingkat teknologi. Konsekuensinya, bagi negara yang miskin modal manusia dan fisik sulit untuk menyamai tingkat pendapatan per kapita negara yang kaya kapital, walaupun memiliki tingkat tabungan nasional yang sama besar.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah

Dalam perekonomian modern pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin penting. Aktivitas ekonomi sektor pemerintah ditunjukkan oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Fungsi pemerintah berbeda dengan dengan fungsi rumah tangga atau perusahaan swasta.

Rumah tangga memiliki faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, kapital, *entrepreneurship*) yang dijual di pasar faktor produksi, dengan imbalan berupa : sewa/harga lahan, upah/gaji, bunga, laba yang kesemuanya merupakan penghasilan untuk dibelikan barang dan jasa di pasar barang. Kelompok pengusaha berfungsi sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa yang dijual di pasar barang dan jasa sehingga memperoleh pendapatan yang

digunakan untuk membeli faktor produksi dan seterusnya. Proses tersebut berjalan berdasarkan konsep efisiensi, yaitu baik produsen maupun konsumen berupaya mendapatkan hasil tertentu dengan faktor/biaya seminimum mungkin. Di dalam perkembangannya terjadi kegagalan pasar karena berbagai hal seperti timbulnya monopoli, dan informasi yang tidak sempurna. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Terjadinya *chaos* dan depresi sehingga masyarakat memandang perlu adanya aturan (*regulation*) dan dibentuklah pemerintah yang mewakili masyarakat untuk mengambil keputusan membenahi masalah yang dihadapi masyarakat. Pemerintah mengatur masyarakat dan kegiatan perekonomian disamping pembeli faktor dan penjual barang dan jasa kepada masyarakat (Reksohadiprodjo, 1999:3-7).

Pemerintah agar supaya dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas dengan baik, memerlukan dukungan anggaran (pajak dan pungutan lain) yang memadai guna melaksanakan kegiatan-kegiatan negara baik dalam bidang pemerintahan umum maupun dalam bidang pembangunan serta memelihara kehidupan dan kegiatan negara lainnya.

Di sektor pemerintahan, anggaran (*budget*) adalah sebuah rencana atau proyeksi atas pendapatan dan belanja di masa mendatang. Sebuah anggaran pemerintah adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, didasarkan pada data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. Sehingga secara terinci dapat dinyatakan bahwa (Nurdjaman, 1992: 45) :

- a. Anggaran negara adalah gambaran atau pilihan alternatif dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutup pengeluaran tersebut.
- b. Dari anggaran negara dapat pula diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu.
- c. Melalui anggaran negara pada akhirnya dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu, serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah di masa yang akan datang.

Anggaran bagi negara atau daerah pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun (anggaran) yang dituangkan dalam angka-angka rupiah yang mencakup sisi penerimaan dan pengeluaran. Anggaran daerah yang merupakan realisasi kebijakan fiskal termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga kebijaksanaan penganggaran daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Pendapatan daerah diusahakan selalu meningkat sedangkan pengeluaran dilakukan seefisien mungkin. Fungsi anggaran harus dapat membiayai pembangunan disamping dapat membiayai kebutuhan rutin. Melalui anggaran, daerah dapat melakukan supervisi dengan ketat dan pengendalian terhadap penggunaan dana sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik (Mardiasmo, 2004: 25). Di dalam UU No. 33 tahun 2004 secara tegas disebutkan bahwa anggaran baik di tingkat pusat (negara)

maupun daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (untuk APBN) dan peraturan daerah (untuk APBD).

Meskipun setiap tindakan pemerintah (perpajakan dan pengeluaran) mempengaruhi perekonomian dalam banyak cara dan dapat dirancang untuk berbagai maksud, fungsi anggaran belanja negara adalah sebagai berikut (Musgrave *and* Musgrave, 1989: 6):

1. Penyediaan barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana bauran/komposisi barang sosial ditentukan. Penyediaan ini dapat disebut sebagai *fungsi alokasi* dari kebijakan anggaran.
2. Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang "merata" dan "adil" disebut sebagai *fungsi distribusi*.
3. Penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran, sebagai *fungsi stabilisasi*.

Pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN/APBD mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1997:171), model pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.
- b. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.
- c. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti : program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Menurut Wagner dalam Mangkoesobroto (1997:172), dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat. Tumbuhnya perekonomian berpengaruh pada hubungan antar industri, hubungan industri dengan masyarakat semakin kompleks. Sehingga peranan pemerintah menjadi sangat penting, karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesobroto (1997:173), mendasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran tersebut. Masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran

pemerintah. Menurut Peacock dan Wiseman perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi besar.

2.1.8 Penerimaan Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : jumlah pajak yang diterima, tujuan-tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Sumber penerimaan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah meliputi pajak, pungutan, dan pinjaman (Musgrave *and* Musgrave, 1989:226). Pajak dan pungutan yang ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar kembali pada suatu hari di masa mendatang, serta untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Diantara ketiga sumber penerimaan tersebut pajak merupakan bagian penerimaan yang paling besar.

Menurut Mangkoesoebroto (1997:181) sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran ada dua, yaitu dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak misalnya pinjaman, penerimaan dari badan usaha milik negara, penerimaan dari lelang. Pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak, dengan tidak ada balas jasa langsung yang dapat ditunjukkan

penggunaannya.

Pajak di samping berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Sistem pengenaan pajak dapat dibedakan menjadi sistem pajak yang progresif, sistem pajak proporsional, dan sistem pajak regresif. Sistem pajak progresif adalah sistem pengenaan pajak dimana dengan semakin tingginya dasar pajak (*tax base*) akan dikenai pungutan yang semakin tinggi persentasenya. Sistem pajak proporsional adalah tarif pajak yang dikenakan tetap sama besarnya walaupun nilai obyek pajaknya berbeda-beda. Sistem pajak regresif yaitu walaupun nilai atau harga obyek pajak meningkat namun persentase jumlah pajak yang dibayar semakin kecil.

2.1.9 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah melakukan investasi sosial dalam penyediaan fasilitas publik, di samping investasi yang dilakukan oleh swasta (PMDN maupun PMA). Berbeda dengan investasi swasta yang bertujuan mencari keuntungan, investasi pemerintah didasarkan pada pertimbangan lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat sehingga dinamakan juga investasi sosial (Sukirno, 2000:85). Investasi pemerintah disini adalah realisasi pengeluaran pembangunan daerah yang juga faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pembangunan pada dasarnya merupakan investasi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Pengeluaran pembangunan tersebut dapat berupa :

1. Belanja perbaikan terhadap jalan, jembatan, gedung-gedung, dan lain sebagainya,
2. Belanja mendirikan gedung baru, pembuatan jembatan baru,

pelabuhan, saluran irigasi, dan sebagainya. 3. Belanja modal, 4. Belanja pembangunan lainnya.

Menurut Keynes (Pressman, 2000:149), peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan. Apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasaran bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan terjadi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar di suatu periode ke periode lainnya, dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran, serta tingkat harga.

Menurut Mangkoesobroto (1997:2), peranan pemerintah sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian secara agregatif, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Menurut Suseno (1990:75), kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) ini dapat diketahui melalui APBN untuk perekonomian nasional, atau APBD untuk perekonomian regional (provinsi/kabupaten/kota) yang pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut serta menggerakkan PDB/PDRB dalam perekonomian nasional maupun regional. Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat, dan melalui peningkatan permintaan agregat, produksi atau *output* akan meningkat.

2.1.10 Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Simanjuntak (1985:41), tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih yang sudah atau sedang mencari pekerjaan dan sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur.

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dan dalam menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja mempunyai kaitan yang erat dengan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia (Tambunan, 2001: 60).

Secara ringkas, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, yang keduanya termasuk dalam usia kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lainnya, yaitu penerimaan pendapatan seperti penerima tunjangan pensiun, bunga atas simpanan dan sewa atas milik. Jika yang digunakan sebagai satuan hitung tenaga kerja adalah orang, dianggap semua orang mempunyai kemampuan dan produktivitas kerja yang sama dan lama waktu kerja yang dianggap sama pula.

Kesempatan kerja dapat dibedakan dalam tiga aspek (Wenny A, 2004: 25):

1. Aspek Pendapatan

Kesempatan kerja memberikan pendapatan para pekerja. Oleh karena itu, kesempatan kerja sering dianggap sebagai alat yang efektif sebagai upaya mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.

2. Aspek Produksi

Kesempatan kerja menghasilkan luaran, berarti tambahannya kesempatan kerja dapat memperbesar laju pertumbuhan luaran.

3. Aspek Harga Diri

Kesempatan kerja memberikan harga diri bagi yang bersangkutan, menganggur sering diartikan bahwa dirinya tidak berguna dan menyebabkan perasaan rendah diri.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain:

- a. Perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja.
- b. Pertumbuhan ekonomi.
- c. Kebijakan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri.

Selain faktor-faktor di atas, faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja (Sagir, 1982:52) yaitu : kependudukan, kedudukan geografis dan sumber daya alam, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya dan faktor politik.

Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu, namun sebenarnya penyebab perubahan kesempatan kerja tersebut bukan karena waktu saja, tetapi karena perubahan bidang ekonomi. Perubahan yang terjadi pada situasi ekonomi membawa dampak pada kesempatan kerja. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi mikro bahwa permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived*

demand) dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Apabila perekonomian berkembang maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Sedangkan apabila perekonomian menyusut atau lesu maka kesempatan kerja juga akan berkurang dan sebagai akibatnya tentu saja pengangguran akan bertambah.

Penggunaan tenaga kerja hanya bisa diwujudkan bila tersedia dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah kesempatan kerja yang cukup banyak, yang produktif dan yang memberi imbalan yang layak. Sedangkan unsur yang kedua adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan semangat kerja yang cukup tinggi (Anastasia, 2004: 21).

Menurut Chotib (2000), istilah "*employment*" dari bahasa Inggris yang berasal dari kata kerja "*to employ*" yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Penggunaan istilah "*employment*" sehari-hari biasanya dinyatakan dengan jumlah orang dan yang dimaksud adalah sejumlah orang yang sudah ada dalam pekerjaan atau mempunyai pekerjaan. Apabila kesempatan kerja yang diukur dari banyak orang yang bekerja dapat dianggap sebagai *proxy* bagi permintaan tenaga kerja, maka untuk melihat faktor yang menentukan kesempatan kerja harus dikaitkan dengan permintaan akan barang dan jasa (*derived demand*). Dengan kata lain, masalah kesempatan kerja tidak boleh dilihat secara terpisah, dan proses pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada perluasan kesempatan kerja. Hal ini sangat tergantung pada kepekaan kesempatan kerja sebagai akibat pertumbuhan produksi nasional. Oleh karena itu laju pertumbuhan produksi nasional harus ditingkatkan sehingga setiap tambahan angkatan kerja akibat pertumbuhan penduduk dapat terserap dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang produktif serta pemberian upah yang layak sangat berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kesempatan kerja tercipta jika terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Besarnya tenaga kerja dalam jangka pendek tergantung dari besarnya elastisitas permintaan untuk tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan substitusi antara tenaga kerja dan faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan hasil produksi dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya.

Pertumbuhan ekonomi mampu membawa pengaruh bagi kesempatan kerja dan kemampuan produktivitas tenaga kerja. Pengaruh tersebut akan positif selama dalam kondisi yang ideal yaitu laju perubahan pendapatan masyarakat tidak menyebabkan perubahan kesempatan kerja yang lebih besar daripada perubahan pendapatan masyarakat itu sendiri (Sudarsono, 1989).

Salah satu model ekonomi tentang proses dan faktor yang menentukan dalam masalah ketenagakerjaan yaitu model makro output-kesempatan kerja (*output employment macro model*), yang berkembang dari aliran ilmu ekonomi Neoklasik (Todaro, 2003:100). Model ini berfokus pada hubungan-hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan output industri, dan penciptaan lapangan kerja. Model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP. Dari model tersebut diisyaratkan dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Perangkat teoritis utama yang dipakai untuk menjelaskan proses pertumbuhan adalah teori Harrod-Domar. Menurut model tersebut, pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai suatu hasil dari kombinasi pemupukan tingkat tabungan dan akumulasi modal fisik dengan rasio modal-output. Berdasarkan rasio modal output agregat tertentu, tingkat pertumbuhan

output nasional serta kesempatan kerja dapat memaksimalkan tingkat tabungan dan investasi. "Dorongan Besar" (*Big Push*) kearah industrialisasi yang cepat telah menjadi kata kunci dalam model ini bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan tercapainya keberhasilan pembangunan nasional.

Banyak negara di dunia ketiga mengalami pertumbuhan *output* industri yang cepat, namun pertumbuhan kesempatan kerjanya tetap saja ketinggalan jauh, bahkan lapangan kerjanya tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Jawaban dari gagalnya teori pembangunan "*big push*" terletak pada pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Ketika ada perbedaan pertumbuhan output dengan kesempatan kerja maka selisih peningkatan output tersebut bersumber dari kenaikan produktivitas tenaga kerja.

Fenomena naiknya produktivitas tenaga kerja tersebut mengakibatkan naiknya rasio modal-tenaga kerja. Dengan diperkenalkannya metode-metode produksi yang lebih padat modal akan menghasilkan laba yang lebih besar sehingga akan dapat menghasilkan pertumbuhan output maksimum. Disini nampak bahwa tujuan mencapai pertumbuhan output maksimum dan peningkatan kesempatan kerja maksimum saling bertentangan dan tidak dapat dicapai secara serentak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model Harrod-Domar dan Neoklasik menekankan pentingnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi dengan segenap kebijakan yang menjadi implikasinya memang dapat mempercepat pertumbuhan output, namun kurang dapat diandalkan untuk memacu pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Jika yang lebih dipentingkan adalah penciptaan lapangan kerja yang luas maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lain, yang lebih mengutamakan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya seperti sektor pertanian dan industri yang berskala

kerja akan bertambah untuk setiap 1 % pertumbuhan ekonomi.

$$\eta_L = (\partial L / L) / (\partial Q / Q) \dots\dots\dots = (\partial L / L) \times Q / \partial Q \dots\dots\dots 2.3$$

Di mana : η_L adalah Elastisitas kesempatan kerja

L adalah Kesempatan kerja

∂L adalah Persentase perubahan kesempatan kerja

Q adalah Output

∂Q adalah Persentase perubahan *output*

Tingkat efisiensi juga mempunyai dampak mendua terhadap kesempatan kerja, seperti pada penjelasan tentang rasio kesempatan kerja-output. Di Indonesia, memasuki dasawarsa 1990-an angka elastisitas kesempatan kerja cenderung menurun dibanding dasawarsa sebelumnya. Hal ini mengindikasikan teknik produksi sudah mengarah ke padat modal dan ada masalah dengan efisiensi produksi.

2.1.11 Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan

Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar. Jika alat utama yang digunakan untuk perbaikan distribusi pendapatan adalah mekanisme pasar, maka supaya dapat bertahan di pasar, para pekerja harus terus meningkatkan produktivitasnya. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja yang tersedia memaksa orang untuk menentukan spesialisasi, yang akan meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas, maka uang yang dihasilkan untuk jam

kerja yang sama akan lebih besar. Uang tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga dalam beberapa generasi kemudian, distribusi pendapatan makin membaik serta kesejahteraan makin meningkat (Papanek *and* Oldrich, 1986).

Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Penelitian dengan data silang tempat oleh Kuznetz (1955), diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan. Penelitian empiris Kuznetz mensintesisasikan adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*), yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata (Todaro, 2003:240).

Seringkali dirasakan adanya korelasi yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Apabila suatu negara ingin lebih mendahulukan memajukan tingkat pertumbuhan ekonominya, biasanya akan berdampak apada terbengkalainya distribusi pendapatan yang merata. Namun hal ini kembali pada kebijakan pada masing-masing negara, di negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, umumnya sudah ada lembaga yang mendukung untuk diusahakanya pemerataan distribusi pendapatan, lembaga-lembaga ini masih sangat sulit dijumpai di negara-negara berkembang. Tetapi ada negara-negara berkembang yang mengalami distribusi pendapatan yang merata karena memang diusahakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah negara yang bersangkutan sebagai dasar filosofi negaranya. Sebagai contohnya adalah negara Sri Lanka yang menggunakan pendekatan "kebutuhan dasar" sebagai strategi untuk membangun perekonomiannya. Mereka menganggap apabila kebutuhan dasar, seperti, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan sudah

terpenuhi, maka proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi lebih mudah (World Bank,1990:50).

Menurut Todaro (2003:234), kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat maka akan meningkatkan kesejahteraannya. Namun kesejahteraan mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan, semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat maka cenderung menurunkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

2.1.12 Kesenjangan Ekonomi

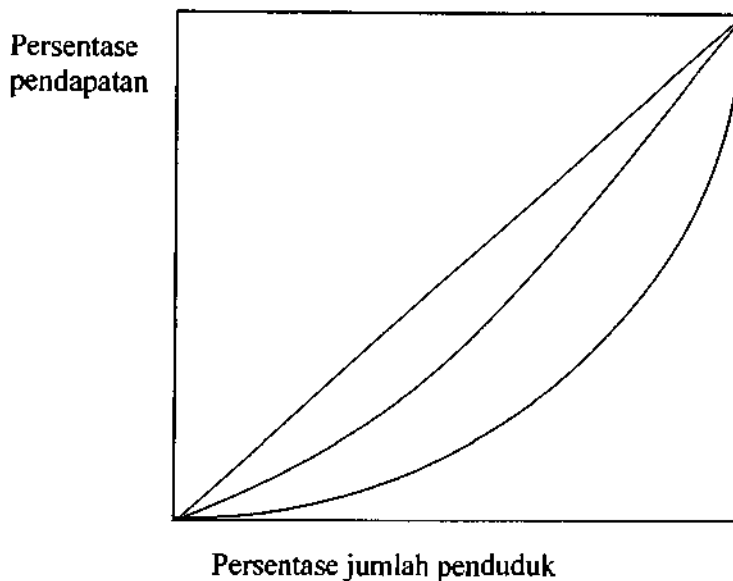
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa macam kesenjangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan, yaitu : 1. kesenjangan antar daerah, 2. kesenjangan antar sektor, dan 3. kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat (Basri,1995:92).

Kesenjangan jenis pertama, tampaknya lebih bersifat struktural. Di tengah permasalahan pembangunan yang kian pelik dan beragam di setiap daerah, agaknya amat mustahil untuk membayangkan suatu pendekatan dan pemecahan masalah secara terpusat, departemental, sektoral dan parsial. Daerah mau tidak mau harus diberikan porsi yang semakin besar untuk mengidentifikasi sendiri permasalahan yang dihadapinya, demikian pula dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah pemecahannya.

Kesenjangan kedua, yakni kesenjangan antar sektor, lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan (*urban bias*) dan atau ke sektor modern sehingga sektor tradisional dan pembangunan daerah pedesaan relatif tertinggal.

Kesenjangan jenis yang ketiga, yaitu kesenjangan pendapatan yang amat nyata terlihat, meskipun data-data statistik yang ada menunjukkan perbaikan. Adalah benar adanya jika dikatakan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat secara keseluruhan telah meningkat, namun ini tidak cukup menggembirakan jika diiringi oleh kesenjangan yang meningkat. Apalagi kalau kelompok sosial yang berpendapatan tinggi meraih dan menikmati kekayaannya lewat cara-cara yang justru dapat merugikan masyarakat yang berpendapatan lebih rendah.

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan, yaitu : Kurva Lorenz, Indeks Gini, dan kriteria Bank Dunia, Indeks Williamson. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin merata, dan sebaliknya.



Sumber : Todaro, 2003:226

Gambar 2.1. KURVA LORENZ

Indeks atau rasio Gini adalah ukuran kesenjangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) dan satu (kesenjangan sempurna). Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia di dasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan terendah (penduduk termiskin), 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Kesenjangan distribusi pendapatan dinyatakan tinggi apabila 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Kesenjangan distribusi pendapatan dinyatakan sedang apabila 40% penduduk termiskin menikmati antara 12% sampai dengan 17% pendapatan nasional. Apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% dari pendapatan nasional, maka kesenjangan dikatakan rendah (Dumairi, 1996:55)

Indeks Williamson merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional yang diperkenalkan oleh Williamson. Metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Indeks Williamson bernilai positif, dan berkisar antara angka 0 sampai dengan satu. Semakin besar nilai indeks ini (mendekati satu) berarti semakin besar tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks ini (mendekati nilai nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Rumus untuk mencari Indeks Williamson adalah (Ricardson, 1995: 47).

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 (f_i / n)}}{Y}$$

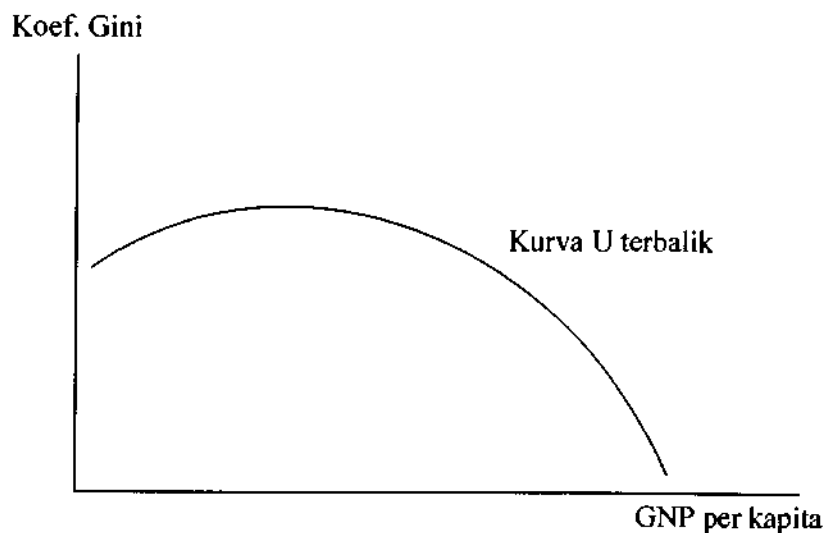
Di mana : IW adalah Indeks Williamson

Y_i adalah PDRB per kapita kabupaten/kota i

- Y adalah PDRB per kapita provinsi
 f_i adalah penduduk kabupaten/kota i
 n adalah penduduk provinsi

Isu kesenjangan dan pertumbuhan hingga kini masih merupakan debat yang tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Menurut Kuncoro (2003:135) seringkali ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Menurut World Bank (1990:55), antara pertumbuhan dan kemiskinan bukanlah suatu *trade-off* yang tidak dapat diatasi. Dengan kebijakan yang tepat, golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan, dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Terdapat berbagai tipe pertumbuhan ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan. Penelitian dengan data silang tempat oleh Kuznetz (1955), diakui sebagai pelopor penelitian komparatif dalam distribusi pendapatan.



Sumber : Todaro, 2003:240

Gambar 2.2 : KURVA U TERBALIK

Penelitian empiris Kuznetz mensintesisasikan adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*), yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Penelitian selanjutnya yang mengamati kesenjangan distribusi pendapatan oleh Kravis (1970), Oshima (1962), Kuznetz (1963), Adelman dan Moris (1973), Chenery dan Syrquin (1975), Ahluwalia, Charter, dan Chenery (1979) mendukung thesis Kuznetz tentang kurva U yang terbalik (Kuncoro, 2003:136).

Hasil studi Weisskoff (1970), tentang perubahan dan pola distribusi pendapatan di tiga negara Amerika latin (Argentina, Meksiko, dan Puerto Rico), dan Fishlow (1972) di Brazil, menunjukkan bahwa sukses ekonomi makro tidak diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan. Penelitian Fields (1980) menemukan fakta sebagai berikut: pertama, negara yang mengalami kenaikan kesenjangan distribusi pendapatan ternyata kurang lebih sama dengan banyaknya negara yang mengalami penurunan kesenjangan pendapatan. Kedua, kemiskinan absolut menurun di kebanyakan negara (Costa Rica, Pakistan, Singapura, Srilangka, dan Taiwan). Ketiga, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan banyak yang berjalan beriringan (Bangladesh, Brazil, Meksiko, dan Puerto Rico). Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa kendati pertumbuhan ekonomi yang cepat umumnya menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya pengurangan kemiskinan.

Penelitian Papanek dan Oldrich Kyn (1986: 55) tentang "*The effect on income distribution of development, the growth rate and economic strategy*" menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih sering dikaitkan dengan kesenjangan pendapatan yang lebih rendah.

Todaro menjelaskan (2003: 245), hubungan antara laju pertumbuhan GNP dengan standar perbaikan tingkat pendapatan relatif penduduk yang paling miskin (40 persen penduduk yang paling miskin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak adanya hubungan jelas yang kuat antara laju pertumbuhan GNP dan distribusi pendapatan. Laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan, seperti yang pernah dikatakan sejumlah pengamat. Bahkan di sejumlah negara seperti Taiwan dan Korea Selatan mengalami laju pertumbuhan GNP yang tinggi dan distribusi pendapatan yang makin merata, atau setidaknya tidak bertambah buruk. Namun demikian, negara-negara seperti Meksiko dan Panama juga mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi disertai dengan semakin memburuknya kondisi distribusi pendapatan. Di pihak lain, laju pertumbuhan GNP yang rendah ternyata tidak selalu berkaitan dengan perbaikan distribusi pendapatan. Di negara-negara berkembang seperti India, Peru, dan Filipina, laju pertumbuhan GNP yang rendah disertai pula dengan memburuknya distribusi pendapatan bagi 40 persen penduduknya yang paling miskin. Sri Lanka, Kolombia, Kosta Rika, dan El Salvador mengalami laju pertumbuhan yang sama rendahnya, namun mereka berhasil memperbaiki kesejahteraan ekonomi penduduknya yang berpendapatan rendah. Laporan World Bank (1998) dengan data *time series* periode 1965-1996, memperlihatkan bahwa kesenjangan yang diukur dengan koefisien Gini tidak berhubungan dengan laju pertumbuhan GNP per kapita agregat.

Selama kurun waktu 1960-an hingga 1990-an terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat pada beberapa negara di wilayah Asia. Negara-negara

tersebut kemudian digolongkan ke dalam kelompok Negara "*High Performing Asian Economies (HPAEs)*". Kelompok Negara HPAEs tersebut meliputi Jepang, Singapura, Hongkong, Republik Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di Negara-negara tersebut selain mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mampu melakukan pemerataan distribusi pendapatan, baik dalam hal alokasi sumber daya maupun hasil dari pertumbuhan itu sendiri.

2.1.13 Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam melihat tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan antar wilayah adalah suatu kondisi di mana perkembangan pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang mempunyai harapan lebih tinggi, sedangkan wilayah lainnya relatif tertinggal. Menurut Todaro (2003:235) kesenjangan harus mendapatkan perhatian karena :

1. Kesenjangan pendapatan yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, hal ini karena pada tingkat pendapatan rata-rata berapapun, kesenjangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit yang lain.
2. Kesenjangan pendapatan menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan. Kesenjangan yang tinggi akan menyebabkan penekanan yang tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar. Kesenjangan yang tinggi atas kepemilikan tanah juga menyebabkan inefisiensi.

3. Kesenjangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Kesenjangan yang tinggi akan memperkuat kekuatan politis golongan kaya dan kekuatan tawar-menawar ekonomi mereka. Sehingga mempermudah “pemburuan rente” yang meliputi berbagai tindakan seperti lobi, sumbangan politis yang besar, penyuapan, dan kronisme.
4. Kesenjangan merupakan suatu ketidakadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan semua alasan di atas Todaro merumuskan kesejahteraan adalah sebagai berikut :

$$W = W (Y, I, P)$$

Di mana : Y adalah pendapatan per kapita, berhubungan positif dengan fungsi kesejahteraan

I adalah kesenjangan dan berhubungan negatif dengan fungsi kesejahteraan

P adalah kemiskinan absolut berhubungan dengan negatif dengan fungsi kesejahteraan

2.1.14 Teori Ekonomi Kesejahteraan

Teori ekonomi kesejahteraan mempelajari berbagai kondisi di mana cara penyelesaian dari model equilibrium umum dapat dikatakan optimal. Hal ini memerlukan antara lain, alokasi optimal faktor produksi antar komoditi dan alokasi optimal komoditi (yaitu distribusi pendapatan) antar konsumen (Salvatore, 1983: 349). Ekonomi kesejahteraan menurut Pigou (1960:11) adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Sedangkan pengertian kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Federico (1997:361) merupakan sistem suatu

bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.

Ilmu ekonomi kesejahteraan menurut Scitovsky (dalam Agarwal, 1998:727) adalah bagian dari bentuk umum teori ekonomi yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Ilmu ekonomi kesejahteraan menggunakan pendekatan ekonomi normatif, menurut Sudarsono (1989:357) ekonomi normatif di samping membahas hubungan sebab akibat dari berbagai variabel ekonomi, juga memasukkan unsur evaluasi dari sudut pandang apa yang seharusnya atau sebaiknya. Di sisi lain, ekonomi positif membahas tentang hubungan sebab akibat variabel ekonomi yang membahas seperti apa adanya.

2.1.14.1 Kesejahteraan Umum dan Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Pigou ilmu ekonomi kesejahteraan hanya berhubungan dengan yang bersifat ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dalam pengertian ini adalah kepuasan yang diturunkan dari penggunaan barang dan jasa yang dapat dipertukarkan. Pendapat Pigou di atas dikritik oleh Graaff (dalam Agarwal, 1998:728) karena: (1) pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan uang tidak selalu akurat, (2) pendapat Pigou tidak memperoleh pengesahan karena kesejahteraan ekonomi dapat diinterpretasikan hanya untuk barang-barang yang dapat dipertukarkan saja. Kesejahteraan sekelompok manusia atau perorangan tergantung beberapa faktor, sebagian merupakan faktor ekonomi sedangkan lainnya merupakan faktor non ekonomi, seperti faktor sosial politik.

Kesejahteraan tidak hanya tergantung pada variabel-variabel ekonomi saja, tetapi juga pada variabel-variabel non ekonomi yang berpengaruh terhadap variabel ekonomi. Walaupun faktor-faktor non ekonomi mempengaruhi faktor-faktor ekonomi, tetapi faktor-faktor non ekonomi tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi. Dalam berbagai kasus, sebagian besar ahli ekonomi hanya memperhitungkan variabel-variabel ekonomi dalam analisis kesejahteraan dan variabel-variabel non ekonomi dianggap konstan.

2.1.14.2 Kesejahteraan Individu dan Kesejahteraan Sosial

Para ahli ekonomi modern berusaha untuk mempertahankan sifat obyektif dari kesejahteraan individu dengan cara mengkaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu. Sebagai contoh seorang yang memiliki skala preferensi tertentu lebih memilih A daripada B, hal itu menunjukkan bahwa kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi di A daripada di B. Pilihan yang dilakukan oleh individu sebagai uji yang obyektif untuk membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Konsep kesejahteraan sosial bukan merupakan hal yang mudah, mengukur kesejahteraan sosial merupakan hal yang tidak mungkin. Membandingkan kesejahteraan sosial dalam situasi yang berbeda melalui media pilihan sosial tidak mudah. Hal ini karena pilihan sosial penjumlahan dari pilihan-pilihan individu. Dengan sederhana dikatakan bahwa kesejahteraan sosial sebagai penjumlahan dari kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial oleh Varian (1993:539) digambarkan dalam bentuk fungsi kesejahteraan sebagai berikut :

$$W = W (U_1 (X_1), \dots, U_n (X_n)) \dots\dots\dots 2.4$$

Di mana : W adalah kesejahteraan sosial

 Xi adalah konsumsi individu

$U_i (X_i)$ adalah tingkat utilitas dari konsumen

Fungsi kesejahteraan secara langsung adalah suatu fungsi dari tingkat utilitas individu-individu dan secara tidak langsung adalah suatu fungsi dari konsumsi individu-individu.

Menurut Graaff (dalam Agarwal,1998:728) terdapat tiga konsep kesejahteraan sosial yang berbeda yaitu:

1. Konsep kesejahteraan sosial *Paretian*. Konsep ini digunakan oleh Pareto dan para penerusnya. Menurut konsep ini kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan secara kolektif yang terdiri dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa bila sekurang-kurangnya satu orang menjadi lebih baik dan tidak seorangpun menjadi lebih buruk keadaannya maka kesejahteraan sosial mengalami kenaikan.
2. Konsep kesejahteraan sosial *Bergson*. Konsep ini mencakup lebih banyak kasus di mana perubahan organisasi ekonomi membuat beberapa orang menjadi lebih baik dan orang lain menjadi lebih buruk. Dalam konsep tersebut dapat dibuat pertimbangan nilai secara eksplisit, misalnya dalam fungsi yang sederhana dapat ditunjukkan bagaimana kesejahteraan seseorang ditambahkan pada kesejahteraan orang lain.
3. Konsep kesejahteraan sosial *Paternalist*. Yaitu konsep yang menggambarkan pandangan-pandangan penguasa paternalis atau negara, dan bukan individu-individu atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai ide tentang kesejahteraan sosial maksimum yang akan dicapai.

2.1.14.3 Pareto Optimum dan Kondisi Kesejahteraan Optimum

Ahli ekonomi yang mula-mula mengajukan suatu kriteria positif untuk peningkatan atau penurunan kesejahteraan sosial adalah Wilfredo Pareto (Agarwal, 1998:732, dalam Sasongko, 2006). Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi di mana tidak memungkinkan suatu realokasi *input* atau *output* untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, distribusi barang dan jasa antar konsumen bila setelah alokasi barang-barang antar konsumen menghasilkan pengurangan kepuasan setidaknya untuk satu orang.

Produksi akan efisien bila setiap realokasi yang layak dari *input* antar perusahaan menurunkan tingkat *output* sekurang-kurangnya satu perusahaan atau satu komoditi. Hal ini berarti Pareto optimum adalah sebuah posisi di mana tidak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang. Pareto optimum menunjukkan kriteria untuk membuat penilaian kesejahteraan. Pareto tidak memberikan perhatian terhadap distribusi pendapatan. Menurut konsep ini sebuah kerangka dari distribusi atau suatu reorganisasi produksi dan perdagangan akan dilihat sebagai peningkatan kesejahteraan atau penurunan kesejahteraan, hal itu akan meningkatkan atau memperburuk posisi sekurang-kurangnya satu orang tanpa berpengaruh merugikan terhadap posisi yang lain.

Hukum Pareto tidak bersandar pada perbandingan guna antar individu melainkan berdasar pada suatu penilaian kritis yang cukup luas yakni sesuatu yang bagus untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain atau pihak lain menjadi makin buruk. Pareto tidak berbicara tentang suatu kebijaksanaan yang bermanfaat kepada beberapa pihak dan merugikan pihak yang lain, karena untuk mengevaluasi kasus demikian masalah perbandingan guna antar

individu akan muncul di mana kriteria Pareto telah menghindari dengan hati-hati. Konsep Pareto dalam kesejahteraan sosial yang optimum adalah sama dengan konsep dari Baumol tentang *output* ideal.

Pareto mensyaratkan tiga kondisi marginal untuk menjelaskan pencapaian situasi optimal di dalam konsumsi, produksi, dan perdagangan. Kondisi marginal bagi optimasi menyeluruh mengikuti beberapa asumsi penting yaitu :

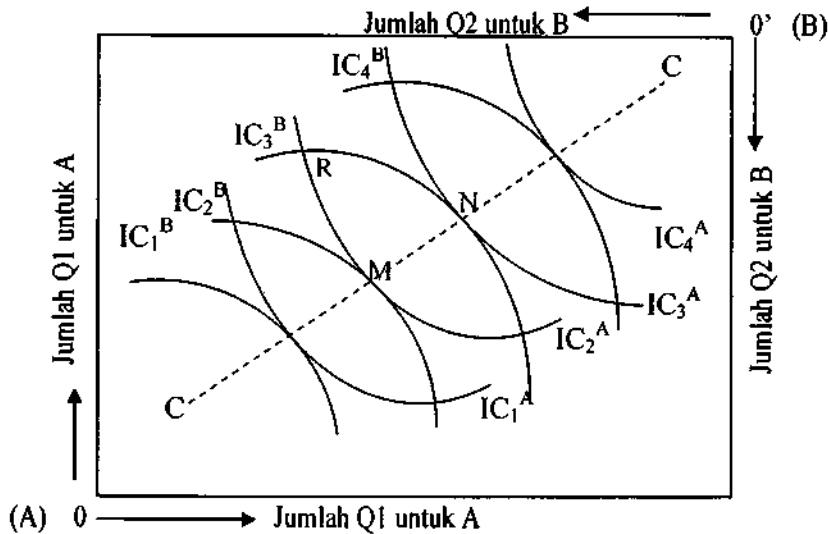
1. Setiap individu mempunyai fungsi guna ordinal dan itu disediakan dengan jumlah yang tertentu pada masing-masing produk.
2. Fungsi produksi pada tiap-tiap perusahaan (produsen) sudah tertentu dengan tingkat teknologi yang ada.
3. Semua barang sangat mungkin untuk dibagi
4. Masing-masing individu membeli beberapa dari keseluruhan barang
5. Semua faktor produksi digunakan di dalam proses produksi setiap barang.

Pareto optimal yang menyeluruh dapat diturunkan sebagai berikut :

- a. Sektor Konsumsi. Kondisi marginal yang pertama memastikan alokasi optimum barang-barang antar konsumen. Kondisi ini menyatakan bahwa setiap konsumen di dalam masyarakat, di mana tingkat substitusi marginal antara dua barang harus sama. Untuk pengertian tentang kondisi marginal, tampak pada *Edgeworth Box diagram* pada Gambar 2.3 halaman 89. Bila tingkat substitusi marginal untuk dua barang tidak sama bagi dua konsumen, mereka dapat memasuki suatu perdagangan yang akan meningkatkan kepuasan keduanya atau salah satu tanpa mengurangi kepuasan (kesejahteraan) yang lain. Ini diketahui sebagai *mutually profitable trade* antara dua konsumen.

Pada Gambar 2.3, sumbu tegak dan sumbu datar pada bidang persegi

panjang mengukur jumlah barang Q1 dan Q2 pada perdagangan murni. Setiap titik di dalam kotak menunjukkan distribusi dari barang-barang antar dua konsumen yaitu A dan B. Peta indifferen dari individu A dan B dan tingkat kepuasan mereka dari berbagai kombinasi Q1 dan Q2 adalah sebagai berikut:



Sumber : Agarwal, 1998:734

Gambar 2.3. EDGEWORTH BOX DIAGRAM

Peta indifferen dari A digambarkan dengan menggunakan 0 sebagai titik asal, dan peta indifferen B digambarkan dengan menggunakan 0' sebagai titik asal. Dalam kasus dua orang dengan dua komoditi keseimbangan perdagangan akan dicapai di mana kurva indifferen dari dua orang konsumen bersinggungan satu sama lain. Tempat titik singgung dari dua macam kurva indifferen merupakan kurva kontrak CC. *Slope* dari sebuah kurva indifferen sebagai tingkat substitusi marjinal dari Q1 ke Q2.

Titik keseimbangan perdagangan dari kurva indifferen untuk dua individu adalah sama, tingkat substitusi marjinal masing-masing juga sama. Setiap titik sepanjang kurva kontrak adalah pareto optimal, setiap titik di

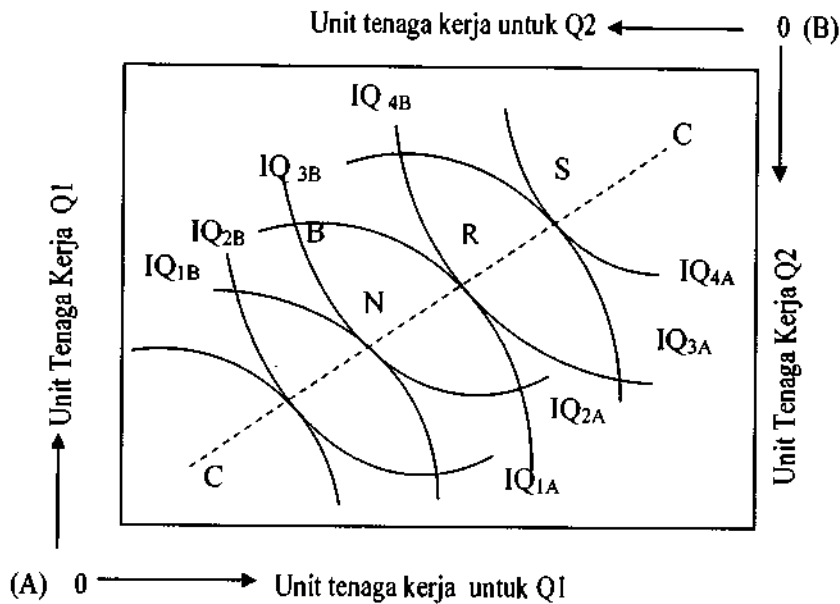
luar kurva kontrak menunjukkan sebuah posisi yang tidak optimum karena pada sebuah titik seseorang akan kehilangan (kurva indifferen yang lebih rendah) sementara yang lain tidak memperoleh keuntungan (tetap pada kurva indifferen yang sama).

Mengikuti kriteria Pareto, sebuah gerakan dari titik non-optimum R ke titik lain M atau N di dalam kurva kontrak CC akan bermanfaat bagi seseorang tanpa merugikan yang lain. Bagaimanapun, sebuah gerakan sepanjang kurva kontrak pada salah satu arah tidak dapat membuat keduanya menjadi lebih baik. Sebuah gerakan seperti ini akan selalu menguntungkan seorang individu dan merugikan yang lain. Sehingga setiap titik pada kurva kontrak menunjukkan kesejahteraan sosial Pareto.

- b. Sektor Produksi. Pareto optimum di dalam produksi dua sektor meliputi pemenuhan kondisi marginal seperti (a) alokasi optimum faktor *input*; (b) optimisasi *output* untuk setiap perusahaan.

(a). Alokasi optimum faktor *input*. Hal itu memerlukan tingkat substitusi teknik marginal (MRTS) antara beberapa pasang faktor produksi untuk dua perusahaan yang menggunakan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan sebuah produk tertentu. Kondisi kepuasan tidak mungkin untuk menghadirkan barang yang lebih banyak tanpa mengurangi produksi barang lain. Sebaliknya, Beberapa kemungkinan penambahan total produk dengan menggeser setiap faktor produksi untuk satu produk kepada produk lain.

Dengan mengasumsikan bahwa Q1 dan Q2 adalah hanya barang yang diproduksi di dalam perekonomian masyarakat dan terdapat dua macam *input* yaitu tenaga kerja dan kapital, maka pareto optimal dapat dijelaskan pada Gambar 2.4 halaman 91 berikut.



Sumber : Agarwal, 1998 :736

Gambar 2.4. PARETO OPTIMAL

Persinggungan antara dua isoquan mengacu kepada titik efisien atau kurva kontrak produksi. Setiap titik pada garis CC menunjukkan kesamaan tingkat substitusi teknik marjinal setiap faktor untuk produsen, sementara titik di luar kurva CC, sebut saja titik B, menunjukkan ketidaksamaan dengan MRTS, kondisi pareto optimal produsen berada pada berbagai titik di CC.

(b). Output optimal untuk setiap perusahaan. Kondisi marjinal yang kedua di dalam sektor produksi ditentukan oleh *output* setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kondisi adalah memuaskan apabila tingkat marjinal dari produk transformasi (MRPT) antara dua barang sama untuk dua perusahaan yang menghasilkan barang-barang tersebut. Diketahui bahwa marjinal dari produk transformasi (MRPT) antara dua barang adalah satu tingkat di mana satu barang harus dikorbankan untuk mencapai lebih banyak barang lain tanpa meningkatkan penggunaan *input*. Masyarakat

harus memilih antara dua produsen, jika masyarakat memilih lebih banyak Q1 dan lebih sedikit Q2 hal itu akan mengurangi produksi Q2. Hal tersebut dapat dilihat dari kurva kemungkinan produksi .

2.1.14.4 Kesejahteraan dengan Memperhatikan Pembangunan Manusia

United Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor : rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Laporan ini menganggap bahwa pembangunan manusia pada hakekatnya adalah suatu proses memperbesar pilihan-pilihan manusia. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh UNDP dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(UNDP,1994:94).

Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro,2003:70). Indikator HDI jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya tersebut.

Indeks tiga komponen HDI dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan antara nilai indikator dan penentu nilai minimumnya dengan perbedaan antara penentu indikator maksimum dan minimum (UNSFIRS, 2000) :

$$\text{Indeks } X(i) = \{X(i) - X(i)\text{min}\} / \{X(i)\text{max} - X(i)\text{min}\} \dots\dots\dots 2.5$$

Di mana : $X(i)$ adalah indikator ke- i ($i=1,2,3$)

$X(\max)$ adalah nilai maksimum $X(i)$

$X(i)\min$ adalah nilai minimum $X(i)$

Berdasarkan prosedur di atas, HDI dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$HDI = 1/3 \{X(1) + X(2) + X(3)\} \dots\dots\dots 2.6$$

Di mana : $X(1)$ adalah indeks harapan hidup kelahiran

$X(2)$ adalah indeks pendidikan

$X(3)$ adalah indeks standar hidup layak

Salah satu keuntungan HDI adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia. HDI juga menyampaikan bahwa pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Indikator kesenjangan pembangunan dan pemerinkatan yang baik harus memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan yang tertimbang, dan bukan hanya melihat tingkat pendapatan saja. HDI merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah (Todaro,2003:71).

Dalam tingkat kesejahteraan atau pembangunan manusia yang baik, pendapatan nasional (GNP) hanyalah salah satu indikator-simpul dari banyak indikator lainnya. Dari tahun ke tahun indeks telah dikembangkan, dari indeks mengenai tingkat kekurangan gizi, kematian bayi, usia harapan hidup, melek huruf, akses air bersih, fasilitas kesehatan, sampai ke pemberdayaan gender dan

tingkat kemiskinan. Sebelum tahun 2000, laporan-laporan UNDP mengenai kesejahteraan (pembangunan manusia) diuntai dengan perspektif "tingkat pengurangan kemiskinan" atau tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Namun pada tahun-tahun 2000-an, sekurangnya pada laporan tahun 2001 dan 2004 laporan UNDP mengenai pembangunan manusia dilihat dari perspektif demokrasi.

2.1.15 Teori Pertumbuhan Wilayah

Pertumbuhan wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.

Teori yang membicarakan pertumbuhan regional ini dimulai dari teori yang dikutip dari ekonomi makro maupun ekonomi pembangunan, dengan mengubah batas wilayah dan disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya dilanjutkan dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi : Teori ekonomi Klasik Adam Smith (1723-1790), Teori Harod-Domar dalam sistem regional (1957), Teori pertumbuhan Neoklasik oleh Solow (1970) dan Swan (1956), dan sebagainya.

Menurut Aziz (1994) dalam Mursinto (2004: 87) pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel, seperti penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga kerja dan imbalan bagi faktor (*factor return*), dalam daerah yang dibatasi secara jelas. Perbedaan terpenting dalam analisis ekonomi antara tingkat nasional

dan daerah adalah masalah perdagangan, pola perdagangan antar daerah tidak terlampau penting di tingkat nasional dibandingkan dengan tingkat daerah.

Lebih lanjut Aziz (1994) menyebutkan bahwa arah gerak modal antar daerah sangat tergantung dari :

- a. Fungsi obyektif yang ingin dicapai
- b. Lamanya periode perencanaan
- c. Skala Ekonomi
- d. Gejala *return to scale* di tiap daerah
- e. Besarnya stok modal di masing-masing daerah

Disebutkan pula bahwa studi tentang tipologi sistem dua daerah, tentang perubahan modal antar daerah disertai dengan gerak tingkat produktivitas modal ke arah yang sama. Hal ini sangat penting karena tidak jarang dijumpai daerah yang mengalami peningkatan produktivitas secara bersama-sama, terutama dalam keadaan perekonomian nasional yang tumbuh dengan cepat dan program pembangunan daerah sangat efektif. Sebaliknya dalam perekonomian yang suram, penurunan produktivitas tak terelakkan lagi di hampir semua daerah yang bersangkutan. Klasifikasi sistem dua daerah meliputi :

1. *No dependency*, yang menunjukkan bahwa dengan atau tanpa kebebasan bergerak (mobilitas) modal antar daerah, arah perkembangan produktivitas modal di kedua daerah tidak berbeda. Arah naik turunnya tingkat produktivitas modal di kedua daerah tidak dipengaruhi oleh arus modal yang mengalir dari dan ke daerah lain. Sehingga tingkat ketergantungan antar daerah dalam produktivitas modal tidak terjadi.
2. *Quasi dependency*, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan bahwa kalau modal tidak bergerak bebas dari satu daerah ke daerah lain, produktivitas

modal hanya akan meningkat di salah satu daerah. Pada saat mobilitas modal terjadi, proses peningkatan produktivitasnya akan berlangsung di kedua daerah. Sehingga ada tingkat ketergantungannya, tetapi tidak sepenuhnya hanya produktivitas modal di satu daerah yang akan dipengaruhi.

3. *Strong dependency*, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa sebelum mobilitas antar daerah terjadi, produktivitas modal di kedua daerah menurun, dan setelah modal bebas mengalir antar daerah produktivitas meningkat di kedua daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa arah naik turunnya tingkat produktivitas modal di kedua daerah sangat tergantung dari gerak modal antar daerah.
4. *Complete dependency*, sistem jenis ini menggambarkan keadaan mengalirnya modal dari satu daerah ke daerah lain yang bukan hanya membuat produktivitas modal antar daerah sama (terjadi keseimbangan), tetapi juga proporsi modal dan tenaga kerja di kedua daerah akan sama. Sehingga proses penyamaan (*convergency*) lengkap atau sempurna.
5. *Incomplete convergency*, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa mobilitas modal antar daerah hanya akan menyamakan produktivitas modal di kedua daerah, sedangkan rasio modal terhadap tenaga kerja akan mencapai tingkat yang berbeda di saat keseimbangan terjadi.
6. *Divergency*, merupakan keadaan yang justru arus modal mengalir ke daerah yang sudah kaya akan modal, dan arus ini berlangsung terus menerus sehingga tidak pernah tercapai keseimbangan atau penyamaan produktivitas modal di kedua daerah.

Sistem pertama sampai tiga, didasarkan atas perbandingan keadaan sebelum dan sesudah mobilitas modal antar daerah terjadi, sedangkan sistem keempat sampai keenam didasarkan atas pola dan tingkah laku produktivitas modal dalam keadaan terdapat mobilitas modal antar daerah.

2.1.16 Teori Pembangunan Wilayah

2.1.16.1 Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut, kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005:28).

Dalam pengertian ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah, baik ke luar wilayah lain dalam suatu negara maupun ke luar negeri. Tenaga kerja yang berdomisili di wilayah kita, tetapi bekerja dan memperoleh uang dari wilayah lain termasuk dalam pengertian ekspor. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah disebut kegiatan basis. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang bersifat *exogeneous* (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal).

Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk dalam kegiatan/sektor *service* atau pelayanan, tetapi untuk tidak menciptakan pengertian yang keliru tentang arti *service* disebut saja sektor non basis. Sektor non basis (*service*) adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kenaikannya sejalan

dengan kenaikan pendapatan masyarakat se tempat. Sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi se tempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan tersebut, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal, bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi (Arsyad, 1999: 116).

2.1.16.2 Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)

Menurut Arsyad (1999) teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa, sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peran fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

2.1.16.3 Teori Kausal Kumulatif (*Cumulative Causation Theory*)

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya.

2.1.16.4 Teori Lokasi (*Place Theory*)

Para ekonom regional sering mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah, yaitu lokasi, lokasi, lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya dengan memilih lokasi yang memaksimalkan peluang untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno, menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

Banyak variabel yang mempengaruhi kualitas atau suitability suatu lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya, maupun sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi yang berbeda pula atas berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu sering kali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik masuknya perusahaan ke suatu lokasi.

Keterbatasan dari teori lokasi adalah, bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi barang.

2.1.16.5 Teori Daya Tarik (*Attraction Theory*)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian insentif dan subsidi.

Teori pembangunan yang ada sekarang ini (seperti yang diuraikan sebelumnya) tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu perlu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah telah cukup banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi dan kesejahteraan, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Demikian pula hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan, sudah cukup banyak studi maupun penelitian yang dilakukan. Untuk memperkuat pijakan dalam studi ini, berikut akan disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan studi ini.

1. Adelman dan Morris (1973).

Penelitian Adelman dan Morris bertujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Diperoleh kesimpulan bahwa negara-negara berkembang bukan saja menghadapi kemerosotan dalam kesenjangan relatif selama pelaksanaan

pembangunannya, tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan absolut dan tingkat pengangguran.

2. Penelitian Nicholas Yacobus Rumbiak (2000).

Penelitian Rumbiak mengkaji mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jayapura. Menggunakan model regresi logaritma natural. Hasil analisis disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jayapura, dengan koefisien sebesar 0,04 dan 0,0007.

3. M. Govinda Rao (2000)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rao (2000), disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di India maupun di Indonesia tidak berbeda jauh. Ada banyak potensi-potensi yang seharusnya masih bisa digali, tetapi yang terjadi adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tersebut. Baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. Seharusnya dengan desentralisasi fiskal, akan lebih menguntungkan pemerintah daerah dalam usahanya untuk menaikkan pendapatan daerahnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan warganya. Tetapi yang terjadi adalah adanya defisit fiskal. Agregat defisit fiskal jauh lebih tinggi dibanding yang dapat terukur. Hal ini tidak terlepas dari adanya *moral hazard* pada unsur aparat pemerintahan. Permasalahan inilah yang pada akhirnya memerlukan pengawasan yang lebih ketat, agar tidak terjadi berbbagai penyelewengan.

4. Jorge Martinez-Vasquez dan Robert M.McNab (2001).

Penelitian Martinez dan Robert M. McNab mengkaji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan bahwa

hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi belum tentu mempunyai dampak secara langsung. Ada potensi bermacam-macam efek dari desentralisasi tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi konsumen, efisiensi produsen, distribusi sumber daya geografis, kestabilan makro ekonomi, korupsi. Desentralisasi akan mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran atau pembelanjaan publik.

5. Raksaka Mahi (2001).

Mahi meneliti tentang dampak desentralisasi dengan judul "*Fiscal decentralization : It's Impact on Cities Growth*". Menggunakan model ekonometrika simultan *two stage least squares model*. Variabel desentralisasi fiskal diukur dengan dana bagi hasil, DAU, dan DAK. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) dana alokasi umum lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun desain kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. (2) Bagi hasil pajak dan bukan pajak menurunkan pertumbuhan ekonomi. (3) Kebutuhan bagi hasil sumber daya alam berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan antar daerah.

6. Paul Smoke (2001)

Penelitian yang dilakukan oleh Smoke (2001) terhadap proses desentralisasi fiskal di Afrika Selatan di hasilkan kesimpulan bahwa, kapasitas terbatas dalam administrasi publik dan manajemen politik adalah kendala pokok dalam proses penyaluran pelayanan di Afrika Selatan. Kurangnya kapasitas ini terbukti secara khusus pada tingkat provinsi, dan sudah disajikan dalam perdebatan politik sebagai argumen penting yang condong untuk tidak

memberikan tanggungjawab fiskal provinsi. Hubungan antara kendala kapastian dan kelayakan desentralisasi tidaklah jelas. Isu kapasitas juga memunculkan kemungkinan mengadopsi pendekatan asimetris untuk desentralisasi. Tidak semua provinsi atau pemerintah daerah sama dalam kapasitas fiskal dan kapasitas kemanusiaannya. Perbedaan tersebut merekomendasikan bahwa desentralisasi fiskal tidak perlu diimplementasikan seragam di seluruh negara, dan melintasi semua tingkat pemerintah.

7. Arachi (2002)

Penelitian Arachi (2002) tentang "*Fiscal Decentralization and the Autonomy of the Local Government in Italy*", bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara tujuan peningkatan efisiensi melalui desentralisasi fiskal pada setiap daerah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa reformasi mendasar di Italia telah menghilangkan banyak inefisiensi dari sistem masa lalu tentang keuangan publik daerah. Banyak isu yang harus dikerjakan di masa mendatang, pertama prinsip keseragaman dalam standar kesehatan di seluruh penjuru negeri, dengan menghapuskan jenis pungutan keuangan apapun agar dapat memaksa tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Kedua, insentif-insentif untuk melakukan kebijakan-kebijakan pajak otonomus pada tingkat daerah bias dihindari dengan mekanisme baru redistribusi antar wilayah.

8. Penelitian Kanokpan Lao-Araya (2002)

Penelitian Kanokpan Lao-Araya (2002) dengan tema "*Effect of Decentralization Strategy on Macroeconomic Stability in Thailand*" mengidentifikasi dua kekurangan penting dalam program desentralisasi di Thailand dan mengusulkan dua kemungkinan pemecahan yang dapat

dilakukan oleh pemerintah Thailand. Masalah pertama adalah pendekatan *unbalanced* dalam desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah dijamin memperoleh pendapatan melalui transfer dari pemerintah pusat namun di sisi lain tidak menuntut tanggung jawab untuk mengendalikan pembelanjaan daerahnya. Hal ini mendorong otoritas pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan secara kurang bertanggungjawab, dan kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mencari pinjaman secara serampangan. Hal ini akhirnya dapat diprediksi akan mengakibatkan ketidakstabilan makroekonomi.

Masalah kedua, meskipun pemerintah daerah menikmati bagian pendapatan yang lebih besar dibanding pemerintah pusat namun pemerintah daerah tidak secara serta merta dapat diasumsikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang sebelumnya disediakan oleh pemerintah pusat. Sehingga walaupun dalam jangka menengah pemerintah meningkatkan alokasi pendapatannya kepada pemerintah daerah namun hal tersebut akan selalu kurang karena pemerintah daerah memiliki kebijakan pembelanjaan yang berbeda-beda.

9. Osung Kwon (2002)

Penelitian Kwon (2002) di Korea dengan tema "*The Effect of Fiscal Decentralization on Public Spending*". Penelitian Osung Kwon menyimpulkan bahwa, pelaksanaan desentralisasi fiskal yang kurang cermat, beresiko terjadinya *inefisiensi* dalam perekonomian negara tersebut. Implikasinya fiskal yang dilakukan yaitu: (1) ketidakseimbangan fiskal vertikal, ini merupakan ciri-ciri yang terdapat di negara yang menganut federasi, ini terjadi karena penyerahan kekuasaan pajak dan pengeluaran; (2)

pembagian kekuasaan yang dapat berakibat *over lap*; (3) harus ada mekanisme untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah setempat. Ketidakseimbangan fiskal berkaitan dengan ketidakterpaduan antara kapasitas sumber-sumber penerimaan dan kebutuhan pengeluaran dari pemerintahan. Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran sektor publik yang didesentralisasi mempunyai hubungan dengan peningkatan yang lebih sedikit (hubungan negatif) pada pengeluaran pusat.

10. Bambang Brodjonegoro (2002).

Penelitian Brodjonegoro dengan tema "*The impact of decentralization process to the Indonesia regional economies : a simultaneous economic approach*". Menggunakan model ekonometrika *two stage least squares model* hasil analisis menjelaskan bahwa dana transfer dari pemerintah yang meliputi dana alokasi umum, bagi hasil sumber daya alam dan PPh menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

11. Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro (2003).

Penelitian mereka mengestimasi dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah : analisa model makro ekonometrik simultan. Desentralisasi fiskal sebagai variabel eksogen menggunakan proksi dana transfer dari pemerintah pusat (PBB, BPHTB, PPh, BHSDA, DAU), pertumbuhan ekonomi di proksi dengan perubahan PDRB per kapita, kesenjangan antar wilayah diproksi dengan koefisien variasi PDRB per kapita antar daerah. Hasil analisis diperoleh bahwa, setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di Indonesia. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola

dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

12. Nurkholis dan Bambang PS Brodjonegoro (2003).

Penelitian mereka mengkaji tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah.. Dengan menggunakan model *Interregional Input-Output (IRIO)* menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap keterkaitan sektoral antar daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, kesenjangan antar daerah, serta efisiensi. Desentralisasi fiskal di proksi dengan transfer pusat ke daerah yaitu DAU, DAK, Bagi hasil pajak dan non pajak. Hasil kajian disimpulkan bahwa dengan skenario berbagai model yang ada desentralisasi fiskal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tingkat efisiensi akan menurun dan diikuti oleh kesenjangan antar daerah.

13. Penelitian Anastasia Astry (2004).

Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan model *multivariat regression*, dengan variabel independen adalah investasi swasta, pengeluaran pembangunan, output regional, dan variabel dependen adalah kesempatan kerja. Hasil analisis disimpulkan bahwa variabel investasi swasta, pengeluaran pembangunan, dan output regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja.

14. Hadi Sasana (2005).

Penelitian mengenai analisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggunakan *pooled least regression*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dana bagi hasil, pendapatan asli daerah (PAD), tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di semua kabupaten/kota. DAU berpengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di semua kabupaten/kota di DIY. Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar daerah di DIY justru mengalami peningkatan.

15. Studi Salvadore Barrios dan Eric Strobl (2006).

Barrios dan Eric Strobl meneliti tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dengan kesenjangan antar wilayah di negara-negara Uni Eropa. Studi menggunakan data produk domestik bruto yang diolah dengan metode ekonometrik untuk menjelaskan pola hubungan antara PDB (pertumbuhan ekonomi) dengan kesenjangan antar wilayah yang berbentuk U terbalik. Hasil studi Salvadore Barrios dan Eric Strobl memberikan bukti kuat bahwa untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memiliki pola kesenjangan wilayah yang berbentuk huruf U terbalik. Temuan ini sejalan dengan temuan Kuznets, temuan lain dari studi ini membuktikan bahwa variabel yang berkaitan dengan kebijakan penggabungan ekonomi negara-negara Uni Eropa antara lain struktur anggaran negara dan desentralisasi fiskal, serta mekanisme redistribusi jaminan sosial memberi dampak terhadap kesenjangan antar wilayah.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

DAN HIPOTESIS

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

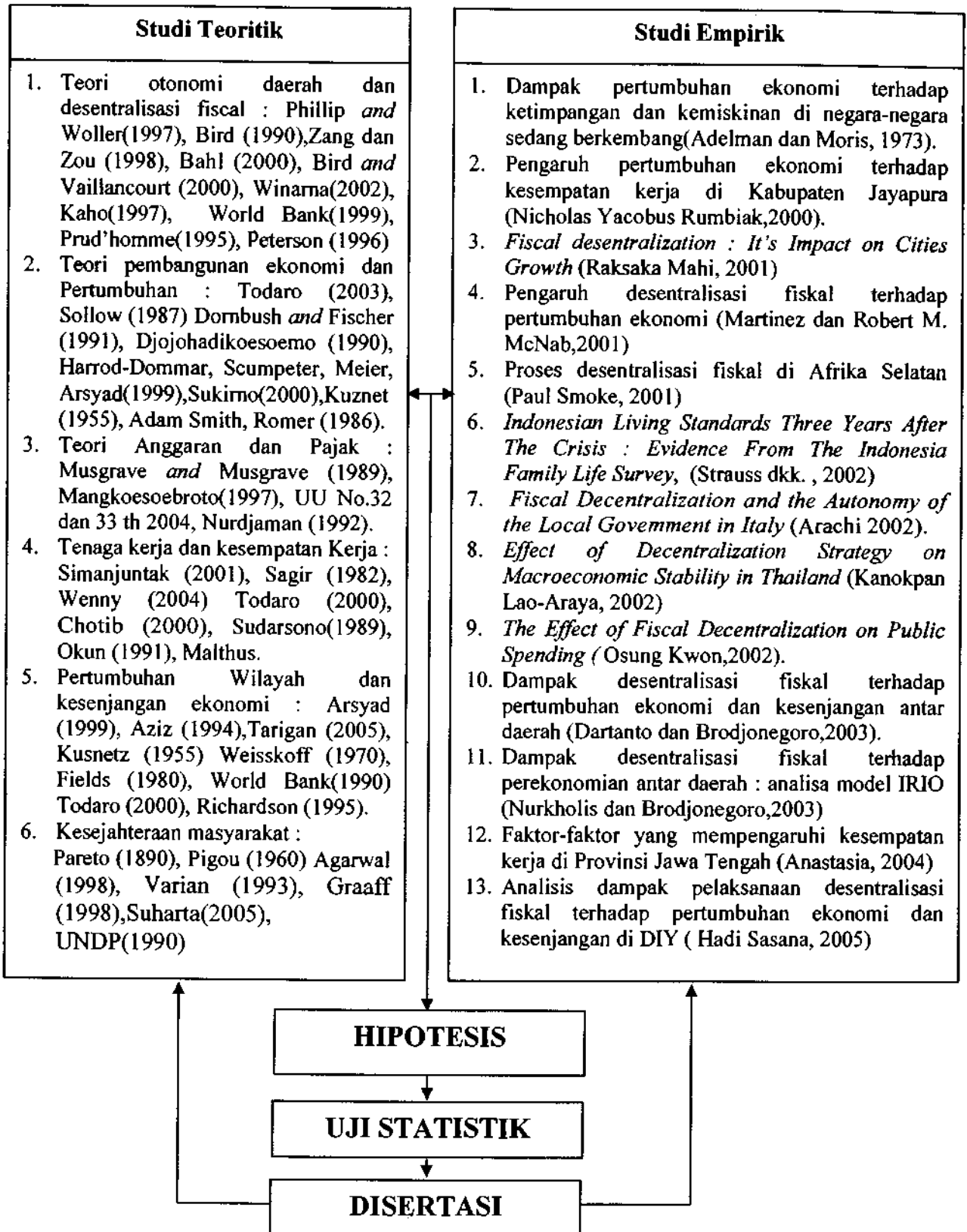
3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur pikir agar supaya lebih mudah untuk dimengerti tujuan yang ingin dicapai. Sebelum menyusun kerangka konseptual, studi ini menjelaskan terlebih dahulu kerangka proses berpikir. Kerangka proses berpikir dimaksudkan untuk memberikan tuntunan berpikir deduktif melalui teori dan konsep yang telah ada, serta memberikan tuntunan induktif untuk memperluas wawasan dalam melakukan analisis melalui studi empiris. Kerangka proses berpikir tertera dalam Gambar 3.1 halaman 110. Kerangka proses berpikir dalam studi ini dimulai dari studi teoritik, yaitu mengkaji teori-teori yang relevan dengan studi ini yaitu meliputi : teori mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan kesenjangan, serta teori kesejahteraan, sebagai pedoman dalam menyusun konsep disertasi dengan proses berpikir deduktif, karena teori mempunyai kajian yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus khusus. Menurut Chalmers (1983:6) melalui penalaran metode deduktif dimungkinkan menarik konsekuensi-konsekuensi yang bisa digunakan untuk memberikan penjelasan-penjelasan dan peramalan-peramalan.

Penyusunan naskah disertasi selain didasarkan pada kajian yang bersumber dari teori, juga dari kajian empirik yang bersumber dari hasil penelitian terdahulu. Studi empirik yang menjadi referensi dalam penulisan ini merupakan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan studi ini, yang telah dilakukan sebelumnya. Studi empirik

bersifat induktif, karena mengkaji sesuatu yang bersifat khusus untuk digeneralisasi guna memperoleh kesimpulan umum. Proses berpikir dalam menyusun disertasi tidak hanya didasarkan atas pemikiran deduktif atau induktif saja, tetapi juga kombinasi proses berpikir deduktif dan induktif karena keduanya saling berhubungan dan saling mendukung. Berdasarkan hasil sintesa dari proses berpikir deduktif dan induktif, maka dirumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. Guna membuktikan kebenaran hipotesis ini maka perlu dilakukan pengujian statistik yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dari hipotesis yang telah diuji dengan statistik ini, dapat dihasilkan temuan-temuan baik yang berhubungan dengan teori maupun kenyataan empirik. Hasil pengujian empirik menjadi dasar penyusunan naskah disertasi. Selanjutnya disertasi ini akan menambah khasanah perbendaharaan studi empirik yang nantinya diharapkan berkontribusi dalam pengembangan studi teoritik. Di samping itu, disertasi ini juga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal saat ini.

Setelah menyusun kerangka proses berpikir, disusun kerangka konseptual dalam studi ini pada Gambar 3.2. Kerangka konseptual disusun untuk menjelaskan variabel-variabel mana yang berkedudukan sebagai variabel eksogen, variabel intervening, dan variabel endogen. Dengan preposisi yang didasarkan pada studi teoritik dan empirik akan diketahui hipotesis dan bagaimana hubungan pengaruh antar variabel. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan langsung antar variabel dalam studi ini seperti digambarkan pada Gambar 3.2 halaman 114.



Gambar 3.1
KERANGKA PROSES BERPIKIR

Hubungan antara variabel menggunakan dasar teorik dan kajian empirik. Dasar teoritik dan empirik yang mendasari hubungan antar variabel, dijelaskan sebagai berikut :

Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena melalui desentralisasi fiskal pemerintah daerah akan lebih mudah dalam memobilisasi dan menggunakan sumber daya lokal guna meningkatkan *public service*. Pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi, sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi, dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dilandasi oleh teori otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Meliputi teori : Phillip and Woller(1997), Bird (1990), Zang dan Zou (1998), Bahl (2000), Bird and Vaillancourt (2000), Kaho(1997), Martinez and Macnab (2001), Peterson (1996). Beberapa studi empiris yang mendahului dan memperkuat studi ini antara lain: Raksaka Mahi (2001), Bambang Brodjonegoro (2002), Nurkholis dan Bambang Brodjonegoro (2003), Hadi Sasana (2005).

Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal ini terjadi karena melalui otonomi dan desentralisasi fiskal, daerah akan lebih mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat mengurangi tekanan kewilayahan akibat kesenjangan. Hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ekonomi dilandasi oleh teori-teori:

Barzelay (1991), World Bank (1999), Bird (1994), Prud'homme (1995), Kuznets (1955). Studi empiris yang mendasari hubungan variabel ini adalah oleh : Astuti dan Haryanto (2007), Lessmann (2006), Moreno *and* Trellers (2004), Lindahman *and* Thurmaier(2002).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal ini dapat terjadi karena melalui pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah secara sinergis, akibat pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal akan mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah dilandasi oleh teori-teori: Kuznetz (1955), World Bank (1990) dan Todaro (2003). Studi empiris yang memperkuat variabel ini dilakukan oleh : Fields (1990), World Bank (1996), Arief (1992), Sumarto (2002), Bathacharya *and* Sakthivel (2004), Barrios *and* Strobl (2006).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi mampu membawa pengaruh bagi kesempatan kerja dan kemampuan produktivitas tenaga kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja juga dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kerja yang semakin tinggi, berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Teori-teori yang melandasi hubungan antar variabel ini antara lain: Todaro (2003), Dornbusch (1991). Studi empiris yang memperkuat variabel ini adalah oleh : Rumbiak (2000), Anastasia (2004), Kemu dan Nurhidayat (2005), Mutasya (2005).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada

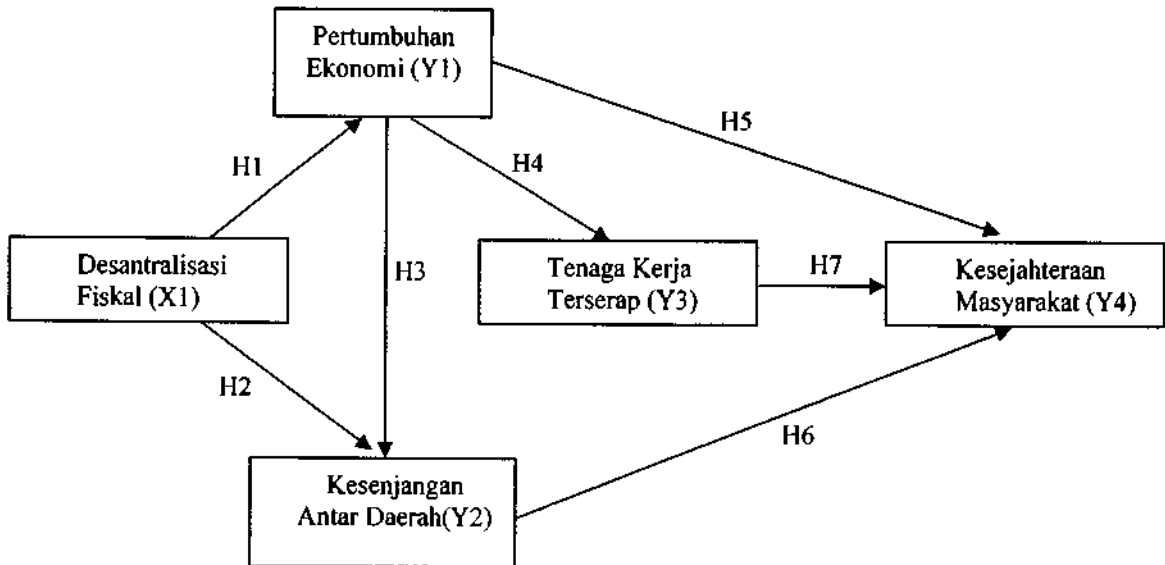
terpenuhinya kebutuhan dasar seperti : sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga kesejahteraan akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas, sehingga distribusi pendapatan makin membaik serta kesejahteraan makin meningkat. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan dilandasi oleh teori-teori: Papanek *and* Oldrich (1986), Todaro (2003), World Bank (1990). Studi empiris yang memperkuat variabel ini adalah oleh : Suharto (2005), Strauss *et al.* (2005), Ramirez *et al.*(1998), Brata (2004), Tadjoeddin dkk.(2001).

Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini dapat terjadi karena kesempatan kerja yang luas akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi membawa pengaruh pada kemampuan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan dilandasi oleh teori-teori: Adam Smith, Papanek *and* Oldrich (1986), Sutrisno (1995). Studi empiris yang memperkuat variabel ini adalah oleh : Martinawati (2007), Lee (1993), Weisskoff (1970), Fishlow (1972).

Kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini dapat terjadi karena kesenjangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan. Kesenjangan antar daerah adalah suatu kondisi di mana perkembangan pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang mempunyai harapan lebih tinggi, sedangkan wilayah lainnya relatif tertinggal, apabila kondisi ini terjadi maka tidak akan mendukung pencapaian kesejahteraan yang maksimum. Hubungan antara kesenjangan ekonomi terhadap kesejahteraan dilandasi oleh teori-

teori: Todaro (2003), Whithaker dan Federico (1997), dan sebagainya. Studi empiris yang memperkuat variabel ini adalah oleh : World Bank (1993), Maruyama (1997).

Berdasarkan studi teoritik dan empirik sebelumnya, kerangka konseptual dalam studi ini digambarkan dalam suatu kerangka sebagai berikut:



Gambar 3.2
KERANGKA KONSEPTUAL

Keterangan :

- = *Observed variable*
 ————— = *Direct effect (Hipotesis)*

3.2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
6. Kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
7. Tenaga kerja terserap berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

BAB 4

METODE PENELITIAN

BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Menurut Zainudin (2000:26), rancangan penelitian dapat diartikan rencana tentang bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberi arti terhadap data tersebut secara efisien dan efektif. Rancangan penelitian meliputi tahapan penentuan alat (*instrument*), pengambilan data yang digunakan, cara pengumpulan, pengaturan dan analisis data yang akan digunakan serta pemberian kesempatan atas hasil analisis yang dilakukan.

Penelitian ini berbasis pada penelitian *eksplanatory*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat kesejahteraan.

Ditinjau dari tujuan penelitian serta waktu yang tersedia, maupun obyek yang menjadi fokus penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan terhadap obyek, dokumen-dokumen, maupun nara sumber penelitian yang diamati dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Melakukan sensus untuk mendapatkan data wilayah maupun data penelitian terkait di semua kabupaten/kota di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengumpulkan semua data sekunder yang telah diverifikasi kebenarannya.

3. Menganalisis data sekunder dan menarik simpulan, baik dalam bentuk data *time series* maupun *cross section* yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dan pembuktian hipotesis penelitian.

4.2 Populasi dan Pengumpulan Data

4.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Cooper dan Emory (1996:214), keunggulan ekonomis pengambilan sampel dibandingkan dengan sensus sangat besar, terutama pertimbangan biaya dan waktu. Keunggulan pengambilan sampel dibandingkan dengan sensus berkurang apabila sampelnya kecil, sedangkan variabilitasnya tinggi. Dua kondisi yang sesuai dengan studi sensus adalah :

- a. Apabila populasinya kecil
- b. Masing-masing elemen populasi agak berbeda satu sama lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga. Populasi dalam penelitian ini adalah : seluruh daerah kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai alasan mengapa penelitian ini menggunakan populasi adalah :

1. Adanya perbedaan atau heterogenitas kondisi ekonomi di masing-masing daerah
2. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah serta tenaga kerja terserap dan kesejahteraan di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Jenis sumber datanya adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten maupun kota yang dipublikasikan.
4. Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data berbentuk *time series* dari tahun 2001 sampai dengan 2005, dan data *cross section* yang terdiri atas 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan *pooled the data* yaitu gabungan antara data *time series* (tahun 2001 sampai dengan 2005: 5 tahun) dengan data *cross section* 35 kabupaten/kota. Dengan jumlah obyek dan data tersebut, kasus analisisnya memenuhi persyaratan dari model yang digunakan.

4.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui perpustakaan yang berupa referensi statistik, terbitan berkala, buku, dokumen, koleksi khusus.
2. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui media elektronik dan jaringan internet.

4.3 Klasifikasi dan Definisi Operasional Variabel

4.3.1 Klasifikasi Variabel

Menurut Zainudin (2000:23) variabel adalah operasionalisasi dari suatu konsep. Dengan demikian variabel adalah konsep yang telah dioperasionalkan,

yaitu yang dapat diamati dan dapat diukur sehingga dapat terlihat adanya variasi. Klasifikasi atau penentuan fungsi dari suatu variabel merupakan hal yang sangat penting. Jika peneliti salah mengklasifikasikan variabel, maka hasil penelitian akan mengandung kesalahan (bias). Klasifikasi secara benar memerlukan penguasaan dasar teoritis yang kuat dan mendalam serta memerlukan penyusunan model atau kerangka teoritis yang kuat. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar wilayah, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan, meliputi :

1. Variabel desentralisasi fiskal (X_1) disebut variabel eksogen atau independen, yaitu variabel yang keragamannya tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab di dalam sistem dan tidak dapat ditetapkan hubungan kausalnya. Variabel eksogen merupakan variabel pemula yang memberi pengaruh kepada variabel lainnya.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1), merupakan variabel endogen yang keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogen dan variabel endogen lainnya dalam suatu model. Variabel pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto di setiap kabupaten/kota.
3. Variabel kesenjangan ekonomi antar daerah (Y_2), merupakan variabel endogen yang keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogen dan variabel endogen lainnya dalam model. Variabel kesenjangan ekonomi antar daerah diukur dengan nilai indeks Williamson di masing-masing kabupaten/kota.
4. Variabel tenaga kerja terserap (Y_3) merupakan variabel endogen yang keragamannya dijelaskan oleh variabel eksogen dan variabel endogen lainnya dalam suatu model. Variabel tenaga kerja terserap diukur dengan jumlah

penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja dalam seluruh lapangan usaha di masing-masing kabupaten/kota.

5. Kesejahteraan masyarakat (Y4) merupakan variabel endogen dan sebagai variabel dependen/variabel tergantung. Variabel kesejahteraan diproksi dengan nilai indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

4.3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan atas sifat-sifat/kriteria-kriteria, hal yang didefinisikan dapat diamati (diobservasi) dan diuji secara khusus. Istilah-istilah harus mempunyai rujukan-rujukan empiris, rincian-rincian dan prosedur-prosedurnya harus demikian jelas sehingga setiap orang yang kompeten yang akan memakainya akan mengklasifikasikan obyeknya dengan cara yang sama (Cooper dan Emory, 1996:37). Definisi operasional atas variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi Fiskal (X1)

Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal. Salah satu alasan penggunaan variabel desentralisasi fiskal ini mengacu pada studi Zang dan Zou (1998), studi empiris Mahi (2000) Tim LPEM-UI (Halim, 2001:28), dan studi empiris Mursinto (2004:170).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah, dalam satuan rupiah.

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan pada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak dan tidak bergerak, dalam satuan rupiah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu, dalam satuan rupiah.

Bagian laba usaha daerah, adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang terdiri dari laba bersih bank pembangunan daerah, perusahaan daerah air minum, bagian laba bersih perusahaan daerah lainnya dan penyertaan modal daerah kepada perusahaan, dalam satuan rupiah.

Lain-lain penerimaan daerah yang sah meliputi hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan roda dua dan roda empat serta cicilan rumah oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro dan lain-lain, dalam satuan rupiah.

Bagi hasil pajak merupakan bagian penerimaan daerah yang bersumber bersumber dari : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21, dalam satuan rupiah.

Dana bagi hasil bukan pajak merupakan bagian penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dalam satuan rupiah.

Pengeluaran total adalah realisasi total pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2001 sampai dengan 2005. Pengeluaran total daerah meliputi realisasi total pengeluaran daerah, dalam satuan rupiah.

2. Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga berlaku, yang dinyatakan dalam satuan persen. Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi per tahun} = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan, $PDRB_t$ adalah PDRB tahun ke-t

$PDRB_{(t-1)}$ adalah PDRB tahun ke (t-1)

Penggunaan data pertumbuhan ekonomi dalam harga berlaku dengan alasan bahwa data dalam desentralisasi fiskal yang meliputi : pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun realisasi total pengeluaran pemerintah daerah adalah dalam harga berlaku (Mursinto,2004).

3. Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah (Y2)

Kesenjangan ekonomi antar daerah merupakan kesenjangan ekonomi antar wilayah (kabupaten/kota) di Jawa Tengah, yang diproksi dengan nilai Indeks Williamson masing-masing kabupaten/kota dalam satuan desimal.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 (f_i / n)}}{Y}$$

Di mana : IW adalah Indeks Williamson
 Y_i adalah PDRB per kapita Kabupaten/kota i
 Y adalah PDRB per kapita Provinsi
 f_i adalah penduduk Kabupaten/Kota i
 n adalah penduduk Provinsi



4. Tenaga Kerja Terserap (Y3)

Tenaga kerja terserap merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian tahun 2001 sampai dengan 2005, dalam satuan orang.

5. Kesejahteraan Masyarakat (Y4)

Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Tengah selama periode tahun 2001 sampai dengan 2005, dalam satuan desimal. Kesejahteraan masyarakat diukur dari aspek pendapatan perkapita, pendidikan, dan kesehatan.

Pendapatan perkapita merupakan proporsi dari PDRB dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa, dengan menggunakan satuan ukuran rupiah.

Pendidikan diukur dengan angka melek huruf, yaitu rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota yang berumur 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis, dengan satuan ukuran persentase.

Kesehatan (angka harapan hidup), yaitu rata-rata perkiraan lama hidup yang dapat dicapai oleh penduduk di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang lahir pada tahun yang sama, dengan satuan tahun.

Penggunaan ketiga indikator tersebut mengacu pada konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*, yang diperkenalkan oleh UNDP. HDI dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$HDI = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

Dimana : $X_{(1)}$ adalah indeks harapan hidup

$X_{(2)}$ adalah indeks pendidikan

$X_{(3)}$ adalah indeks standar hidup layak

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menerapkan pola penelitian *eksplanatory*, data yang dipergunakan meliputi data *time series* dan *cross section*. Jenis data berbentuk data sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dinas-dinas lainnya yang terkait dalam beberapa penerbitan.

4.5 Data dan Prosedur Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder. Menurut Cooper dan Emory (1996: 257) data sekunder dapat digunakan untuk tiga tujuan penelitian. Pertama, mengisi kebutuhan akan rujukan pada beberapa hal. Kedua, data sekunder merupakan sebuah bagian terpadu dari sebuah studi penelitian yang besar. Akhirnya data sekunder dapat digunakan sebagai dasar satu-satunya bagi sebuah studi penelitian. Mengingat seluruh data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur pengambilan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data sekunder dikumpulkan dari instansi yang terkait antara lain kantor BPS, kantor Bappeda, dan dinas lainnya yang terkait. Data tersebut diperoleh dari berbagai laporan/buku yang dipublikasikan oleh instansi terkait.

2. Verifikasi data

Data sekunder yang tersedia dikumpulkan, diteliti, dan didiskusikan dengan para pihak yang berkompeten serta pengolah data agar supaya data tersebut valid.

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini menggunakan data sekunder selama rentang waktu 5 (lima) tahun (2001-2005), di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (terdiri dari 29 daerah kabupaten, dan 6 daerah kota) dengan lokasi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Kabupaten Cilacap | 19. Kabupaten Kudus |
| 2. Kabupaten Banyumas | 20. Kabupaten Jepara |
| 3. Kabupaten Purbalingga | 21. Kabupaten Demak |
| 4. Kabupaten Banjarnegara | 22. Kabupaten Semarang |
| 5. Kabupaten Kebumen | 23. Kabupaten Temanggung |
| 6. Kabupaten Purworejo | 24. Kabupaten Kendal |
| 7. Kabupaten Wonosobo | 25. Kabupaten Batang |
| 8. Kabupaten Magelang | 26. Kabupaten Pekalongan |
| 9. Kabupaten Boyolali | 27. Kabupaten Pemalang |
| 10. Kabupaten Klaten | 28. Kabupaten Tegal |
| 11. Kabupaten Sukoharjo | 29. Kabupaten Brebes |
| 12. Kabupaten Wonogiri | 30. Kota Magelang |
| 13. Kabupaten Karanganyar | 31. Kota Surakarta |
| 14. Kabupaten Sragen | 32. Kota Salatiga |
| 15. Kabupaten Grobogan | 33. Kota Semarang |
| 16. Kabupaten Blora | 34. Kota Pekalongan |
| 17. Kabupaten Rembang | 35. Kota Tegal |
| 18. Kabupaten Pati | |

Untuk keperluan analisis digunakan data *cross section* di 35 kabupaten/kota dan *time series* dengan rentang waktu antara tahun 2001 sampai dengan 2005.

4.7 Cara Pengolahan dan analisis Data

4.7.1 Cara Pengolahan Data

Cara pengolahan data dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi data, untuk mendapatkan data yang akurat.
2. Membuat tabulasi secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan analisis.
3. Melakukan pengolahan data dalam *software* tertentu (SPSS), dengan alat *path analysis* (analisis jalur).
4. Melakukan analisis olahan data untuk membuktikan hipotesis penelitian.

4.7.2 Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur (*path analysis*), yang dikembangkan sebagai model untuk mempelajari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan di dalam model dan merupakan metode yang baik untuk menerangkan apabila terdapat seperangkat data yang besar untuk dianalisis dan mencari kausal. Analisis jalur digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah di rumuskan peneliti atas dasar pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu (Wibowo, 2005:1).

Bentuk hubungan sebab akibat yang muncul dalam studi ini menggunakan model yang tidak sederhana, yaitu adanya variabel yang berperan ganda sebagai variabel independen pada suatu hubungan, tetapi menjadi variabel dependen pada hubungan yang lain. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang

mampu menjelaskan secara simultan, untuk itu digunakan analisis jalur (*path analysis*). Alasan penggunaan analisis jalur adalah :

1. Hipotesis yang akan diuji dikembangkan dari model (kerangka konseptual) yang semua hubungannya bersifat asimetri dan merupakan sistem, sehingga metode yang paling tepat adalah dengan analisis jalur (*path analysis*).
2. Analisis jalur (*path analysis*) memberikan metode langsung berkaitan dengan hubungan ganda secara simultan (model struktural), sehingga memberikan efisiensi analisis statistik.
3. Kemampuannya untuk menguji hubungan secara komprehensif dan memberikan suatu bentuk transisi analisis *eksplanatory* menuju analisis *confirmatory*. Bentuk transisi ini berkaitan dengan upaya yang lebih besar dalam semua lapangan penelitian untuk mengembangkan suatu pandangan masalah secara lebih sistematis dan holistik. Upaya seperti itu memerlukan kemampuan untuk menguji suatu hubungan yang berantai yang membentuk model yang besar, seperangkat prinsip dasar, atau suatu teori keseluruhan, hal seperti ini sangat cocok diselesaikan dengan analisis jalur.
4. Data semua variabel yang digunakan dalam studi ini adalah terukur (*observed*)
5. Proses perhitungan koefisien dalam analisis jalur didekati melalui analisis regresi dengan variabel yang dibakukan (*standardise regression*). Komputasi dilakukan dengan *software SPSS for window*.

4.7.3 Langkah-Langkah Pada Analisis Jalur.

Analisis jalur merupakan suatu model alat analisis yang penting untuk menguji suatu teori kausal. Melalui analisis ini peneliti dapat menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel yang satu dengan lainnya. Langkah-langkah pada analisis jalur adalah sebagai berikut (Wibowo, 2005: 8) :

Pertama. Dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori. Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan ini ada yang menamakan sistem persamaan simultan, atau juga ada yang menyebut model struktural. Mengingat model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan penelitian dan berbasis teori dan konsep, maka dinamakan model hipotetik atau model konfirmatori.

Kedua. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi, yaitu hubungan antar variabel adalah linier dan aditif. Model yang digunakan adalah rekursif, yaitu sistem aliran kausal satu arah. Model rekursif apabila memenuhi asumsi-asumsi, yaitu antar variabel eksogen saling bebas. Pengaruh kausalitas dari variabel endogen adalah searah dan tidak ada variabel endogen yang mempunyai pengaruh resiprok (bolak-balik).

Ketiga. Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien *path*. Perhitungan koefisien jalur bisa dibantu dengan komputer dan perangkat lunak statistik. Perhitungan koefisien tersebut merupakan koefisien *path* (pengaruh langsung). Di dalam analisis jalur, ada pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung serta pengaruh total.

Keempat. Pemeriksaan validitas model, dengan cara melihat asumsi-asumsi untuk analisis jalur harus sudah terpenuhi. Di samping itu ada indikator validitas model yaitu koefisien determinasi total (R^2_m) yang interpretasinya sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi. Untuk menghitung (R^2_m) berdasarkan $u = \sqrt{1-r^2}$. Uji validasi lain adalah uji validasi koefisien jalur (β), sama dengan pada uji regresi yaitu melihat tingkat signifikansi dari uji t , (dalam studi ini pada level 0,05).

Kelima. Melakukan interpretasi model, cara melakukan interpretasi model adalah menginterpretasikan hasil atau nilai parameter yang ada pada analisis *path* tersebut. Misalnya model yang ada tersebut sudah fit atau belum. Kemudian koefisien *path* mana yang signifikan atau tidak signifikan. Koefisien yang tidak signifikan nilainya dianggap tidak ada, sedangkan nilai parameter yang signifikan bisa dilihat berapa yang mempunyai pengaruh langsung dan seberapa besar yang berpengaruh tidak langsung. Dari nilai koefisien bisa dilihat variabel mana yang mempunyai pengaruh dominan, mana yang tidak.

Hasil analisis bisa disajikan dalam bentuk diagram *path* atau dalam bentuk persamaan model strukturalnya. Model persamaan sebagai berikut :

$$Y1 = \beta X1 + \mu1 \dots\dots\dots 4.1$$

$$Y2 = \delta1 X1 + \delta2 Y1 + \mu2 \dots\dots\dots 4.2$$

$$Y3 = \gamma1 Y1 + \mu3 \dots\dots\dots 4.3$$

$$Y4 = \varphi1 Y1 + \varphi2 Y2 + \varphi3 Y3 + \mu4 \dots\dots\dots 4.4$$

- Di mana :
- X1 adalah desentralisasi fiskal
 - Y1 adalah pertumbuhan ekonomi
 - Y2 adalah kesenjangan antar daerah
 - Y3 adalah tenaga kerja terserap
 - Y4 adalah kesejahteraan
 - μ adalah *disturbance term*
 - $\beta, \delta, \gamma, \varphi$ adalah koefisien jalur

BAB 5

ANALISIS HASIL

PENELITIAN

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Provinsi Jawa Tengah terletak di antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lautan Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, serta sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah mencakup areal seluas $32.548,20 \text{ km}^2$ atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Tata guna lahan Provinsi Jawa Tengah meliputi areal hutan seluas 5.565 km^2 (17,1 persen), areal yang ditumbuhi kayu-kayuan seluas 455 km^2 (1,4 persen), padang rumput seluas 97 km^2 (0,3 persen), pemukiman/perumahan seluas 5.403 km^2 (16,6 persen), tegalan seluas 7.388 km^2 (22,7 persen), sawah seluas 9.602 km^2 (29,5 persen), areal perkebunan negara seluas 781 km^2 (2,4 persen), tambak seluas 293 km^2 (0,9 persen), kolam ikan/tambak/empang seluas 33 km^2 (0,1 persen), lahan kering seluas 33 km^2 (0,1 persen), dan areal budidaya lainnya seluas 2.898 km^2 (8,9 persen) dari seluruh luas wilayah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan topografi yang beragam, yakni berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan daerah pantai. Sekitar 53,30 persen wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Wilayah daratan yang mempunyai ketinggian antara 100 – 500 di atas permukaan laut meliputi sekitar 4,60 persen. Provinsi Jawa Tengah memiliki perairan umum berupa

sungai, danau, dan waduk. Iklim di Jawa Tengah termasuk kering dan basah dengan curah hujan beragam, baik daerah kering maupun basah berkisar antara 800 hingga 8.890 milimeter setiap tahunnya. Suhu udara beragam antara 18,7^o celcius hingga 30,2^o celcius tiap tahun. Secara administratif di Provinsi Jawa Tengah terdapat 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.

5.1.1 Kependudukan

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor penentu, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaku tetapi juga sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan daerah tidak hanya meningkatkan taraf hidup dan kepentingan ekonomi lainnya saja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dalam segala bidang. Berhasil dan tidaknya pembangunan daerah di bidang kependudukan sangat tergantung pada berhasil tidaknya pemerintah daerah mengendalikan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia tersebut. Bagaimanapun juga yang menentukan tercapai tidaknya tujuan pembangunan adalah sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya kuantitas tetapi juga harus mempunyai kualitas yang tinggi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 32,40 juta jiwa atau sekitar 15 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Jawa Tengah lebih besar dibandingkan jumlah penduduk

laki-laki, hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2006:54), data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN SERTA LUAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Kab. Cilacap	1.674.210	2.138,51	782,89
2	Kab. Banyumas	1.531.737	1.327,59	1.153,77
3	Kab. Purbalingga	863.478	777,65	1.110,37
4	Kab. Banjarnegara	903.919	1.069,74	844,99
5	Kab. Kebumen	1.208.486	1.282,74	942,11
6	Kab. Purworejo	712.003	1.034,82	688,05
7	Kab. Wonosobo	779.919	984,68	792,05
8	Kab. Magelang	1.169.638	1.085,73	1.077,28
9	Kab. Boyolali	941.624	1.015,07	927,64
10	Kab. Klaten	1.139.218	655,56	1.737,78
11	Kab. Sukoharjo	838.149	466,66	1.796,06
12	Kab. Wonogiri	1.010.456	1.822,37	554,47
13	Kab. Karanganyar	834.265	772,20	1.080,37
14	Kab. Sragen	868.036	946,49	917,11
15	Kab. Grobogan	1.334.380	1.975,85	675,34
16	Kab. Blora	840.729	1.794,40	468,53
17	Kab. Rembang	588.320	1.014,10	580,14
18	Kab. Pati	1.213.664	1.491,20	813,88
19	Kab. Kudus	759.267	425,17	1.785,80
20	Kab. Jepara	1.077.586	1.004,16	1.073,12
21	Kab. Demak	1.071.487	897,43	1.193,95
22	Kab. Semarang	894.018	946,86	944,19
23	Kab. Temanggung	717.486	870,23	824,48
24	Kab. Kendal	897.560	1.002,27	895,53
25	Kab. Batang	712.542	788,95	903,15
26	Kab. Pekalongan	858.650	836,13	1.026,93
27	Kab. Pemalang	1.371.943	1.011,90	1.355,81
28	Kab. Tegal	1.471.043	879,70	1.672,21
29	Kab. Brebes	1.814.274	1.657,73	1.094,43
30	Kota Magelang	130.732	18,12	7.214,79
31	Kota Surakarta	534.540	44,03	12.140,26
32	Kota Salatiga	175.967	52,96	3.322,64
33	Kota Semarang	1.435.800	373,67	3.842,43
34	Kota Pekalongan	284.112	44,96	6.319,22
35	Kota Tegal	249.612	34,49	7.237,23

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2006.

Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Umumnya, penduduk banyak menumpuk di daerah kota

dibandingkan dengan di kabupaten. Jumlah penduduk menurut kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2005 terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Brebes dengan jumlah sebanyak 1.814.274 orang. Kota Magelang mempunyai jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 130.732 orang. Kepadatan penduduk merupakan suatu rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Seiring bertambahnya penduduk, kepadatan penduduk juga meningkat pula. Kota Surakarta merupakan wilayah yang terpadat penduduknya di Jawa Tengah, dengan kepadatan penduduk 12.140,26 orang per km².

5.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Kenaikan PDRB mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tinggi, sebaliknya jika kenaikan PDRB rendah atau negatif mencerminkan bahwa daerah tersebut mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan merosot. Gambaran PDRB Jawa Tengah selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.2 halaman 134. Berdasarkan data Tabel 5.2, pada tahun 2005 PDRB Jawa Tengah sebesar Rp 143.051.214 juta, sektor yang paling besar menyumbang terhadap pembentukan PDRB adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp 46.105.706 juta (32,23 persen). Sektor yang paling kecil kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu menyumbang sebesar Rp 1.179.891 juta (0,82 persen). Pada periode 2002-2005 kinerja perekonomian Jawa Tengah mengalami laju pertumbuhan yang cukup berarti dan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 tercatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,35 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya 5,13 persen (2004).

Proporsi sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB total menunjukkan struktur ekonomi suatu wilayah. Apabila dilihat dari sumbangan per sektor ekonomi di Jawa Tengah terhadap PDRB total, tampak bahwa sektor industri pengolahan selalu memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Jawa Tengah periode tahun 2002 sampai dengan 2005 dengan rata-rata sebesar 32,12 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,38 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,18 persen. Adapun sektor yang paling kecil sumbangannya terhadap PDRB total adalah sektor listrik, gas, dan air bersih rata-rata sebesar 0,79 persen.

Tabel 5.2
PDRB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Juta Rupiah)

Sektor	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
1. Pertanian	27.725.086	22,53	27.157.596	21,03	28.606.237	21,07	29.924.642	20,92
2. Pertamb. & Galian	1.227.652	1,00	1.295.356	1,00	1.330.759	0,98	1.454.230	1,02
3. Industri Peng.	39.193.653	31,85	41.347.172	32,01	43.995.611	32,40	46.105.706	32,23
4. Listrik, Gas, Air	975.869	0,79	980.307	0,76	1.065.115	0,78	1.179.891	0,82
5. Bangunan	6.116.818	4,97	6.907.251	5,35	7.448.715	5,49	7.960.948	5,57
6. Perdg.Hotel & Res	26.289.743	21,37	27.666.472	21,42	28.394.473	20,91	30.056.962	21,01
7. Pengkt.dan Komk.	5.872.916	4,77	6.219.923	4,82	6.510.447	4,79	6.988.425	4,89
8. Keuangan,Persew.	4.524.128	3,68	4.650.862	3,60	4.775.114	3,52	5.067.665	3,54
9. Jasa-jasa	11.112.678	9,03	12.941.525	10,02	13.663.399	10,06	14.312.739	10,01
Total PDRB	123.038.541	100	129.166.463	100	135.789.872	100	143.051.214	100
Pertumbuhan	3,55		4,98		5,13		5,35	

Sumber: BPS, PDRB Jawa Tengah, 2006

Selama lima tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Jawa Tengah, secara umum kondisi ekonomi di kabupaten/kota menunjukkan hasil yang relatif baik. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, nilai PDRB baik secara riil maupun harga berlaku cenderung mengalami perkembangan positif di semua daerah. PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan ekonomi suatu daerah, hal ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 5.3
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005

Kabupaten/ Kota	PDRB Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)				
	2001	2002	2003	2004	2005
Kab. Cilacap	16.483.552,41	17.963.441,66	19.141.986,12	20.458.739,20	21.729.328,83
Kab. Banyumas	2.689.576,57	2.777.618,98	2.910.478,40	3.027.430,24	3.598.399,16
Kab. Purbalingga	1.485.366,85	1.533.382,46	1.601.791,87	1.665.738,78	1.921.653,92
Kab. Banjarnegara	2.047.937,66	2.067.306,33	2.128.162,84	2.209.396,76	2.321.117,64
Kab. Kebumen	1.961.243,93	2.024.773,91	2.099.743,13	2.141.060,04	2.360.449,90
Kab. Purworejo	1.955.370,81	2.022.743,18	2.125.411,34	2.214.137,30	2.321.543,04
Kab. Wonosobo	1.374.944,18	1.402.298,93	1.434.155,24	1.466.975,04	1.570.347,69
Kab. Magelang	2.732.031,39	2.857.339,03	2.992.408,18	3.120.318,77	3.245.978,82
Kab. Boyolali	2.984.958,46	3.062.387,87	3.211.153,33	3.276.631,03	3.456.062,13
Kab. Klaten	3.267.192,67	3.394.958,24	3.561.706,27	3.737.993,75	4.160.938,70
Kab. Sukoharjo	2.934.260,08	3.024.685,37	3.149.995,63	3.285.604,57	3.941.788,46
Kab. Wonogiri	2.214.250,68	2.294.457,71	2.333.137,65	2.410.433,62	2.426.197,98
Kab. Karanganyar	3.190.291,22	3.333.969,22	3.522.989,78	3.762.025,48	4.188.330,48
Kab. Sragen	1.988.134,03	2.035.584,82	2.109.239,17	2.206.330,95	2.322.239,43
Kab. Grobogan	1.960.212,12	2.024.043,72	2.115.140,05	2.190.405,94	2.579.283,26
Kab. Blora	1.666.103,53	1.706.776,14	1.789.417,51	1.869.108,39	1.731.375,93
Kab. Rembang	1.398.058,00	1.479.081,95	1.525.177,35	1.584.428,68	1.633.176,71
Kab. Pati	3.051.143,43	3.136.064,75	3.202.772,29	3.334.916,06	3.786.140,34
Kab. Kudus	7.854.876,91	8.048.850,61	8.184.393,30	8.449.294,34	10.630.188,11
Kab. Jepara	2.877.653,63	2.990.539,39	3.105.547,29	3.222.872,00	3.411.159,47
Kab. Demak	2.358.227,95	2.421.373,11	2.490.413,75	2.575.194,94	2.470.777,08
Kab. Semarang	3.406.953,16	3.773.972,68	3.662.184,24	3.703.506,75	4.484.189,54
Kab. Temanggung	1.837.339,92	1.899.507,75	1.985.295,00	2.058.605,42	1.994.172,89
Kab. Kendal	3.757.954,62	3.879.300,82	3.992.277,82	4.104.226,89	4.279.793,99
Kab. Batang	1.782.266,80	1.817.972,39	1.856.898,95	1.894.108,21	1.972.776,84
Kab. Pekalongan	2.255.088,63	2.320.647,12	2.406.190,61	2.504.933,38	2.587.305,96
Kab. Pemasang	2.502.608,92	2.587.214,92	2.685.676,75	2.791.400,38	2.770.157,15
Kab. Tegal	2.289.461,27	2.408.300,04	2.542.121,31	2.677.089,69	2.808.153,13
Kab. Brebes	3.567.515,85	3.751.724,73	3.930.501,13	4.119.445,92	4.318.218,90
Kota Magelang	759.504,24	782.362,45	811.631,50	835.952,98	890.399,02
Kota Surakarta	3.113.668,99	3.268.559,54	3.468.276,94	3.669.373,45	3.858.169,65
Kota Salatiga	653.798,40	679.183,51	714.424,41	736.766,67	766.841,48
Kota Semarang	14.456.106,17	15.243.442,78	15.991.486,00	16.690.914,35	16.361.861,94
Kota Pekalongan	1.381.287,59	1.425.719,21	1.479.611,35	1.550.653,50	1.701.324,24
Kota Tegal	746.859,56	784.891,57	825.671,69	877.286,65	1.002.821,99

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, Tahun 2006

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah pertumbuhan terjadi atau tidak (Arsyad, 1999:45). Tabel 5.3 menyajikan data PDRB atas dasar harga konstan 2000 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2001 sampai dengan 2005.

Dari Tabel 5.3 terlihat bahwa PDRB riil terbesar dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh Kabupaten Cilacap (pada

tahun 2001 sebesar Rp 16.483.552,41 juta, dan pada tahun 2005 sebesar Rp 21.729.328,83 juta). Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap mendapatkan tambahan PDRB dari minyak. Nilai PDRB terkecil ditunjukkan oleh Kota Salatiga yaitu berturut-turut dari tahun 2001 (Rp 653.798,40 juta), sampai dengan tahun 2005 (Rp 766.841,48 juta). Rendahnya nilai PDRB Kabupaten Salatiga disebabkan antara lain karena relatif kecilnya sumbangan yang diberikan oleh sektor-sektor yang dapat meningkatkan PDRB.

Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.4 halaman 137), nilai yang paling besar adalah ditunjukkan oleh Kota Semarang (pada tahun 2001 sebesar Rp 15.047.094,05 juta, dan pada tahun 2005 sebesar Rp 23.508.719,58 juta). Hal ini dikarenakan besarnya nilai sumbangan sektor sekunder terhadap PDRB, terutama industri manufaktur, sedangkan nilai terkecil ditunjukkan oleh Kota Salatiga yaitu berturut-turut dari tahun 2001 (Rp 725.495,99 juta), sampai dengan tahun 2005 (Rp 1.256.435,38 juta). Rendahnya nilai PDRB Kabupaten Salatiga disebabkan antara lain karena relatif kecilnya sumbangan yang diberikan oleh sektor-sektor yang dapat meningkatkan PDRB.

Seiring dengan peningkatan PDRB di kabupaten/kota pendapatan per kapita di masing-masing daerah juga mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita adalah jumlah total pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (Sukirno,2000:417). Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Dengan kata lain, pendapatan per kapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan negara/daerah

juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di berbagai negara/daerah (Arsyad, 1999 :23).

Tabel 5.4
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005

No	Kabupaten/ Kota	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	11.546.061,08	14.457.979,09	16.502.860,40	18.300.783,13	27.265.957,78
2	Kab. Banyumas	3.412.740,32	3.917.711,45	4.365.914,67	4.835.240,50	5.580.804,33
3	Kab. Purbalingga	1.845.655,22	2.052.111,18	2.297.491,46	2.564.077,55	2.912.447,31
4	Kab. Banjarnegara	2.367.247,99	2.621.258,36	2.935.541,51	3.262.404,02	3.775.515,79
5	Kab. Kebumen	2.326.201,16	2.628.529,32	2.886.012,91	3.055.784,62	3.497.757,-11
6	Kab. Purworejo	2.128.726,49	2.192.859,72	2.668.537,84	2.951.647,47	3.443.170,90
7	Kab. Wonosobo	1.563.136,46	1.731.093,94	1.896.720,20	2.063.216,41	2.309.638,85
8	Kab. Magelang	3.033.421,41	3.400.468,69	3.753.850,89	4.119.373,21	4.640.401,55
9	Kab. Boyolali	3.393.159,85	3.805.251,33	4.239.666,44	4.250.098,73	4.639.506,25
10	Kab. Klaten	3.837.399,33	4.404.119,84	4.915.533,76	5.475.849,75	6.520.828,29
11	Kab. Sukoharjo	3.660.863,99	4.010.997,06	4.378.598,57	4.806.448,20	5.545.486,06
12	Kab. Wonogiri	2.283.518,40	2.521.884,05	2.807.906,87	3.088.700,62	3.419.195,82
13	Kab. Karanganyar	3.600.627,97	3.966.482,61	4.429.540,10	5.038.378,68	5.611.289,49
14	Kab. Sragen	2.140.956,08	2.396.061,90	2.699.973,27	3.059.653,16	3.497.325,00
15	Kab. Grobogan	2.338.187,55	2.650.175,52	2.867.131,97	3.149.111,14	3.537.914,15
16	Kab. Bora	1.573.619,65	1.773.354,80	1.955.920,49	2.182.867,86	2.456.761,18
17	Kab. Rembang	1.472.717,28	1.802.797,96	1.950.799,04	2.130.174,83	2.427.739,00
18	Kab. Pati	3.645.659,68	4.015.279,78	4.366.618,37	4.834.477,66	5.470.291,82
19	Kab. Kudus	9.959.085,22	12.571.647,00	14.323.351,38	16.503.624,58	19.790.531,14
20	Kab. Jepara	3.250.361,67	3.655.056,44	4.310.481,68	4.383.716,46	5.018.164,15
21	Kab. Demak	2.374.456,87	2.657.716,19	2.881.076,78	3.148.528,67	3.373.415,52
22	Kab. Semarang	4.298.235,82	4.914.951,32	5.334.650,39	5.683.406,80	6.488.712,95
23	Kab. Temanggung	1.891.680,20	2.099.454,58	2.311.178,83	2.541.689,78	2.816.602,42
24	Kab. Kendal	4.224.820,66	4.730.957,46	5.140.628,45	5.500.213,17	6.027.668,66
25	Kab. Batang	2.018.631,59	2.276.124,03	2.461.452,48	2.660.659,53	3.110.086,51
26	Kab. Pekalongan	2.538.045,02	2.835.745,49	3.170.695,31	3.361.348,34	3.990.049,28
27	Kab. Pemasang	2.694.668,39	3.030.064,60	3.374.078,79	3.727.986,77	4.506.647,67
28	Kab. Tegal	2.468.126,66	2.743.490,03	3.254.198,06	3.395.787,21	3.827.237,49
29	Kab. Brebes	4.197.533,67	4.853.904,88	5.353.023,22	5.959.237,17	7.269.010,25
30	Kota Magelang	828.521,75	943.430,61	1.048.964,64	1.145.468,49	1.306.877,50
31	Kota Surakarta	3.372.850,36	3.772.737,68	4.251.845,60	4.756.559,57	5.585.776,86
32	Kota Salatiga	725.495,99	825.696,90	907.795,06	977.244,18	1.256.435,38
33	Kota Semarang	15.047.094,05	16.734.831,39	18.365.382,32	20.413.640,14	23.508.719,58
34	Kota Pekalongan	1.608.282,56	1.763.768,64	1.907.337,03	2.058.516,21	2.400.562,15
35	Kota Tegal	900.268,18	1.044.255,56	1.146.658,83	1.278.884,13	1.450.041,15

Sumber : BPS Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2002 sampai dengan 2006.

5.2 Deskripsi Variabel

5.2.1 Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan, merupakan total dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Secara lebih rinci pengeluaran pemerintah digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai pendidikan, kesehatan masyarakat, membiayai perbelanjaan untuk pertahanan dan keamanan, serta membiayai berbagai jenis infrastruktur dalam proses pembangunan.

Berdasarkan penelitian Due dan Miftah (2000), perbandingan antara pengeluaran-pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan bruto cenderung berbanding linear dan positif, maksudnya jika pengeluaran pemerintah naik, maka pendapatan bruto masyarakat juga naik bersamaan pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam model Keynes (Arief.1998: 50), pengeluaran pemerintah hanya akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi dalam negeri seandainya terjadi perubahan absolut dalam pengeluaran pemerintah. Jikalau perubahan pengeluaran absolut tidak terjadi tetapi terjadi perubahan komposisi dalam pengeluaran pemerintah, metodologi ini menganggap bahwa perubahan dampak ekonomi akibat pengeluaran pemerintah tidak terjadi. Tabel 5.5 halaman 139 menyajikan data realisasi total pengeluaran daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2001 sampai dengan 2005.

Dari data Tabel 5.5, menunjukkan bahwa realisasi total pengeluaran daerah terbesar dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah ditunjukkan oleh Kota Semarang (tahun 2001 sebesar Rp 584.512.404 ribu, tahun 2005 sebesar Rp 647.569.061 ribu). Besarnya pengeluaran daerah di Kota Semarang antara lain karena besarnya pengeluaran rutin untuk pegawai, sedangkan realisasi pengeluaran daerah terkecil ditunjukkan oleh Kota Salatiga (tahun 2001 sebesar Rp 89.074.033 ribu, tahun 2005 sebesar Rp 172.292.837 ribu), hal ini antara lain disebabkan oleh relatif kecilnya pengeluaran rutin.

Tabel 5.5
REALISASI TOTAL PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005

Kabupaten/Kota	Realisasi Total Pengeluaran Daerah (Ribu Rupiah)				
	2001	2002	2003	2004	2005
Kab. Cilacap	213.898.900	389.405.484	545.722.029	502.955.108	551.365.880
Kab. Banyumas	229.177.339	374.584.447	471.802.989	488.851.690	499.934.873
Kab. Purbalingga	236.598.244	280.918.928	350.141.648	317.284.174	314.628.794
Kab. Banjarnegara	204.183.234	253.205.377	316.761.179	344.791.092	379.631.264
Kab. Kebumen	154.825.798	352.513.698	431.376.491	427.806.043	413.260.857
Kab. Purworejo	271.558.749	278.262.234	374.020.356	350.842.402	315.674.237
Kab. Wonosobo	215.773.068	235.247.000	352.361.480	351.619.864	348.315.829
Kab. Magelang	249.869.282	327.994.144	390.323.606	417.376.796	437.162.963
Kab. Boyolali	218.653.209	287.112.031	430.749.856	395.692.550	382.077.385
Kab. Klaten	297.411.759	401.310.426	483.855.113	495.124.460	518.208.433
Kab. Sukoharjo	165.932.342	205.601.519	336.907.166	347.962.300	307.736.896
Kab. Wonogiri	248.294.855	300.401.010	403.593.369	444.084.458	441.082.709
Kab. Karanganyar	226.759.425	266.943.817	348.659.940	363.553.294	348.879.655
Kab. Sragen	225.226.413	276.284.950	390.467.388	380.335.917	766.104.055
Kab. Grobogan	260.686.165	322.564.969	344.865.887	467.797.969	451.992.263
Kab. Blora	308.234.172	327.882.526	403.970.983	378.582.855	370.596.273
Kab. Rembang	171.657.498	202.741.509	265.460.001	286.605.170	243.010.132
Kab. Pati	264.934.084	324.087.779	419.773.703	444.319.716	453.304.272
Kab. Kudus	182.701.685	239.398.312	330.808.670	347.334.972	317.650.820
Kab. Jepara	254.776.000	290.306.771	370.344.031	385.401.281	401.140.564
Kab. Demak	286.850.551	217.459.951	327.643.101	332.211.468	265.382.642
Kab. Semarang	216.115.967	285.329.673	357.769.620	363.569.879	271.415.555
Kab. Temanggung	192.512.078	252.361.513	294.674.039	308.187.439	244.119.337
Kab. Kendal	311.623.508	358.644.113	407.490.038	396.744.547	334.613.770
Kab. Batang	231.155.998	227.830.924	296.802.726	325.180.836	262.310.100
Kab. Pekalongan	224.698.087	256.791.670	304.568.857	311.462.405	297.233.825
Kab. Pemalang	228.810.679	282.586.873	408.865.006	405.560.095	388.688.853
Kab. Tegal	305.910.263	310.179.618	422.813.958	444.552.825	447.326.933
Kab. Brebes	189.036.743	373.030.559	458.169.979	447.994.376	434.585.246
Kota Magelang	113.137.784	143.970.187	178.912.851	175.418.967	164.960.090
Kota Surakarta	257.489.895	262.624.681	351.968.337	327.393.370	318.941.418
Kota Salatiga	89.074.033	110.040.073	110.040.019	168.950.588	172.292.837
Kota Semarang	584.512.404	505.763.455	621.669.886	661.416.254	647.569.061
Kota Pekalongan	90.924.553	133.676.209	107.177.581	180.288.472	179.445.904
Kota Tegal	197.180.069	158.163.672	218.966.946	252.064.887	250.636.872

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 sampai dengan 2005

Dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, total pengeluaran daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dari tahun 2001 sampai dengan 2005, Kota Tegal mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi (72,28 persen) sedangkan rata-rata

pertumbuhan pengeluaran daerah terendah yaitu Kabupaten Purbalingga (sebesar 11,85 persen).

5.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah diharapkan selalu berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor / ekspor.

Pajak daerah adalah suatu kewajiban wajib pajak (orang atau badan) untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari jasa negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Mahfatih, 2000 : 3). Menurut UU No. 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten ataupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan yang dapat digali dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah, dan penerimaan lain – lain. PAD perlu dipacu terus menerus peningkatannya, karena sangat berperan dan menentukan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nilai rasio antara PAD dan total penerimaan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Jika rasionya semakin menurun maka menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat semakin meningkat.

Sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu melakukan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab apabila terdapat kemandirian keuangan daerah. Artinya bahwa, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan terhadap bantuan pusat diupayakan seminimal mungkin, dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan menyelenggarakan pemerintah daerah. Dilihat dari sisi penerimaan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan keuangan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan

keadilan. Data PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel

5.6. Berdasarkan data tersebut, Pendapatan Asli daerah (PAD) di kabupaten/kota

Jawa Tengah nilai absolutnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Tabel 5.6
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Ribu Rupiah)

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab.Cilacap	32.112.950	46.833.922	45.494.812	53.499.090	101.873.000
2	Kab.Banyumas	29.541.431	37.499.527	45.045.840	51.224.310	47.901.860
3	Kab.Purbalingga	15.169.508	23.522.645	28.179.000	28.619.780	31.790.060
4	Kab.Banjarnegara	13.266.099	21.951.039	25.303.140	30.622.370	26.614.950
5	Kab.Kebumen	14.216.180	26.625.971	29.807.200	26.264.660	27.153.350
6	Kab.Purworejo	15.391.413	20.914.955	21.882.950	26.277.060	30.751.980
7	Kab.Wonosobo	10.824.602	26.507.231	24.159.626	23.869.510	20.665.320
8	Kab.Magelang	23.550.264	32.079.438	35.808.180	43.687.040	46.344.690
9	Kab.Boyolali	17.675.167	24.460.326	32.781.310	36.960.020	46.616.170
10	Kab.Klaten	13.897.566	17.519.438	21.879.726	27.047.600	33.466.710
11	Kab.Sukoharjo	13.296.684	18.555.318	19.929.270	21.701.840	25.245.340
12	Kab.Wonogiri	14.224.168	23.108.192	25.998.750	25.290.370	35.101.100
13	Kab.Karanganyar	16.550.714	17.300.155	25.196.920	29.485.260	29.851.980
14	Kab.Sragen	14.866.610	24.347.952	42.976.692	43.547.110	31.497.970
15	Kab.Grobogan	17.975.772	27.067.567	37.296.066	37.038.760	38.917.690
16	Kab.Blora	16.481.414	26.185.726	26.933.910	29.530.460	29.706.640
17	Kab.Rembang	9.441.588	15.677.504	18.295.450	18.715.700	19.926.750
18	Kab.Pati	30.193.137	34.573.274	40.826.750	55.030.350	46.418.260
19	Kab.Kudus	22.126.358	30.198.793	38.842.600	41.617.400	39.968.700
20	Kab. Jepara	20.235.162	45.036.658	53.740.240	47.266.550	53.704.230
21	Kab. Demak	11.117.809	14.597.124	18.320.152	17.449.370	22.108.420
22	Kab. Semarang	18.928.280	30.058.625	40.269.710	44.624.640	50.099.810
23	Kab. Temanggung	11.184.582	18.021.900	18.580.060	19.572.480	35.162.130
24	Kab. Kendal	21.889.307	35.783.037	37.174.070	31.671.370	44.638.580
25	Kab. Batang	13.947.641	21.382.844	23.308.570	23.610.800	19.189.730
26	Kab. Pekalongan	15.219.032	22.278.219	22.734.770	27.224.990	22.275.300
27	Kab. Pemalang	15.174.330	25.001.558	29.868.640	26.905.820	29.602.140
28	Kab. Tegal	18.599.227	32.581.299	38.336.280	39.009.420	46.219.890
29	Kab. Brebes	14.520.906	22.182.605	25.288.380	25.735.110	31.140.700
30	Kota. Magelang	12.311.353	19.191.415	23.567.460	22.628.700	24.486.980
31	Kota. Surakarta	35.640.532	44.922.141	54.815.679	59.632.520	62.852.840
32	Kota. Salatiga	10.501.149	17.703.834	20.181.960	21.619.400	24.146.320
33	Kota. Semarang	85.509.298	122.590.245	143.157.300	155.824.660	163.621.100
34	Kota. Pekalongan	13.392.028	16.247.596	13.679.480	15.864.600	12.838.810
35	Kota. Tegal	17.576.788	30.410.523	3.5147.570	4.2359.750	4.1719.370

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, 2001 sampai dengan 2005

Pada tahun 2001 kabupaten/kota yang penerimaan PAD nya terbesar adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp 85.509.298 ribu, sedangkan yang

paling kecil adalah Kabupaten Rembang yaitu sebesar Rp 9.441.588 ribu. Pada tahun 2005 pendapatan asli daerah terbesar adalah Kota Semarang (yaitu sebesar Rp163.621.100 ribu), diikuti oleh Kabupaten Cilacap (sebesar Rp101.873.000 ribu). Adapun daerah yang penerimaan PAD yang paling kecil tahun 2005 adalah Kota Pekalongan yaitu sebesar Rp12.838.810 ribu.

Berdasarkan peranan PAD terhadap pengeluaran daerah, data bisa dilihat pada Tabel 5.7 halaman 144, dari tahun ke tahun persentase PAD terhadap pengeluaran total di sebagian besar daerah justru mengalami penurunan. Pada dasarnya PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah masih relatif kecil sebagai sumber pembiayaan dibanding total pengeluaran daerah. Persentase PAD terhadap realisasi total pengeluaran daerah di seluruh kabupaten/kota rata-rata masih di bawah 9 persen.

Relatif kecilnya persentase PAD terhadap total pengeluaran daerah di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Hanya Kota Semarang yang rata-rata persentase PAD nya cukup tinggi (tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 di atas 21,60 persen).

Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, persentase PAD terhadap pengeluaran total paling besar adalah Kota Salatiga yaitu sebesar 11,85 persen, yang paling kecil adalah daerah Kabupaten Klaten yaitu hanya 3,53 persen. Setelah lima tahun pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, persentase PAD terhadap pengeluaran total paling besar adalah Kota Semarang yaitu sebesar 22,60 persen, sedangkan yang paling kecil adalah daerah Kabupaten Boyolali yaitu hanya 2,64 persen (lihat Tabel 5.7 halaman 144).

Tabel 5.7
PERSENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP REALISASI
TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen)

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab.Cilacap	9,83	8,14	5,44	7,93	4,45
2	Kab.Banyumas	7,19	6,24	5,05	6,18	3,46
3	Kab.Purbalingga	3,79	4,13	4,96	5,59	6,22
4	Kab.Banjarnegara	4,66	5,15	7,21	5,16	3,26
5	Kab.Kebumen	7,93	4,56	3,92	5,31	3,23
6	Kab.Purworejo	5,40	6,17	8,57	5,59	4,76
7	Kab.Wonosobo	5,17	6,21	0,57	5,65	3,57
8	Kab.Magelang	4,11	5,66	7,18	5,85	3,60
9	Kab.Boyolali	7,35	7,46	3,98	4,90	2,64
10	Kab.Klaten	3,53	3,17	4,13	5,08	4,07
11	Kab.Sukoharjo	6,77	6,82	6,39	7,25	6,56
12	Kab.Wonogiri	4,90	3,91	4,11	4,63	3,62
13	Kab.Karanganyar	7,65	8,07	4,74	5,94	4,29
14	Kab.Sragen	4,11	4,24	4,40	4,89	1,62
15	Kab.Grobogan	4,89	8,34	10,16	6,08	4,79
16	Kab.Blora	4,19	6,54	7,29	7,13	4,57
17	Kab.Rembang	7,29	7,41	6,59	6,01	5,49
18	Kab.Pati	8,19	7,03	5,11	5,12	3,74
19	Kab.Kudus	10,30	7,49	6,40	8,91	9,43
20	Kab. Jepara	4,25	6,38	5,76	6,04	4,34
21	Kab. Demak	4,03	7,38	9,05	6,17	6,15
22	Kab. Semarang	8,29	9,23	5,84	6,00	8,32
23	Kab. Temanggung	4,42	4,69	6,27	5,48	4,86
24	Kab. Kendal	5,69	6,84	4,92	5,80	5,85
25	Kab. Batang	3,79	5,38	5,50	5,48	5,99
26	Kab. Pekalongan	4,76	7,05	5,55	5,41	4,37
27	Kab. Pemalang	4,59	5,46	5,42	5,94	4,77
28	Kab. Tegal	5,76	7,04	4,37	11,27	3,91
29	Kab. Brebes	9,00	4,73	5,52	6,56	5,39
30	Kota. Magelang	5,45	9,49	6,14	7,24	5,46
31	Kota. Surakarta	6,69	6,74	6,61	10,64	10,51
32	Kota. Salatiga	11,85	12,16	10,52	7,42	5,85
33	Kota. Semarang	9,64	21,69	23,66	29,93	22,60
34	Kota. Pekalongan	9,04	12,26	14,22	8,65	5,97
35	Kota. Tegal	4,57	7,53	7,39	7,19	5,42

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah 2001 sampai dengan 2005, diolah

5.2.3 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Terdapat tiga fungsi utama pemerintah dalam pembangunan (Musgrave and Musgrave, 1989 :6), yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut harus saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan pembangunan. Lahirnya undang-undang otonomi daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi, yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan dalam rangka memenuhi anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk fungsi distribusi tersebut, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa salah satu penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan tersebut meliputi : bagi hasil (pajak dan bukan pajak), dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Dana bagi hasil berasal dari penerimaan pajak (PBB, BPHTB, PPh), dan penerimaan dari sumber daya alam (pertambangan umum, minyak bumi, gas alam, kehutanan, dan perikanan). Dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.8 halaman 146. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dana bagi hasil yang di terima daerah otonom di Jawa Tengah rata-rata meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2005 hampir semua daerah otonom menerima dana bagi hasil lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Melalui pembagian dana perimbangan khususnya dana bagi hasil, diharapkan membawa implikasi positif bagi keberadaan daerah untuk mencegah terjadinya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), dan

akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga daerah lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 5.8
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005
(Ribu Rupiah)

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	21.036.220	31.702.930	29.680.510	39.892.600	24.510.160
2	Kab. Banyumas	16.487.150	23.374.370	23.842.260	30.214.260	17.296.320
3	Kab. Purbalingga	8.966.750	11.615.910	17.367.209	17.730.030	19.575.010
4	Kab. Banjarnegara	9.517.260	13.035.860	22.851.580	17.799.090	12.375.900
5	Kab. Kebumen	12.284.490	16.092.220	16.895.940	22.701.050	13.348.320
6	Kab. Purworejo	14.668.030	17.164.320	32.065.329	19.627.410	15.011.240
7	Kab. Wonosobo	11.163.190	14.599.200	12.024.361	19.876.720	12.436.310
8	Kab. Magelang	10.274.520	18.567.071	28.035.740	24.410.820	15.756.640
9	Kab. Boyolali	16.075.190	21.408.940	17.157.189	19.384.910	10.100.000
10	Kab. Klaten	10.494.720	12.714.080	19.991.496	25.146.160	21.093.660
11	Kab. Sukoharjo	11.230.440	14.027.400	21.527.920	25.226.150	20.180.230
12	Kab. Wonogiri	12.174.800	11.750.810	16.574.700	20.539.570	15.949.900
13	Kab. Karanganyar	17.345.570	21.546.000	16.525.840	21.608.770	14.955.530
14	Kab. Sragen	9.255.780	11.704.820	17.181.277	18.611.370	12.375.970
15	Kab. Grobogan	12.750.550	26.892.780	35.023.264	28.452.030	21.634.360
16	Kab. Blora	12.909.950	21.427.730	29.439.541	27.007.030	16.947.340
17	Kab. Rembang	12.510.160	15.028.760	17.493.150	17.234.660	13.341.500
18	Kab. Pati	21.684.900	22.787.713	21.453.230	22.757.040	16.954.920
19	Kab. Kudus	18.825.100	17.939.510	21.178.690	30.936.950	29.966.100
20	Kab. Jepara	10.827.900	18.508.040	21.335.540	23.275.220	17.426.270
21	Kab. Demak	11.551.120	16.050.660	29.661.771	20.490.250	16.312.920
22	Kab. Semarang	17.922.810	26.335.820	20.897.306	21.802.380	22.575.130
23	Kab. Temanggung	8.510.540	11.829.470	18.482.720	16.894.820	11.863.560
24	Kab. Kendal	17.721.730	24.536.360	20.067.190	23.008.600	19.580.000
25	Kab. Batang	8.765.320	12.258.810	16.321.180	17.812.060	15.713.350
26	Kab. Pekalongan	10.688.150	18.110.660	16.895.880	16.862.100	13.001.960
27	Kab. Pemalang	10.493.550	15.434.400	22.151.429	24.071.940	18.528.950
28	Kab. Tegal	17.606.340	21.831.180	18.476.160	50.117.280	17.500.860
29	Kab. Brebes	17.009.100	17.650.810	25.309.110	29.374.150	23.405.750
30	Kota. Magelang	6.170.020	13.657.890	10.982.210	12.708.370	9.013.700
31	Kota. Surakarta	17.214.000	17.695.220	23.271.992	34.818.460	33.509.090
32	Kota. Salatiga	10.551.220	13.383.120	11.573.550	12.539.860	10.084.680
33	Kota. Semarang	56.364.520	109.718.680	147.103.710	197.954.720	146.321.510
34	Kota. Pekalongan	8.222.790	16.386.030	15.235.840	15.592.430	10.712.360
35	Kota. Tegal	9.020.080	11.913.750	16.183.500	18.128.890	13.584.190

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, 2001-2005

Daerah otonom yang paling besar menerima kurungan dana bagi hasil selama lima tahun terakhir adalah Kota Semarang (Rp 56.364.520 ribu tahun

2001, dan Rp 146.321.510 ribu tahun 2005). Daerah otonom yang paling sedikit menerima dana bagi hasil selama lima tahun terakhir adalah Kota Magelang (Rp 6.170.020 ribu pada tahun 2001, dan Rp 9.013.700 ribu pada tahun 2005).

Melihat dari besarnya porsi dana bagi hasil yang diterima daerah maka memberikan rasa optimis dalam melaksanakan otonomi daerah. Akan tetapi perlu diingat bahwa besarnya porsi tersebut dikarenakan banyaknya urusan yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu perlu dimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk kegiatan peningkatan pelayanan publik.

Persentase dana bagi hasil terhadap pengeluaran total di sebagian besar daerah lebih besar daripada persentase PAD yang berhasil dihimpun terhadap pengeluaran total. Data pada Tabel 5.9 halaman 148 menunjukkan bahwa rata-rata persentase dana bagi hasil terhadap realisasi total pengeluaran daerah dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih cukup besar.

Persentase dana bagi hasil terhadap realisasi total pengeluaran selama lima tahun terakhir yang paling besar adalah Kota Semarang (tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata sebesar 22,19 persen). Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal persentase bagi hasil terhadap realisasi pengeluaran total paling besar adalah Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 15,01 persen, yang paling kecil adalah daerah Kabupaten Demak yaitu hanya 3,88 persen.

Setelah lima tahun pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (tahun 2005), persentase dana bagi hasil terhadap realisasi pengeluaran total paling besar adalah Kota Semarang yaitu sebesar 25,27 persen, sedangkan yang paling kecil adalah daerah Kabupaten Sragen yaitu hanya 4,11 persen.

Tabel 5.9
PERSENTASE DANA BAGI HASIL TERHADAP
REALISASI TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	15,01	12,03	8,34	10,64	18,48
2	Kab. Banyumas	12,89	10,01	9,55	10,48	9,58
3	Kab. Purbalingga	6,41	8,37	8,05	9,02	10,10
4	Kab. Banjarnegara	6,50	8,67	7,99	8,88	7,01
5	Kab. Kebumen	9,18	7,55	6,91	6,14	6,57
6	Kab. Purworejo	5,67	7,52	5,85	7,49	9,74
7	Kab. Wonosobo	5,02	11,27	6,86	6,79	5,93
8	Kab. Magelang	9,43	9,78	9,17	10,47	10,60
9	Kab. Boyolali	8,08	8,52	7,61	9,34	12,20
10	Kab. Klaten	4,67	4,37	4,52	5,46	6,46
11	Kab. Sukoharjo	8,01	9,02	5,92	6,24	820
12	Kab. Wonogiri	5,73	7,69	6,44	5,69	7,96
13	Kab. Karanganyar	7,30	6,48	7,23	8,11	8,56
14	Kab. Sragen	6,60	8,81	11,01	11,45	4,11
15	Kab. Grobogan	6,90	8,39	10,81	7,92	8,61
16	Kab. Blora	5,35	7,99	6,67	7,80	8,02
17	Kab. Rembang	5,50	7,73	6,89	6,53	8,20
18	Kab. Pati	11,40	10,67	9,73	12,39	10,24
19	Kab. Kudus	12,11	12,61	11,74	11,98	12,58
20	Kab. Jepara	7,94	15,51	14,51	12,26	13,39
21	Kab. Demak	3,88	6,71	5,59	5,25	8,33
22	Kab. Semarang	8,76	10,53	11,26	12,27	18,46
23	Kab. Temanggung	5,81	7,14	6,31	6,35	14,40
24	Kab. Kendal	7,02	9,98	9,12	7,98	13,34
25	Kab. Batang	6,03	9,39	7,85	7,26	7,32
26	Kab. Pekalongan	6,77	8,68	7,46	8,74	7,49
27	Kab. Pemasang	6,63	8,85	2,41	6,63	7,62
28	Kab. Tegal	6,08	10,50	9,07	8,77	10,33
29	Kab. Brebes	7,68	5,95	5,52	5,74	7,17
30	Kota. Magelang	10,88	13,33	13,17	12,90	14,84
31	Kota. Surakarta	13,84	17,11	15,57	18,21	19,71
32	Kota. Salatiga	11,79	16,09	18,34	12,80	14,01
33	Kota. Semarang	14,63	24,24	23,03	23,56	25,27
34	Kota. Pekalongan	14,73	12,15	12,76	8,80	7,15
35	Kota. Tegal	8,91	19,23	16,05	16,81	16,65

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, diolah

5.2.4 Rasio Pendapatan Asli Daerah ditambah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Terhadap Realisasi Total Pengeluaran

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota memerlukan dana yang semakin besar sebagai dampak tuntutan

masyarakat yang dinamis dan bergerak cepat, sementara di lain pihak daerah dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Sekarang ini kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Tabel 5.10
RASIO PAD DITAMBAH BAGI HASIL TERHADAP
REALISASI TOTAL PENGELUARAN DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	0,25	0,20	0,14	0,19	0,23
2	Kab. Banyumas	0,20	0,16	0,15	0,17	0,13
3	Kab. Purbalingga	0,10	0,13	0,13	0,15	0,16
4	Kab. Banjarnegara	0,11	0,14	0,15	0,14	0,10
5	Kab. Kebumen	0,17	0,12	0,11	0,11	0,10
6	Kab. Purworejo	0,11	0,14	0,14	0,13	0,14
7	Kab. Wonosobo	0,10	0,17	0,07	0,12	0,10
8	Kab. Magelang	0,14	0,15	0,16	0,16	0,14
9	Kab. Boyolali	0,15	0,16	0,12	0,14	0,15
10	Kab. Klaten	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11
11	Kab. Sukoharjo	0,15	0,16	0,12	0,13	0,15
12	Kab. Wonogiri	0,11	0,12	0,11	0,10	0,12
13	Kab. Karanganyar	0,15	0,15	0,12	0,14	0,13
14	Kab. Sragen	0,11	0,13	0,15	0,16	0,16
15	Kab. Grobogan	0,12	0,17	0,21	0,14	0,13
16	Kab. Blora	0,10	0,15	0,14	0,15	0,13
17	Kab. Rembang	0,13	0,15	0,13	0,13	0,14
18	Kab. Pati	0,20	0,18	0,15	0,18	0,14
19	Kab. Kudus	0,22	0,20	0,18	0,21	0,22
20	Kab. Jepara	0,12	0,22	0,20	0,18	0,18
21	Kab. Demak	0,08	0,14	0,15	0,11	0,14
22	Kab. Semarang	0,17	0,20	0,17	0,18	0,27
23	Kab. Temanggung	0,10	0,12	0,13	0,12	0,19
24	Kab. Kendal	0,13	0,17	0,14	0,14	0,19
25	Kab. Batang	0,10	0,15	0,13	0,13	0,13
26	Kab. Pekalongan	0,12	0,16	0,13	0,14	0,12
27	Kab. Pemasang	0,11	0,14	0,08	0,13	0,12
28	Kab. Tegal	0,12	0,18	0,13	0,20	0,14
29	Kab. Brebes	0,17	0,11	0,11	0,12	0,13
30	Kota. Magelang	0,16	0,23	0,19	0,20	0,20
31	Kota. Surakarta	0,21	0,24	0,22	0,29	0,30
32	Kota. Salatiga	0,24	0,28	0,29	0,20	0,20
33	Kota. Semarang	0,24	0,46	0,47	0,53	0,48
34	Kota. Pekalongan	0,24	0,24	0,27	0,17	0,13
35	Kota. Tegal	0,13	0,27	0,23	0,24	0,22

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Daerah, beberapa tahun, diolah

Oleh karena itu peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal. Gambaran kemampuan pembiayaan terhadap realisasi total pengeluaran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah terdapat pada Tabel 5.10.

Berdasarkan data pada Tabel 5.10 halaman 149, menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan terhadap realisasi pengeluaran di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah. Pada tahun 2001 kondisi yang paling baik di Kabupaten Cilacap (0,25), sedangkan yang paling kecil adalah Kabupaten Klaten (0,08). Pada tahun 2005 rasio PAD dengan bagi hasil terhadap realisasi total pengeluaran paling besar di Kota Semarang (0,48), sedangkan yang paling kecil di Kabupaten Sragen (0,06).

5.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan menaikkan kualitas hidup rakyat. Kualitas hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar. Pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan

Menurut Djohadikusumo (1994:15) dan Sukirno (2000:25), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan suatu kelompok masyarakat (negara) dari tahun ke tahun karena meningkatnya kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Pada tingkat daerah, data PDRB dapat untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pertumbuhan ekonomi di sini diperlihatkan dari kenaikan PDRB kabupaten dan kota.

Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.11. Pada tahun 2001 Kota Tegal mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 8,06 persen. Pertumbuhan PDRB terbesar pada tahun 2002 adalah Kabupaten Semarang yaitu 10,77 persen.

Tabel 5.11
PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN
2000 DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	4,88	8,98	6,56	6,88	7,99
2	Kab. Banyumas	2,22	3,27	4,78	4,02	3,21
3	Kab. Purbalingga	2,96	3,23	4,46	3,99	4,18
4	Kab. Banjarnegara	-0,11	0,95	2,94	3,82	4,32
5	Kab. Kebumen	0,94	3,24	3,70	1,97	3,21
6	Kab. Purworejo	3,54	3,45	5,08	4,17	4,85
7	Kab. Wonosobo	1,01	1,99	2,27	2,29	3,19
8	Kab. Magelang	2,68	4,59	4,73	4,27	4,62
9	Kab. Boyolali	6,33	2,59	4,86	2,04	4,08
10	Kab. Klaten	4,14	3,91	4,91	4,95	4,66
11	Kab. Sukoharjo	4,14	3,08	4,14	4,31	4,11
12	Kab. Wonogiri	4,20	3,62	1,69	3,31	4,14
13	Kab. Karanganyar	1,22	4,50	5,67	6,79	5,49
14	Kab. Sragen	-1,28	2,39	3,62	4,60	5,16
15	Kab. Grobogan	2,95	3,26	4,50	3,56	4,74
16	Kab. Blora	4,16	2,44	4,84	4,45	4,32
17	Kab. Rembang	2,89	5,80	3,12	3,88	3,15
18	Kab. Pati	3,13	2,78	2,13	4,13	4,01
19	Kab. Kudus	3,94	2,47	1,68	3,24	4,23
20	Kab. Jepara	3,88	3,92	3,85	3,78	4,23
21	Kab. Demak	3,20	2,68	2,85	3,40	3,86
22	Kab. Semarang	2,69	10,77	-2,96	1,13	3,18
23	Kab. Temanggung	3,19	3,38	4,52	3,69	3,99
24	Kab. Kendal	3,38	3,23	2,91	2,80	2,69
25	Kab. Batang	2,35	2,00	2,14	2,00	2,80
26	Kab. Pekalongan	2,50	2,91	3,69	4,10	3,72
27	Kab. Pemasang	2,87	3,38	3,81	3,94	4,15
28	Kab. Tegal	3,72	5,19	5,56	5,31	4,90
29	Kab. Brebes	6,15	5,16	4,77	4,81	4,83
30	Kota Magelang	3,44	3,01	3,74	3,00	5,71
31	Kota Surakarta	4,12	4,97	6,11	5,80	5,15
32	Kota Salatiga	4,66	3,88	5,19	3,13	4,23
33	Kota Semarang	2,73	5,45	4,91	4,37	5,50
34	Kota Pekalongan	3,96	3,22	3,78	4,80	3,82
35	Kota Tegal	8,06	5,09	5,20	6,25	4,87

Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka beberapa tahun, (diolah)

Williamson 0,02), daerah yang nilai indeks kesenjangannya paling tinggi yaitu Kota Semarang (indeks Williamson 0,37). Pada tahun 2005 di mana desentralisasi fiskal telah berjalan selama lima tahun, tingkat kesenjangan antar daerah relatif meningkat. Daerah yang nilai indeks Williamson paling tinggi adalah Kabupaten Cilacap (indeks Williamson 0,45), paling rendah adalah Kabupaten Kendal (indeks Williamson 0,02).

5.2.7 Tenaga Kerja Terserap

Beberapa negara mencatat bahwa dengan menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Investasi pada manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people centered development* atau *putting people first* (Korten, 1981:201). Artinya manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja yang luas dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Oleh karena itu pembangunan harus selalu diupayakan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Gambaran umum data penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Jawa Tengah selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.16
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	65,7	65,3	64,8	68,8	69,5
2	Kab. Banyumas	67,4	66,7	68,2	70,3	70,7
3	Kab. Purbalingga	65,6	65,0	65,9	68,7	69,3
4	Kab. Banjarnegara	65,5	63,7	65,2	66,9	67,3
5	Kab. Kebumen	64,0	65,6	65,7	68,0	68,9
6	Kab. Purworejo	63,7	68,4	65,9	68,7	69,1
7	Kab. Wonosobo	66,4	64,7	65,7	66,9	67,6
8	Kab. Magelang	66,1	67,2	66,7	69,1	69,9
9	Kab. Boyolali	66,6	65,7	65,9	68,5	69,0
10	Kab. Klaten	66,3	67,8	67,9	71,0	71,4
11	Kab. Sukoharjo	69,7	67,7	66,1	70,7	71,2
12	Kab. Wonogiri	62,9	66,5	65,5	68,4	69,0
13	Kab. Karanganyar	66,7	68,5	68,9	70,5	70,7
14	Kab. Sragen	65,8	64,9	64,6	66,1	66,6
15	Kab. Grobogan	65,4	65,5	65,4	67,3	68,2
16	Kab. Blora	63,4	64,7	64,4	66,5	67,9
17	Kab. Rembang	61,1	65,5	64,6	67,5	69,0
18	Kab. Pati	69,0	68,6	68,4	70,6	70,9
19	Kab. Kudus	69,4	66,9	67,4	69,4	70,0
20	Kab. Jepara	67,8	66,9	67,7	69,1	69,6
21	Kab. Demak	66,7	66,4	66,0	69,0	69,4
22	Kab. Semarang	69,4	69,5	68,8	71,4	71,9
23	Kab. Temanggung	69,9	69,6	68,8	71,4	71,8
24	Kab. Kendal	64,4	65,5	63,3	67,3	67,5
25	Kab. Batang	64,7	65,5	65,4	67,0	67,6
26	Kab. Pekalongan	64,1	63,9	64,5	67,6	68,2
27	Kab. Pemalang	62,6	62,2	63,4	65,6	66,3
28	Kab. Tegal	65,6	63,3	63,5	66,8	67,5
29	Kab. Brebes	61,7	61,3	61,6	63,4	64,3
30	Kota Magelang	74,7	73,0	71,7	74,5	74,7
31	Kota Surakarta	74,1	73,0	72,5	75,8	76,0
32	Kota Salatiga	73,9	72,8	72,9	74,4	74,8
33	Kota Semarang	74,3	73,6	72,8	74,9	75,3
34	Kota Pekalongan	69,5	68,2	69,0	71,4	71,9
35	Kota Tegal	71,0	68,5	69,1	71,2	71,4

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan manusia Jawa Tengah, beberapa tahun.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang tertinggi pada tahun 2001 adalah Kota Magelang (74,7), tahun 2002 adalah di Kota Semarang (73,6), tahun 2003 adalah Kota Salatiga (72,9), pada tahun 2004 dan 2005 adalah Kota Surakarta (75,8 dan 76,0).

Tingginya nilai Indeks Pembangunan manusia di Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta karena penduduk di daerah tersebut

mempunyai nilai rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran riil per kapita yang tinggi dibanding dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jawa Tengah, ketiganya merupakan komposisi dari nilai Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan daerah yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia terendah adalah Kabupaten Rembang (yaitu 61,1) pada tahun 2001. Kabupaten Brebes dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 mempunyai nilai IPM terendah, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk miskin di Brebes paling tinggi, sehingga berpengaruh terhadap indikator indeks pembangunan manusia yaitu pendidikan dan kesehatan serta daya beli penduduk di Kabupaten Brebes.

5.3. Analisis Jalur

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa variabel endogen (Kesejahteraan Masyarakat (Y4)) dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel eksogen Desentralisasi Fiskal (X1), Pertumbuhan Ekonomi (Y1), Kesenjangan Antar Daerah (Y2), Tenaga Kerja Terserap (Y3). Pengaruh desentralisasi fiskal (X1), laju pertumbuhan ekonomi (Y1), kesenjangan antar daerah (Y2), tenaga kerja terserap (Y3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4) dapat diinterpretasikan dari masing-masing koefisien jalur. Koefisien-koefisien jalur tersebut merupakan hipotesis dalam penelitian ini, yang dapat disajikan dalam empat persamaan berikut:

$$\text{Model 1 : } \hat{Y}_1 = 0,268X_1$$

$$\text{Model 2 : } \hat{Y}_2 = -0,494X_1 - 0,164\hat{Y}_1$$

$$\text{Model 3 : } \hat{Y}_3 = 0,154\hat{Y}_1$$

$$\text{Model 4 : } \hat{Y}_4 = 0,133\hat{Y}_1 - 0,262\hat{Y}_2 + 0,600\hat{Y}_3$$

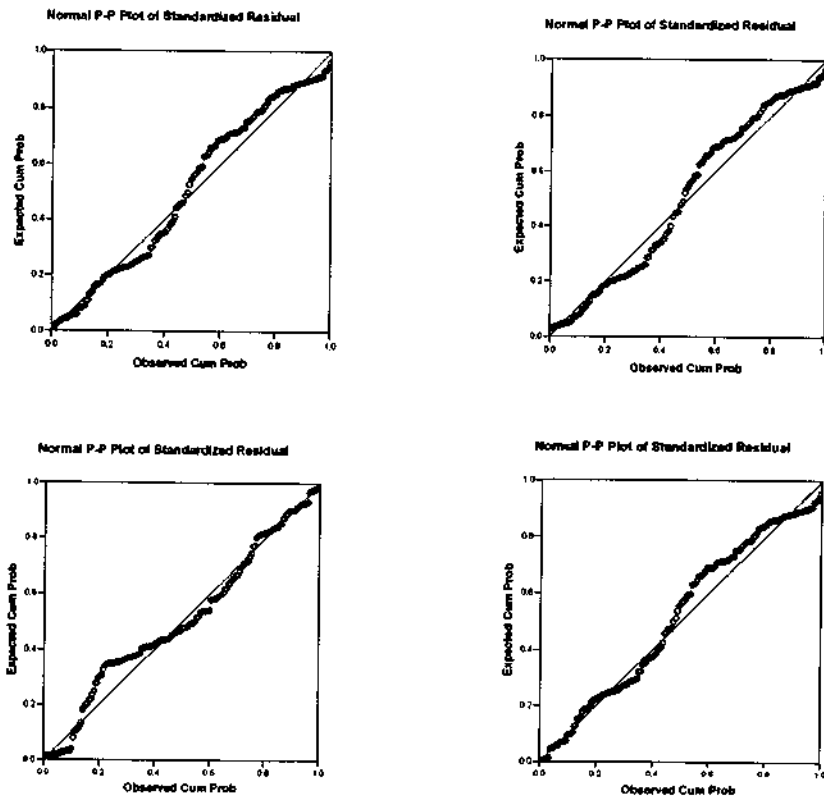
Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis jalur adalah terpenuhi asumsi pada residual pada masing-masing model. Sehingga pada

penelitian ini dilakukan pemeriksaan asumsi residual pada masing-masing model.

5.3.1. Uji Normalitas

Normalitas dari data merupakan salah satu syarat dalam pemodelan analisis jalur (*path analysis*). Pemeriksaan normalitas ditekankan pada data residual pada masing-masing model. Pemeriksaan asumsi distribusi normal dilakukan dengan melihat plot probabilitasnya, jika plot mendekati garis lurus maka dikatakan asumsi normal telah terpenuhi (Gujarati, 2005). Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Berdasarkan uji normalitas pada Gambar 5.1, ternyata baik pada model 1, model 2, model 3, dan model 4 menunjukkan bahwa plot residual tersebut mendekati garis lurus garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dikatakan asumsi normalitas pada model 1, model 2, model 3 dan model 4 telah terpenuhi.

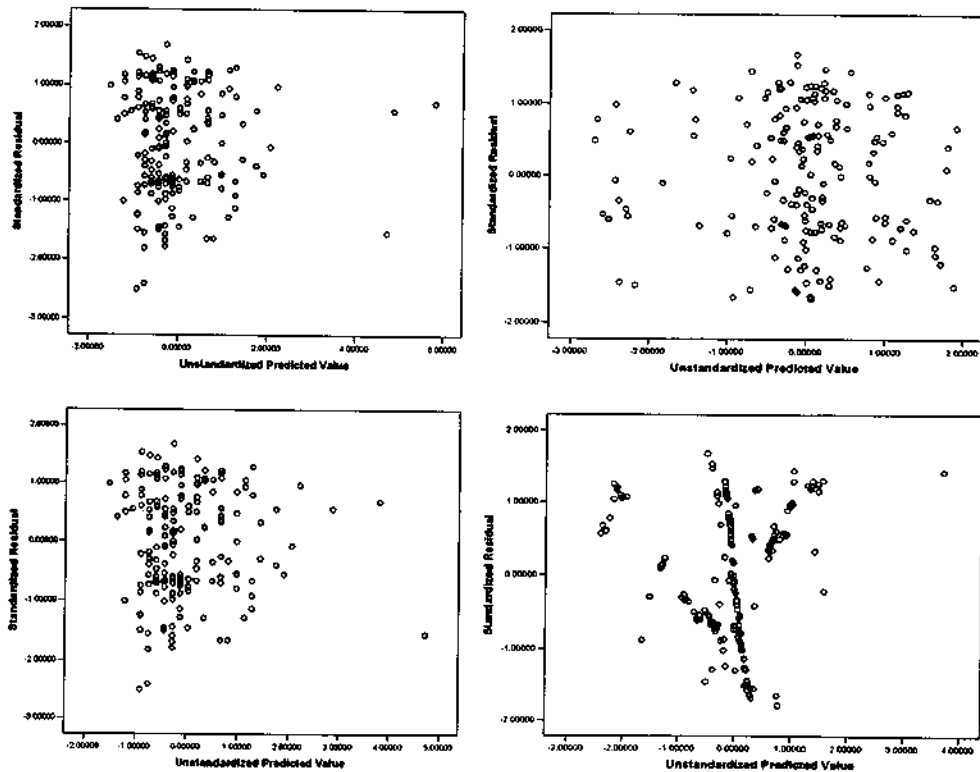


Gambar 5.1 : UJI ASUMSI NORMALITAS PADA MODEL

5.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi penyebaran data yang tidak sama atau tidaksamanya variansi sehingga uji signifikansi tidak valid (Gajarati,2005). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas (sama variannya). Apabila varian berbeda disebut heteroskedastisitas (tidak sama variannya). Model yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Dari Gambar 5.2, baik pada model 1, model 2, model 3 dan model 4 ternyata menunjukkan bahwa persebaran antara nilai prediksi variabel dengan residualnya tidak membentuk suatu pola yang pasti, sehingga dikatakan asumsi homoskedastisitas pada model 1, model 2, model 3 dan model 4 telah terpenuhi.



Gambar 5.2 : UJI ASUMSI HOMOSKEDASTISITAS PADA MODEL

5.3.3. Uji Autokorelasi

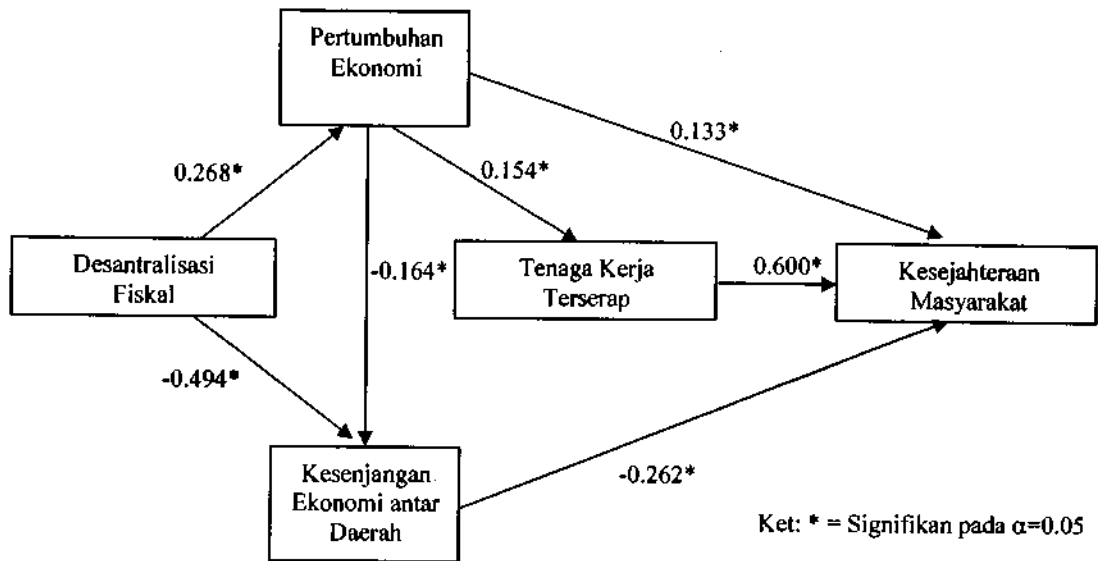
Autokorelasi dalam residual dapat dilihat melalui nilai Durbin Watson (DW) pada masing-masing model. Nilai Durbin-Watson yang mendekati 2 dikatakan tidak ada otokorelasi (Gujarati, 2005). Hasil penelitian memberikan nilai DW = 2,047 pada model 1, DW = 1,923 pada model 2, DW = 2,049 pada model 3 dan DW = 1,983 pada model 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah otokorelasi pada data yang dianalisis.

5.3.4. Uji Multikolinearitas atau Singularitas

Multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel independen di masing-masing model. Nilai VIF kurang dari 10 dikatakan tidak ada multikolinearitas, nilai VIF dari 10 sampai 20 dikatakan ada multikolinearitas yang tidak serius, dan nilai VIF lebih dari 20 dikatakan ada multikolinearitas yang serius (Draper and Smith, 1989). Hasil penelitian memberikan nilai VIF kurang dari 10 baik pada model 1, model 2, model 3 dan model 4. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dan singularitas pada data yang dianalisis.

5.4 Pengaruh Antar Variabel

Setelah dilakukan pemeriksaan asumsi, maka dari keempat model tersebut di atas dapat dinyatakan dalam grafik analisis jalur dengan bentuk seperti pada Gambar 5.3 halaman 165, sebagai berikut:



Gambar 5.3 : PENGARUH VARIABEL EKSOGEN TERHADAP VARIABEL ENDOGEN

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka berikut ini dikemukakan koefisien jalur dari masing-masing hubungan antar variabel secara rinci yang digunakan dalam studi ini, seperti terlihat pada Tabel 5.17 berikut :

**Tabel 5.17
HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN JALUR**

Variabel	Koefisien	C.R.	Prob.	Keterangan
Desentralisasi Fiskal (X1) → Pertumbuhan ekonomi (Y1)	0,268	3,662	0,000	Signifikan
Desentralisasi Fiskal (X1) → Kesenjangan antar daerah (Y2)	-0,494	-7,532	0,000	Signifikan
Pertumbuhan ekonomi (Y1) → Kesenjangan antar daerah (Y2)	-0,164	-2,501	0,013	Signifikan
Pertumbuhan ekonomi (Y1) → Tenaga kerja terserap (Y3)	0,154	2,050	0,042	Signifikan
Pertumbuhan ekonomi (Y1) → Kesejahteraan masyarakat (Y4)	0,133	3,032	0,003	Signifikan
Kesenjangan antar daerah (Y2) → Kesejahteraan masyarakat (Y4)	-0,262	-4,498	0,000	Signifikan
Tenaga kerja terserap (Y3) → Kesejahteraan masyarakat (Y4)	0,600	10,644	0,000	Signifikan

Sumber: Lampiran 2 halaman 283, diolah

Berdasarkan Tabel 5.17, interpretasi masing-masing koefisien jalur adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Desentralisasi Fiskal (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,268 dengan nilai C.R. sebesar 3,662 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,268, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan desentralisasi fiskal maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,286. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis satu pada penelitian ini, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 2 : Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Desentralisasi fiskal (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah (Y_2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar -0,494 dengan nilai C.R. sebesar -7,532 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung pada kesenjangan antar daerah (Y_2) sebesar -0,494 yang berarti bahwa setiap ada peningkatan desentralisasi fiskal maka akan menurunkan kesenjangan ekonomi antar daerah sebesar 0,494. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis dua pada penelitian ini, bahwa desentralisasi

fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 3 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan antar daerah (Y2). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar -0,164 dengan nilai C.R. sebesar -2,501 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,013 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung pada kesenjangan daerah sebesar -0,164 yang berarti bahwa setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan kesenjangan ekonomi antar daerah sebesar 0,164. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis tiga pada studi ini, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja terserap (Y3). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,154 dengan nilai C.R. sebesar 2,050 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,042 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung pada tenaga kerja terserap sebesar 0,154 yang berarti bahwa setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menaikkan tenaga kerja terserap sebesar 0,154. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis

empat pada studi ini, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 5 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,133 dengan nilai C.R. sebesar 3,032 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,003 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,133 yang berarti setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menaikkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,133. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis lima pada studi ini, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 6 : Kesenjangan antar daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kesenjangan antar daerah (Y2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar -0,262 dengan nilai C.R. sebesar -4,498 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan sebesar -0,262, yang berarti bahwa setiap ada penurunan kesenjangan antar daerah sebesar 0,262 maka akan

menaikkan kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar 0,262. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis enam pada studi ini, bahwa kesenjangan antar daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis 7 : Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tenaga kerja terserap (Y3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y4). Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0,600 dengan nilai C.R. sebesar 10,644 dan diperoleh probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian Tenaga kerja terserap berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,600, yang berarti bahwa setiap ada kenaikan tenaga kerja terserap (Y3) sebesar 0,600 maka akan menaikkan kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar 0,600. Hasil estimasi ini memberikan dukungan atas hipotesis tujuh pada studi ini, bahwa meningkatnya tenaga kerja yang terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

5.4.1 Pengaruh Langsung Antar Variabel

Dalam analisis jalur yang melibatkan banyak variabel dan jalur antar variabel terdapat pengaruh antar variabel yang meliputi pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Untuk itu akan dibahas secara rinci masing-masing pengaruh tersebut di atas.

Hubungan langsung terjadi antara variabel eksogen (Desentralisasi Fiskal (X1)) dengan variabel endogen penengah (pertumbuhan ekonomi (Y1)),

kesenjangan antar daerah (Y2), tenaga kerja terserap (Y3)) dan variabel endogen (kesejahteraan masyarakat (Y4)).

Berdasarkan hasil estimasi, hubungan langsung yang terjadi di antara variabel-variabel eksogen dan endogen terlihat pada Tabel 5.18. Data Tabel 5.18 menyajikan hasil pengaruh langsung (*direct effects*) antar variabel, hubungan langsung yang terjadi di antara variabel-variabel eksogen dan endogen tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.18
PENGARUH LANGSUNG VARIABEL PENELITIAN

Pengaruh Langsung		Variabel Endogen			
		Pertumbuhan ekonomi (Y1)	Kesenjangan antar daerah (Y2)	Tenaga kerja terserap (Y3)	Kesejahteraan masyarakat (Y4)
Variabel Eksogen	Desentralisasi Fiskal (X1)	0,268	-0,494	0,000	0,000
	Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	0,000	-0,164	0,154	0,133
	Kesenjangan antar daerah (Y2)	0,000	0,000	0,000	-0,262
	TenagaKerja Terserap (Y3)	0,000	0,000	0,000	0,600

Sumber: Lampiran 2 halaman 283, diolah

Dari Tabel 5.18, dapat dijelaskan besar pengaruh langsung (*direct effects*) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Desentralisasi Fiskal (X1) memberikan efek langsung terbesar secara negatif sebesar -0,494 pada Kesenjangan antar daerah (Y2), dan memberikan efek terbesar secara positif pada pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 0,268. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (Y1) memberikan efek langsung terbesar pada tenaga kerja terserap (Y3) sebesar 0,154, selanjutnya pada kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar 0,133.

Kesenjangan antar daerah (Y2) memberikan efek terbesar secara negatif pada kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar -0,262. Sedangkan tenaga kerja terserap (Y3) memberikan efek langsung secara positif pada kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar 0,600.

5.4.2 Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel

Hubungan tidak langsung terjadi antara variabel *observed* eksogen (Desentralisasi Fiskal (X1)) dengan variabel *observed* endogen penengah (pertumbuhan ekonomi (Y1), kesenjangan antar daerah (Y2), tenaga kerja terserap (Y3)) dan variabel *observed* endogen (kesejahteraan masyarakat (Y4)). Hubungan tidak langsung antar variabel adalah seperti pada Tabel 5.19 berikut :

Tabel 5.19
PENGARUH TIDAK LANGSUNG VARIABEL PENELITIAN

Pengaruh Tidak Langsung		Variabel Endogen			
		Pertumbuhan ekonomi (Y1)	Kesenjangan antar daerah (Y2)	Tenaga kerja terserap (Y3)	Kesejahteraan masyarakat (Y4)
Variabel Eksogen	Desentralisasi Fiskal (X1)	0,000	-0,044	0,041	0,202
	Pertumbuhan ekonomi (Y1)	0,000	0,000	0,000	0,135
	Kesenjangan antar daerah (Y2)	0,000	0,000	0,000	0,000
	Tenaga kerja terserap (Y3)	0,000	0,000	0,000	0,000

Sumber: Lampiran 2 halaman 283, diolah

Tabel 5.19, menyajikan hasil *indirect effects* mengenai hubungan tidak langsung yang terjadi di antara variabel – variabel eksogen dan endogen. Desentralisasi Fiskal (X1) memberikan efek tidak langsung terbesar secara positif sebesar 0,202 pada kesejahteraan masyarakat (Y4). Sedangkan laju pertumbuhan

ekonomi (Y1) memberikan efek tidak langsung terbesar pada kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar 0,135.

5.4.3 Pengaruh Total Antar Variabel

Pengaruh total merupakan penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel *observed* eksogen (Desentralisasi Fiskal (X1)) dengan variabel *observed* endogen penengah (laju pertumbuhan ekonomi (Y1), kesenjangan antar daerah (Y2), tenaga kerja terserap (Y3)) dan variabel *observed* endogen (kesejahteraan masyarakat (Y4)).

Tabel 5.20 halaman 173, menyajikan hasil *total effects* yang terjadi di antara variabel – variabel *observed* eksogen dan endogen. Desentralisasi Fiskal (X1) memberikan efek total terbesar secara positif sebesar 0,268 pada laju pertumbuhan ekonomi (Y1), dan memberikan efek total secara positif pada kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar 0,202. Pertumbuhan ekonomi (Y1) memberikan efek total terbesar secara positif sebesar 0,268 pada kesejahteraan masyarakat (Y4), dan memberikan efek total secara positif pada tenaga kerja terserap (Y3) sebesar 0,154. Kesenjangan antar daerah (Y2) memberikan efek total terbesar secara negatif sebesar -0,262 pada kesejahteraan masyarakat (Y4). Sedangkan tenaga kerja terserap (Y3) memberikan total efek secara positif pada kesejahteraan masyarakat (Y4) sebesar 0,600.

Tabel 5.20
PENGARUH TOTAL VARIABEL EKSOGEN TERHADAP VARIABEL ENDOGEN

Pengaruh	Variabel Endogen											
	Pertumbuhan Ekonomi (Y1)			Kesenjangan Antar Daerah (Y2)			Tenaga Kerja Terserap (Y3)			Kesejahteraan Masyarakat (Y4)		
	PL	PTL	PT	PL	PTL	PT	PL	PTL	PT	PL	PTL	PT
Desentralisasi Fiskal (X1)	0,268	0,000	0,268	-0,494	-0,044	-0,538	0,000	0,041	0,041	0,000	0,202	0,202
Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	0,000	0,000	0,000	-0,164	0,000	-0,164	0,154	0,000	0,154	0,133	0,135	0,268
Kesenjangan Antar Daerah (Y2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,262	0,000	-0,262
Tenaga Kerja Terserap (Y3)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,600

Sumber: Lampiran 2 diolah

Ket: PL = Pengaruh Langsung, PTL = Pengaruh Tidak Langsung, PT = Pengaruh Total

BAB 6

PEMBAHASAN

BAB 6

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis pada Bab 5, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap hasil analisis tersebut. Pembahasan dilakukan dengan melihat hubungan kausalitas yang terjadi sebagai pembuktian hipotesis yang diajukan dalam studi ini. Teori-teori maupun hasil studi empirik yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya akan digunakan dalam pembahasan hasil studi. Hasil studi yang diperoleh bisa mendukung atau justru bertentangan dengan teori ataupun studi sebelumnya. Di samping itu, dalam melakukan pembahasan akan dikemukakan pula berbagai kelemahan, keterbatasan yang ada, untuk selanjutnya bisa dijadikan dasar bagi studi-studi sejenis selanjutnya.

6.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.17 halaman 165), menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien jalur hasil estimasi bertanda positif, yaitu sebesar 0,268 dengan nilai C.R sebesar 3,662 dan probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 lebih kecil dari

taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, dengan meningkatnya desentralisasi fiskal (yang ditunjukkan oleh semakin besarnya rasio antara PAD dan bagi hasil dengan realisasi pengeluaran total daerah) maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data, rasio PAD ditambah bagi hasil dengan realisasi total pengeluaran selama 2001 sampai dengan 2005 (lihat Tabel 5.10) selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2001 rasio berkisar antara 0,08 (Kabupaten Klaten) dan 0,25 (Kabupaten Cilacap), pada tahun 2005 berubah menjadi lebih besar, berkisar antara 0,10 (Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo) dan 0,48 (Kota Semarang). Data pertumbuhan ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya (lihat Tabel 5.12), tahun 2001 berkisar antara berkisar -9,12% (Kabupaten Blora) dan 30,25% (Kota Tegal). Pada tahun 2005 pertumbuhannya menjadi berkisar antara 7,14% (Kabupaten Demak) dan 48,99% (Kabupaten Cilacap).

Hasil studi ini mendukung temuan empiris Martinez and Robert M.Mc.Nab (2001), Mahi (2001), Brodjonegoro (2002), Dartanto dan Brodjonegoro (2003), Hadi Sasana (2005). Desentralisasi mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/pembelanjaan publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dalam era desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan

mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan studi ini juga mendukung hasil studi Mursinto di Jawa Timur (2004). Hasil studi disimpulkan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil itu diketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (pertumbuhan ekonomi) tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi diperlukan peran serta swasta dan masyarakat yang semakin besar. Dalam hitungan statistik peran swasta dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 46,20 persen.

Studi ini tidak sepenuhnya mendukung studi Jin dan Zou (2000) yang menguji desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Hasil studi Jin dan Zou menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, penerimaan perlu bertemu dengan pengeluaran pada level daerah untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1979 sampai dengan 1993 desentralisasi penerimaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina, namun desentralisasi pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode tahun 1994 sampai dengan 1999 di mana diberlakukan sistem perpajakan yang baru, hasil studi menunjukkan bahwa desentralisasi pengeluaran tidak mempunyai hubungan secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi penerimaan mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil studi ini juga tidak mendukung hasil studi Davoodi dan Zou (1998) tentang sistem desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang tinggi di negara-negara berkembang mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun Davoodi dan Zou (1998) menemukan pengaruh positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah di negara maju, yaitu Amerika Serikat.

Menurut Suparmoko (1996), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi, di mana salah satunya adalah bahwa pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang, hasil studi mendukung pendapat Suparmoko. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah akan terkait dengan alokasi dana untuk pembangunan dalam berbagai bidang. Dengan semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah pada pembangunan sektor publik seperti pendidikan maupun kesehatan, serta sarana publik lainnya dimungkinkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil studi ini mendukung teori desentralisasi fiskal Oates (1993). Menurut Oates desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat

diakses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Menurut Bodman dan Ford (2006) dalam studinya di negara OECD menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan *growth enhancing* jika menuju efisiensi peningkatan persediaan barang-barang publik (efisiensi konsumen), atau jika ke arah sub nasional inovasi, produktivitas dan pengurangan biaya yang meningkatkan kompetisi antar pemerintah (efisiensi produsen). Menurut Bodman dan Ford terdapat bukti suatu hubungan langsung antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi di negara OECD. Desentralisasi di tingkat sub nasional, pemerintah akan semakin dekat dengan rakyat dan berpotensi untuk lebih mampu untuk meliputi pilihan lokal dalam pengambilan keputusan fiskal.

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2001 menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, serta penyediaan infrastruktur. Salah satu kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan tersebut adalah respon pemerintah terhadap desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Dua sisi ekstrim dari respon dimaksud adalah, (a) apakah pemerintah daerah memusatkan

perhatiannya untuk memperbesar peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya, ataukah (b) pemerintah daerah mementingkan peningkatan efektivitas pengeluarannya (*expenditure policy*) dalam berbagai bidang. Hingga saat ini kecenderungan yang nampak adalah terjadinya pilihan, dan pilihan lebih banyak jatuh pada bentuk respon mengupayakan peningkatan PAD. Dengan kata lain, perhatian pada aspek peningkatan efektivitas sisi pengeluaran APBD kurang optimal.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan berpegang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 22, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban antara lain untuk mengembangkan sumber daya produktif di daerah, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Untuk mampu mewujudkan kewajiban tersebut di daerah Jawa Tengah telah dibentuk Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) Provinsi Jawa Tengah. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) di Provinsi Jawa Tengah terbentuk pada tahun 2001 sebagai pembaharuan konsep pengembangan kewilayahan yang telah ada sebelumnya tetapi tidak berfungsi secara efektif dan sudah tidak berlaku lagi, yaitu konsep Satuan Pembangunan Wilayah (SWP). Bakorlin ini mempunyai visi : “Kemandirian Jawa Tengah melalui Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota”. Adapun misinya adalah :

1. Meningkatkan koordinasi pembangunan lintas kabupaten/kota.
2. Mendinamisasikan dan mediasi pembangunan serta konflik kepentingan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan fasilitas pembangunan lintas kabupaten/kota.

Tujuan pengembangan fungsi koordinasi untuk mendukung optimalisasi kinerja Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) Provinsi Jawa Tengah melalui :

1. Meningkatkan koordinasi di bidang pembangunan yang menyangkut lintas kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar kabupaten/kota serta antara kabupaten/kota dengan provinsi.
3. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul pada lintas kabupaten/kota.

Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) I (satu) dengan pusat administratif di Kabupaten Pati meliputi 11 (sebelas) daerah, yaitu :
 - a. Kabupaten Grobogan
 - b. Kabupaten Blora
 - c. Kabupaten Rembang
 - d. Kabupaten Pati
 - e. Kabupaten Kudus
 - f. Kabupaten Jepara
 - g. Kabupaten Demak
 - h. Kabupaten Semarang
 - i. Kabupaten Kendal
 - j. Kota Semarang
 - k. Kota Salatiga

2. **Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II (dua)** dengan pusat administratif di Kota Magelang terdiri 13 (tiga belas) daerah, yaitu :
 - a. Kabupaten Kebumen
 - b. Kabupaten Purworejo
 - c. Kabupaten Wonosobo
 - d. Kabupaten Magelang
 - e. Kabupaten Boyolali
 - f. Kabupaten Klaten
 - g. Kabupaten Sukoharjo
 - h. Kabupaten Wonogiri
 - i. Kabupaten Karanganyar
 - j. Kabupaten Sragen
 - k. Kabupaten Temanggung
 - l. Kota Magelang
 - m. Kota Surakarta

3. **Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) III (tiga)** dengan pusat administratif di Kabupaten Banyumas meliputi 11 (sebelas) daerah, yaitu :
 - a. Kabupaten Cilacap
 - b. Kabupaten Banyumas
 - c. Kabupaten Purbalingga
 - d. Kabupaten Banjarnegara
 - e. Kabupaten Batang
 - f. Kabupaten Pekalongan

- g. Kabupaten Pemalang
- h. Kabupaten Tegal
- i. Kabupaten Brebes
- j. Kota Pekalongan
- k. Kota Tegal

Dasar terbentuknya ketiga Bakorlin di Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan historis administratif yaitu karesidenan yang sekarang sudah tidak berlaku lagi (secara historis di Provinsi Jawa Tengah semula terdapat 4 (empat) wilayah karesidenan). Selain itu juga berdasarkan kedekatan lokasi kabupaten/kota satu dengan yang lainnya, serta jalur jalan yang menghubungkan antar daerah. Berdasarkan kondisi eksisting yang ada selama periode 2001 samapi dengan 2005 masing-masing daerah dalam tiap Bakorlin belum menunjukkan adanya keseimbangan dalam kondisi ekonomi maupun sosial. Misalnya masih adanya kesenjangan ekonomi antar daerah, tingkat pengangguran yang relatif tinggi, serta kesejahteraan yang belum merata.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka studi ini mencoba untuk membuat Bakorlin di Provinsi Jawa Tengah dengan format yang baru. Sebagai dasar pertimbangannya adalah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 195 ayat 1 yang menyatakan bahwa, dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Pertimbangan lainnya adalah kondisi ekonomi makro daerah yang dicerminkan oleh peranan masing-masing sektor terhadap PDRB, kedekatan lokasi antar daerah, serta jalur jalan yang menghubungkan antar daerah. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) modifikasi dari studi ini jumlahnya 6 (enam), yaitu sebagai berikut :

1. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) I meliputi :
 - a. Kabupaten Grobogan
 - b. Kabupaten Blora
 - c. Kabupaten Rembang
 - d. Kabupaten Pati
 - e. Kabupaten Kudus
 - f. Kabupaten Jepara

Untuk memacu pertumbuhan daerah, pusat pertumbuhan (*growth pole*) wilayah di Bakorlin I adalah di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Blora. Kabupaten Kudus kondisi makro ekonomi baik, secara makro perekonomiannya berbasis sektor sekunder (62,56 %) dan tersier (33,70%) (lihat Tabel 6.1) dengan fasilitas umum yang cukup memadai dan secara lokasi berdekatan dengan daerah penyangga. Di Kabupaten Kudus telah berkembang beberapa industri menengah dan besar seperti PT.Jarum Kudus, PT. Pura Barutama, PO. Nusantara dan sebagainya. Kudus memerlukan daerah penyangga (*hinterland*) untuk kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan pemukiman seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. Kabupaten Blora sebagai pusat pertumbuhan karena makro ekonomi sangat

berkembang dengan basis sektor primer (52,15 %), telah dieksplorasi sektor pertambangan dan penggalian (minyak bumi blok Cepu), dengan kandungan minyak yang sangat besar. Daerah penyangganya meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Pati, dan daerah sekitarnya.

2. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II meliputi daerah :

- a. Kabupaten Demak
- b. Kabupaten Semarang
- c. Kabupaten Kendal
- d. Kota Semarang
- e. Kota Salatiga

Untuk memacu pertumbuhan daerah pusat pertumbuhan (*growth pole*) wilayah di Bakorlin II adalah di Kota Semarang. Kota Semarang secara makro perekonomiannya berbasis sektor sekunder (41,71%) dan tersier (57,11%) (lihat Tabel 6.1) dengan fasilitas umum yang sangat memadai (Bandara, Pelabuhan, jalan raya, perbankan), dan secara lokasi berdekatan dengan daerah penyangga. Kota Semarang sebagai *growth pole* memerlukan daerah penyangga (*hinterland*) untuk kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, pemukiman seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kota Salatiga.

3. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) III meliputi daerah :

- a. Kota Surakarta
- b. Kabupaten Boyolali
- c. Kabupaten Klaten

- d. Kabupaten Sukoharjo
- e. Kabupaten Wonogiri
- f. Kabupaten Karanganyar
- g. Kabupaten Sragen

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) wilayah di Bakorlin III adalah di Kota Surakarta. Kota Surakarta secara makro perekonomiannya berbasis sektor sekunder (41,90%) dan tersier (56,90%, lihat Tabel 6.2), dengan fasilitas umum yang sangat memadai (Bandara, jalan raya, pasar, perbankan), dan secara lokasi berdekatan dengan daerah penyangga. Kota Surakarta sebagai *growth pole* memerlukan daerah penyangga (*hinterland*) untuk kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, tempat pemukiman seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri.

4. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) IV meliputi daerah :

- a. Kota Magelang
- b. Kabupaten Magelang
- c. Kabupaten Kebumen
- d. Kabupaten Purworejo
- e. Kabupaten Wonosobo
- f. Kabupaten Temanggung

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) wilayah di Bakorlin IV adalah di Kota Magelang. Kota Magelang secara makro perekonomiannya berbasis sektor sekunder (22,28%) dan tersier (74,90%) (lihat Tabel 6.2) dengan fasilitas umum yang cukup memadai (Wisata, jalan raya, perbankan), dan secara lokasi berdekatan dengan daerah

penyangga. Kota Magelang sebagai *growth pole* memerlukan daerah penyangga (*hinterland*) untuk kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja seperti Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung.

5. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) V meliputi daerah :

- a. Kabupaten Cilacap
- b. Kabupaten Banyumas
- c. Kabupaten Purbalingga
- d. Kabupaten Banjarnegara

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) wilayah di Bakorlin V adalah di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap secara makro perekonomiannya berbasis sektor sekunder (51,06%) dan tersier (34,46%) (lihat Tabel 6.3) dengan fasilitas umum yang cukup memadai (Bandara, Pelabuhan, jalan raya, perbankan), dan secara lokasi berdekatan dengan daerah penyangga. Kabupaten Cilacap sebagai *growth pole* memerlukan daerah penyangga (*hinterland*) untuk kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan pemukiman yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara.

6. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) VI meliputi daerah :

- a. Kota Tegal
- b. Kabupaten Tegal
- c. Kabupaten Brebes
- d. Kabupaten Batang

- e. Kabupaten Pekalongan
- f. Kabupaten Pemasang
- g. Kota Pekalongan

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) wilayah di Bakorlin VI adalah di Kota Tegal. Kota Tegal secara makro perekonomiannya berbasis sektor sekunder (36,23%) dan tersier (54,12 %) (lihat Tabel 6.3) dengan fasilitas umum yang cukup memadai (Pelabuhan, jalan raya, perbankan, pasar), dan secara lokasi berdekatan dengan daerah penyangga. Kota Tegal sebagai *growth pole* memerlukan daerah penyangga (*hinterland*) untuk kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan pemukiman yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Batang.

Berdasarkan perubahan Bakorlin di Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan masing-masing kabupaten/kota meningkatkan koordinasi pembangunan, mendinamisasikan serta melakukan mediasi pembangunan dan konflik kepentingan antar kabupaten/kota, serta meningkatkan fasilitasi pembangunan lintas kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu Bakorlin melakukan koordinasi program-programnya, sehingga terjadi keseimbangan (tidak terjadi kesenjangan antar daerah) dan keserasian dalam mendukung kemandirian Jawa Tengah melalui pembangunan di masing-masing daerah kabupaten/kota. Hal ini memperkuat pendapat Tarigan (2005:28) dan Arsyad (1999:117) tentang teori basis ekonomi (*Economic Base Theory*), bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa di luar daerah. Pengertian permintaan dari luar daerah dapat saja dimaksudkan sebagai permintaan barang dan jasa yang belum mampu dipenuhi oleh kabupaten/kota yang

satu dapat dipenuhi dari luar daerahnya, tetapi masih dalam lingkup satu Bakorlin. Hal ini juga memperkuat teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*), bahwa setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya industri dan bahan baku. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan *output* maupun jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Beberapa daerah dapat menjadi wilayah penyedia jasa, sedangkan daerah lainnya sebagai daerah pemukiman. Lebih lanjut hal tersebut juga memperkuat pendapat Aziz (1994:125) tentang teori *Complete Convergence*. Teori ini menggambarkan keadaan mengalirnya modal dari satu daerah ke daerah lain yang bukan hanya membuat produktivitas modal antar daerah sama (terjadi keseimbangan), tetapi juga proporsi modal dan tenaga kerja kedua daerah akan sama. Jadi proses penyamaan (*convergence*) akan lengkap dan lebih sempurna.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU No.32 tahun 2004, dan sesuai dengan pendapat Rasyid (2000:89) bahwa dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal saat ini, daerah otonom dengan kewenangan dan kemampuannya menggali potensi daerahnya seoptimal mungkin diharapkan lebih mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam memobilisasi dan menggunakan sumber daya lokal guna meningkatkan *public service* (Peterson, 1996: 26). Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan selalu meningkat disertai dengan pemerataan hasil-hasilnya sebagai suatu syarat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada umumnya ditunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.

Untuk lebih memperkuat uraian sebelumnya, maka akan dijelaskan distribusi sektoral atas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota masing-masing daerah. Pengelompokan sektor dalam PDRB terbagi atas tiga kelompok yaitu:

1. Sektor primer, terdiri dari sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian.
2. Sektor sekunder, terdiri dari sektor industri pengoahan , listrik, gas dan air bersih, serta konstruksi.
3. Sektor tersier, terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Hasil perhitungan pengelompokan sektor dalam PDRB menurut Bakorlin dengan mengelompokkan menjadi tiga kelompok sektor tampak pada Tabel 6.1, Tabel 6.2, dan Tabel 6.3. Berdasarkan data Tabel 6.1, sumbangan rata-rata masing-masing sektor di Bakorlin I selama tahun 2001 sampai dengan 2005 di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh sektor tersier (43,06%), diikuti oleh sektor sekunder (28,99%), dan sektor primer (27,95%).

Daerah kabupaten/kota di Bakorlin I aktivitas perekonomiannya lebih banyak ditopang oleh sektor sekunder dan tersier. Adapun dominasi sektor tersier yang utama adalah dari perdagangan. Hal ini mengingat wilayah Bakorlin I berada di daerah Pantura Jawa Tengah yang menghubungkan jalur transportasi perdagangan antara Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dengan Provinsi Jawa Timur maupun dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia melalui Bandara internasional Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang.

Tabel 6.1
RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN I
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005
(DALAM PERSEN)

No	Kabupaten/Kota	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	Total
1	Kab. Grobogan	43,14	9,27	47,59	100,00
2	Kab. Blora	52,15	11,37	36,48	100,00
3	Kab. Rembang	49,60	10,27	40,13	100,00
4	Kab. Pati	40,80	21,35	37,85	100,00
5	Kab. Kudus	3,74	62,56	33,70	100,00
6	Kab. Jepara	25,40	32,46	42,14	100,00
7	Kab. Demak	44,05	16,30	39,65	100,00
8	Kab. Semarang	14,30	50,77	34,92	100,00
9	Kab. Kendal	25,44	43,87	30,69	100,00
10	Kota Salatiga	6,04	28,86	65,10	100,00
11	Kota Semarang	1,18	41,71	57,11	100,00
	Rata – rata	27,95	28,99	43,06	100,00

Sumber : BPS, Jawa Tengah, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2001 sampai dengan 2005, diolah

Dilihat dari struktur ekonominya di kabupaten/kota Bakorlin I sudah terjadi pergeseran dari sektor primer ke sekunder, meskipun belum semua daerah mengalami pergeseran struktur ekonomi ke sektor sekunder. Kabupaten/Kota di Bakorlin I yang telah mengalami pergeseran struktur ekonomi, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Salatiga. Hanya empat daerah dari sebelas daerah di Bakorlin I yang struktur ekonominya masih tetap didominasi sektor primer, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati. Di daerah-daerah ini secara geografis terletak lebih ke dalam (selatan) dari jalur Pantura, dan secara topografis maupun historis merupakan daerah agraris.

Berbeda dengan daerah-daerah di Bakorlin I, daerah kabupaten/kota di Bakorlin II terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan tanah yang subur. Kabupaten/Kota di Bakorlin II struktur ekonominya sebagian besar berbasis pada sektor primer dengan dominasi pada sektor pertanian (lihat Tabel 6.2). Dilihat dari sumbangan masing-masing sektor selama 2001 sampai dengan 2005, kontribusi rata-rata terbesar adalah sektor tersier sebesar 44,05 persen, diikuti sektor primer sebesar 30,44 persen, dan sektor sekunder 25,51 persen.

Tabel 6.2
RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN II
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005
(DALAM PERSEN)

No	Kabupaten/Kota	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	Total
1	Kab. Kebumen	43,57	14,58	41,85	100,00
2	Kab. Purworejo	40,52	14,60	44,88	100,00
3	Kab. Wonosobo	49,46	15,74	34,80	100,00
4	Kab. Magelang	35,26	27,27	37,47	100,00
5	Kab. Boyolali	36,42	20,93	42,65	100,00
6	Kab. Klaten	22,94	32,24	44,82	100,00
7	Kab. Sukoharjo	21,97	33,67	44,36	100,00
8	Kab. Wonogiri	51,09	9,56	39,35	100,00
9	Kab. Karanganyar	20,02	47,94	32,04	100,00
10	Kab. Sragen	37,60	25,86	36,55	100,00
11	Kab. Temanggung	34,11	25,85	40,05	100,00
12	Kota Magelang	2,83	22,28	74,90	100,00
13	Kota Surakarta	1,20	41,90	56,90	100,00
	Rata – rata	30,44	25,51	44,05	100,03

Sumber : BPS, Jawa Tengah, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
2001 sampai dengan 2005, diolah

Daerah kabupaten/kota di Bakorlin II merupakan daerah penyangga pangan (beras) di Jawa Tengah maupun nasional. Seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten

Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen. Terkait dengan stok pangan nasional yang selalu defisit, daerah-daerah penyangga pangan khususnya di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya dan mampu memenuhi kekurangan stok pangan nasional.

Berkaitan dengan kondisi pangan di negara kita, menurut Santosa (2008) negara Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas pangan, sehingga Indonesia merasakan dampak paling buruk akibat kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi akhir-akhir ini, karena negara kita merupakan importir pangan terbesar. Kedaulatan pangan terjadi apabila negara kita tidak didekte oleh fluktuasi produksi dan harga pangan internasional, tidak tergantung benih yang dikuasai perusahaan multinasional, petani berdaulat atas tanah dan produknya, serta pemerintah tidak membiarkan petani sendirian bersaing di pasar global. Kenaikan harga komoditas pangan dunia merupakan gabungan dari tiga faktor yang saling mempengaruhi, yaitu kenaikan harga minyak bumi yang berdampak pada kenaikan biaya produksi, perubahan iklim global, dan konversi komoditas pangan ke bahan bakar nabati.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara kita, produktivitas lahan harus lebih baik dengan didukung teknologi tepat guna. Produktivitas lahan sangat ditentukan oleh kesuburan tanah dan teknologi yang digunakan. Di lain pihak luas lahan pertanian yang ada semakin menyusut, beralih fungsi sebagai area pemukiman maupun industri karena nilai tambahnya (*added value*) lebih besar. Melihat kenyataan ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu menjaga dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk stabilitas stok pangan dengan memberikan kebijakan yang memihak pada petani. Beberapa dekade ini para petani

kita cenderung mengalami posisi yang lemah dan merugi, dengan nilai tukar (*term of trade*) *output* yang menurun, hal ini akan menurunkan motivasi para petani beraktivitas di sektor pertanian dan beralih ke sektor lain.

Beberapa daerah di Bakorlin II yang merupakan daerah industri dan jasa seperti Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar tetap dipertahankan. Kota Surakarta merupakan kota perdagangan (sentra grosir industri garmen) dan daerah pariwisata (obyek wisata alam, keraton dan kuliner). Kota Surakarta berada di tengah jalur transportasi yang menghubungkan antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Semarang (Konsep Joglosemar), serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Provinsi Jawa Timur melalui jalur selatan. Sementara itu Kota Magelang juga merupakan daerah dengan basis sektor jasa (wisata Candi Borobudur, perguruan tinggi, dan perdagangan) dan berada di tengah jalur transportasi yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Provinsi DIY.

Kabupaten/Kota di Bakorlin III (lihat Tabel 6.3) terletak di daerah Jawa Tengah bagian barat membentang dari selatan (Kabupaten Cilacap, Banyumas) sampai utara (Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kota Pekalongan). Daerah di Bakorlin III memiliki potensi ekonomi dan aktivitas ekonomi masyarakat bervariasi. Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas merupakan basis industri (pengilangan minyak, pembangkit listrik batubara), Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Brebes, dan Pemasang basis ekonomi pada sektor primer khususnya pertanian. Sedangkan kawasan Pantura meliputi Kota Tegal, Pekalongan, Kabupaten Batang merupakan basis ekonomi pada industri pengolahan dan perdagangan.

Tabel 6.3
RATA-RATA KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 2000 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN III
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005
(DALAM PERSEN)

No	Kabupaten/Kota	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	Total
1	Kab. Cilacap	14,48	51,06	34,46	100,00
2	Kab. Banyumas	24,25	27,27	48,48	100,00
3	Kab. Purbalingga	37,09	17,60	45,32	100,00
4	Kab. Banjarnegara	40,10	22,20	37,70	100,00
5	Kab. Batang	29,31	35,38	35,31	100,00
6	Kab. Pekalongan	19,36	36,13	44,51	100,00
7	Kab. Pemalang	31,24	26,08	42,68	100,00
8	Kab. Tegal	25,50	28,70	45,81	100,00
9	Kab. Brebes	58,10	12,33	29,57	100,00
10	Kota Pekalongan	13,78	33,07	53,15	100,00
11	Kota Tegal	9,65	36,23	54,12	100,00
	Rata – rata	27,53	30,19	42,28	100,00

Sumber : BPS, Jawa Tengah, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2001 sampai dengan 2005, diolah

Dilihat dari struktur ekonomi secara keseluruhan, PDRB kabupaten/kota di Bakorlin III didominasi oleh sektor tersier (42,28 %), diikuti oleh sektor sekunder (30,19 %), dan sektor primer menyumbang paling kecil (27,53 %). Sektor tersier didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan sektor sekunder didominasi oleh industri pengolahan dan sektor primer didominasi oleh sektor pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu daerah kontribusi sektor primer cenderung semakin menurun, sebaliknya sektor sekunder semakin meningkat, namun tidak mengurangi atau bahkan meningkatkan sektor tersiernya. Hal ini berarti sektor tersier merupakan sektor yang menyeimbangkan antara sektor primer dan sektor sekunder

(Mursinto, 2004:272). Realita kondisi perekonomian ini lebih memperkuat pendapat Kuznets, Kaldor, dan Hirschman, Djojohadikusumo.

Menurut Kuznets (Pressman, 2000:77) pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang besar. Dari kedua faktor ini pertumbuhan produktivitas jelas lebih penting, karena seperti yang ditunjukkan oleh Adam Smith, pertumbuhan produktivitas inilah yang menghasilkan peningkatan dalam standar kehidupan. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan inovasi teknologi sebagai cara meningkatkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

Sementara itu menurut Kaldor (Pressman,2000: 216) terdapat korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan *output* manufaktur. Angka pertumbuhan agregat tergantung pada tingkat pertumbuhan manufaktur (daripada sebaliknya) dan hal ini dapat dijelaskan dengan meningkatnya *return to scale* dalam aktivitas industri. Pertumbuhan manufaktur berkorelasi dengan pertumbuhan produktivitas sektor ekonomi yang lain. Ketika sektor manufaktur tumbuh, sektor ini menyerap surplus tenaga kerja di sektor pertanian. Akibatnya produktivitas dan standar kehidupan bagi sektor pertanian akan lebih baik. Selain itu industrialisasi cenderung mempercepat tingkat perubahan teknologi, tidak hanya pada satu sektor tetapi dalam ekonomi secara keseluruhan. Sesuai dengan Hirschman (Arsyad,1999:155) bahwa terdapat keterkaitan sektoral dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang pesat dari satu atau beberapa industri akan mendorong industri lainnya. Keterkaitan antar sektor tersebut bisa keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect*) atau bisa juga keterkaitan ke depan (*forward linkage*

effect). Untuk itu pemerintah diharapkan terus mendorong sektor industri manufaktur dalam negeri.

Pendapat dari ketiga ahli tersebut diperkuat oleh Djojohadikusumo (1994:6), bahwa salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan produksi. Oleh karena itu proses pembangunan menghendaki perubahan pada komposisi produksi di antara sektor-sektor ekonomi, serta perubahan kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini berarti perubahan adalah suatu transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur ekonomi, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat.

Menurut Schumpeter (Sukirno, 2000: 445), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa *entrepreneur*. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus tetapi bisa mengalami keadaan di mana adakalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (*entrepreneur*) melakukan *inovasi* atau pembaharuan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Memperbaiki mutu sesuatu barang, menciptakan model mobil yang baru, atau menciptakan model yang lebih canggih adalah beberapa contoh dari kegiatan para pengusaha melakukan inovasi. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Proses *multiplier* yang ditimbulkannya akan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dalam kegiatan ekonomi dan perekonomian mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih baik, ketika para pengusaha melakukan inovasi yang baru yang akan menggalakkan investasi, sehingga mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan

dalam produksi nasional.

Memperhatikan kenyataan tersebut, maka program pembangunan ekonomi untuk masing-masing Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) harus berbeda satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Hal ini tidak berarti bahwa semua Bakorlin harus dikembangkan seragam. Program pembangunan masing-masing daerah sangat ditentukan oleh potensi masing-masing daerah dan skala prioritas. Meskipun dalam jangka panjang diharapkan semua daerah di setiap Bakorlin lebih diarahkan pada sektor sekunder dan tersier. Hal tersebut memperkuat pendapat Schumpeter (Pressman, 2000:156), bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang selalu merupakan perhatian sentral ilmu ekonomi. Adam Smith dan sebagian besar ahli ekonomi klasik melihat kapitalisme sebagai cara terbaik untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang pesat. Menjelang akhir abad 19, para ahli ekonomi lebih memfokuskan diri pada efisiensi ekonomi dan kehilangan minatnya terhadap isu-isu pertumbuhan. Sumbangan utama Schumpeter adalah mengarahkan kembali perhatian dari para pakar ekonomi kepada isu pertumbuhan jangka panjang. Dalam melakukan hal itu Schumpeter menekankan pada pentingnya faktor-faktor non ekonomi, seperti inovasi dan pengusaha untuk kebaikan, kemajuan, dan pertumbuhan kapitalisme.

Berhasil tidaknya suatu daerah dalam pembangunan ekonomi seperti diungkapkan dalam teori di atas, sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di masing-masing pemerintah daerah. Setiap daerah dalam tiap Bakorlin mempunyai potensi dan kondisi yang tidak sama, sehingga membawa implikasi pada aplikasi pembangunan yang berbeda pula. Penerapan dan peniruan mentah-mentah pola kebijakan pembangunan yang pernah diterapkan dan berhasil di suatu daerah belum

tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Sehingga dalam membangun suatu daerah, pola pembangunan dan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi, potensi di daerah yang bersangkutan.

Bakorlin I yang meliputi daerah : Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga kebijakan pembangunannya diutamakan pada sektor sekunder yang mengarah pada sektor tersier. Pusat pertumbuhan (*growth pole*) ekonomi wilayah di Bakorlin I sebaiknya ada 3 (tiga) yaitu : pertama, Kota Semarang, karena fasilitas publik yang lengkap dan sebagai pusat perdagangan dengan wilayah *hinterland* Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga. Kedua, Kabupaten Kudus sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah timur, karena di daerah ini telah berdiri beberapa industri besar seperti PT. Jarum Kudus, PT. Pura Barutama, PO.Nusantara wilayah *hinterland* Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan. Ketiga, Kabupaten Blora untuk pusat pertumbuhan wilayah Bakorlin I bagian tenggara dengan wilayah *hinterland* Kabupaten Rembang dan Grobogan, karena di area ini telah dimulai dieksplorasi minyak bumi yaitu blok Cepu dengan kandungan minyak yang sangat besar.

Arah pembangunan ekonomi Kota Semarang pada sektor tersier dan sekunder utamanya perdagangan hotel dan restoran serta jasa-jasa serta industri pengolahan. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana penunjangnya telah ada tinggal dilakukan pengembangannya. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan pintu gerbang internasional Jawa Tengah telah terdapat suatu anjungan semacam Taman Mini Indonesia Indah namun bersifat lokal dengan nama "Taman Maerokoco". Di

tempat ini setiap tahun (sekitar bulan Agustus) digelar suatu acara Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) dengan menampilkan potensi dan berbagai komoditas unggulan masing-masing daerah di Jawa Tengah. *Event* ini bisa sebagai sarana informasi dan promosi bagi para investor yang mau berinvestasi di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sektor sekunder (dalam hal ini industri pengolahan) yang telah berkembang di kabupaten/kota Bakorlin I supaya tetap dipertahankan dan diarahkan pengembangannya di sekitar Kota Semarang untuk menghindari kejenuhan dan kesemrawutan Kota Semarang. Perluasan sektor sekunder ke arah barat adalah di Kabupaten Kendal, ke arah selatan di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, dan ke arah timur di Kabupaten Demak, Pati serta Kabupaten Rembang. Daerah di sekitar Kota Semarang tersebut masih relatif luas wilayahnya dan cukup tersedia sarana prasarana yang memadai. Sementara itu di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara sudah tumbuh industri-industri menengah dan besar seperti PT. Jarum Kudus, PT. Pura Barutama, PT. Garuda Food dan sebagainya. Hal ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan di daerah Bakorlin I bagian timur.

Daerah-daerah Bakorlin I yang ekondisi ekonominya relatif masih tradisional (dominasi sektor pertanian) yaitu : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati arah pembangunannya masih pada sektor primer dengan bertahap menuju ke sektor sekunder. Daerah tersebut merupakan wilayah *hinterland* dengan kegiatan utama sektor primer (terutama pertanian, kecuali di Blora ada pengeboran minyak blok Cepu) diharapkan terus maju untuk menjadi penyangga pangan di daerah ini dan Jawa Tengah serta nasional pada umumnya. Pengembangan sektor tersier di Bakorlin I selain perdagangan, hotel dan restoran

adalah optimalisasi wisata, yaitu wisata bahari di Pulau Karimunjawa yang merupakan Taman Laut Nasional dengan pemandangan dasar laut yang sangat indah serta alami dan langka di Indonesia.

Pembangunan ekonomi untuk daerah Bakorlin I memperkuat pendapat dari Richardson (1995), Arsyad (1999) dan Tarigan (2005) mengenai teori basis ekonomi (*economic base theory*). Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Pembangunan ekonomi di Bakorlin I tersebut juga memperkuat tentang teori lokasi. Para ekonom regional yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Hal ini terkait dengan pemanfaatan lokasi yang strategis dan unsur aglomerasi, perusahaan atau industri cenderung memanfaatkan keuntungan aglomerasi, baik keuntungan-keuntungan internal (*internal economies*) maupun keuntungan eksternal (*external economies*) Richardson (1995:55).

Daerah-daerah di Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) II (dua) meliputi : Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo arah pembangunan ekonominya pada sektor primer utamanya adalah sektor pertanian karena sebagian besar PDRB nya daerah ini disumbang dari sektor primer khususnya sektor pertanian karena didukung oleh kondisi geografis yang memadai untuk

mengembangkan sektor pertanian. Melihat kondisi ekonomi (PDRB) dan geografis kabupaten/kota di Bakorlin II arah kebijakan pembangunannya pada sektor primer dengan pengembangan menuju pada sektor sekunder. Pusat pertumbuhan wilayah di Bakorlin II diusulkan ada 2 (dua) yaitu : pertama, Kota Surakarta karena dilihat fasilitasnya lebih lengkap dan cukup memadai, di Kota Surakarta selama ini telah berkembang sebagai pusat perdagangan antar daerah bahkan ekspor. Kota Surakarta dan sekitarnya merupakan daerah industri, sehingga diharapkan mampu memicu serta mamacu sektor sekunder di kawasan ini. Wilayah *hinterland* meliputi Kabupaten Pusat Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Pusat pertumbuhan kedua di Kota Magelang, karena daerah ini potensi pertaniannya sangat besar dan didukung oleh sarana pemasaran hasil-hasil pertanian yang memadai, selain itu posisinya di tengah-tengah jalur transportasi antara dua pusat perdagangan yaitu DIY dan Kota Semarang. Jadi kabupaten/kota yang telah berkembang industri pengolahan maupun wisata dan perdagangan tetap dipertahankan untuk menjadi kutub pertumbuhan daerah sekitarnya yaitu Kota Surakarta, Kota Magelang. Kemudian daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung pangan regional maupun nasional diarahkan pola pembangunan pada sektor primer yang dinamis mengarah pada sektor sekunder dan tersier.

Arah pembangunan ekonomi daerah Bakorlin II memperkuat pendapat Samuelson (1995:124) tentang teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*). Menurut Samuelson setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan.

Dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pasar luar negeri. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Misalnya usaha perkebunan dibuat bersinergi dengan usaha peternakan. Arah pembangunan ini juga memperkuat pendapat Aziz (1994 : 125) tentang teori *complete convergency*. Teori tersebut menggambarkan keadaan mengalirnya modal dari satu daerah ke daerah lain yang bukan hanya membuat produktivitas modal antar daerah sama atau terjadi keseimbangan, tetapi juga proporsi modal dan tenaga kerja di kedua daerah akan sama.

Daerah Bakorlin III (tiga) dengan daerah meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kota Tegal, Kota Pekalongan. Berdasarkan kondisi ekonomi maupun historis aktivitas ekonomi masyarakatnya arah pembangunan ekonomi di daerah Bakorlin III adalah pada sektor sekunder dalam hal ini industri manufaktur karena sebagian besar PDRB di daerah Bakorlin III disumbang oleh sekunder dan sektor tersier. Sektor tersier berkembang baik apabila didukung oleh sektor sekunder maupun primer yang kuat, oleh karena itu fokus utama pembangunan ekonomi pada sektor sekunder. Pusat pertumbuhan ekonomi daerah Bakorlin III sebaiknya ada tiga daerah, yaitu : pertama, di Kota Tegal dengan wilayah *hinterland* Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang. Kota Tegal diharapkan menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) karena di daerah ini secara historis masyarakatnya telah

mempunyai jiwa wirausaha di berbagai bidang industri (seperti industri peralatan pertanian dan rumah, industri makanan dan minuman), selain itu kondisi ekonomi riilnya didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Kota Tegal selain merupakan daerah industri dan perdagangan dilihat dari posisinya sangat strategis yaitu di jalur pantura serta dekat dengan pusat perdagangan internasional yaitu Jakarta.

Pusat pertumbuhan kedua adalah Kota Pekalongan dengan wilayah *hinterland* Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang. Kota Pekalongan secara historis telah berkembang kawasan industri tekstil dan bahan baku dari tekstil (seperti industri batik), sentra batik Pekalongan saat ini semakin berkembang dengan area pemasaran meliputi pasar regional dan nasional bahkan internasional. Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana penunjang cukup memadai, selain itu daerah ini persis berada di jalur utama Pantura dan dekat dengan pasar utama yaitu Jakarta dan Kota Semarang. Pusat pertumbuhan ketiga di Kabupaten Cilacap wilayah *hinterland* Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara. Di Kabupaten Cilacap telah berkembang industri pengilangan minyak dan pembangkit listrik tenaga batubara, serta UKM berbagai produk yang telah lama berkembang di Cilacap. Di Kabupaten Cilacap memiliki fasilitas umum yang cukup baik seperti pelabuhan, lapangan udara (Tunggul Wulung) dan transportasi darat yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Timur melalui jalur selatan. Sehingga tumbuh dan berkembangnya daerah ini akan menjadi pemicu serta pemacu daerah di sekitarnya. Beberapa daerah yang masih eksis sektor primernya seperti Kabupaten Brebes dan Banjarnegara supaya tetap dipertahankan karena mampu menjadi penyangga kebutuhan pokok di Jawa Tengah bahkan telah diekspor ke luar daerah. Di

Kabupaten Brebes sudah lama menjadi pemasok kebutuhan pangan dan sayuran di tingkat nasional seperti bawang merah, cabe, telur dan sebagainya.

6.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesenjangan Antar Daerah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk wewenang fungsi pemerintah. Dalam era desentralisasi fiskal tantangan utama bagi pemerintah dalam pembangunan bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin, tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang disalurkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk membelanjakan anggaran tambahan mereka, seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan sarana publik dan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pos pengeluaran paling besar oleh pemerintah daerah adalah untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sehingga sektor-sektor lain tidak menerima cukup alokasi anggaran terutama sektor-sektor yang mampu menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian.

Kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia telah terjadi sebelum maupun selama pelaksanaan desentralisasi fiskal. Muncul anggapan bahwa otonomi daerah hanya akan menyebabkan masalah baru yaitu kesenjangan ekonomi antar daerah, dikarenakan faktor perbedaan kekayaan akan sumber daya alam. Daerah dengan kekayaan sumber daya alam lebih besar mendapat bagian yang lebih besar dalam perolehan sumber daya alam, sebaliknya bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam. Apabila desain pemerintah dalam pembagian kewenangan desentralisasi fiskal kurang ada upaya untuk mendistribusikan sumber-sumber daya alam dan potensi fiskal ke daerah miskin bisa mengakibatkan kesenjangan antar daerah

semakin lebar. Namun demikian kekawatiran ini diantisipasi oleh pemerintah dengan memberikan dana perimbangan berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.17 halaman 165), menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap kesenjangan antar daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur yang bertanda negatif yaitu sebesar $-0,494$ dengan nilai C.R sebesar $-7,532$, dan probabilitas signifikansi (p) sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan “desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal (yang ditunjukkan oleh semakin besarnya rasio antara PAD dan bagi hasil dengan pengeluaran total daerah) akan mengurangi kesenjangan antar daerah. Berdasarkan data, rasio PAD ditambah bagi hasil dengan realisasi total pengeluaran selama 2001-2005 (lihat Tabel 5.10) selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2001 rasio berkisar antara $0,08$ (Kabupaten Klaten) dan $0,25$ (Kabupaten Cilacap), pada tahun 2005 berubah menjadi lebih besar, berkisar antara $0,10$ (Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo) dan $0,48$ (Kota Semarang). Data kesenjangan ekonomi antar daerah (Tabel 5.13) selama tahun 2001 tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada kisaran antara $0,02$ (Kabupaten Boyolali, Karanganyar) dan $0,36$ (Kabupaten Cilacap). Pada tahun 2005 berkisar antara $0,02$ (Kabupaten Boyolali) dan $0,45$ (Kabupaten Cilacap).

Hasil studi ini mendukung studi Astuti dan Haryanto (2007), dalam studinya tentang pengaruh desentralisasi terhadap kesenjangan antar daerah di Indonesia. Hasil studi Astuti dan Haryanto menyimpulkan, bahwa desentralisasi yang telah berjalan selama ini mampu mengurangi kesenjangan antar daerah di Indonesia, terutama bila semakin besar pengeluaran daerah. Pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mampu memperkecil kesenjangan antar daerah, sementara itu semakin besar tingkat penerimaan suatu daerah maka akan memicu peningkatan terjadinya kesenjangan antar daerah.

Studi lain yang relevan dengan pengaruh desentralisasi dengan kesenjangan dilakukan oleh Lessmann (2006), ia meneliti mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kesenjangan antar daerah di negara-negara OECD. Studinya menggunakan beberapa data statistik ekonomi di 17 negara OECD yang di olah dengan analisis statistik. Studi Lessmann menghasilkan temuan bahwa negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang rendah. Kewenangan dan otonomi lokal terhadap kapasitas fiskal wilayah yang besar akan dapat mengurangi kesenjangan. Namun hasil temuan ini hanya berlaku bagi negara-negara maju. Untuk negara-negara berkembang dan miskin, desentralisasi fiskal mungkin akan menyebabkan tajamnya kesenjangan antar wilayah. Hal ini disebabkan masih tingginya tingkat korupsi dan lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Hasil studi Lessmann ini dikaitkan dengan studi di Jawa Tengah berseberangan, karena negara kita dalam kategori negara berkembang dengan kondisi yang berbeda.

Isu kesenjangan ekonomi antar daerah telah lama menjadi bahan kajian para pakar ekonomi regional. Berbagai sudut pandang dapat dipergunakan untuk menelaah

masalah kesenjangan tersebut. Dari segi normatif, upaya untuk mengurangi kesenjangan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang harus dicapai, terlebih bagi pemerintah kabupaten/kota yang saat ini perannya semakin strategis, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal selain karena adanya penguatan peran pemerintah daerah sebagai konsekuensi logis dari penerapan otonomi yang tengah berlangsung saat ini.

Hasil studi ini sangat mendukung studi Moreno dan Trelers di Andalusia Spanyol (2004), studi di Andalusia Spanyol membuktikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah Andalusia Spanyol telah mampu menurunkan tingkat kesenjangan secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah regional menjadi lebih inovatif mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jasa kemasyarakatan seperti : konseling dan informasi, perlindungan untuk para wanita jompo, janda dan para cacat, yatim piatu, serta penyediaan dana sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 1988 pertumbuhan ekonomi daerah telah ditopang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan studi ini mendukung studi Lindahman *and* Thurmaier (2002), mereka meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil studi mereka disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat (kesejahteraan). Namun walaupun desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya kesenjangan antar daerah, ketidakstabilan makro ekonomi dan sebagainya. Hal ini muncul manakala proses desentralisasi fiskal tidak diikuti oleh kemampuan administratif

pemerintah daerah yang memadai, kualitas sumber daya manusia yang cukup dan perangkat kelembagaan yang baik.

Desentralisasi saat ini telah menjadi perhatian pokok dan merupakan fenomena bagi negara-negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara-negara maju. Desentralisasi seakan menjadi suatu resep atas kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi suatu negara. Dampak utama desentralisasi fiskal adalah kemampuannya untuk menyediakan peningkatan alokasi sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini merupakan pengaruh klasik seperti yang digambarkan oleh Musgrave, bahwa dengan desentralisasi fiskal pemerintah daerah akan lebih baik dalam melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat lokal (*local needs and local demand*) karena pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya.

Terkait dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal/daerah, hasil studi ini mendukung teori Musgrave (1989) dalam teori *fiscal federalism*. Musgrave menekankan pentingnya *revenue and expenditure assignment* antar level pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritik dengan lebih dekat kepada masyarakatnya (*their constituent*), seharusnya pemerintah daerah akan berperilaku berbeda ketika pemerintah pusat menyerahkan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu semakin berusaha meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan desentralisasi fiskal pemerintah daerah akan lebih mudah dalam memobilisasi dan menggunakan sumber daya lokal guna meningkatkan *public service*.

Isu kesenjangan yang muncul selama era orde baru dan masa-masa transisi, akhir-akhir ini mulai berkurang. Hal ini akibat kebijakan fiskal pemerintah yang cenderung diskresioner, yaitu pemerintah melakukan perubahan pengeluarannya dengan lebih besar mendistribusikan ke daerah melalui dana perimbangan yang berbentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil. Hasil studi ini memperkuat teori Harrod-Domar (Sukirno, 2000: 450). Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari teori Keynes yang melihat persoalan pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam model ekonomi makro Keynes, mengandung konsep-konsep agregat yaitu konsumsi agregat, investasi agregat, pengeluaran pemerintah agregat, *output* agregat dan komponen-komponen agregat lainnya. Berdasarkan model ini, pengeluaran pemerintah hanya akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi dalam negeri seandainya terjadi perubahan absolut dalam pengeluaran pemerintah. Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Apabila kapasitas produksi bertambah, maka pendapatan nasional baru akan bertambah dan apabila pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan tercipta, dan kesenjangan ekonomi akan semakin menurun.

6.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Antar Daerah

Masalah kesenjangan ekonomi merupakan masalah pembangunan yang multidimensional. Konflik vertikal antara pusat dan daerah khususnya provinsi-provinsi yang kaya sumber daya alam beberapa tahun yang lalu merupakan ekspresi ketidakpuasan daerah akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menjamin

bahwa kekayaan suatu daerah akan membuat masyarakat di daerah tersebut menjadi lebih makmur. Meskipun kebijakan pemerataan yang dilaksanakan Orde Baru telah mampu menjaga tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar daerah pada tingkat yang rendah, ternyata kebijakan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Gejala ini menunjukkan adanya aspirasi terhadap ketidakmerataan (*aspiration of inequality*) yang pada dasarnya muncul ketika kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah yang relatif kaya ternyata hanya sama atau bahkan lebih rendah dari kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya (Tadjoeddin dkk, 2001: 2).

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan antar daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah (Tabel 5.17 halaman 165), menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap kesenjangan antar daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur yang bertanda negatif yaitu sebesar -0,164 dengan nilai C.R sebesar -2,501, dan probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,013 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “ pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin rendah kesenjangan daerah. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi selama 2001 sampai dengan 2005 berkisar antara berkisar -9,12 % (Kabupaten Blora) dan 30,25 % (Kota Tegal) tahun 2001, dan meningkat pertumbuhannya menjadi berkisar antara 7,14 % (Kabupaten Demak) dan 48,99 % (Kabupaten Cilacap) tahun 2005 (lihat Tabel 5.12). Data kesenjangan ekonomi antar daerah (lihat Tabel 5.13) selama tahun 2001 tingkat

kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada kisaran antara 0,02 (Kabupaten Boyolali, Karanganyar) dan 0,36 (Kabupaten Cilacap). Pada tahun 2005 berkisar antara 0,02 (Kabupaten Boyolali) dan 0,45 (Kabupaten Cilacap).

Hasil studi ini mendukung studi World Bank (1996), bahwa ketimpangan di Indonesia selama periode 1964 sampai dengan 1999 tergolong rendah, dibandingkan dengan berbagai negara lain dan bisa dikatakan tidak menunjukkan gejala melebar (*widening*) selama lebih dari tiga dekade terakhir. Pada saat yang sama Indonesia mencatat angka pertumbuhan yang mengesankan, rata-rata 7 %, sampai datangnya krisis ekonomi akhir 1997, sehingga prestasi ini dihargai sebagai suatu pencapaian pertumbuhan dengan pemerataan.

Hasil studi ini juga sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Arief tentang dampak pertumbuhan terhadap kesenjangan di Indonesia dengan model ekonometrika (1998). Hasil studi Arief menyimpulkan, bahwa hipotesis Kuznets tidak berlaku di Indonesia. Hasil studi Arief secara lebih lengkap menyatakan, bahwa pertumbuhan *output* tidak konflik dengan pemerataan, sehingga distribusi pendapatan hendaklah tetap diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan dan pemerataan pendapatan merupakan komponen yang penting dalam strategi pembangunan yang menyeluruh.

Studi yang dilakukan oleh Sumarto (2002) dari *SMERU Research Institute* menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang, namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi. Pengurangan kesenjangan mengurangi kemiskinan secara signifikan, sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan kesenjangan. Pemerintah harus memberikan hak atas properti dan memberikan akses

terhadap kapital untuk golongan miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan. Hasil studi Sumarto ini sesuai dengan temuan dalam studi ini.

Hasil studi ini juga mendukung studi komprehensif Fields (1990), yang mengamati perubahan dan pola distribusi pendapatan di beberapa negara Amerika Latin dan Asia. Studi Fields menyimpulkan, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh atau tidak terhadap distribusi pendapatan tergantung dari perhatian pemerintah yang ditujukan pada kemiskinan ataukah ketimpangan pendapatan. Di Philipina pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penurunan kemiskinan dan distribusi pendapatan, hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap rakyat miskin. Di sisi lain, Srilangka berhasil dalam mengurangi kesenjangan meskipun tingkat pertumbuhannya rendah, hal ini karena obsesi pemerintah mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan dilakukan secara baik dengan mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil studi ini tidak mendukung studi Bhattacharya dan Sakthivel di India (2004). Studi mereka menganalisis antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan antar wilayah yang terjadi di India. Data yang digunakan adalah data produk domestik bruto, dan pendapatan per kapita sebagai dasar analisis statistik untuk menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi wilayah serta perubahan struktur wilayah-wilayah di India. Hasil studi mereka menghasilkan temuan bahwa pembangunan industri di India berjalan secara cepat dan terpusat di wilayah-wilayah dengan infrastruktur memadai. Pola pembangunan seperti ini semakin mempertajam kesenjangan antar wilayah di India. Temuan mereka yang lain adalah adanya korelasi negatif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan. Hal ini berarti

menimbulkan suatu masalah yang simultan, yaitu beban wilayah yang berat dengan jumlah penduduk banyak dan pendapatan rendah sehingga mendorong migrasi ke wilayah lain yang lebih maju. Di sisi lain, masalah yang terjadi di wilayah tujuan adalah tidak meratanya tingkat pendidikan yang menyebabkan timbulnya masalah sosial, pengangguran yang mengarah pada meningkatnya kriminalitas.

Studi Salvadore Barrios dan Eric Strobl (2006) tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dengan kesenjangan antar wilayah di negara-negara Uni Eropa juga tidak sesuai dengan hasil studi ini. Studi menggunakan data produk domestik bruto yang diolah dengan metode ekonometrik untuk menjelaskan pola hubungan antara PDB (pertumbuhan ekonomi) dengan kesenjangan antar wilayah yang berbentuk U terbalik. Hasil studi Salvadore Barrios dan Eric Strobl memberikan bukti kuat bahwa untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memiliki pola kesenjangan wilayah yang berbentuk huruf U terbalik. Temuan ini sejalan dengan temuan Kuznets, temuan lain dari studi ini membuktikan bahwa variabel yang berkaitan dengan kebijakan penggabungan ekonomi negara-negara Uni Eropa antara lain struktur anggaran negara dan desentralisasi fiskal, serta mekanisme redistribusi jaminan sosial memberi dampak terhadap kesenjangan antar wilayah.

Hasil studi ini juga tidak sepenuhnya mendukung hipotesis Simon Kuznetz (1955) dalam Kuncoro (2003:137), tentang adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*), bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hasil studi ini juga tidak sesuai dengan hasil studi Kuncoro (2003:127) di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah periode 1993-2000. Hasil studi Kuncoro menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan PDRB

dengan indeks ketimpangan Williamson maupun indeks ketimpangan entropi Theil, menunjukkan bahwa kedua indeks tersebut ternyata memperlihatkan trend yang serupa menyerupai huruf U terbalik.

Jika diperhatikan kecenderungan perkembangannya, maka ada dua pola yang mengikuti perubahan tingkat kesenjangan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kecenderungan pertama, semakin menurunnya tingkat kesenjangan yang ditandai dengan semakin kecilnya nilai indeks Williamson. Dalam kondisi seperti ini kecenderungan yang terjadi bersifat konvergen. Kecenderungan kedua, semakin meningkatnya tingkat kesenjangan, yang terjadi yang ditandai dengan semakin besarnya nilai indeks Williamson, sehingga kecenderungan yang terbentuk bersifat divergen. Peningkatan kesenjangan yang terjadi, ternyata turut dipengaruhi pula oleh keberadaan sektor non pertanian di daerah tersebut yang semakin meningkat peranannya.

Pergeseran kesenjangan dalam kaitannya dengan pergeseran tingkat pendapatan per kapita di kabupaten/kota memiliki beberapa kecenderungan. Yaitu, kabupaten/kota dengan tingkat kesenjangan rendah dan tingkat pendapatan per kapita rendah (*low disparity low income*). Kedua kabupaten/kota dengan tingkat kesenjangan tinggi dan tingkat pendapatan per kapita rendah (*high disparity high income*).

Berdasarkan tingkat kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (lihat Tabel 5.13) selama tahun 2001 sampai dengan 2005 tingkat kesenjangan ekonomi berkisar antara 0,02 (Kabupaten Boyolali dan Karanganyar) - 0,45 (Kabupaten Cilacap). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih

terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah di Jawa Tengah. Strategi pembangunan yang diupayakan untuk menekan kesenjangan ekonomi antar daerah adalah:

- a. Optimalisasi peran Bakorlin, di mana secara rutin kabupaten/kota di masing-masing Bakorlin secara lebih intensif berkoordinasi bekerjasama membuat rencana pembangunan lintas regional, melaksanakan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan, dan saling mengatasi apabila terdapat permasalahan.
- b. Di daerah kabupaten/kota khususnya daerah basis sektor primer (pertanian) dilaksanakan pembangunan pertanian dalam arti luas, dan melakukan revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir. Apabila program ini bisa efektif berjalan secara tidak langsung *growth pole-growth pole* menyebar ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
- c. Menyediakan fasilitas pemasaran hasil-hasil produk pertanian maupun UKM di masing-masing Bakorlin. Misalnya di Bakorlin I terdapat pusat promosi hasil UKM di Kota Semarang, dan di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Pusat pemasaran hasil pertanian di Secang Magelang dengan nama "Agro Soropadan", dan sebagainya.
- d. Bantuan modal meliputi : kredit lunak perbankan dengan syarat yang mudah, dana bergulir UKM yang tepat sasaran seperti bantuan bergulir sapi, kambing dan sebagainya yang bisa mengakselerasi ekonomi petani di desa.
- e. Pemerintah daerah memfasilitasi program *linkage* maupun program kemitraan dengan konsep "*win-win solution*" antara UKM dengan industri

besar, baik di bidang bahan baku maupun *output* sehingga mampu mendorong perekonomian antar daerah.

6.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tenaga Kerja Terserap

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting dalam makro ekonomi, karena dari sisi penawaran (*supply side*) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal, dan teknologi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dalam menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu, namun sebenarnya penyebab perubahan kesempatan kerja tersebut bukan karena waktu saja, tetapi bisa karena perubahan bidang ekonomi. Perubahan yang terjadi pada situasi ekonomi membawa dampak pada kesempatan kerja. Apabila perekonomian berkembang maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah, sedangkan apabila perekonomian menyusut atau lesu maka kesempatan kerja akan berkurang dan sebagai akibatnya tentu saja pengangguran akan bertambah.

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.17 halaman 165), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja terserap. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur yang bertanda positif yaitu sebesar 0,154 dengan nilai C.R sebesar 2,050 dan probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,042 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “ pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin banyak tenaga kerja terserap di

berbagai sektor/lapangan usaha. Temuan ini didukung oleh data, data pertumbuhan ekonomi juga mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya (lihat Tabel 5.12), tahun 2001 berkisar antara berkisar -9,12% (Kabupaten Blora) dan 30,25% (Kota Tegal). Pada tahun 2005 pertumbuhannya menjadi berkisar antara 7,14% (Kabupaten Demak) dan 48,99% (Kabupaten Cilacap). Data tenaga kerja terserap (lihat Tabel 5.13) selama tahun 2001, tenaga kerja terserap di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 15.066.542 orang. Pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja terserap lebih besar, yaitu sebesar 15.655.303 orang.

Hasil studi ini mendukung studi Nicholas Yacobus Rumbiak (2000) dan Anastasia Astry (2004). Hasil studi mereka disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sehingga diperlukan kerja keras oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, untuk menekan angka pengangguran yang masih cukup besar.

Hasil studi ini juga mendukung temuan studi Kemu dan Nurhidayat (2005), tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja di Indonesia. Hasil studi disimpulkan bahwa dari tiga model estimasi yang digunakan pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Indonesia, dengan perincian sebagai berikut : (a) periode kebangkitan ekonomi (1976-1987) di mana pertumbuhan ekonomi adalah 6,1% kesempatan kerja tumbuh 3,7%, pada periode ini ekonomi Indonesia didukung oleh tumbuhnya sektor industri

yang bersifat *labour intensive*. (b) Periode pertumbuhan ekonomi tinggi (1988-1997) di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,9% pertumbuhan kesempatan kerja adalah 2,0%. Dalam periode ini ekonomi Indonesia mulai bersifat *capital intensive*. (3) Pada periode pasca krisis ekonomi (1999-2003) ekonomi tumbuh dengan rata-rata 3,8% sedangkan kesempatan kerja hanya tumbuh 0,7%. Dalam periode ini ekonomi Indonesia tumbuh tidak dengan industri yang *labor intensive*.

Hasil studi ini tidak sejalan dengan teori "Dorongan Besar" (*Big Push Theory*), di mana industrialisasi yang cepat menjadi kata kunci dalam model ini bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan tercapainya keberhasilan pembangunan nasional. Banyak negara di dunia ketiga mengalami pertumbuhan *output* industri yang cepat, namun pertumbuhan kesempatannya tetap saja ketinggalan jauh, bahkan lapangan kerjanya tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Jawaban dari gagalnya teori pembangunan "*big push*" terletak pada pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Ketika ada perbedaan pertumbuhan *output* dengan kesempatan kerja maka selisih peningkatan *output* tersebut bersumber dari kenaikan produktivitas tenaga kerja.

Fenomena naiknya produktivitas tenaga kerja tersebut mengakibatkan naiknya rasio modal-tenaga kerja. Dengan diperkenalkannya metode-metode produksi yang lebih padat modal akan menghasilkan laba yang lebih besar sehingga akan dapat menghasilkan pertumbuhan *output* maksimum. Di sini nampak bahwa tujuan mencapai pertumbuhan *output* maksimum dan peningkatan kesempatan kerja maksimum saling bertentangan dan tidak dapat dicapai secara serentak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model Harrod-Domar dan Neoklasik yang menekankan pentingnya akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi dengan segenap

kebijakan yang menjadi implikasinya memang dapat mempercepat pertumbuhan *output*, namun kurang dapat di andalkan untuk memacu pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Jika yang lebih dipentingkan adalah penciptaan lapangan kerja yang luas maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lain, yang lebih mengutamakan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya seperti sektor pertanian dan industri yang berskala kecil yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Terciptanya lebih banyak kesempatan kerja berarti tersedianya lebih banyak sumber-sumber pendapatan. Kenaikan pendapatan akan dapat memacu pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Mustasya (2005:3) perbaikan indikator makro ekonomi Indonesia belum diikuti oleh terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, terutama di sektor formal. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat pengangguran dan besarnya jumlah pekerja di sektor informal yang relatif berpenghasilan rendah dibandingkan dengan sektor formal. Pertumbuhan ekonomi tidak akan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat tanpa adanya kontribusi yang riil terhadap kesempatan kerja. Pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel diyakini merupakan penyebab utama kondisi tersebut. Bentuk-bentuk kekakuan dalam pasar tenaga kerja yang disebabkan oleh berbagai regulasi pemerintah, seperti upah minimum, aturan pesangon, dan aturan perlindungan pekerja dinilai sangat memberatkan pengusaha. Pasar tenaga kerja yang kaku berpotensi menghambat terbukanya kesempatan kerja melalui dua hal : (a) pertama, perusahaan yang bergerak di *footloose industry* akan menghindari Indonesia yang memiliki upah rata-rata relatif tinggi dibandingkan seperti Vietnam dan RRC. Kedua, perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya dan hanya memperkerjakan karyawan yang relatif produktif. Pengurangan jumlah karyawan

juga terjadi akibat penggantian tenaga kerja dengan barang modal.

Hasil studi ini mendukung teori Harrod-Domar (1946) dalam Subri (2002:8), menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas produksi yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang lebih besar pula, surplus akan muncul diikuti oleh penurunan jumlah produksi. Peranan modal fisik dalam model pertumbuhan amat besar. Tetapi kapasitas hanya dapat meningkat bila sumber daya lain membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat.

Hasil studi ini tidak mendukung teori Malthus "*Essay on Population*" (1798) dalam Pressman (2000:44). Malthus mengatakan bahwa kemajuan manusia adalah tidak mungkin karena kemiskinan dan penderitaan merupakan hal yang tak terelakkan dalam mayoritas dari setiap masyarakat. Malthus berkeyakinan bahwa keadaan manusia tidak bisa ditingkatkan karena dua alasan : (a) Pertama, ia yakin bahwa orang-orang dikendalikan oleh hasrat kesenangan seksual yang tak pernah puas. Hal ini menyebabkan populasi bertambah tak terkendalikan. Kedua, *diminishing return* berlaku dalam produksi, sehingga pertumbuhan penduduk jauh melebihi produksi untuk memberi makan penduduk. Kelaparan akan terjadi jika tidak ada pengendalian terhadap jumlah penduduk.

Gambaran banyaknya tenaga kerja terserap menurut sektor dan kelompok daerah berdasarkan Bakorlin terlihat pada Tabel 6.4, Tabel 6.5 dan Tabel 6.6. Berdasarkan data Tabel 6.4 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di

daeran Bakorlin I selama lima tahun (2001 sampai dengan 2005) terserap di sektor tersier (38%) dan sekunder (35%), sedangkan sektor sekunder yang menyumbang PDRB paling besar hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar (26%).

Tabel 6.4
RATA-RATA TENAGA KERJA TERSERAP SECARA SEKTORAL
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN I PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN)

No	Kabupaten/Kota	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier
1	Kab. Grobogan	61	14	25
2	Kab. Blora	67	9	25
3	Kab. Rembang	50	10	42
4	Kab. Pati	41	17	25
5	Kab. Kudus	16	52	34
6	Kab. Jepara	16	56	29
7	Kab. Demak	40	22	38
8	Kab. Semarang	38	29	32
9	Kab. Kendal	49	15	36
10	Kota Salatiga	7	32	65
11	Kota Semarang	3	34	64
	Rata – rata	35	26	38

Sumber : BPS, Jawa Tengah, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2001 sampai dengan 2005, diolah

Kondisi ini mencerminkan bahwa perubahan struktur ekonomi agaknya tidak selalu sejalan dengan transformasi sosial sebagaimana tercermin dalam perubahan lapangan kerja penduduk. Sektor primer (pertanian) mempunyai kemampuan menampung tenaga kerja sangat besar, sehingga tidak berlebihan apabila sektor primer merupakan katub pengaman bagi banyaknya tenaga kerja yang cukup besar pertambahannya dari tahun ke tahun.

Tenaga kerja terserap menurut sektor di Bakorlin II terlihat pada Tabel 6.5. Tidak berbeda dengan kondisi di daerah Bakorlin I penyerapan tenaga kerja di daerah ini juga didominasi oleh tersier (40%) dan sektor primer khususnya sektor pertanian

(39%). Sektor sekunder hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 21 persen dari total tenaga kerja yang terserap. Hal ini sangat wajar karena sebagian besar kabupaten/kota merupakan daerah pertanian dengan sumbangan terbesar pada PDRB adalah dari sektor primer khususnya sektor pertanian.

Tabel 6.5
RATA-RATA TENAGA KERJA TERSERAP SECARA SEKTORAL
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN II PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN)

No	Kabupaten/Kota	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier
1	Kab. Kebumen	47	23	31
2	Kab. Purworejo	48	19	33
3	Kab. Wonosobo	63	11	25
4	Kab. Magelang	45	19	36
5	Kab. Boyolali	43	19	38
6	Kab. Klaten	30	30	40
7	Kab. Sukoharjo	19	31	46
8	Kab. Wonogiri	58	14	28
9	Kab. Karanganyar	36	22	42
10	Kab. Sragen	49	13	37
11	Kab. Temanggung	61	11	27
12	Kota Magelang	3	30	72
13	Kota Surakarta	1	30	68
	Rata – rata	39	21	40

Sumber : BPS, Jawa Tengah, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2001 sampai dengan 2005, diolah

Agar supaya tidak semakin besar beban sektor pertanian menampung tenaga kerja yang terus bertambah di daerah sehingga menambah jumlah pengangguran tersembunyi (*disguised unemployment*), pemerintah daerah sebaiknya melakukan upaya dengan memperluas lapangan kerja yang bersifat padat karya melalui pelaku ekonomi lokal, antara lain dengan pemberian insentif bagi pengembangan usaha yang berbasis potensi lokal.

Gambaran tenaga kerja terserap di kabupaten/kota Bakorlin III tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya (lihat Tabel 6.6), tenaga kerja sebagian besar terserap di sektor tersier dan primer.

Tabel 6.6
RATA-RATA TENAGA KERJA TERSERAP SECARA SEKTORAL
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN III PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (DALAM PERSEN)

No	Kabupaten/Kota	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier
1	Kab. Cilacap	37	27	35
2	Kab. Banyumas	20	26	54
3	Kab. Purbalingga	36	49	15
4	Kab. Banjarnegara	52	19	31
5	Kab. Batang	40	25	36
6	Kab. Pekalongan	28	39	39
7	Kab. Pemasang	44	9	40
8	Kab. Tegal	29	24	48
9	Kab. Brebes	42	14	44
10	Kota Pekalongan	4	41	55
11	Kota Tegal	11	24	66
	Rata - rata	31	27	42

Sumber : BPS, Jawa Tengah, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2001 sampai dengan 2005, diolah

Berdasarkan data Tabel 6.6, sektor tersier mampu menyerap tenaga kerja sebesar 42 persen, sektor primer sebesar 31 persen, dan sektor sekunder hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 27 persen. Hal ini membuktikan bahwa perubahan struktur ekonomi belum diikuti oleh perubahan struktur sosial (tenaga kerja terserap).

Hal yang menarik dari data tenaga kerja terserap di berbagai daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah seperti pada Tabel 6.4, Tabel 6.5, Tabel 6.6, adalah bahwa semakin berkembangnya sektor sekunder di masing-masing daerah cenderung semakin besar/meningkat proporsi tenaga kerja yang mampu diserap. Hal

ini menunjukkan bahwa sektor sekunder sangat penting peranannya dalam menampung beban sektor primer di pedesaan dalam menyerap tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Peluang kerja di sektor pertanian tidak akan mampu secara terus menerus menampung tambahan pekerja. Untuk mengurangi tekanan masalah ini, usaha mengembangkan peluang kerja bukan pertanian di pedesaan (*rural non farm employment*) kiranya perlu mendapat prioritas.

Kondisi ketenagakerjaan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini memperkuat teori Lewis (1959) dalam Subri (2002:56), menurut Lewis ada dua struktur dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Sektor subsisten terbelakang ini mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah dari pada sektor kapitalis modern. Lebih murah nya upah pekerja pedesaan akan menjadi pendorong bagi pengusaha perkotaan untuk mengembangkan industri modern. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran tenaga kerja di sektor subsisten terbelakang akan terserap di sektor industri modern.

Sementara itu menurut Fei-Ranis (1961) dalam Subri (2002:57), bahwa negara berkembang dengan ciri-ciri: kelebihan tenaga kerja, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, banyak pengangguran, serta sumber daya alamnya belum dapat diolah, ada tiga tahap pembangunan ekonomi. Pertama, para penganggur semu dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional sama. Kedua, tahap di mana pekerja di sektor pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap dinamai dengan awal pertumbuhan swasembada, pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini

kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus sejalan dengan penambahan *output* dan perluasan usahanya.

Pembangunan yang menunjukkan kecenderungan meningkat di hampir semua daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir belum mampu mengentaskan masalah pengangguran yang cukup besar di daerah, khususnya di perkotaan. Kondisi tingkat pengangguran selama lima tahun (2001 sampai dengan 2005) selama pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Bakorlin, adalah seperti terlihat pada Tabel 6.7, Tabel 6.8, dan Tabel 6.9.

Berdasarkan data tingkat pengangguran pada Tabel 6.7 halaman 226, rata-rata tingkat pengangguran di kabupaten/kota Bakorlin I (satu) selama tahun 2001 sampai dengan 2005 berkisar antara 4,25% sampai 7,03%. Tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2004, yaitu sebesar 7,03 persen. Daerah yang paling tinggi tingkat penganggurannya selama 2001 sampai dengan 2005 adalah Kota Salatiga (rata-rata 11,29%). Daerah yang paling kecil tingkat penganggurannya adalah Kabupaten Blora (2,47%).

Kondisi tingkat pengangguran di kabupaten/kota Bakorlin II (dua) seperti terlihat dalam Tabel 6.8 halaman 227. Kondisi rata-rata tingkat pengangguran di daerah Bakorlin II relatif lebih rendah dibandingkan dengan keadaan di Bakorlin I, yaitu berkisar antara 3,12% sampai 6,11%. Rata-rata tingkat pengangguran selama 2001 sampai dengan 2005, paling tinggi di Kota Magelang (10,56%), sedangkan daerah yang paling rendah tingkat penganggurannya adalah Kabupaten Wonosobo (2,37%).

Tabel 6.7
TINGKAT PENGANGGURAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN I
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1	Kab. Grobogan	2,83	6,09	5,46	5,46	3,53	4,67
2	Kab. Blora	1,41	2,01	2,40	3,65	2,88	2,47
3	Kab. Rembang	2,28	3,23	2,84	5,05	5,75	3,83
4	Kab. Pati	3,11	5,57	4,99	4,72	4,16	4,51
5	Kab. Kudus	4,32	6,57	4,49	7,28	5,25	5,58
6	Kab. Jepara	3,14	3,28	4,34	4,30	4,39	3,89
7	Kab. Demak	5,70	6,20	6,22	9,21	6,30	6,73
8	Kab. Semarang	2,49	4,92	4,90	4,55	4,79	4,33
9	Kab. Kendal	3,75	5,27	5,32	7,61	4,63	5,32
10	Kota Salatiga	11,08	10,43	10,17	13,29	11,49	11,29
11	Kota Semarang	6,63	11,84	7,92	12,20	9,38	9,59
	Rata-rata	4,25	5,95	5,37	7,03	5,69	

Sumber : BPS, Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah, 2001 sampai dengan 2005, diolah

Kondisi tingkat pengangguran di kabupaten/kota Bakorlin III, terlihat pada Tabel 6.9 halaman 228. Tingkat pengangguran di kabupaten/kota Bakorlin III Provinsi Jawa Tengah di mana sebagian besar daerahnya berbasis adalah sektor sekunder, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di daerah ini lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran di Bakorlin lainnya, yaitu berkisar antara 4,98% sampai 8,23%. Dilihat dari daerahnya, rata-rata tingkat pengangguran yang paling tinggi terdapat di Kota Pekalongan, yaitu sebesar 10,74 persen. Sedangkan daerah yang paling kecil tingkat penganggurannya adalah di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebesar 4,17 persen.

Tabel 6.8
TINGKAT PENGANGGURAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA BAKORLIN II
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1	Kab. Kebumen	2,72	6,71	4,86	5,78	5,90	5,19
2	Kab. Purworejo	2,00	3,00	1,74	3,04	4,03	2,76
3	Kab. Wonosobo	1,01	2,87	1,76	3,28	2,92	2,37
4	Kab. Magelang	3,32	4,24	5,49	6,08	6,07	5,04
5	Kab. Boyolali	1,92	3,68	3,96	6,25	5,07	4,18
6	Kab. Klaten	3,18	5,27	5,48	7,68	4,39	5,20
7	Kab. Sukoharjo	3,32	5,51	7,05	9,08	7,65	6,52
8	Kab. Wonogiri	1,83	3,66	4,11	5,04	9,75	4,88
9	Kab. Karanganyar	2,37	4,83	4,56	5,27	5,31	4,47
10	Kab. Sragen	2,89	6,63	4,45	4,27	4,29	4,51
11	Kab. Temanggung	1,04	3,33	3,46	3,78	3,56	3,03
12	Kota Magelang	7,37	10,22	12,89	9,09	13,24	10,56
13	Kota Surakarta	7,59	10,64	8,06	8,09	7,27	8,33
	Rata-rata	3,12	5,43	5,22	5,90	6,11	

Sumber : BPS, Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah, 2001 sampai dengan 2005, diolah.

Melihat realita jumlah angkatan kerja di Bakorlin I, Bakorlin II, dan Bakorlin III yang terus bertambah, sehingga menambah besarnya angka pengangguran, maka strategi yang diusulkan untuk meringankan, atau kalau bisa membantu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah merangsang pengembangan lapangan kerja bukan sektor pertanian di pedesaan, yaitu melalui industrialisasi pedesaan. Meskipun di atas kertas strategi ini realistis, dalam penerapannya hambatannya cukup besar yaitu keterbatasan modal, pemasaran *output*, serta birokrasi. Oleh karena itu diperlukan dukungan formal (seperti : penyediaan saprodi di tingkat lokal dengan harga terjangkau, kredit murah) serta *political will* yang kuat dari pemerintah daerah maupun pusat.

Tabel 6.9
TINGKAT PENGANGGURAN
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI BAKORLIN III
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata
1	Kab. Cilacap	5,60	8,52	8,36	9,80	10,43	8,54
2	Kab. Banyumas	4,05	5,68	5,26	5,00	5,01	5,00
3	Kab. Purbalingga	3,82	4,95	3,66	4,56	3,84	4,17
4	Kab. Banjarnegara	2,94	5,80	4,52	6,68	6,44	5,28
5	Kab. Batang	6,73	8,93	7,90	9,14	6,93	7,93
6	Kab. Pekalongan	3,08	7,28	6,18	5,63	5,95	5,62
7	Kab. Pemasang	5,23	9,95	7,31	7,57	6,70	7,35
8	Kab. Tegal	4,57	8,64	9,15	7,68	7,50	7,51
9	Kab. Brebes	5,05	8,61	8,35	6,89	6,87	7,15
10	Kota Pekalongan	6,66	13,23	9,63	11,80	12,40	10,74
11	Kota Tegal	7,04	8,93	10,75	9,29	10,26	9,25
		4,98	8,23	7,37	7,64	7,48	

Sumber : BPS, Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah, 2001 sampai dengan 2005, diolah

Secara lebih spesifik strategi untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan di mana angka pengangguran masih cukup besar dapat dilihat dari 2 (dua) sisi pendekatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan dari sisi penawaran (*supply side*): pendekatan dari sisi penawaran ini merupakan pendekatan dari sisi tenaga kerja untuk meningkatkan kapabilitasnya. Realita di lapangan, kondisi tenaga kerja kita sebagian besar masih berpendidikan rendah, sehingga kualitasnya juga kurang. Hal ini menghambat mereka untuk memasuki pasar kerja sektor sekunder dan tersier di pasar regional, nasional, apalagi internasional di era globalisasi sekarang ini. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) bisa dilakukan melalui:

- a. Optimalisasi dan pembentukan beberapa badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota, yang berfungsi secara efektif dengan dukungan formal pemerintah daerah.
 - b. Optimalisasi atau pendirian pendidikan kejuruan yang aplikabel dengan kebutuhan pasar tenaga kerja seperti : bidang otomotif, perkapalan dan kelautan, kesehatan, perkebunan dan sebagainya.
2. Pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*): pendekatan dari sisi permintaan ini merupakan pendekatan dari sisi pemakai tenaga kerja. Untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, strategi yang perlu dilakukan adalah :
- a. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, melalui *prime mover sector* dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Sektor-sektor penghelea yang mampu menggerakkan perekonomian daerah perlu mendapat prioritas utama. Pemerintah daerah diharapkan menyediakan fasilitas pendukung kegiatan perekonomian seperti : infrastruktur jalan, irigasi, telekomunikasi, dan energi.
 - b. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk mampu menarik investor masuk ke daerah, beberapa hal harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah :
 1. Membangun iklim yang kondusif bagi para investor melalui : penyediaan infrastruktur utama yang dibutuhkan investor yaitu infrastruktur jalan, irigasi, telekomunikasi, listrik, dan energi.

2. Menciptakan birokrasi yang profesional dan efisien, sehingga bagi investor yang mau melakukan investasi bisa memperoleh pelayanan cepat dan tepat, serta murah.
- c. Melakukan kerjasama dengan swasta dalam rangka *link and match* antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan, sehingga para lulusan baik pendidikan formal maupun informal bisa terserap dalam pasar tenaga kerja.

6.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Karenanya, pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial, namun demikian pembangunan ekonomi tidak identik dengan pembangunan sosial. Keduanya memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, meski terdapat irisan/persamaan. Banyak temuan riset menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi penting bagi pembangunan sosial.

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.17 halaman 165), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur yang bertanda positif, yaitu sebesar 0,133 dengan nilai C.R sebesar 3,032 dan probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “ pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi kesejahteraan. Hasil estimasi ini

didukung oleh data, data pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya (lihat Tabel 5.12), tahun 2001 berkisar antara berkisar -9,12% (Kabupaten Blora) dan 30,25% (Kota Tegal) (tahun 2001). Pada tahun 2005 pertumbuhannya menjadi berkisar antara 7,14% (Kabupaten Demak) dan 48,99% (Kabupaten Cilacap). Variabel kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM (lihat Tabel 5.16) selama 5 tahun cenderung meningkat lebih baik, tahun 2001 IPM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 66,1 (Kabupaten Rembang) dan 74,7 (Kota Magelang). Pada tahun 2005 nilai IPM berkisar antara 64,3 (Kabupaten Brebes) dan 76,0 (Kota Surakarta).

Hasil studi ini mendukung studi Suharto (2005:48), bahwa secara global dan khususnya di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Banyak fakta menunjukkan bahwa dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler : usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Di banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperbesar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan.

Konsep dan tujuan pembangunan ekonomi sekarang ini hendaknya bersandar pada *the new economic view of development* yang maknanya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi saja, melainkan menyentuh empat agenda besar, yaitu : (a) meningkatkan orang dalam menjangkau sumber, (b) memperluas ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar, (c) meningkatkan standar hidup, (d) memperluas pilihan-

pilihan manusia sehingga terbebas dari segala macam ketergantungan. Inti dari konsep dan tujuan pembangunan tersebut adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat lebih baik melalui pembangunan ekonomi (Todaro, 2003: 231).

Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan bila memenuhi setidaknya dua syarat, yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja yang tersedia memaksa orang untuk menentukan spesialisasi, yang akan meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas, maka uang yang dihasilkan untuk jam kerja yang sama akan lebih besar. Uang tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM generasi berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga dalam beberapa generasi kemudian, distribusi pendapatan makin membaik serta kesejahteraan makin meningkat (Papanek *and* Oldrich, 1986).

Studi yang dilakukan oleh Strauss, *et al.* (2002) yang disponsori oleh World Bank dengan menggunakan *Indonesian Family Life Surveys (IFLS)* untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menggunakan survei panel terhadap 13 provinsi di Indonesia. Di mana IFLS mencakup data upah, tenaga kerja dan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, program jaring pengaman sosial. Hasil studi menyimpulkan bahwa setelah tiga tahun krisis melanda Indonesia, kesejahteraan individu dalam data IFLS tidak lebih memburuk bahkan meningkat, dibandingkan dengan sebelum krisis pada akhir tahun 1997, dilihat dari berbagai dimensi standar hidup masyarakat. Sebagian masyarakat justru lebih baik, paling tidak terlihat bahwa tingkat kemiskinan yang lebih rendah

dan tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi. Penawaran tenaga kerja khususnya wanita meningkat, dan tingkat kesehatan anak dalam jangka panjang tidak menjadi lebih buruk selama krisis.

Hasil studi ini sejalan dengan pendapat Ramirez *et al.* (1998), bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan manusia (*human development*). Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, selain adanya peran *civil society* seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Alokasi antar dan dalam lembaga-lembaga tersebut dan perbedaan perilakunya dapat menjadi penyebab perbedaan kinerja pembangunan manusia sekalipun tingkat ekonominya setara. Kecenderungan rumah tangga membelanjakan pendapatan bersih mereka untuk barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia (seperti makanan, air, pendidikan, dan kesehatan) tergantung dari sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga dan juga pada siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Sudah umum diketahui bahwa penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak daripada penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia. Sementara itu, perempuan juga memiliki andil yang tidak kecil dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Makin tinggi pendidikan perempuan akan makin positif pula bagi pembangunan manusia. Sehubungan dengan hal itu dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia ditentukan bukan hanya oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh distribusi pendapatan dalam masyarakat, termasuk peran perempuan dan peran pemerintah. Alokasi sumber daya untuk pembangunan manusia dari sisi pemerintah tersebut merupakan fungsi dari

tiga hal, yakni : total pengeluaran sektor pemerintah, berapa banyak yang ditagihkan untuk sektor-sektor pembangunan manusia, dan bagaimana dana tersebut dialokasikan di dalam sektor-sektor tersebut. Adapun peran organisasi masyarakat dan LSM sendiri umumnya sebagai pelengkap, hanya di sejumlah negara tampak sangat dominan karena menjadi pendorong terpenting bagi pembangunan manusia.

Hasil studi ini mendukung temuan Brata (2004). Brata mengkaji hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (kesejahteraan). Dari penelitiannya ditemukan, bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kinerja ekonomi dengan pembangunan manusia di daerah di Indonesia. Kinerja ekonomi regional menentukan pembangunan manusia dan sebaliknya pembangunan manusia yang baik juga menentukan kinerja ekonomi regional. Sehubungan dengan hal itu, seyogyanya bagi pemerintah daerah tidak hanya menekankan pada kinerja ekonomi saja, tetapi sekaligus juga pembangunan manusia. Dalam konteks daerah, hal ini menjadi sangat penting termasuk dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Hasil studi ini tidak sepenuhnya mendukung studi Tadjoeeddin dkk. (2001), hasil studi Tadjoeeddin menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat output regional (PDRB per kapita) menurut kabupaten/kota dengan indikator kesejahteraan masyarakat tidak terdapat hubungan/korelasi yang kuat (lemah). Angka koefisien korelasi relatif sangat kecil, yaitu antara 0,1 – 0,3. Daerah-daerah *enclave* mempunyai PDRB per kapita yang relatif sangat tinggi sehingga posisinya sebagai *out layers* dengan jelas terlihat, tetapi daerah-daerah tersebut hanya mencatat pencapaian level kesejahteraan kurang lebih sama dengan daerah lainnya. Daerah-daerah dengan PDRB per kapita tinggi tetapi nilai-nilai indikator kesejahteraan

masyarakat yang dilihat dari sisi pengeluaran konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan IPM hanya kurang lebih sama dengan rata-rata nasional. Yang paling ironis adalah di Kabupaten Fak-Fak (Provinsi Papua) di mana sebuah perusahaan pertambangan Amerika Serikat *Freeport McMoran Copper & Gold Inc.* mengeksploitasi kekayaan tembaga, emas, dan perak sejak akhir 1960-an. Daerah ini mencatat besaran *output* per kapita lebih dari 16 kali rata-rata nasional, tetapi angka IPM-nya 5% di bawah rata-rata nasional, sementara konsumsi riilnya 18% lebih rendah dibanding angka nasional. Temuan lainnya bahwa tingginya kekayaan daerah tidak secara signifikan diikuti oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. Jadi terjadi kegagalan untuk merefleksikan kekayaan daerah ke dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di beberapa tempat *enclave* maupun beberapa daerah yang kaya sumber daya alam.

Oleh karenanya perlu dipisahkan antara *output* dan *welfare*, *output* mencerminkan *regional prosperity* dengan pendekatan daerah (*area approach*) dalam penghitungannya, sementara *welfare* lebih mengacu pada tingkat kesejahteraan individu di suatu daerah yang datanya berasal dari survei rumah tangga (*household approach*). Tetapi harus disadari bahwa individu atau rumah tangga tersebut adalah mereka yang berdomisili atau menempati daerah yang menghasilkan *output*. Sehingga bukanlah sesuatu yang tidak beralasan untuk melihat kaitan antara *output* dan *welfare*, sementara keduanya adalah hal yang berbeda.

Secara umum diyakini, bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini dilandasi oleh pandangan yang menyatakan kebutuhan masyarakat daerah terhadap pendidikan, kesehatan, barang-barang publik

pada umumnya akan terpenuhi dengan baik dibandingkan apabila langsung diatur oleh pemerintah pusat (Isdijoso dan Tri Wibowo, 2002).

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan manusia adalah sebagai berikut :

1. Di bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ada dengan biaya terjangkau masyarakat. Alokasi dana anggaran untuk pendidikan ditingkatkan menjadi 20 persen sesuai dengan undang-undang. Dengan anggaran yang cukup diharapkan bisa untuk meningkatkan sarana dan prasaran pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 telah mengalokasikan anggaran APBD sekitar 17%, pada tahun 2008 pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan 20% anggaran APBD untuk sektor pendidikan (Prof.Dr.Miyasto mantan ketua Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007). Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mengikuti pola anggaran di sektor pendidikan seperti pada tingkat provinsi, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Di bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat berperilaku sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Strategi pembangunan kesehatan melalui kegiatan :

- a. Pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat dan kader kesehatan
 - b. Pembangunan kesehatan secara lintas sektoral dan lintas program dengan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak.
 - c. Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya untuk rakyat miskin (Posyandu, Polindes, Puskesmas)
 - d. Perluasan dan peningkatan sarana, prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, sehingga tercipta pelayanan yang memadai.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kebutuhan barang maupun jasa terpenuhi dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyediakan fasilitas umum dengan baik seperti jalan, irigasi, listrik dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Memberikan insentif perpajakan, fasilitas modal murah kepada UKM, dan iklim usaha yang kondusif.

6.6 Pengaruh Kesenjangan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan

Indonesia adalah negara dengan tingkat kebhinekaan yang tinggi, dimana perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebaran sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, serta pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah menyebabkan timbulnya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga kesenjangan output antar daerah tak terelakkan. Ketimpangan antar daerah adalah suatu kondisi di mana perkembangan pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang mempunyai harapan lebih tinggi, sedangkan wilayah lainnya relatif tertinggal. Kesenjangan pembangunan selama ini berlangsung dan berwujud

dalam berbagai bentuk dan aspek. Bukan saja berupa kesenjangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga kesenjangan dalam proses distribusinya. Bukan pula semata-mata berupa kesenjangan antar daerah, akan tetapi juga berupa kesenjangan ekonomi dalam lapisan masyarakat yang ada.

Berdasarkan hasil estimasi antara kesenjangan antar daerah terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.17 halaman 165), menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur yang bertanda negatif yaitu sebesar -0,262 dengan nilai C.R sebesar -4,498, serta probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan “ kesenjangan antar daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hasil estimasi ini menunjukkan bahwa semakin rendah kesenjangan antar daerah, maka akan semakin tinggi kesejahteraan. Hasil estimasi ini didukung oleh data, data kesenjangan ekonomi antar daerah (lihat Tabel 5.13) selama tahun 2001 tingkat kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada kisaran antara 0,02 (Kabupaten Boyolali, Karanganyar) dan 0,36 (Kabupaten Cilacap). Pada tahun 2005 berkisar antara 0,02 (Kabupaten Boyolali) dan 0,45 (Kabupaten Cilacap). Variabel kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM (lihat Tabel 5.16) selama 5 tahun cenderung meningkat lebih baik, tahun 2001 IPM di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah berkisar antara 66,1 (Kabupaten Rembang) dan 74,7 (Kota Magelang). Pada tahun 2005 nilai IPM meningkat menjadi berkisar antara 64,3 (Kabupaten Brebes) dan 76,0 (Kota Surakarta).

Hasil studi ini sejalan dengan teori Todaro (2003:235) tentang dampak ketimpangan (*inequality*) terhadap tingkat kesejahteraan. Menurut Todaro kesenjangan berhubungan negatif dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga ketimpangan/kesenjangan harus mendapatkan perhatian karena : (a). Kesenjangan pendapatan yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, (b). Kesenjangan pendapatan menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, (c). Kesenjangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, (d). Kesenjangan pendapatan menciptakan ketidakadilan.

Hasil studi ini juga mendukung laporan World Bank (1993) di negara-negara *High Performing Asian Economics (HPAEs)* meliputi negara : Jepang, Singapura, Hongkong, Republik Korea, Thailand, dan Malaysia. Negara-negara *HPAEs* tersebut selama kurun waktu 1960-an hingga 1990-an telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan serta pemerataan distribusi pendapatan, baik dalam hal alokasi sumber daya maupun hasil dari pertumbuhan itu sendiri. Fenomena ini sangat menarik karena bertentangan dengan hipotesis Kuznets mengenai hipotesis U terbalik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan, telah mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maruyama (1997) dalam Kuncoro (2003:186), mencatat secara umum ada tiga ciri utama pembangunan industri di Asia Timur yang menopang kisah sukses mereka. Pertama, adanya liberalisasi ekonomi yang kuat sehingga mempengaruhi pembangunan industri di negara-negara tersebut. Kedua, negara-negara Asia Timur menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki struktur industrinya, termasuk kebijakan transfer teknologi dan Litbang, pembangunan industri strategik, dan

kebijakan yang ditujukan untuk membentuk suatu kelompok industri. Ketiga, negara-negara Asia timur menerapkan strategi jaringan regional.

Aspirasi terhadap ketidakmerataan pada prinsipnya bertentangan dengan penyamarataan. Aspirasi ini menginginkan keleluasaan bagi “daerah kaya” untuk memanfaatkan kekayaannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan kelebihan secara alami yang mereka miliki. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan prinsipil terhadap dasar pemikiran kebijakan pemerataan, dari pemerataan anggaran pembangunan sebagaimana dilaksanakan pemerintah orde baru menjadi pemerataan kesempatan, yang pada prinsipnya berupaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi seluruh rakyat, tanpa menghambat potensi pertumbuhan masing-masing daerah.

Sebagai bangsa yang berada dalam suatu negara kesatuan, tentunya diperlukan adanya pemenuhan hak minimum untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karenanya, diperlukan iklim baru yang membuka kesempatan bagi seluruh daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama melalui pencapaian kebutuhan dasar minimal, tanpa harus mengurangi kesempatan daerah yang memiliki kelebihan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini tentunya harus dicapai melalui peningkatan kemampuan daerah dan menstimulus tumbuhnya partisipasi aktif daerah untuk mencapai suatu standar nasional minimum (*a minimum national standard*) dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu komitmen nasional yang ditetapkan dan disepakati bersama (*national consensus*).

Berdasarkan realita yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan yang menurunkan kesenjangan antar daerah, strategi di masing-masing daerah melalui Bakorlin adalah sebagai berikut :

- a. Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir untuk membantu daerah kabupaten/kota yang berbasis sektor primer (pertanian). Apabila program ini bisa efektif berjalan secara tidak langsung *growth pole-growth pole* menyebar ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b. Membantu pemasaran produk UMKM maupun produk pertanian, antara lain melalui penyediaan fasilitas tempat pemasaran, informasi dan telekomunikasi pemasaran UMKM di masing-masing Bakorlin.
- c. Bantuan modal meliputi : kredit lunak perbankan dengan syarat yang mudah, dana bergulir UMKM yang tepat sasaran seperti berujud sapi, kambing dan sebagainya yang bisa mengakselerasi ekonomi petani di desa.
- d. Pemerintah daerah memfasilitasi program *linkage* maupun program kemitraan dengan konsep “*win-win solution*” antara UMKM dengan industri besar, baik di bidang bahan baku maupun *output* sehingga mampu mendorong perekonomian antar daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ada dengan menambah alokasi anggaran.
- f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan dasar kesehatan sampai di tingkat desa khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- g. Peningkatan pemenuhan kebutuhan primer, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan dasar warganya. Seperti jalan, irigasi, listrik dan sebagainya.

6.7 Pengaruh Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan modal pembangunan manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal, termasuk dalam hal kinerja ekonominya serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil estimasi antara tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Tabel 5.17 halaman 165), menunjukkan bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien jalur yang bertanda positif yaitu sebesar 0,600 dengan nilai C.R sebesar 10.644, dan probabilitas signifikansi (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang ditentukan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan “tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat diterima, karena secara statistik terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja terserap maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil estimasi ini didukung oleh data, data tenaga kerja terserap (lihat Tabel 5.14) selama tahun 2001 tenaga kerja terserap di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 15.066.542 orang. Pada tahun 2005 jumlah tenaga kerja terserap lebih besar, yaitu 15.655.303 orang. Variabel kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM (lihat Tabel 5.16) selama 5 tahun cenderung

meningkat lebih baik, tahun 2001 IPM di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah berkisar antara 66,1 (Kabupaten Rembang) dan 74,7 (Kota Magelang). Pada tahun 2005 nilai IPM berkisar antara 64,3 (Kabupaten Brebes) dan 76,0 (Kota Surakarta).

Hasil studi ini mendukung studi Martinawati (2007), bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk (pendapatan masyarakat) di suatu wilayah akan menghasilkan peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan perkapita diperoleh sebesar 0,00000152 yang berarti bahwa kenaikan pendapatan per kapita penduduk sebesar satu rupiah akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,0000152. Pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan akan semakin tepenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat di suatu wilayah. Pemenuhan berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi semakin terpenuhi. Peningkatan tingkat pendidikan yang dikenyam oleh masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas manusia.

Batasan kesejahteraan memang masih banyak diperdebatkan, terlalu banyak batas-batas kesejahteraan yang telah dikemukakan para ahli. Namun secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (*basic needs*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi definisi kesejahteraan dapat juga merupakan tingkat aksesibilitas seseorang dalam kepemilikan faktor-faktor produksi yang dapat ia manfaatkan dalam suatu proses produksi dan ia memperoleh imbalan bayaran (*compensations*) dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Semakin tinggi seseorang mampu meningkatkan pemakaian faktor-faktor produksi yang ia kuasai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diraihinya. Demikian pula sebaliknya, orang menjadi miskin karena tidak punya akses yang luas dalam memiliki faktor-faktor produksi

walaupun faktor produksi itu adalah dirinya sendiri. Kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak terlepas di mana pun diletakkan.

Sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab orang tidak mampu mendapatkan kesejahteraan sehingga ia harus miskin? Soetrisno(1995) menyatakan, dalam pandangan *agrarian populist*, negara menjadi penyebab utama kemiskinan, sedangkan berdasarkan pandangan masalah budaya di mana orang menjadi miskin karena mereka tidak memiliki etos kerja yang tinggi, jiwa wiraswasta, dan rendahnya pendidikan. Menyimak pendapat Soetrisno, maka seyogyanyalah penyelenggara negara mengambil peran utama memfasilitasi dan meregulasi sejumlah kebijakan dan program-program pembangunan yang membuka seluas-luasnya aksesibilitas setiap warga untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dengan imbalan kompensasi yang meningkat. Jadi tidak ada *entry barrier* bagi siapa pun dalam kepemilikan faktor-faktor produksi, yang ada adalah *ability to achieve a politically acceptable potential living standard*. Akan menjadi lebih lengkap bilamana pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga intermediasi berperan aktif dalam turut serta meningkatkan etos kerja para kepala keluarga, mengembangkan jiwa *entrepreneurship* (wiraswasta), dan mengemas program-program pendidikan yang terjangkau.

Hasil studi ini sesuai dengan studi Lee di Korea (1993), hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Korea selama tahun 1945-1992. Korea mempunyai strategi yang cukup baik dalam membangun dan memajukan negaranya. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas bagi seluruh penduduk (sumber daya manusia), menjadikan Korea sebagai salah macan asia pada dekade 1960-1990. Korea mampu menjadi negara dengan pembangunan dan

teknologi yang maju dengan mengandalkan sektor industri yang berbasis teknologi modern selain Jepang.

Jumlah atau besarnya jumlah penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita suatu negara/daerah, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara/daerah tersebut. Pembangunan ekonomi seharusnya dapat menjamin meningkatnya produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja. Dalam era otonomi dan desentralisasi saat ini kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan kerja akan memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Tenaga kerja yang terserap dalam pasar kerja akan mendapatkan upah yang layak, sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya sehingga kesejahteraan akan meningkat lebih baik. Kontribusi tenaga kerja dalam segala aspek pembangunan yang semakin besar di daerah menggambarkan bahwa angkatan kerja di daerah yang terlibat dalam kegiatan produksi semakin besar. Keterlibatan yang semakin besar dalam produksi maupun pembangunan akan mengurangi beban daerah dalam mengatasi masalah sosial, seperti pengangguran maupun kemiskinan.

Di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun, nilai indeks pembangunan manusia cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan makin tingginya perhatian daerah terhadap pembangunan manusia. Nilai rata-rata IPM selama tahun 2001 sampai 2005 terlihat pada Tabel 6.10. Berdasarkan rata-rata nilai indeks pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, apabila dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok terendah berkisar antara 62,46 sampai dengan 66,40 meliputi 12 (dua belas) kabupaten : Banjarnegara, Wonosobo, Sragen, Grobogan, Blora,

Rembang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes. Daerah-daerah tersebut apabila dilihat dari struktur ekonominya sebagian besar didominasi oleh sektor primer.

Tabel 6.10
RATA-RATA INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN 2005

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata	Kategori
1	Kab. Sragen	65,60	Bawah
2	Kab. Grobogan	66,36	Bawah
3	Kab. Blora	65,38	Bawah
4	Kab. Banjarnegara	65,72	Bawah
5	Kab. Rembang	65,54	Bawah
6	Kab. Wonosobo	66,26	Bawah
7	Kab. Kendal	65,60	Bawah
8	Kab. Batang	66,04	Bawah
9	Kab. Pekalongan	65,66	Bawah
10	Kab. Pemalang	64,02	Bawah
11	Kab. Tegal	65,34	Bawah
12	Kab. Brebes	62,46	Bawah
13	Kab. Karanganyar	69,06	Sedang
14	Kab. Kebumen	66,44	Sedang
15	Kab. Purworejo	67,16	Sedang
16	Kab. Pati	69,50	Sedang
17	Kab. Kudus	68,62	Sedang
18	Kab. Jepara	68,22	Sedang
19	Kab. Demak	67,50	Sedang
20	Kab. Semarang	70,20	Sedang
21	Kab. Temanggung	70,30	Sedang
22	Kab. Cilacap	66,82	Sedang
23	Kab. Banyumas	68,66	Sedang
24	Kab. Purbalingga	66,90	Sedang
25	Kab. Magelang	67,80	Sedang
26	Kab. Boyolali	67,14	Sedang
27	Kab. Klaten	68,88	Sedang
28	Kab. Sukoharjo	69,08	Sedang
29	Kab. Wonogiri	66,46	Sedang
30	Kota Pekalongan	70,00	Sedang
31	Kota Tegal	70,24	Sedang
32	Kota Magelang	73,72	Atas
33	Kota Surakarta	74,28	Atas
34	Kota Salatiga	73,76	Atas
35	Kota Semarang	74,18	Atas

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan manusia Jawa Tengah, beberapa tahun, diolah

Perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia harus lebih ditingkatkan, dengan memperbesar alokasi anggaran dibidang pendidikan, kesehatan serta penyediaan sarana prasarana umum lainnya. Upaya-upaya untuk memacu pembangunan manusia adalah menggerakkan perekonomian desa dengan berbasis pada sektor pertanian. Kelompok kedua (menengah) nilai IPM berkisar antara 66,41 sampai 70,35 meliputi 19 (sembilan belas) daerah, yaitu : Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonoogiri, Karanganyar, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, dan Kota Pekalongan serta Kota Tegal. Daerah-daerah tersebut dilihat dari struktur ekonominya sebagian besar berbasis pada sektor sekunder dan tersier. Kelompok ketiga (tertinggi) nilai IPM berkisar antara 70,36 sampai 74,28 meliputi 4 (empat) Kota, yaitu : Magelang, Surakarta, Salatiga dan Semarang. Daerah-daerah dengan nilai IPM tertinggi ini berarti dalam pembangunannya telah telah berbasis pada pembangunan manusia, dengan mengalokasikan sebagian besar anggaran daerahnya untuk pembangunan manusia. Dilihat dari struktur ekonominya daerah dengan IPM tertinggi semuanya berbasis pada sektor tersier dan sekunder. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan manusia adalah dengan memperhatikan sektor tersier dan sekunder.

Berdasarkan studi empiris yang ada, hasil studi ini mendukung teori Smith (1729-1790) dalam Subri (2002:2) bahwa manusia merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alam(tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelola sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

6.8 Temuan – Temuan

Setelah mengkaji dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah serta penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, maka temuan-temuan baik secara empirik maupun teoritik yang menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

Temuan Teoritis :

1. Temuan teoritis tentang pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi memperkuat teori Oates (1993), Bahl (2000), Enikolopov *and* Zurafkaya (2003), Prud'homme (1995), dan Peterson (1996). Menurut Oates desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya. Menurut Bahi desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for*

fiscal decentralization). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain. Enikolopov and Zurafkaya menyatakan bahwa dampak dari desentralisasi bagi suatu negara/daerah adalah sangat tergantung pada corak institusi atau kelembagaan yang ada dalam dalam tata pemerintahan negara/daerah tersebut.

2. Temuan teoritis mendukung teori Musgrave (1989), *fiscal federalism* yang menekankan pentingnya *revenue and expenditure assignment* antar level pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritik dengan lebih dekat kepada masyarakatnya (*their constituent*), seharusnya pemerintah daerah akan berperilaku berbeda ketika pemerintah pusat menyerahkan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah, yaitu semakin berusaha meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal mampu menurunkan tingkat kesenjangan antar daerah serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Temuan teoritis tidak mendukung hipotesis Simon Kuznetz (1955). Studi empiris Kuznetz mensintesisikan adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*), yaitu pada awal ketika pembangunan dimulai distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Di daerah kabupaten/kota Jawa

Tengah menunjukkan bahwa selama pelaksanaan desentralisasi fiskal menunjukkan pertumbuhan yang positif dan tingkat kesenjangan yang relatif rendah.

4. Temuan teoritis mendukung pendapat Soeharsono Sagir (1982), perluasan kesempatan kerja dipengaruhi faktor-faktor dominan yaitu : kependudukan, sumber daya alam, dan kondisi ekonomi. Temuan ini juga mendukung pendapat Sudarsono (1989), bahwa pertumbuhan ekonomi mampu membawa pengaruh positif bagi kesempatan kerja dan kemampuan produktivitas tenaga kerja.
5. Temuan teoritis tidak sesuai dengan teori dorongan besar (*Big Push Theory*), di mana industrialisasi yang cepat menjadi kata kunci bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan tercapainya keberhasilan pembangunan nasional. Banyak negara di dunia ketiga mengalami pertumbuhan *output* industri yang cepat, namun pertumbuhan kesempatan kerjanya tetap saja ketinggalan jauh termasuk di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, bahkan lapangan kerjanya tidak mengalami pertumbuhan.
6. Temuan teoritis lainnya mendukung pendapat Todaro bahwa konsep dan tujuan pembangunan ekonomi sekarang ini hendaknya bersandar pada *the new economic view of development* yang maknanya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi saja, melainkan menyentuh empat agenda besar, yaitu : (a) meningkatkan orang dalam menjangkau sumber, (b) memperluas ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar, (c) meningkatkan standar hidup, (d) memperluas pilihan-pilihan manusia sehingga terbebas dari segala macam ketergantungan. Inti dari konsep dan tujuan pembangunan tersebut adalah

bagaimana kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat lebih baik melalui pembangunan ekonomi.

7. Hasil studi ini tidak mendukung teori Malthus dalam *Essay on Population*. Malthus mengatakan bahwa kemajuan manusia adalah tidak mungkin karena kemiskinan dan penderitaan merupakan hal yang tak terelakkan dalam mayoritas dari setiap masyarakat. Malthus berkeyakinan bahwa keadaan manusia tidak bisa ditingkatkan karena dua alasan (a) Pertama, ia yakin bahwa orang-orang dikendalikan oleh hasrat kesenangan seksual yang tak pernah puas. Hal ini menyebabkan populasi bertambah tak terkendalikan. Kedua, *diminishing return* berlaku dalam produksi. Sehingga pertumbuhan penduduk jauh melebihi produksi untuk memberi makan penduduk. Sehingga kelaparan akan terjadi jika tidak ada pengendalian terhadap jumlah penduduk.
8. Temuan teoritis mendukung teori Todaro (2003) tentang dampak kesenjangan (*inequality*) terhadap tingkat kesejahteraan. Menurut Todaro kesenjangan/ketimpangan berhubungan negatif dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga kesenjangan harus mendapatkan perhatian karena : a. Kesenjangan pendapatan yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi. b. Kesenjangan pendapatan menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan. c. Kesenjangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. d. Kesenjangan pendapatan menciptakan ketidakadilan.
9. Temuan teoritis lainnya mendukung teori Smith, bahwa manusia merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alam(tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang

pandai mengelola sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Temuan Empiris :

1. Temuan empiris menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan secara absolut nilainya terus mengalami peningkatan. Dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kemampuan pembiayaan daerah otonom yang semakin meningkat. Namun demikian rasio antara PAD dan dana bagi hasil dengan total realisasi pengeluaran daerah menunjukkan relatif kecil (rata-rata selama 2001-2005 sebesar 0,16). Hal ini menunjukkan relatif rendahnya kemampuan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai kegiatan pembangunan, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Realisasi total pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan kegiatan administrasi dan pembangunan di semua daerah otonom Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan studi Due dan Miftah (2000), bahwa perbandingan antara pengeluaran-pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan bruto cenderung berbanding linear dan positif, maksudnya jika pengeluaran pemerintah naik, maka pendapatan bruto masyarakat juga naik bersamaan pembangunan ekonomi suatu daerah.
2. Modifikasi Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota (Bakorlin) di Jawa Tengah merupakan temuan empiris. Perubahan Bakorlin tersebut merupakan modifikasi dari UU No.32 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus

dan/atau digabung dengan daerah lain. Modifikasi ini tidak dilakukan penggabungan melainkan dijadikan satu Bakorlin. Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Selain itu sesuai dengan pasal 195 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Pernyataan ini memperkuat teori basis ekonomi (*economic base theory*) yang menyebutkan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa di luar daerah. Hal ini juga memperkuat teori tempat sentral (*central place theory*) bahwa setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya industri dan bahan baku. Kondisi ini sesuai pula dengan pendapat Aziz tentang teori *complete convergence*. Teori ini menggambarkan keadaan mengalirnya modal dari satu daerah ke daerah lain yang bukan hanya membuat produktivitas modal antar daerah seimbang, tetapi juga proporsi modal dengan tenaga kerja kedua daerah cenderung sama.

3. Temuan empiris studi ini memperkuat hasil studi Martinez *and* Robert M. McNab (2001), Mahi (2001), Brodjonegoro (2002), Dartanto dan Brodjonegoro (2003), Mursinto (2004), Hadi Sasana (2005). Desentralisasi akan mempunyai dampak/pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/pembelanjaan publik.

Pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. Dari hasil itu diketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang didukung peran serta swasta dan masyarakat yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah.

4. Temuan empiris tidak mendukung hasil studi Davoodi dan Zou (1998) mengenai desentralisasi di negara-negara berkembang, dan studi Jin and Zou (2000). Hasil studi Davoodi dan Zou menemukan, bahwa desentralisasi fiskal yang tinggi mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun Davoodi dan Zou (1998) menemukan pengaruh positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah di negara maju Amerika Serikat. Hasil studi Jin and Zou (2000) yang menguji desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina, menyatakan bahwa kebijakan konvensional desentralisasi fiskal, pada tahun 1979–1993 desentralisasi penerimaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun desentralisasi pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada periode tahun 1994-1999 di mana diberlakukan sistem perpajakan yang baru, hasil studi menunjukkan bahwa desentralisasi pengeluaran tidak mempunyai hubungan secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi penerimaan mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi.
5. Temuan empiris sejalan dengan hasil studi Astuti dan Haryanto (2007), Lessmann (2006), Moreno and Trelers (2004). Hasil studi Astuti dan Haryanto disimpulkan, bahwa desentralisasi yang telah berjalan selama ini mampu mengurangi ketimpangan antar daerah, terutama bila semakin besar pengeluaran

daerah. Pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mampu memperkecil kesenjangan antar daerah, sementara itu semakin besar tingkat penerimaan suatu daerah maka akan memicu peningkatan terjadinya ketimpangan daerah. Sementara itu Lessmann (2006), meneliti mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dengan kesenjangan antar daerah di negara-negara OECD. Studi Lessmann menghasilkan temuan bahwa negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki kesenjangan wilayah yang rendah. Hasil studi Moreno *and* Trelers di Andalusia Spanyol membuktikan, bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah Andalusia telah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah regional menjadi lebih inovatif mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan penyediaan jasa kemasyarakatan seperti : konseling dan informasi, perlindungan untuk para wanita jompo, janda dan para cacat, yatim piatu, serta penyediaan dana sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 1988 pertumbuhan telah ditopang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Temuan empiris studi ini mendukung studi World Bank (1996), Arief (1998), Sumarto (2002), dan Fields (1980). Menurut World Bank ketimpangan di Indonesia selama periode 1964–1999 tergolong rendah, dibandingkan dengan berbagai negara lain dan bisa dikatakan tidak menunjukkan gejala melebar (*widening*) selama lebih dari tiga dekade terakhir. Pada saat yang sama Indonesia mencatat angka pertumbuhan yang mengesankan, rata-rata 7 %, sampai datangnya krisis ekonomi akhir 1997, sehingga prestasi ini dihargai sebagai suatu pencapaian pertumbuhan dengan pemerataan. Hasil studi Arief menyimpulkan, bahwa hipotesa Kuznets tidak berlaku di Indonesia. Hasil studi Arief secara lebih

lengkap menyatakan, bahwa pertumbuhan *output* tidak konflik dengan pemerataan, sehingga distribusi pendapatan hendaklah tetap diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan dan pemerataan pendapatan merupakan komponen yang penting dalam strategi pembangunan yang menyeluruh. Sumarto dari *SMERU Research Institute* menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang, namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi. Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan.

7. Hasil studi ini tidak seiring dengan studi Bhattacharya dan Sakthivel di India (2004), dan Salvadore Barrios dan Eric Strobl (2006) di negara-negara Uni Eropa. Studi Bhattacharya dan Sakthivel menghasilkan temuan bahwa pembangunan industri di India berjalan secara cepat dan terpusat di wilayah-wilayah dengan infrastruktur memadai. Pola pembangunan seperti ini semakin mempertajam kesenjangan antar wilayah di India. Temuan lainnya adalah adanya korelasi negatif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan. Hal ini berarti menimbulkan suatu masalah yang simultan, yaitu beban wilayah yang berat dengan jumlah penduduk banyak dan pendapatan rendah sehingga mendorong migrasi ke wilayah lain yang lebih maju. Studi Barrios dan Eric Strobl menggunakan data produk domestik bruto yang diolah dengan metode ekonometrik untuk menjelaskan pola hubungan antara PDB (pertumbuhan ekonomi) dengan kesenjangan antar wilayah yang berbentuk U terbalik. Hasil studi ini memberikan bukti kuat bahwa untuk negara-negara yang tergabung

dalam Uni Eropa memiliki pola kesenjangan wilayah yang berbentuk huruf U terbalik.

8. Hasil studi ini mendukung hasil studi Astry (2004), Rumbiak (2000), dan Kemu dan Nurhidayat (2005). Hasil studi Astry menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Sehingga diperlukan kerja keras oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, untuk menekan angka pengangguran yang masih cukup besar. Rumbiak meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jayapura, dengan menggunakan model regresi logaritma natural. Hasil analisis disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jayapura. Hasil studi Kemu dan Nurhidayat menyimpulkan bahwa dari tiga model estimasi yang digunakan, pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sangat mendorong kesempatan kerja periode kebangkitan ekonomi (1976-1987), di mana ekonomi Indonesia didukung oleh tumbuhnya sektor industri yang bersifat *labour intensive*.
9. Hasil studi ini mendukung studi Suharto (2005), Strauss *et al.* (2002), Ramirez *et al.* (1998), Brata (2004), Tadjoeeddin dkk. (2001). Menurut Suharto, secara global dan khususnya di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat

integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Banyak fakta menunjukkan bahwa dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler : usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Ramirez *et al.* menyatakan, bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang diukur dengan pembangunan manusia (*human development*). Hasil studi Strauss *et al.*, menyimpulkan bahwa setelah tiga tahun krisis melanda Indonesia kesejahteraan individu dalam data IFLS tidak lebih memburuk/meningkat, dibandingkan dengan sebelum krisis pada akhir tahun 1997 dilihat dari berbagai dimensi standar hidup masyarakat. Sebagian masyarakat justru lebih baik, paling tidak terlihat bahwa tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi. Hasil studi Brata ditemukan, bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kinerja ekonomi dengan pembangunan manusia daerah di Indonesia.

10. Hasil studi ini tidak mendukung sepenuhnya hasil studi Tadjoeeddin dkk. (2001), hasil studi Tadjoeeddin menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat output regional (PDRB per kapita) menurut kabupaten/kota dengan indikator kesejahteraan masyarakat tidak terdapat hubungan/korelasi yang kuat (lemah). Angka koefisien korelasi relatif sangat kecil, yaitu antara 0,1 – 0,3. Daerah-daerah *enclave* mempunyai PDRB per kapita yang relatif sangat tinggi sehingga posisinya sebagai *out layers* dengan jelas terlihat, tetapi daerah-daerah tersebut

hanya mencatat pencapaian level kesejahteraan kurang lebih sama dengan daerah lainnya

11. Temuan empiris mendukung laporan World Bank (1993) di negara-negara *High Performing Asian Economics (HPAEs)* meliputi negara : Jepang, Singapura, Hongkong, Republik Korea, Thailand, dan Malaysia. Negara-negara *HPAEs* tersebut selama kurun waktu 1960-an hingga 1990-an telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan serta pemerataan distribusi pendapatan, baik dalam hal alokasi sumber daya maupun hasil dari pertumbuhan itu sendiri. Fenomena ini sangat menarik karena bertentangan dengan hipotesis Kuznets mengenai hipotesis U terbalik. Pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan, telah mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Temuan empiris lainnya, bahwa hasil studi ini sesuai dan mendukung studi Lee di Korea (1993), hasil studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh yang kuat antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Korea selama tahun 1945-1992. Korea mempunyai strategi yang cukup baik dalam membangun dan memajukan negaranya. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas bagi seluruh penduduk (sumber daya manusia), menjadikan Korea sebagai salah macan asia pada dekade 1960-1990. Korea mampu menjadi negara dengan pembangunan dan teknologi yang maju di Asia, dengan mengandalkan sektor industri yang berbasis teknologi modern selain Jepang.

6.9 Keterbatasan Studi

Berdasarkan beberapa temuan yang dihasilkan dalam studi ini, peneliti sangat menyadari bahwa temuan-temuan yang dihasilkan belum secara sempurna menjawab semua permasalahan yang dibahas. Terdapat banyak keterbatasan yang melingkupi studi ini, yaitu :

1. Periode waktu studi yang relatif pendek yaitu 5 (lima) tahun, hal ini menjadikan analisis permasalahan kurang sempurna karena pembahasan suatu proses pembangunan memerlukan periode waktu yang cukup.
2. Penggunaan data sekunder yang diperoleh dari berbagai institusi pemerintah. Ketidak akuratan pengumpulan data oleh institusi pemerintah terkait tentunya akan berpengaruh terhadap hasil-hasil temuan dalam studi ini.
3. Sistem pemerintahan dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal relatif baru berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia, sehingga dukungan teori dan empiris relatif terbatas. Peneliti harus melakukan penggunaan berbagai teori yang tidak secara langsung terkait, tetapi mempunyai substansi yang sama.

BAB 7 PENUTUP

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah serta penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis satu yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Arah positif ini menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesenjangan ekonomi antara daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah. Arah negatif menunjukkan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal akan menyebabkan menurunnya kesenjangan ekonomi antar daerah, atau meningkatnya pemerataan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis tiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hubungan negatif menunjukkan bahwa, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan menurunnya kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis empat yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hubungan positif menunjukkan bahwa, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya tenaga kerja terserap di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis lima yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa

- meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kesenjangan ekonomi antar daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis enam yang menyatakan bahwa kesenjangan antar daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hubungan negatif menunjukkan bahwa, menurunnya kesenjangan antar daerah akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
 7. Tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis tujuh yang menyatakan bahwa tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hubungan positif menunjukkan, bahwa meningkatnya tenaga kerja terserap akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
 8. Berdasarkan hasil pembahasan, hasil studi ini memberikan kontribusi keilmuan dalam bentuk mendukung dan memperkuat teori dan hasil penelitian yang mengungkap bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, dan kesejahteraan yaitu teori desentralisasi dari teori : Oates (1993), Bahl (2000), Enikolopov *and* Zurafkaya (2003), Prud'homme (1995), Peterson

(1996), Bird *and* Vaillancourt (2000), Phillip *and* Woller (1997), Bird (1990), Zang dan Zou (1998), Musgrave (1959). Hasil studi ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja mendukung teori : Adam Smith, Sagir (1982), Todaro (2003), Lewis (1959). Hasil studi ini kurang mendukung teori Harrod-Domar (*Big Push Theory*), Simon Kuznetz (1955), dan Malthus (1798).

9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, tenaga kerja terserap serta kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil studi ini bisa dijadikan acuan perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, bahwa dalam era desentralisasi fiskal saat ini di mana daerah diberikan kewenangan yang luas berikut pendanaannya diharapkan lebih mampu melakukan peran alokasi serta distribusi secara efisien sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong berkembangnya dunia usaha dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, yang memberikan dampak positif baik bagi pemerintah daerah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan PAD yang semuanya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
10. Berdasarkan kesimpulan dari tujuh hipotesis, secara umum dapat di simpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah, tenaga kerja terserap serta kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam model ini yang merupakan variabel *intervening* adalah : pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah, dan tenaga kerja terserap. Dengan memasukkan variabel *intervening* dalam model, maka dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di masing-masing daerah yang makin besar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap menurunnya kesenjangan antar daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Dalam era desentralisasi fiskal di mana daerah dituntut untuk bisa melakukan fungsinya secara efektif dan efisien, maka harus didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, melalui : pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komoditi unggulan daerah, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkecil kesenjangan antar daerah serta meningkatkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan :

- a. Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir untuk membantu daerah kabupaten/kota yang berbasis sektor primer (pertanian). Apabila program ini bisa efektif berjalan, secara tidak langsung *growth pole-growth pole* menyebar ke desa-desa, sehingga mampu menumbuhkan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
 - b. Membantu pemasaran produk UMKM maupun produk pertanian, antara lain melalui penyediaan fasilitas tempat pemasaran, informasi dan telekomunikasi pemasaran UMKM di masing-masing daerah.
 - c. Bantuan modal meliputi : kredit lunak perbankan dengan syarat yang mudah, dana bergulir bagi UMKM yang tepat sasaran berujud natura seperti sapi, kambing dan sebagainya yang bisa mengakselerasi ekonomi
 - d. Pemerintah daerah memfasilitasi program *linkage* maupun program kemitraan dengan konsep "*win-win solution*" antara UMKM dengan industri besar, baik di bidang bahan baku maupun *output* sehingga mampu mendorong perekonomian antar daerah.
3. Pola pembangunan yang selama dengan pusat pertumbuhan di daerah kota, perlu dievaluasi untuk diarahkan ke daerah kabupaten yang potensial sehingga muncul kutub-kutub pertumbuhan baru, yang pada gilirannya bisa memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 4. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi diharapkan lebih intensif melakukan pembangunan dengan berbasis manusia (*human development*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ada dengan menambah alokasi anggaran (20% dari APBD).
 - b. Di bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat berperilaku sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Strategi pembangunan kesehatan melalui kegiatan :
 1. Pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat dan kader kesehatan
 2. Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya untuk rakyat miskin (Posyandu, Polindes, Puskesmas)
 3. Perluasan dan peningkatan sarana, prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, sehingga tercipta pelayanan yang memadai.
 - c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan primer, pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya. Seperti jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi, BBM, dan sebagainya.
5. Untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan di mana angka pengangguran masih cukup besar dapat dilihat dari 2 (dua) sisi pendekatan, yaitu sebagai berikut :
- a. Pendekatan dari sisi penawaran (*supply side*) meliputi: 1). Optimalisasi dan pembentukan beberapa badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota, yang berfungsi secara efektif dengan dukungan formal pemerintah daerah. 2). Optimalisasi atau

- pendirian pendidikan kejuruan yang aplikabel dengan kebutuhan pasar tenaga kerja seperti: bidang otomotif, elektronik, kesehatan, perkebunan.
- b. Pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*) meliputi:
- 1).Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, melalui *prime mover sector* dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti : infrastruktur jalan, irigasi, telekomunikasi, dan energi.
 - 2).Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk mampu menarik investor masuk ke daerah, beberapa hal harus dilakukan adalah :
 1. Membangun iklim yang kondusif bagi para investor dengan penyediaan infrastruktur utama yang dibutuhkan investor yaitu, infrastruktur jalan, irigasi, telekomunikasi, dan energi.
 2. Menciptakan birokrasi yang profesional dan efisien, sehingga bagi investor yang mau melakukan investasi bisa memperoleh pelayanan cepat dan tepat serta murah.
- c. Melakukan kerjasama dengan swasta dalam rangka *link and match* antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan, sehingga para lulusan baik pendidikan formal maupun informal bisa terserap dalam pasar tenaga kerja.
6. Peneliti lebih lanjut terkait dengan tema ini, diharapkan dapat memperluas skope/daerah penelitian serta periode waktu yang lebih lama, serta teori-teori yang lebih baru, sehingga akan memperdalam kajian analisis dan ketajaman implikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, HS.,1998. *Modem Micro Economics*. 6th Revised and Enlarged Edition. New Delhi : Konark publiser PUT LTD.
- Anastasia A, 2004. "Analisis Kesempatan Kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah". *Tesis*. Semarang: FE Undip.
- Arachi, 2002. "Fiscal Decentralization and the Autonomy of the Local Government in Italy", *Research Working Paper*. Washington DC:World Bank
- Arief, Sritua, 1998. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta : PT.Pustaka CIDESINDO.
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta : BPFU UGM
- Astuti, Esther Sri dan joko Tri Haryanto, 2007, "Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Antar Daerah di Indonesia" *Usahawan* No. XXXVI Februari.Hal.25-40.
- Aziz, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: LPEM-UI.
- Bahl, Roy W. and Sally Wallace,2001, *Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension*. *Fiscal Policy training Program 2001*. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.
- Bahl, Roy W.,2000. *China : Evaluating the impact of Intergovernmental Fiscal reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge Univercity Press.
- _____, 2002, "Implementation Rules For Fiscal Decentralization", *Working Paper*, Georgia State University.
- BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2003. *Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2005. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah*,. Semarang : BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik, 1999. *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*. Jakarta : Biro Pusat Statistik.

- _____, 2004. *Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2004*. Semarang : BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2005a. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang : BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2005b. *Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah 2005*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2006a. *Jawa Tengah Dalam Angka 2006*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- _____, 2006b. *Produk Domestik Regional Jawa Tengah 2006*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Barzelay, M.1991."Managing Local Development, Lesson from Spain". *Policy Sciences*, 24, 271 – 290.
- Basri, Faisal H., 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang, dan Kendala*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Bird, Richard M., 1990. "Intergovernmental Finance and Local Taxation in Developing Countries Some Basic Consideration for Reformers". *Public Administration and Development*.
- _____, 1994. "Decentralizing Infrastructure : for good or ill?" *Policy Research Working Paper 1258*. Washington DC:World Bank, (February).
- Bird, Richard M.,Ebel, Robert, and Wallich, Christine, eds, 1995. *"Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economies*, Washington DC: World Bank.
- Bird, Richard M., and Francois Vaillancourt, 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, United Kingdom : Cambridge University Press.
- Bodman, Philip and Kahtryn Ford, 2006, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in The OECD*, JEL University of Queensland.
- Boediono, 1993. *Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif Dalam Ilmu Ekonomi*. Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE UGM.
- Boediarso, 2004. *Mekanisme dan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Kerangka Reformasi Fiskal Daerah*. Semarang : Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis FE UNDIP ke 46.
- Boediyanto, Arief, 2003. "Dampak Kebijakan Anggaran Belanja Pembangunan Sektoral APBD di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Terhadap

Output dan Kesempatan Kerja Sektoral". Tesis, Semarang: Program Pascasarjana UNDIP.

- Brata, Aloysius Gunadi, 2004, "Analsis hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia Dengan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 14 No.1, 14-26.
- Brodjonegoro, Bambang PS. 2002. "The impact of decentralization processto the Indonesia regional economies : a simultaneous economic approach. ". *Indonesian Journal of Economics and Development*. Vol.3 No.2 Hal. 25-41. Januari 2003. Jakarta: FE UI.
- Chalmers, A.F.,1983. *Apa Itu yang Dinamakan Ilmu?*. Terjemahan Oleh Redaksi Hasta Mitra, Jakarta : HASTA MITRA.
- Chotib, 2000. "Pengangguran dan Mobilitas Pekerjaan Indonesia : Kajian Data Supas Data 1995". *Media Indonesia*, Vol. 6. No.1 Hal 14-23.
- Cooper, Donal R., and C.William Emory, 1996. *Business Research Methods*, 5th Richard D. Irwin Inc.
- Davey, KJ., 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Intemasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Terjemahan : Amanullah dkk. Jakarta : Penerbit UI-Press.
- Davoodi H. And H.Zou, 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth : a Cross Country Study, *Journal of Urban Economics* 43, 244-257.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES
- Dornbush, Rudiger and Fischer, Stanley, 1991. *Macro Economics*. Fourth Edition. New York : McGraw-Hill,Inc.
- Due dan Miftah, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta :Gunung Agung.
- Dumairi, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga,
- Enikolopov and Zurafkaya, 2003. "Decentralization and Political Institution". *Working paper*, October 1-45.
- Fernandez, Joe, 2002. *Otonomi Daerah Di Indonesia Masa Reformasi : Antara Ilusi Dan Fakta*. Jakarta : IPCOS,
- Fields, Gary S.(1990), "Income Distribution and Economic Growth", dalam Gustaf dan T.Paul Schultz, *The State of Development Economics : Progress and Perspectives*, Oxford : Basil Blackwell.
- Gorodnichenko, Y, 2001. "Effects of Intergovernmental Aid en Fiscal Behavior of Local Governemnts : The Case of Ukraine". *Master Thesis*, University

ofKiev.Available:<http://www.eerc.kiev.ua/research/matheses/2001/pdf/gorodnichenko.pdf>.

- Gujarati, Damodar N., 2005. *Basic Econometrics*, New York: McGraw-Hill.
- Hadi Sasana, 2005. "Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan di DIY", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.12 No. 2 Hal. 134-293, Semarang.: STIE Stikubank.
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Isdijoso, Brahmantio, dan Tri Wibowo, 2002, Analisis Kebijakan Fiskal Pada Otonomi Daerah, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6 No.1.Hal.15-25.
- Jin, Jing and Heng-fu Zou, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*, Mimeo, Washington, D.C.:World Bank.
- Kaho, Riwu Josef, 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kaikisna, Stephen, 2000. "Pengembangan SDM dan SDA Guna Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Dian Ekonomi*, Vol. VII No. 1 Hal.: 14-23, Salatiga: FE-UKSW.
- Kaloh, J, 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia
- , Rustian, 2000, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Otonomi daerah*, Naskah No. 20 Juni-Juli.
- Kameni, Vera, 1999. *Fiscal Decentralization in The Czech Republic*, Paper for The Urban Institute.
- Kanokpan Lao-Araya, 2002. *Effect of Decentralization Strategy on Macroeconomic Stability in Thailand*, Asian Development Bank.
- Kemu, Suparman Zen dan R. Nurhidayat, 2005, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 9, Nomor 3.
- Khusaini, Muhamad, 2006, *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang : BPFE Unbraw.
- Kurnia, Mega, 2006. Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, *Skripsi*. Tidak dipublikasikan, Semarang: FE Undip.

- Kuncoro, Haryo, 2000. "Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsivitas Sektor Swasta". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 5 No. 1 Hal.:53-59, Surakarta : Penerbit FE-UMS.
- , 2004. "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota/kabupaten di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 9, No. 1, Juni : 47 – 63. Surakarta: Badan Penerbit FE-UMS.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
- , 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kwon, Osung, 2002. *The Effect of Fiscal Decentralization on Public Spending: The Korean Case*. Paper Presentation at Annual Conference on Public Budgeting and Financial Management. The University of Georgia.
- Lee, Wha Jong, 1993, Economic Growth and Human Development in The Republic of Korea 1945-1992, *Korea Social Science Journal*, Vol 22, 1-30.
- Lidahman, Kara and Kurt Thurmaier, 2002, Beyond Efficiency and Economyan Examination of Basic Needs and Fiscal Decentralization, *Journal of Public Economic*, The University of Chicago, USA.
- Mahfatih, Ahmad, 2000, *Manajemen Pengelolaan Daerah*, Yogyakarta : BPFE UGM.
- Mahi, Raksaka, Karyaman Muchtar, Thia, Jasmina dan Cita Wignyoseptina, 2000. *Kebijakan Desentralisasi Dalam Masa Transisi*. Jakarta. : LPEM FE-UI.
- Mahi, Raksaka, 2001. Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar daerah dan Peningkatan Efisiensi. *Analisa CSIS XXIX*, Hal. 54-66, Jakarta : Indonesia Project, Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno, 1997. *Ekonomi Publik* Edisi Ke-5. Yogyakarta : BPFE-UGM.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Martinez-Vasquez, Jorge and Robert M. McNab.2001. "Fiscal Decentralization and Economic Growth". *International Studies Program Working Paper*. Atlanta : Andre Young School of Policy Studies, Georgia State University.

- Martinawati, Ratna, 2007, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah", *Skripsi*, tidak dipublikasikan, Semarang : FE Universitas Diponegoro.
- Meier, Gerald M., 1995. *Leading Issues in Economic Development*, Sixth Edition, New York : Oxford University Press.
- Miller R.E. and Blair, P.D, 1985. *Input-Output Analysis, Foundations and Extention*, New Jersey : Prentice Hall, Englewood, Cliff.
- Moreno, Luis, and Carlos Trelles, 2004, Decentralization and Welfare Reform in Andalusia, *Working Paper*, 04-10, University of Edinburgh.
- Muldjana, B.S, 1996. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta : Penerbit:UI-Press.
- Mursinto, Djoko, 2004, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- Musgrave, Richard A., and Peggy B.Musgrave. 1989. *Public Finance : In Theory and Practice*. Mc-Graw Hill. Tokyo : Kogakhusa Ltd.
- Mutasya, Tata, 2005, *Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel : Tepatkah Untuk Indonesia Saat Ini?*, The Indonesian Institute. www.theindonesianinstitute.com.
- Noor Sidin, Fasbin, 2001. "Strategi Kebijakan Pembangunan Dalam Era Otonomi Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Edisi IX No. 1 Jan-Juli 2001, Padang : Hal.: 7-15, FE-Universitas Andalas.
- Nugroho, Iwan, 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- Nurkholis dan Bambang Brojonegoro, 2003. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Antar Daerah : Analisa Model IRIO". *Indonesian journal of Economics and Development*. Vol.3 No.2 Hal. 50-71. Januari 2003. Jakarta: FE UI.
- Nurdjaman, Arsyad. 1992. *Keuangan Negara*, Jakarta : Intermedia,
- Oates, W, 1993, Fiscal Decentralization and Economic Development, *National Tax Journal*, XLVI. 237-243.

- Papanek, Gustav and Oldrich Kyn, 1986. "The Effect on Income Distribution of Development, the Growth Rate and Economic Strategy". *Journal of Development Economic* Vol. XX, Page. 55-65.
- Peterson, George, (1996). "Decentralization in Latin Amerika : Learning through Experience", Washington D.C. : World Bank.
- Phillips, Kerk. L and Gerry Woller, 1997, "Does Fiscal Decentralization Lead to Economic Growth?", *Working Paper*, Number 97-7, September, 1-13.
- Pigou, A.C M.A., 1960. *The Economic of Welfare*. Fourth Edition,. London ; Mac Millan & CO LTD.
- Pressman, Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Terjemahan Edisi Pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Prud'homme, Remy, (1995). "On the Danger of Decentralization", Washington D.C., The World Bank, *Policy Research Working Paper*, 1252.
- Ramirez, A., G.Rannis, and F. Stewart, 1998, "Economic Growth and Human Capital", *QEH Working Paper* No.18.
- Rao, M.Govinda, 2000. *Fiscal Decentralization in Indian Federalism*. Institute for Social and Economic Change.
- Rasyid, Ryaas, 2000, Perspektif Otonomi Luas, *Harian Umum Suara Pembaruan*, 15 Maret, Jakarta.
- Richardson, Harry W, 1995, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, terjemahan Paul Sitohang, Jakarta : LPFE UI.
- Sagir, Soeharsono, 1982. *Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Bandung : Alumni Bandung.
- Salvatore, Dominick, 1983. *Theory and Problem of Micro Economic Theory*, 2nd Edition, New York : McGraw-Hill, Inc.
- Samuelson, Paul A., 1995, *Economic*, New York : McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Santosa, Dwi Andreas, 2008, Tidak Berdaulat Atas Pangan, *Kompas*, 24 Januari, Jakarta.
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

- Sasongko, 2006. Pengaruh Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin Terhadap Pengeluaran Konsumsi dan Keadaan Sosial Ekonomi serta Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Budaya Jawa Timur 2006, *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair.
- Sharp, Ansel M., Charles A. Register, dan Paul W. Cerimes, 1996. *Economics of Social Issues*, Edisi 12, Chicago : Richard D. Irwin.
- Simanjuntak, Payaman J, 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : LPFE-UI.
- Sjafrizal, Maret 1997. "Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma*. Nomor 3 Tahun XXVI. Hal.34-52. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Smoke, Paul, 2001. *Fiscal Decentralization in East and Southern Africa*. New York: New York University.
- Soetrisno, Lukman, 1995, "Kemiskinan dan Kesejahteraan", *Prisma*, No. 10.
- Spechler, Martin C., 1990, *Perspectives in Economic Thought*, Singapore: McGraw-Hill Publishing Company.
- Strauss, John, Kathleen Beegle, Agus Dwianto, Yulia Herawati, Dan Pattinasarany, Elan Setiawan, Bondan Sikoki, Sukamdi, dan Firman Witular, 2002. *Indonesian Living Standards Three Years After The Crisis : Evidence From The Indonesia Family Life Survey*, Laporan penelitian yang dibiayai oleh Partnership on Economic growth (PEG)-Usaid dan World Bank, Yogyakarta.
- Subri, Mulyadi, 2002, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Rajawali Persada.
- Sudarsono, 1989, "Penetapan sasaran Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No.2 Tahun III, Hal.19-39. Yogyakarta.
- Sugiyanto, 2000. "Kemandirian dan Otonomi Daerah". *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XII, No.1 Hal.: 1-7, Semarang : FE UNDIP.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Sumarto, Sudarmo, 2002. "Growth, Inequality, and Poverty : Evidence From Micro Data", Makalah dalam *The Young Economists Seminar*, World Bank Jakarta, Jakarta, 29 Mei.
- Suseno Triyanto, W., 1990. *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Tadjoeddin, Muhammad Zulfan. Widjajanti I. Suharyo, dan Satish Mishra, 2001, Aspirasi terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik vertikal di Indonesia, *Working Paper UNSFIR*, Jakarta.
- Tambunan, Tulus TH 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah : Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan", *Indonesian journal of Economics and Development*, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta : FE UI
- The Liang Gie, 1983. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia Jilid II*, Yogyakarta : Liberty.
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003, *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom : Pearson Education Limited.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*
- UNSFIRS, 2000. *Indonesia : The National Human Development Report, 2000*. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIRS) and UNDP.
- UNDP, 1994. *Human Development Report*. New York : Oxford University Press.
- Varian, Hal R. 1993. *Micro Economic Analysis*. Third Edition, , New York : W.W. Northon & Company Inc.
- Waud, N.R., 1992, *Macroeconomics*, Fifth Edition, New York : Harper Collins Publiser.

- Wenny Ana A, 2004. "Analisis Kesempatan Kerja Pada Sektor Industri Tekstil di Jawa Tengah", *Tesis*, Semarang : Pascasarjana Undip,
- Whithaker, William H. and Ronald C.Federico, 1997. *Social welfare in Today's World*, Second Edition . New York : The McGraw-Hill Companies.
- Wibowo, Arif, 2005. *Pengantar Analisis Jalur*, Surabaya : LPPM Unair Surabaya.
- Winarna Surya Adisubrata, 2002. *Otonomi daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- World Bank, 1990. *World Development Report 1990: Poverty*, Oxford University Press, Oxford.
- , 1993, *The East Asian Miracle : Economic Growth and Public Policy*, Oxford : Oxford University Press.
- , 1997. *On Line Source Book on Decentralization and Rural Development*, Decentralization Thematic Team, SDA.
- , 1998. *World Development Report 1998: Poverty*, Oxford University Press, Oxford.
- Zadjuli, Imam Suroso. 2004. *Perspektif Implementasi Otonomi Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Rakerwilo Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI). FE UNAIR.
- Zainudin, Muhamad, 2000, *Metode Penelitian*, Surabaya : Unair
- Zhang Tao and Zou Heng-Fu, 1998, Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China, *Journal of Public Economics* 67, 221-240

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PETA TEORI

Nama Peneliti	Topik Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Analisis
1. M. Govinda Rao (2000)	Dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian	Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional	Analisis menggunakan analisis multivariat	Pengeluaran pemerintah, pajak, dan PDB	<p>1. Desentralisasi fiskal, tidak menaikkan pendapatan daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan warganya. Tetapi yang terjadi adalah adanya defisit fiskal.</p> <p>2. Banyak potensi-potensi yang seharusnya masih bisa digali, tetapi yang terjadi adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan</p>
2. Raksaka Mahi (2001)	"Fiscal decentralization : It's Impact on Cities Growth"	Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi	Menggunakan model ekonometrika simultan <i>two stage least squares model</i>	Variabel desentralisasi fiskal diukur dengan dana bagi hasil, DAU, DAK dan PDB	<p>1. DAU lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan yang lainnya walaupun desain kebijakan dana alokasi umum tidak mendukung pemerataan ekonomi antar daerah.</p> <p>2. Bagi hasil menurunkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>3. Kebutuhan bagi hasil SDA berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan antar daerah.</p>
3. Jorge Martinez Vasquez dan Roberi McNab (2001)	Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.	Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi	Analisis menggunakan analisis regresi berganda	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Desentralisasi akan mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/pembelajaann publik.

4. Arachi (2002)	<i>Fiscal Decentralization and the Autonomy of the Local Government in Italy</i>	Menganalisis konsistensi antara tujuan peningkatan efisiensi melalui desentralisasi fiskal pada setiap daerah	Analisis menggunakan analisis regresi berganda	Pajak-pajak, pengeluaran pemerintah daerah	Reformasi mendasar di Italia telah menghilangkan banyak inefisiensi dari sistem masa lalu tentang keuangan publik daerah. Kedua, insentif-insentif untuk melakukan kebijakan-kebijakan pajak otonomus pada tingkat daerah bias dihindari dengan mekanisme baru redistribusi antar wilayah.
5. Kanokpan Lao-Araya, (2002)	<i>Effect of Decentralization Strategy on Macroeconomic Stability in Thailand</i>	Menganalisis program desentralisasi di Thailand	Analisis menggunakan analisis regresi berganda	Pengeluaran pemerintah otonom dan konsumsi pemerintah	Peningkatan alokasi penerimaan kepada pemerintah daerah tidak akan cukup bagi daerah, karena pemerintah daerah memiliki kebijakan pembelanjaan yang berbeda. Perlu kebijakan yang mengatur pinjaman bagi pemerintah lokal.
6. Osung Kwon, (2002)	<i>The Effect of Fiscal Decentralization on Public Spending</i>	Menganalisis dampak desentralisasi terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah	Analisis menggunakan analisis regresi berganda	Pengeluaran pemerintah dan konsumsi pemerintah	1. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang kurang cermat, beresiko terjadinya <i>inefficiency</i> dalam perekonomian negara dan di Korea dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah setempat. 2. Desentralisasi fiskal bisa berperan dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran publik
7. Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003	Dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah	Mengestimasi dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar daerah	Model makro ekonometrik simultan.	PBB, BPHTB, PPh, BHSDA, DAU, PDRB per kapita, kesenjangan antar wilayah diproksi dengan koefisien variasi PDRB per kapita antar daerah.	1. Setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar wilayah semakin besar antar daerah di Indonesia. 2. Dalam era desentralisasi fiskal memberi efek positif terhadap daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

8. Bambang Brodjonegoro, (2002)	<i>The impact of decentralization processes to the Indonesia regional economy</i>	Menganalisis dampak desentralisasi terhadap perekonomian regional	Menggunakan model ekonometrika <i>two stage least squares model</i>	Transfer pemerintah, GDP	Dana transfer dari pemerintah yang meliputi dana alokasi umum, bagi hasil sumber daya alam dan PPh menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan
9. Nurkholis dan Bambang Brodjonegoro, (2003)	Dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah	Mengkaji tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian antar daerah	Model <i>Interregional Input-Output (IRO)</i>	DAU, DAK, Bagi hasil pajak dan non pajak, PDRB	Dengan skenario berbagai model yang ada, desentralisasi fiskal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tingkat efisiensi akan menurun dan diikuti oleh kesenjangan antar daerah.
10. Anastasia Astry, (2004)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Analisis menggunakan analisis regresi berganda	Investasi swasta, pengeluaran pembangunan, output regional, dan variabel dependen adalah kesempatan kerja.	Hasil analisis disimpulkan bahwa variabel investasi swasta, pengeluaran pembangunan, dan output regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja
11. Hadi Sasana, (2005)	Analisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).	Menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).	<i>Pooled least regression</i>	Dana bagi hasil, pendapatan asli daerah (PAD), tenaga kerja	1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di semua kabupaten/kota. 2. Selama pelaksanaan desentralisasi fiskal kesenjangan antar daerah di DIY justru mengalami peningkatan.

12. Hadi Sasana, (2008)	Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah, tenaga kerja tereserap dan kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	Alat analisis : <i>Path analysis</i>	Desentralisasi fiskal, kesenjangan ekonomi antar daerah, tenaga kerja tereserap dan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi antar daerah 4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja tereserap 5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 6. Kesenjangan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat 7. Tenaga kerja tereserap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan.
-------------------------	--	--	---	---	--

LAMPIRAN 2: OUTPUT ANALISIS JALUR

Model 1: X1 → Y1

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.0852	1.22202	175
DESENTRALISASI FISKAL	-.0675	.93882	175

Correlations

Pearson Correlation	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	DESENTRALISASI FISKAL
		1.000	.268
	DESENTRALISASI FISKAL	.268	1.000
Sig. (1-tailed)	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		.000
	DESENTRALISASI FISKAL	.000	
N	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	175	175
	DESENTRALISASI FISKAL	175	175

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.268 ^a	.072	.067	1.18094	.072	13.411	1	173	.000	2.047

a. Predictors: (Constant), DESENTRALISASI FISKAL

b. Dependent Variable: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	18.694	1	18.694	13.411	.000 ^a
	Residual	241.148	173	1.394		
	Total	259.842	174			

a. Predictors: (Constant), DESENTRALISASI FISKAL

b. Dependent Variable: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics		
						B	Beta	Zero-order	Partial	Tolerance
1	(Constant)	.109	.069	1.218	.226					
	DESENTRALISASI FISKAL	.349	.095	3.662	.000	.268	.268	.268	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Collinearity Diagnostic^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	DESENTRALI SASI FISKAL
1	1	1.072	1.000	.46	.46
2	2	.928	1.075	.54	.54

a. Dependent Variable: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		Residual
		Predicted Value	Predicted Value	
18	7.211	8.81	.2995	8.51400
23	8.065	9.31	-.2123	9.52234
48	8.516	9.68	1.9871	7.69286

a. Dependent Variable: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-.4184	1.9871	.0852	.32778	175
Std. Predicted Value	-1.537	5.802	.000	1.000	175
Standard Error of Predicted Value	.089	.527	.115	.052	175
Adjusted Predicted Value	-.4258	1.9161	.0777	.31366	175
Residual	-1.75525	9.52234	.00000	1.17725	175
Std. Residual	-1.487	8.065	.000	.997	175
Stud. Residual	-1.597	8.108	.003	1.032	175
Deleted Residual	-2.02578	9.62290	.00756	1.26740	175
Stud. Deleted Residual	-1.604	10.267	.032	1.246	175
Maheal. Distance	.001	33.669	.994	3.527	175
Cook's Distance	.000	6.595	.043	.499	175
Centered Leverage Value	.000	.193	.006	.020	175

a. Dependent Variable: LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Model 2: X1, Y1 → Y2

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KETIMPANGAN DAERAH	.0723	.96654	175
DESENTRALISASI FISKAL	-.0675	.93882	175
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.0852	1.22202	175

Correlations

	KETIMPANGAN DAERAH	DESENTRALISASI FISKAL	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	KETIMPANGAN DAERAH	DESENTRALISASI FISKAL	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Pearson Correlation	1.000	-.538	-.296	1.000	-.538	-.296
Sig. (1-tailed)						
N	175	175	175	175	175	175

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.560 ^a	.314	.306	.82179	.314	39.380	2	172	.000	1.923

a. Predictors: (Constant), LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, DESENTRALISASI FISKAL

b. Dependent Variable: KETIMPANGAN DAERAH

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53.190	2	26.595	39.380	.000 ^b
Residual	116.158	172	.675		
Total	169.348	174			

a. Predictors: (Constant), LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, DESENTRALISASI FISKAL

b. Dependent Variable: KETIMPANGAN DAERAH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Std. Error	t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.049	.063	.776	.439					
	DESENTRALISASI FISKAL	-.519	.069	-7.532	.000	-.538	-.498	-.476	.928	1.078
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	-.132	.053	-2.501	.013	-.296	-.187	-.158	.928	1.078

a. Dependent Variable: KETIMPANGAN DAERAH

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	DESENTRALI SASI FISKAL	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
1	1	1.262	1.000	.00	.37	.37
2	2	1.034	1.105	.86	.04	.05
3	3	.704	1.339	.14	.59	.58

a. Dependent Variable: KETIMPANGAN DAERAH

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	KETIMPANG AN DAERAH	Predicted Value	Residual
1	4.262	2.91	-.5961	3.50238
81	3.533	3.65	.7462	2.90379
90	3.008	3.01	.5378	2.47223
123	3.491	3.54	.6710	2.86897
132	3.061	3.23	.7147	2.51529

a. Dependent Variable: KETIMPANGAN DAERAH

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-4.0240	.8373	.0723	.55289	175
Std. Predicted Value	-7.409	1.394	.000	1.000	175
Standard Error of Predicted Value	.063	.546	.087	.063	175
Adjusted Predicted Value	-4.1793	.8368	.0687	.57544	175
Residual	-1.32359	3.50238	.00000	.81705	175
Std. Residual	-1.611	4.262	.000	.994	175
Std. Residual	-2.056	4.304	.002	1.010	175
Deleted Residual	-2.15732	3.57228	.00252	.84593	175
Stud. Deleted Residual	-2.076	4.543	.006	1.032	175
Maheul. Distance	.017	76.370	1.989	8.879	175
Cook's Distance	.000	.868	.013	.075	175
Centered Leverage Value	.000	.439	.011	.051	175

a. Dependent Variable: KETIMPANGAN DAERAH

Model 3: Y1 → Y3

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
TENAGA KERJA TERSERAP	.0105	1.01302	175
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.0852	1.22202	175

Correlations

	TENAGA KERJA TERSERAP	TENAGA KERJA TERSERAP	LAJU PERTUMBUH AN EKONOMI
Pearson Correlation	TENAGA KERJA TERSERAP	1.000	.154
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.154	1.000
Sig. (1-tailed)	TENAGA KERJA TERSERAP		.021
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.021	
N	TENAGA KERJA TERSERAP	175	175
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	175	175

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.154 ^a	.024	.018	1.00382	.024	4.203	1	173	.042	2.049

a. Predictors: (Constant), LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
 b. Dependent Variable: TENAGA KERJA TERSEKAP

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	4.236	1	4.236	4.203	.042 ^a
Residual	174.325	173	1.008		
Total	178.560	174			

a. Predictors: (Constant), LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
 b. Dependent Variable: TENAGA KERJA TERSEKAP

Coefficients^b

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Tolerance
1	(Constant)	.000	.076		.996				
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.128	.062	2.050	.042	.154	.154	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TENAGA KERJA TERSEKAP

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
1	1	1,070	1,000	.47	.47
	2	.930	1,072	.53	.53

a. Dependent Variable: TENAGA KERJA TERSERAP

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-.0374	1.2355	-.0105	.15602	175
Std. Predicted Value	-.307	7.852	.000	1.000	175
Standard Error of Predicted Value	.076	.602	.085	.065	175
Adjusted Predicted Value Residual	-.0301	1.8870	.0105	.17415	175
Std. Residual	-2.20727	2.18625	.00000	1.00093	175
Stud. Residual	-2.199	2.178	.000	.997	175
Deleted Residual	-2.205	2.184	.000	1.006	175
Stud. Deleted Residual	-2.21996	2.24144	.00003	1.02214	175
MaHAL. Distance	-2.230	2.209	-.001	1.012	175
Cook's Distance	.000	61.647	.994	7.380	175
Centered Leverage Value	.000	.897	.012	.087	175
	.000	.354	.006	.042	175

a. Dependent Variable: TENAGA KERJA TERSERAP

Model 4: Y1, Y2, Y3 → Y4

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KESEJAHTERAAN	-.0733	1.03001	175
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.0852	1.22202	175
KETIMPANGAN DAERAH	.0723	.98654	175
TENAGA KERJA TERSERAP	.0105	1.01302	175

Correlations

Pearson Correlation	KESEJAHTERAAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	KETIMPANGAN DAERAH	TENAGA KERJA TERSERAP
	1.000	.303	1.000	-.296	.795
		1.000	1.000	-.296	.154
			1.000	-.296	-.669
				1.000	-.669
					1.000
Sig. (1-tailed)	KESEJAHTERAAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	KETIMPANGAN DAERAH	TENAGA KERJA TERSERAP	
	.000	.000	.000	.000	.000
		.021	.000	.000	.000
N	175	175	175	175	175
	KESEJAHTERAAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	KETIMPANGAN DAERAH	TENAGA KERJA TERSERAP	
	175	175	175	175	175
		175	175	175	175
			175	175	175
				175	175

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson		
					R Square Change	F Change	df2			
1	.837 ^a	.701	.696	.56801	.701	133.722	3	171	.000	1.983

a. Predictors: (Constant), TENAGA KERJA TERSEKAP, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN DAERAH

b. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	129.431	3	43.144	133.722	.000 ^a
	Residual	55.171	171	.323		
	Total	184.601	174			

a. Predictors: (Constant), TENAGA KERJA TERSEKAP, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN DAERAH

b. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Std. Error	t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.069	.043		-1.600	.112					
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	.112	.037		3.032	.003	.303	.228	.127	.909	1.101
	KETIMPANGAN DAERAH	-.274	.061		-4.498	.000	-.702	-.325	-.188	.515	1.943
	TENAGA KERJA TERSEKAP	.610	.057		10.644	.000	.795	.631	.445	.551	1.815

a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	PERTUMBUH LAJU AN EKONOMI	KETIMPANG AN DAERAH	TENAGA KERJA TERSERAP
1	1	1.792	1.000	.00	.07	.13	.13
	2	1.040	1.313	.76	.15	.01	.00
	3	.856	1.446	.20	.71	.01	.09
	4	.312	2.398	.03	.08	.86	.78

a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	KESEJAH TERAAN	Predicted Value	Residual
12	-3.408	-1.58	.3523	-1.93553

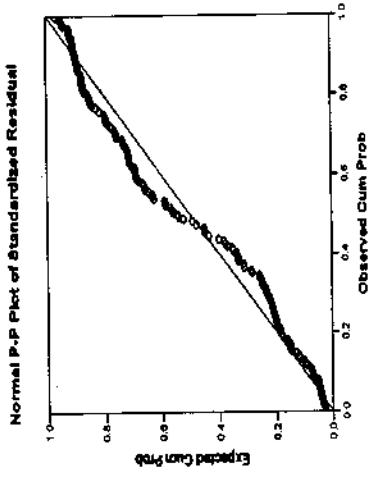
a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

Residuals Statistics^a

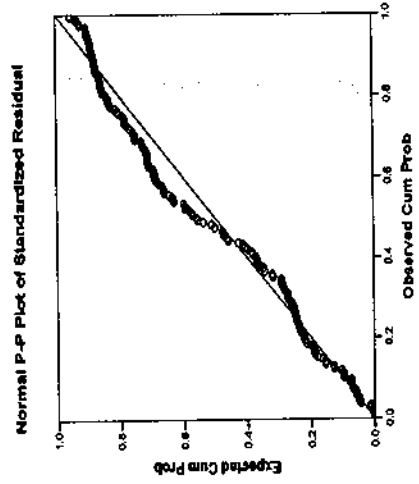
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-2.4028	3.6913	-.0733	.86247	175
Std. Predicted Value	-2.701	4.365	.000	1.000	175
Standard Error of Predicted Value	.044	.349	.073	.045	175
Adjusted Predicted Value	-2.4342	3.1944	-.0757	.86136	175
Residual	-1.93553	.95327	.00000	.56309	175
Std. Residual	-3.408	1.678	.000	.981	175
Stud. Residual	-3.426	1.827	.002	1.011	175
Deleted Residual	-1.95843	1.31561	.00248	.58807	175
Stud. Deleted Residual	-3.540	1.840	.000	1.017	175
Mahat. Distance	.051	64.722	2.983	8.266	175
Cook's Distance	.000	.858	.013	.075	175
Centered Leverage Value	.000	.372	.017	.048	175

a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN

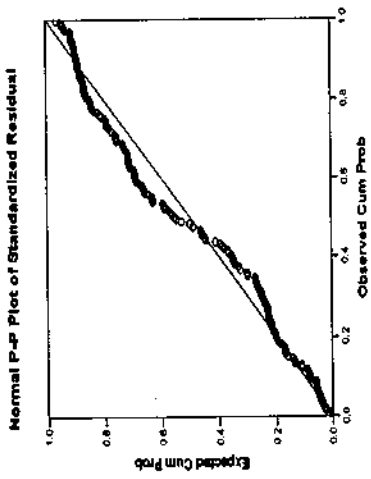
Model 2: Plot Normal



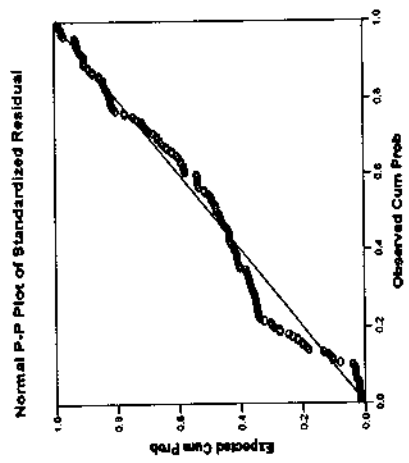
Model 4: Plot Normal



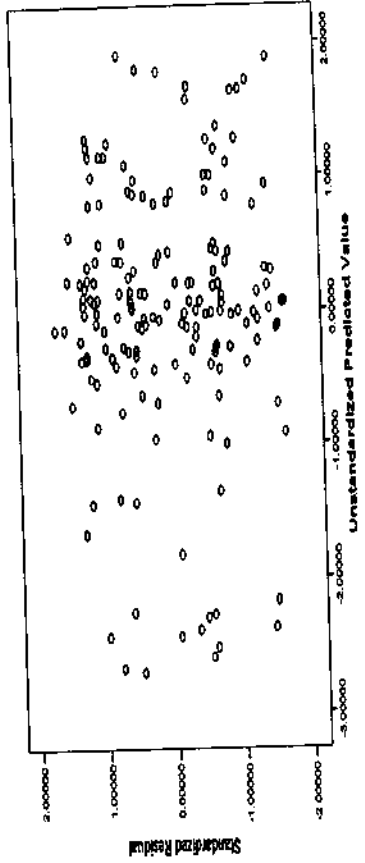
Model 1: Plot Normal



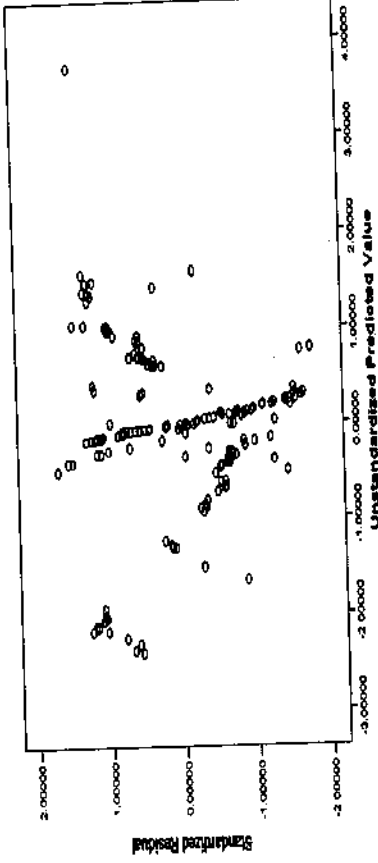
Model 3: Plot Normal



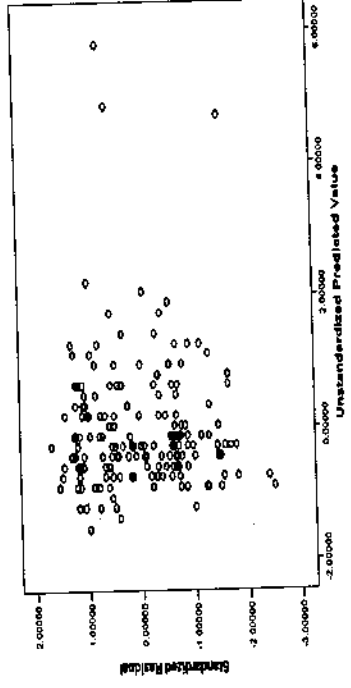
Model 2: Plot Homoskedastisitas



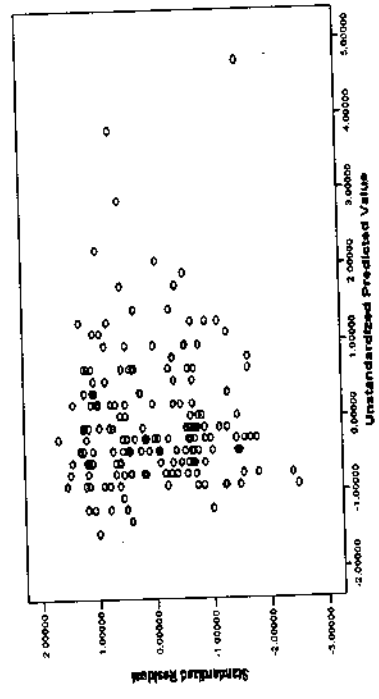
Model 4: Plot Homoskedastisitas



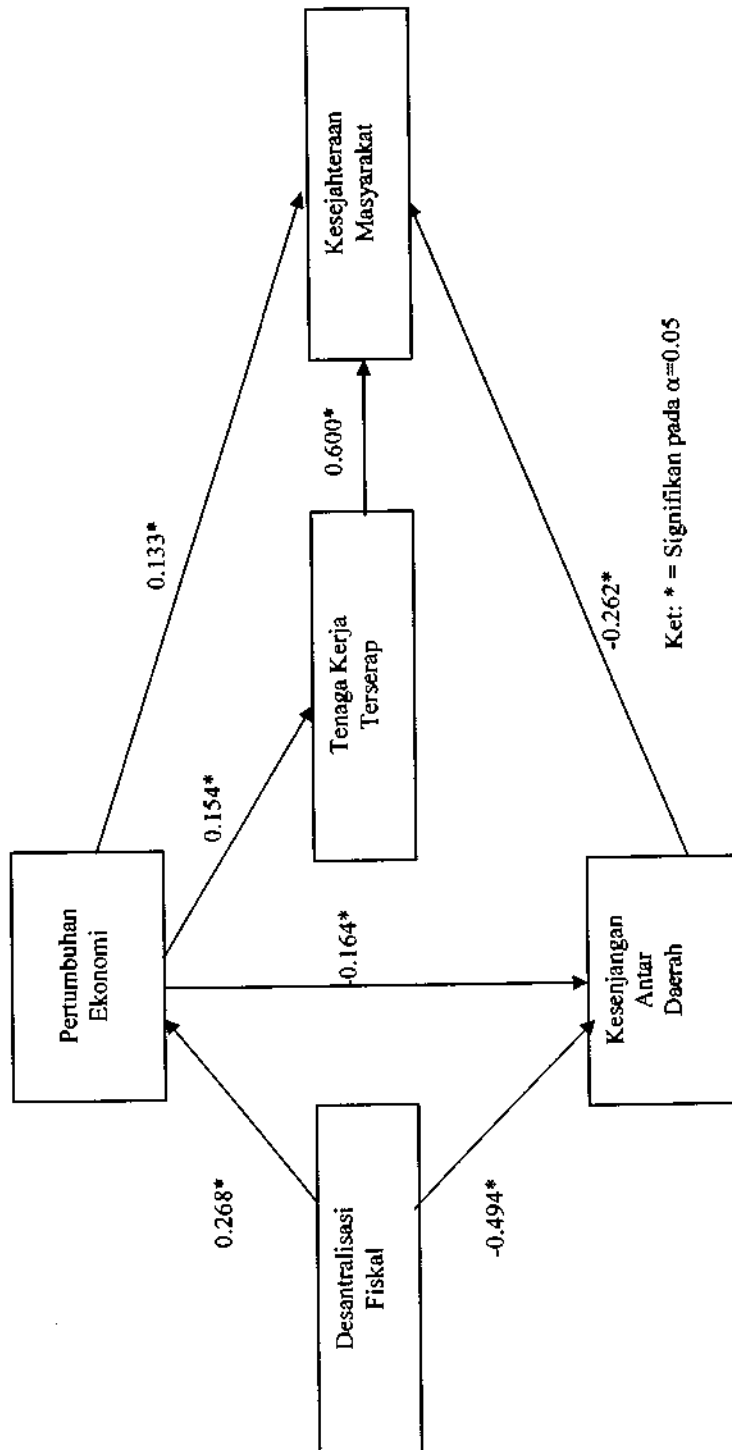
Model 1: Plot Homoskedastisitas



Model 3: Plot Homoskedastisitas



Dari Model 1, Model 2, Model 3 dan Model 4 diagram jalur sebagai berikut:



Ket: * = Signifikan pada $\alpha=0.05$

Perhitungan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Besar Pengaruh
X1z → Y1z → Y2z	$0,268 \times (-0,164) = -0,044$
X1z → Y1z → Y3z	$0,268 \times 0,154 = 0,041$
X1z → Y1z → Y4z	$0,268 \times 0,133 = 0,036$
X1z → Y1z → Y3z → Y4z	$0,268 \times 0,154 \times 0,600 = 0,025$
X1z → Y2z → Y4z	$(-0,494) \times (-0,262) = 0,129$
X1z → Y1z → Y2z → Y4z	$0,268 \times (-0,164) \times (-0,262) = 0,012 \rightarrow 0,202$
Y1z → Y3z → Y4z	$0,154 \times 0,600 = 0,092$
Y1z → Y2z → Y4z	$(-0,164) \times (-0,262) = 0,043 \rightarrow 0,135$

Pengaruh Langsung

Variabel	Besar Pengaruh
X1z → Y1z	0,268
X1z → Y2z	-0,494
Y1z → Y2z	-0,164
Y1z → Y3z	0,154
Y1z → Y4z	0,133
Y2z → Y4z	-0,262
Y3z → Y4z	0,600

Pengaruh Total = Pengaruh Langsung + Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Besar Pengaruh
X1z → Y1z	0,268
X1z → Y2z	-0,494
X1z → Y3z	0,041
X1z → Y4z	0,202
Y1z → Y2z	-0,164
Y1z → Y3z	0,154
Y1z → Y4z	0,268
Y2z → Y4z	-0,262
Y3z → Y4z	0,600

DATA DISERTASI :

PERTUMBUHAN EKONOMI (Y1)

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	19,93	25,22	14,14	10,89	48,99
2	Kab. Banyumas	29,70	14,80	11,44	10,75	15,42
3	Kab. Purbalingga	27,94	11,19	11,96	11,60	13,59
4	Kab. Banjarnegara	-5,60	10,54	11,99	11,13	15,73
5	Kab. Kebumen	19,73	13,00	9,80	5,88	14,46
6	Kab. Purworejo	12,74	13,01	21,69	10,61	16,65
7	Kab. Wonosobo	14,83	10,74	9,57	8,78	11,94
8	Kab. Magelang	14,01	12,10	10,39	9,74	12,65
9	Kab. Boyolali	20,87	12,14	8,79	2,67	9,16
10	Kab. Klaten	22,31	14,77	11,61	11,40	19,08
11	Kab. Sukoharjo	30,00	9,56	9,16	9,77	15,38
12	Kab. Wonogiri	4,38	10,44	11,34	10,00	10,70
13	Kab. Karanganyar	11,42	10,16	11,67	13,74	11,37
14	Kab. Sragen	10,86	11,92	12,68	13,32	14,30
15	Kab. Grobogan	24,24	13,34	8,19	9,83	12,35
16	Kab. Blora	-9,12	12,69	10,29	11,60	12,55
17	Kab. Rembang	8,64	22,41	8,21	9,19	13,97
18	Kab. Pati	24,19	10,14	8,75	10,71	13,15
19	Kab. Kudus	31,71	26,23	13,93	15,22	19,92
20	Kab. Jepara	16,56	12,45	12,46	6,65	14,47
21	Kab. Demak	4,43	11,93	8,40	9,28	7,14
22	Kab. Semarang	29,55	14,35	8,54	6,54	14,17
23	Kab. Temanggung	6,26	10,98	10,08	9,97	10,82
24	Kab. Kendal	16,22	11,98	8,66	6,99	9,59
25	Kab. Batang	15,93	12,76	8,14	8,09	16,89
26	Kab. Pekalongan	15,36	11,73	11,81	6,01	18,70
27	Kab. Pemasang	10,76	12,45	11,35	10,49	20,89
28	Kab. Tegal	11,83	11,16	14,97	7,66	12,71
29	Kab. Brebes	24,90	15,64	10,28	11,32	21,98
30	Kota Magelang	12,84	13,87	11,19	9,20	14,09
31	Kota Surakarta	12,79	11,86	12,70	11,87	17,43
32	Kota Salatiga	16,14	13,81	9,94	7,65	28,57
33	Kota Semarang	12,04	11,22	9,74	11,15	15,16
34	Kota Pekalongan	21,05	9,67	8,14	7,93	16,62
35	Kota Tegal	30,25	15,99	9,81	11,53	13,38

KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH (Y2)

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	0.36	0.39	0.42	0.43	0.45
2	Kab. Banyumas	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10
3	Kab. Purbalingga	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
4	Kab. Banjarnegara	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
5	Kab. Kebumen	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
6	Kab. Purworejo	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
7	Kab. Wonosobo	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
8	Kab. Magelang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
9	Kab. Boyolali	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
10	Kab. Klaten	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
11	Kab. Sukoharjo	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
12	Kab. Wonogiri	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
13	Kab. Karanganyar	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
14	Kab. Sragen	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
15	Kab. Grobogan	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11
16	Kab. Blora	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
17	Kab. Rembang	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05
18	Kab. Pati	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
19	Kab. Kudus	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37
20	Kab. Jepara	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
21	Kab. Demak	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
22	Kab. Semarang	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03
23	Kab. Temanggung	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
24	Kab. Kendal	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
25	Kab. Batang	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
26	Kab. Pekalongan	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
27	Kab. Pemasang	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
28	Kab. Tegal	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
29	Kab. Brebes	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
30	Kota. Magelang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
31	Kota. Surakarta	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09
32	Kota. Salatiga	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
33	Kota. Semarang	0.37	0.38	0.36	0.35	0.36
34	Kota. Pekalongan	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
35	Kota. Tegal	0.08	0.07	0.07	0.03	0.03

TENAGA KERJA TERSERAP (Y3)

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Terserap (Orang)				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	690.108	678.947	689.164	682.522	671.210
2	Kab. Banyumas	658.244	646.789	676.460	659.555	689.850
3	Kab. Purbalingga	366.709	356.175	389.681	401.860	386.859
4	Kab. Banjarnegara	420.252	389.897	411.679	413.948	426.180
5	Kab. Kebumen	521.730	474.938	544.699	482.194	502.926
6	Kab. Purworejo	343.721	328.701	360.545	335.226	337.933
7	Kab. Wonosobo	393.561	372.533	378.144	371.435	400.729
8	Kab. Magelang	561.769	586.010	562.834	593.522	549.552
9	Kab. Boyolali	505.872	491.368	496.698	464.810	502.366
10	Kab. Klaten	588.210	562.770	578.652	526.319	604.888
11	Kab. Sukoharjo	408.720	388.176	392.099	402.733	407.445
12	Kab. Wonogiri	559.170	530.289	503.884	539.426	527.299
13	Kab. Karanganyar	403.931	400.296	422.274	416.456	443.724
14	Kab. Sragen	427.665	412.206	471.663	445.994	436.622
15	Kab. Grobogan	659.244	591.881	642.406	583.110	700.076
16	Kab. Blora	414.768	420.571	423.150	427.346	435.108
17	Kab. Rembang	284.634	270.635	290.302	275.706	274.422
18	Kab. Pati	587.974	577.940	615.070	566.815	604.896
19	Kab. Kudus	362.180	349.819	363.417	374.498	393.626
20	Kab. Jepara	471.412	510.364	447.990	488.824	518.014
21	Kab. Demak	465.984	455.492	481.874	462.972	467.826
22	Kab. Semarang	446.121	445.471	482.737	483.208	500.896
23	Kab. Temanggung	368.967	375.136	358.974	373.407	389.337
24	Kab. Kendal	390.640	407.602	417.627	403.044	445.515
25	Kab. Batang	301.669	295.650	315.667	311.574	327.212
26	Kab. Pekalongan	400.700	364.314	398.825	377.210	400.745
27	Kab. Pemasang	569.603	560.808	570.741	558.180	596.701
28	Kab. Tegal	603.239	586.100	590.699	601.800	632.384
29	Kab. Brebes	777.520	761.597	784.176	779.456	849.566
30	Kota Magelang	49.000	48.651	48.557	53.580	54.346
31	Kota Surakarta	215.343	216.858	208.894	225.720	237.888
32	Kota Salatiga	66.028	69.539	68.402	71.235	73.987
33	Kota Semarang	573.949	614.436	599.554	570.509	633.432
34	Kota Pekalongan	109.540	107.511	112.425	106.317	124.993
35	Kota Tegal	98.365	101.618	96.302	99.586	106.750
	Jumlah	15.066.542	14.751.088	15.196.265	14.930.097	15.655.303

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Y4)

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	65,7	65,3	64,8	68,8	69,5
2	Kab. Banyumas	67,4	66,7	68,2	70,3	70,7
3	Kab. Purbalingga	65,6	65,0	65,9	68,7	69,3
4	Kab. Banjarnegara	65,5	63,7	65,2	66,9	67,3
5	Kab. Kebumen	64,0	65,6	65,7	68,0	68,9
6	Kab. Purworejo	63,7	68,4	65,9	68,7	69,1
7	Kab. Wonosobo	66,4	64,7	65,7	66,9	67,6
8	Kab. Magelang	66,1	67,2	66,7	69,1	69,9
9	Kab. Boyolali	66,6	65,7	65,9	68,5	69,0
10	Kab. Klaten	66,3	67,8	67,9	71,0	71,4
11	Kab. Sukoharjo	69,7	67,7	66,1	70,7	71,2
12	Kab. Wonogiri	62,9	66,5	65,5	68,4	69,0
13	Kab. Karanganyar	66,7	68,5	68,9	70,5	70,7
14	Kab. Sragen	65,8	64,9	64,6	66,1	66,6
15	Kab. Grobogan	65,4	65,5	65,4	67,3	68,2
16	Kab. Blora	63,4	64,7	64,4	66,5	67,9
17	Kab. Rembang	61,1	65,5	64,6	67,5	69,0
18	Kab. Pati	69,0	68,6	68,4	70,6	70,9
19	Kab. Kudus	69,4	66,9	67,4	69,4	70,0
20	Kab. Jepara	67,8	66,9	67,7	69,1	69,6
21	Kab. Demak	66,7	66,4	66,0	69,0	69,4
22	Kab. Semarang	69,4	69,5	68,8	71,4	71,9
23	Kab. Temanggung	69,9	69,6	68,8	71,4	71,8
24	Kab. Kendal	64,4	65,5	63,3	67,3	67,5
25	Kab. Batang	64,7	65,5	65,4	67,0	67,6
26	Kab. Pekalongan	64,1	63,9	64,5	67,6	68,2
27	Kab. Pemasang	62,6	62,2	63,4	65,6	66,3
28	Kab. Tegal	65,6	63,3	63,5	66,8	67,5
29	Kab. Brebes	61,7	61,3	61,6	63,4	64,3
30	Kota Magelang	74,7	73,0	71,7	74,5	74,7
31	Kota Surakarta	74,1	73,0	72,5	75,8	76,0
32	Kota Salatiga	73,9	72,8	72,9	74,4	74,8
33	Kota Semarang	74,3	73,6	72,8	74,9	75,3
34	Kota Pekalongan	69,5	68,2	69,0	71,4	71,9
35	Kota Tegal	71,0	68,5	69,1	71,2	71,4

DESENTRALISASI FISKAL (X1)

NO	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005
1	Kab. Cilacap	0,25	0,20	0,14	0,19	0,23
2	Kab. Banyumas	0,20	0,16	0,15	0,17	0,13
3	Kab. Purbalingga	0,10	0,13	0,13	0,15	0,16
4	Kab. Banjarnegara	0,11	0,14	0,15	0,14	0,10
5	Kab. Kebumen	0,17	0,12	0,11	0,11	0,10
6	Kab. Purworejo	0,11	0,14	0,14	0,13	0,14
7	Kab. Wonosobo	0,10	0,17	0,07	0,12	0,10
8	Kab. Magelang	0,14	0,15	0,16	0,16	0,14
9	Kab. Boyolali	0,15	0,16	0,12	0,14	0,15
10	Kab. Klaten	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11
11	Kab. Sukoharjo	0,15	0,16	0,12	0,13	0,15
12	Kab. Wonogiri	0,11	0,12	0,11	0,10	0,12
13	Kab. Karanganyar	0,15	0,15	0,12	0,14	0,13
14	Kab. Sragen	0,11	0,13	0,15	0,16	0,16
15	Kab. Grobogan	0,12	0,17	0,21	0,14	0,13
16	Kab. Blora	0,10	0,15	0,14	0,15	0,13
17	Kab. Rembang	0,13	0,15	0,13	0,13	0,14
18	Kab. Pati	0,20	0,18	0,15	0,18	0,14
19	Kab. Kudus	0,22	0,20	0,18	0,21	0,22
20	Kab. Jepara	0,12	0,22	0,20	0,18	0,18
21	Kab. Demak	0,08	0,14	0,15	0,11	0,14
22	Kab. Semarang	0,17	0,20	0,17	0,18	0,27
23	Kab. Temanggung	0,10	0,12	0,13	0,12	0,19
24	Kab. Kendal	0,13	0,17	0,14	0,14	0,19
25	Kab. Batang	0,10	0,15	0,13	0,13	0,13
26	Kab. Pekalongan	0,12	0,16	0,13	0,14	0,12
27	Kab. Pemasang	0,11	0,14	0,08	0,13	0,12
28	Kab. Tegal	0,12	0,18	0,13	0,20	0,14
29	Kab. Brebes	0,17	0,11	0,11	0,12	0,13
30	Kota. Magelang	0,16	0,23	0,19	0,20	0,20
31	Kota. Surakarta	0,21	0,24	0,22	0,29	0,30
32	Kota. Salatiga	0,24	0,28	0,29	0,20	0,20
33	Kota. Semarang	0,24	0,46	0,47	0,53	0,48
34	Kota. Pekalongan	0,24	0,24	0,27	0,17	0,13
35	Kota. Tegal	0,13	0,27	0,23	0,24	0,22

